POLITIK INKLUSIF MUHAMMADIYAH

Narasi Pencerahan Islam untuk Indonesia Berkemajuan

Prolog:

Dr. H. Haedar Nashir, M.Si

Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P

Editors:

Ridho Al-Hamdi

David Efendi

Bachtiar Dwi Kurniawan

Hilman Latief

UMY PRESS

POLITIK INKLUSIF MUHAMMADIYAH

Narasi Pencerahan Islam untuk Indonesia Berkemajuan

Prolog:
Dr. H. Haedar Nashir, M.Si
Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P

Editors:
Ridho Al-Hamdi
David Efendi
Bachtiar Dwi Kurniawan
Hilman Latief

POLITIK INKLUSIF MUHAMMADIYAH:
Narasi Pencerahan Islam untuk Indonesia Berkemajuan

x + 258 hlm, 17 cm x 25 cm

ISBN : 978-623-90189-1-7

Prolog : Dr. H. Haedar Nashir, M.Si
Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P
Editors : Ridho Al-Hamdi, David Efendi,
Bachtiar Dwi Kurniawan, Hilman Latief
Desain Cover : Gramasurya
Layout : Gramasurya

Cetakan I, Februari 2019

Diterbitkan Oleh:
UMY Press
Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
Telp. (+62 274) 387656 (hunting) Fax. (+62 274) 387646
Email: bhp@umy.ac.id

PRAKATA EDITORS

Politik inklusif menjadi topik utama yang disajikan dalam buku ini. Apa maksud dari judul buku ini? Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang telah berkembang pesat sejak lebih dari satu abad yang lalu berada pada landasan inklusivitas. Di satu sisi, Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian (purifikasi), tetapi di sini lain menunjukkan terjadi dinamisasi tanpa meninggalkan jejak asal. Perpaduan antara pemurnian sekaligus dinamisasi itulah yang menunjukkan bahwa gerakan inklusivitas menjadi fondasi Muhammadiyah untuk dapat survive sepanjang zaman, saleh li kulli zaman wa al-makaan. Politik inklusif Muhammadiyah tidak dipahami dalam arti sempit politik kekuasaan atau politik kepemiluan, tetapi jauh lebih luas lagi, bahwa politik inklusif yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah praktik politik dalam berbagai dimensi kehidupan sebagaimana disajikan dalam buku ini. Inilah narasi pencerahan Islam untuk sebuah cita-cita bernama: INDONESIA BERKEMAJUAN.

Politik inklusif Muhammadiyah di dalam buku ini dibedah secara lebih tajam ke lima bab. Masing-masing bab ditulis oleh para intelektual Muhammadiyah dari berbagai kalangan yang memiliki perspektif berbeda-beda, tetapi mereka memiliki kesamaan pandangan bahwa Muhammadiyah telah memiliki bukti nyata dalam mengaktualisasikan Islam berkemajuan di berbagai dimensi kehidupan. Bukti nyata itu kemudian ditulis untuk dapat disajikan ke hadapan publik tanpa harus menyombongkan diri atau berteriak seakan mereka adalah orang yang paling berjasa untuk republik ini. Buku ini diawali dengan prolog oleh Haedar Nashir dan Gunawan Budiyanto di mana Haedar lebih memfokuskan pada politik kebangsaan Muhammadiyah, sementara Gunawan menguraikan tentang tujuh falsafah inklusivitas ajaran Ahmad Dahlan. Sebagai tulisan pembuka, Hilman Latief mencoba mengkonstruksikan konsep inklusivitas Muhammadiyah dalam politik kebangsaan.

Bab pertama menjelaskan tentang konsep dan praktik gerakan inklusif Muhammadiyah. Ahmad-Norma Permata menelusuri kajiannya tentang warisan dan peran Muhammadiyah dalam membentuk budaya politik Indonesia. Fauzan Sandiah dan Eva Nurlaila menguraikan tentang politik amal inklusif Muhammadiyah. Piet H. Khaidir mendiskripsikan tentang

politik buah manggis Muhammadiyah. Ghifari Yuristiadhi membuka fakta tentang peran politik dakwah Muhammadiyah di era pra-kemerdekaan. Sementara itu, Ridho Al-Hamdi dan Arie Kusuma Paksi menceritakan pengalaman praktis mereka tentang peran gerakan inklusif Muhammadiyah di luar negeri. Kemudian, M. Izzul Muslimin memperingatkan warga Muhammadiyah untuk menjaga persyarikatan ini dari tahun politik.

Bab kedua mempresentasikan praktik-praktik nyata gerakan Muhammadiyah di bidang politik kesejehateraan. Praktik-praktik kesejahteraan itu dengan sangat baik telah dijelaskan oleh Ahmad Ma'ruf dan Hempri Suyatna yang memaparkan tentang peran Muhammadiyah dalam bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Secara khusus Andi Azhar mencoba memotret pengaruh teologi Al-Ma'un dalam gerakan dakwah terhadap pekerja migran Indonesia di Taiwan. David Efendi dan Rijal Ramdani fokus pada peran politik kesejahteraan Muhammadiyah di bidang lingkungan hidup. Masmulyadi menganalisis peran Muhammadiyah di bidang filantropi dan lingkungan hidup. Sementara itu, Rahmawati Husein dan Arif Jamali Muis menceritakan peran fundamental Muhammadiyah di bidang kebencanaan baik di level nasional maupun internasional.

Bab ketiga menerangkan tentang konsep dan praktik politik yang beradab dalam pandangan Muhammadiyah. Bachtiar Dwi Kurniawan mencoba membedah relasi antara Muhammadiyah, Pancasila dan ideologi negara-bangsa. Irvan Mawardi mempertajam analisinya tentang pilar keadilan untuk Indonesia yang berkeadaban. Arif Jamali Muis mencoba menafsirkan tentang beragama yang mencerahkan dalam konteks kerja-kerja kemanusiaan. Roni Tobroni dan Suswanta menawarkan gagasan sekolah politik Muhammadiyah yang berkemajuan sebagai sebuah jalan agar mewujudkan kader politik yang intelektual sehingga strategi politik Muhammadiyah selalu memiliki dampak positif dalam setiap pemilu. Miftahulhaq memaparkan bahwa masjid harus menjadi pusat dakwah yang mencerahkan untuk politik kebangsaan yang beradab. Lebih lanjut, Bachtiar Dwi Kurniawan menawarkan gagasan Muhammadiyah sebagai jalan untuk membongkar teologi yang selama ini ada dan menawarkan sebuah teologi pembebasan. Hendra Darmawan menguraikan tentang visi nasionalisme dan internasionalisme Muhammadiyah. Moh Mudzakkir menjelaskan tentang bagaimana pentingnya politik pendidikan di Muhammadiyah. Sementara itu, Paryanto, Fajar Riza Ul Haq, dan Zuly Qodir, masing-masing dari mereka bertiga menjelaskan tentang politik Muhammadiyah, persoalan meritrokasi dan politik identitas serta fenomena politik kaum Muslim modernis.

Bab empat memaparkan tentang Muhammadiyah dalam realitas politik kepemiluan. Tunjung Sulaksono mengusulkan tentang pentingnya keterlibatan Muhammadiyah dalam pemilu. Moh Mudzakkir menguraikan tentang pentingnya peran strategis Muhammadiyah dalam politik. Ridho Al-Hamdi dan Andar Nubowo masuk lebih dalam lagi menjelaskan tentang Muhammadiyah dan Pemilu 2019. Sementara itu, M. Taufiq AR dan Wahyudi Akmaliah membahas tentang sikap netral diambil oleh Muhammadiyah dalam menghadapi politik praktis. Irvan Mawardi mengusulkan untuk meninjau ulang pemilu langsung yang selama ini telah dilakukan oleh Indonesia.

Sebagai bab terakhir, bab kelima mengerangkan tentang peran Muhammadiyah dalam politik perdamaian global. Surwandono menjelaskan tentang konsep narasi dan teologi perdamaian Muhammadiyah. Moh Zaki Arrobi mengusulkan agar Muhammadiyah memperoleh Nobel Perdamaian. Sementara itu, Ridho Al-Hamdi menguraikan kontribusi Muhammadiyah di Luar Negeri sebagai duta peradaban Islam Indonesia dalam mensosialisasikan konsep Islam berkemajuan ke berbagai komunitas lintas agama dan lintas etnis.

Dari total 43 naskah yang disajikan dalam buku ini, kami para penyunting memohon maaf jika ada ketidaksempurnaan atau ketidaksepakatan terhadap gagasan-gagasan yang ditampilkan dalam buku ini. Inilah narasi pencerahan Islam dari generasi Muhammadiyah abad kedua untuk cita-cita Indonesia yang berkemajuan. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi para penulis yang bersedia menyumbangkan pikiran mereka sehingga memperluas perspektif yang disajikan dalam buku ini. Kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tanpa support kampus muda mendunia di bawah kepemimpinan rektor visioner Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., buku ini tidak mungkin terbit dan dinikmati publik. Selamat bertanwir, semoga cara beragama kita terus mencerahkan meski di tengah tahun politik.

Yogyakarta, 10 Februari 2019
Tim Editors:
Ridho Al-Hamdi
David Efendi
Bachtiar Dwi Kurniawan
Hilman Latief

DAFTAR ISI

BAB 2 MUHAMMADIYAH DAN POLITIK KESEJAHTERAAN: *BEST PRACTICES* DI BIDANG PEMBERDAYAAN, LINGKUNGAN, FILANTROPI, DAN KEBENCANAAN

BAB 3 MUHAMMADIYAH DAN POLITIK KEBANGSAAN YANG BERADAB

BAB 4 MUHAMMADIYAH DALAM POLITIK ELEKTORAL

BAB 5 MUHAMMADIYAH DAN POLITIK PERDAMAIAN

TENTANG EDITORS

PROLOG: AGAMA, MUHAMMADIYAH, DAN POLITIK KEBANGSAAN

Dr. H. Haedar Nashir, M.Si
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara tidak dapat dipisahkan dari agama. Lebih khusus agama Islam dan umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini. Secara historis dan sosiologis agama dan umat bergama telah hidup menyatu dengan kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia. Agama dan umat beragama menyatu dengan kebudayaan Indonesia, sehingga masyarakat atau bangsa Indonesia dikenal relijius. Dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara Indonsia, peranan umat beragama sangatlah besar dan menentukan. Setiap perang dan perlawanan melawan penjajah selalu melibatkan umat beragama dan simbol-simbol maupun nilai-nilai ajaran agama. Lebih khusus, secara konstitusional agama maupun umat beragama juga memperoleh tempat yang kuat dalam konstitusi dasar Indonesia.

Masalahnya bagaimana negara mengakomodasi dan menjadikan agama sebagai sumber nilai kehidupan yang luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga Indonesia tidak menjadi negara sekular meskipun bukan menjadi negara agama, yang menjadikan para pejabat dan warga bangsa maupun institusi negara sendiri berbuat dan mengambil kebijakan-kebijakan yang menjujung tinggi nilai-nilai kebaikan yang diajarkan agama yang dipeluknya. Pada saat yang sama umat beragama sendiri menjadikan agamanya sebagai nilai luhur yang fundamental yang menjadikan dirinya berbuat kebajikan-kebajikan luhur dan menjadi rahmat bagi semesta alam.

Dalam konteks inilah maka bagi umat beragama, diperlukan beragama yang mencerahkan dalam kehidupan bangsa, termasuk dalam politik. Lebih-lebih bagi umat Islam karena agama yang dibawa oleh Nabi akhir zaman ini merupakan din at-tanwir, sebahai agama yang mencerahkan

kehidupan, sebagaimana firman Allah yang artinya: “Allah Pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman).Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran).Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” [QS *Al-Baqarah*: 257).

Kehadiran Agama

Para pendiri bangsa Indonesia menyadari pentingnya agama dan kehadiran Tuhan dalam perjuangan kebangsaan, sehingga dalam paragraf Pembukaan UUD 1945 dinyatakan, “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.Dalam pasal 29 UUD 1945 bahkan secara tegas dicantumkan tentang eksistensi dan kemenyatuan bangsa Indonesia dengan agama sebagai sistem keyakinan dan kepercayaan.

Agama merupakan ajaran Ilahi yang sangat penting dan mendasar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Agama sebagai sumber nilai utama yang fundamental berfungsi sebagai kekuatan transendental yang luhur dan mulia bagi kehidupan bangsa. Orang Indonesia menjadi tahu mana yang benar dan salah, baik dan buruk, serta pantas dan tidak pantas karena tuntunan ajaran agama. Nilai-nilai instrinsik keagamaan telah memberi inspirasi bagi para pendiri bangsa dan perumus cita-cita negara dalam mewujudkan kehidupan kebangsaan yang berbasis pada ajaran agama. Nilai-nilai agama bahkan tercermin dalam Pancasila sebagai ideologi negara.

Karenanya, agama bagi kehidupan bangsa Indonesiadapat dijadikan sebagai sumber nilai pedoman hidup, panduan moral, dan etos kemajuan. Nilai-nilai agama dapat menumbuhkan etos keilmuan, orientasi pada perubahan, kesadaran akan masa depan yang lebih baik, pendayagunaan sumberdaya alam secara cerdas dan bertanggungjawab, inovasi atau pembaruan, kebersamaan dan toleransi, disiplin hidup, kemandirian, serta hal-hal lain yang membawa pada kemajuan hidup bangsa. Nilai-nilai agama juga dapat mengembangkan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan yang adil tanpa diskrimansi, serta hubungan antarumat manusia yang berkeadaban mulia. Dengan nilai-nilai agama itu, bangsa Indonesia dapat menjalani kehidupan di abad moderen yang membawa pada keselamatan dunia dan akhirat.

Agama dalam konteks berbangsa dan bernegara tentu harus menyatu dalam jiwa, pikiran, dan praktik hidup elite dan warga. Para elite negeri di manapun berada, termasuk di legislatif, eksekutf, dan yudikatif mesti menghayati setiap agama yang dipeluknya sekaligus menjadikan agama sebagai fondasi nilai yang esensial dan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa harus dihantui oleh paham sekularisme negara. Indonesia memang bukan negara agama, tetapi agama menjad sumber nilai penting, sekaligus tidak boleh menjadikan negeri ini menjadi sekuler. Berbagai macam krisis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk merebaknya korupsi, kemaksiatan, dan ketidakadilan antara lain karena lepasnya nilai agama dari kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Agama dan umat beragama sungguh berperan penting dalam kehidupan kebangsaan di negeri ini. Karenanya agama dan institusi keagamaan jangan direduksi oleh satu atribut dan golongan primordial tertentu, seolah mereka mewakili seluruh umat Islam khususnya dan umat beragama pada umumnya. Lebih-lebih manakala klaim golongan keagamaan itu hanya dijadikan alat meraih kekuasaan politik dan memperalat negara untuk memenuhi kepentingan golongan sendiri dalam hasrat *ananiyah-hizbiyah* yang menyala-nyala. Agama yang hidup dalam dengut nadi bangsa Indonesia meniscayakan pesan ajaran dan umat beragama yang benar-benar objektif, membawa kemajuan dan pencerahan, konsisten antara nilai dan perilaku, serta membawa rahmatan lil-'alamin dalam makna dan fungsi yang sebenar-benarnya.

Karenanya tidak boleh ada usaha maupun kebijakan negara yang menjauhkan, memisahkan, dan menegasikan agama dan umat beragama dari kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Tidak boleh negara Indonesia berpaham anti-Tuhan (ateis) atau anti-agama (agnostis), sebab menyalahi Pancasila dan UUD 1945 serta sejarah dan kepribadian Indonsia. Berpijak pada dasar negara tersebut tentu saja jangan pula Indonesia dijadikan sebagai negara agama serta paham agama tertentu menjadi paham negara. Jangan pula tokoh dan umat beragama menjadikan agama sebagai alat transaksi-transaksi politik dan lainnya yang menodai agama dan ketulusan pemeluk agama.

Agama dan Politik

Bagi bangsa Indonesia yang beragama secara faktual agama dan orientasi keagamaan atau kehidupan beragama tidak lepas terkait dengan kehidupan politik kebangsaan atau berbangsa dan bernegara.

Masalah hubungan agama dan politik sangat kompleks dan tidak dapat disederhanakan sebagaimana sering menjadi cara pandang sebagian kalangan. Tumbuh isu politisas agama, agama dijauhkan dari poltik, marjinalisasi umat bergama, radikalisme agama, dan isu-isu lainnya yang sering disederhakan tetapi sejatinya rumit. Konstruksi tentang isu-isu keagamaan dan politik itu tergantung pada cara pandang masing-masing, yang tidak jarang terkait dengan posisi dan kepentingan tertentu.

Agama dan politik dapat harmoni dapat pula kontradiski sebagaimana hubungan antara "al-din wa al-dunya" atau agama dan dunia. Agama berkaitan dengan nilai-nilai luhur dan suci seperti nilai iman, ibadah, amanah, adil, amal shaleh, ihsan, dan nilai keutamaan lainnya dari yang transenden (ilahiah) hingga imanen (insaniyah-dunyawiyah). Politik juga memiliki nilai-nilai berharga seperti keadilan, kebajikan publik, menjujung tinggi hak asasi manusia, menjunjung tinggi hak rakyat, dan sebagainya. Pada nilai-nilai luhur seperti itu tentu terjadi harmoni antara agama dan politik.

Namun sering pula nilai agama dan politik saling berbeda, menjauh, dan bertabrakan. Agama mengajarkan jujur, amanah, menepati janji, adil, dan ihsan sementara politik dalam praktik tidak jarang menunjukkan dusta, hianat, ingkar janji, mementingkan kelompok sendiri sambil menegasikan pihak lain, dan hal-hal yang tak terpuji seperti politik uang, sogok, dan sebagainya. Agamanya mengajarkan mencari harta dan kedudukan secara halal dan baik, sementara politik menghalalkan segala cara termasuk korupsi, gratifikasi, upeti, dan sebagainya. Hal-hal negatif dalam praktik politik seperti itu meski sering dibantah oleh mereka yang berkiprah di dunia politik yang tentu saja politisinya mesti baik, tetapi kenyataan dunia politik sering menunjukkan politik yang pragmatis (orientasi kegunaan) dan oportunistik (orientasi kepentingan) seperti itu.

Dalam kehidupan poliik umat Islam pun ketegangan nilai agama dan politik itu juga sering terjadi, selain harmoni antara keduanya. Perang "Jamal" atau perang "Unta" di Basra Iraq antara pasukan Siti Aisyiyah melawan pasukan Zubair bin Awwam serta sahabat Nabi lainnya yang memihak Ali bin Abi Thalib atas wafatnya Khalifah Usman bin Affan, menunjukkan peliknya hubungan antara nilai agama dan politik. Peristiwa lepasnya kkhalifahan Ali bun Abi Thalib ke Ummayah dalam perjanjian yang kontroversial antara Amr bin Yasir (wakil Ali) dan Amr bin Ash (wakil Muawwiyah) dengan rentetan Perang Siffin yang paling besar, juga tak kontroversial dalam sejarah politik Islam. Demikian pula dalam berbagai

tragedi politik Islam lainnya, termasuk yang menyebabkan meninggalnya Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Hussein, dan lain-lain. Bahkan dalam peristiwa Saidah bani Saidah yang membelah umat Islam ke dalam tiga golongan kepentingan politik dalam persoalan mengangkat pengganti kepemimpinan Nabi, merupkan contoh paling awal dan klasik dari ketegangan nilai agama dan politik dalam kehidupan kaum muslimun.

Dalam kehidupan politik umat Islam Indonesia pun ketegangan antara aktualisasi nilai agama dan politik itu juga sama peliknya dengan sejarah politik Islam di dunia Islam saat ini. Konflik di tubuh Partai Sarikat Islam di masa awal perjuangan kemerdekaan sampai saat ini, keluarnya NU dan Sarikat Islam dari Masyumi, pecah di tubuh Parmusi, hingga PPP yang saat ini mengalami perpecahan hingga ke ranah hukum. Semua merupakan contoh nyata dari dilema politik Islam, yang di dalamnya terkandung ketegangan antara nilai-nilai keagamaan di tingkat normatif dengan politik di dunia nyata, yang sering saling bertentangan. Lebih-lebih jika politik Islam dihadapkan dengan politik sekuler, yang tidak kalah rumitnya atau bahkan semakin rumit.

Politik, ekonomi, dan aspek mu'amalahah keduniaan itu pada dasarnya baik. Politik menurut Ibn Qayyim ialah "aqrab ila al-shalah wa ab'ad 'an al-fasad", yakni mendekatkan kepada segala hal yang baik serta menjauhkan diri dari segala hal yang merusak. Tetapi dalam kenyataan terdapat sejumlah praktik "fasad" dalam politik dan kehidupan dunia lainnya seperti menipu, membohongi, dan menggunakan segala cara yang tak halal. Dalam ketegangan nilai seperti itu maka tergantung pada konsistensi rujukan nilai dari setiap tindakan politik, sekaligus perilaku aktor atau pelaku politik itu sendiri dalam hal berpolitik. Faktor sistem dan kontrol publik juga menentukan aktualisasi nilai politik dalam kehidupan berpolitik.

Nilai Politik Muhammadiyah

Muhammadiyah memandang politik sebagai bagian dari mu'amalah-dunyawiyah yang harus diurus dalam kerangka menjalankan dan mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan umat dan bangsa. Sebagaimana prinsip bermu'amalah maka dasarnya boleh kecuali hal yang dilarang, artinya di satu pihak diberi keleluasaan retapi tidak berarti serba boleh atau serba bebas tanpa dasar nilai dari ajaran Islam itu sendiri. Selain itu nilai-nilai yang diperintahkan dan dianjurkan dalam Islam harus dijalankan dalam politik, sebaliknya hal-hal yang dilarang harus dihindarkan atau tidak

boleh dilakukan. Tentang mana yang boleh dan tidak boleh, yang benar dan salah, yang baik dan buruk, yang pantas dan tidak pantas selain dalam ajaran Islam sendiri terdapat kandungan nilai yang mengaturnya secara sharih atau jelas, tentunya banyak terdapat nilai-nilai politik yang menjadi ranah ijtihad karena menyangkut urusan mua'amalah dunyawiyah.

Muhammadiyah melalui Khittah Denpasar 2002 secara tegas menetapkan garis perjuanag politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang di dalamnya terkandung nilai dan orientasi bagi tindakan setiap warga persyarikatan sebagai berikut:

1. Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek ajaran Islam dalam urusan keduniawian (*al-umur al-dunyawiyyat*) yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan pilitik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun memalui pengembangan masyarakat, pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun dimana nilai-nilai Illahiyah melandasi dan tumbuh subur bersamaan dengan tegakknya nilai-nilai kebersamaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, keadaban untuk terwujudnya "*Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*"
3. Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani yang kuat sebagaimana tujuan muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan kenegaraan sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip-prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan negara yang demokratis.
4. Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis dan berorientasi pada kekuasaan untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya menuju terciptanya sistem politik yang

demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara. Dalam hal ini perjuangan politik yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik hendaknya benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat dan tegaknya nilai-nilai utama sebagaimana yang menjadi semangat dasar dan tujuan didirikannya NKRI yang diprolkamasikan tahun 1945.

5. Muhammadiyah senantiasa memainkan peran politiknya sebagai wujud dari da'wah amar ma'ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban.
6. Muhammadiyah tidak berafiliasi ddan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan pollitik dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.
7. Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai dengan hati nurani masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus sesuai dengantangguang jawab sebagai warga negara yag dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiayah, demi kemaslahatan bangsa dan negara.
8. Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab, akhlaq mulia, keteladanan, dan perdamaian. Aktifitas polotik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi persyarikatan dalam melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar.
9. Muhammadiyah senantiasa bekerjasama dengan pihak atau golongan mana pun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemudharatan, dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, maju, demokratis dan berkeadaban.

Bagi warga Muhammadiyah terdapat panduan nilai dalam berpolitik sebagaimana terkandung dalam "Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah" sebagai berikut:

1. Warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis (masa bodoh) dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud bermuamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain dengan prinsip-prinsip etika/akhlaq Islam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
2. Beberapa pinsip dalam berpolitik harus ditegakkan dengan sejujur-jujurnya dan sesungguh-sungguhnya yaitu menunaikan amanat dan tidak boleh menghianati amanat, menegakkan keadilan, hukum, dan kebenaran, ketaatan kepada pemimpin sejauh sejalan dengan perintah Allah dan Rasul, mengemban risalah Islam, menunaikan amar ma'ruf, nahi munkar, dan mengajak orang untuk beriman kepada Allah, mempedomani Al-Quran dan Sunnah, mementingkan kesatuan dan persaudaraan umat manusia, menghormati kebebasan orang lain, menjauhi fitnah dan kerusakan, menghormati hak hidup orang lain, tidak berhianat dan melakukan kezaliman, tidak mengambil hak orang lain berlomba dalam kebaikan, bekerjasama dalam kebaikan dan ketaqwaan serta tidak bekerjasama (konspirasi] dalam melakukan dosa dan permusuhan, memelihara hubungan baik antara pemimpin dan warga, memelihara keselamatan umum, hidup berdampingan dengan baik dan damai, tidak melakukan fasad dan kemunkaran, mementingkan ukhuwah Islamiyah, dan prinsip-prinsip lainnya yang maslahat, ihsan, dan ishlah.
3. Berpolitik dalam dan demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah kepada Allah dan ishlah serta ihsan kepada sesama, dan jangan mengorbankan kepentingan yang lebih luas dan utama itu demi kepentingan diri sendiri dan kelompok yang sempit.
4. Para politisi Muhammadiyah berkewajiban menunjukkan keteladanan diri (*uswah hasanah*) yang jujur, benar, dan adil serta menjauhkan diri dari perilaku politik yang kotor, membawa fitnah, fasad (kerusakan], dan hanya mementingkan diri sendiri.
5. Berpolitik dengan kesalihan, sikap positif, dan memiliki cita-cita bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan fungsi amar ma'ruf dan nahi munkar yang tersistem dalam satu kesatuan imamah yang kokoh.

6. Menggalang silaturahmi dan ukhuwah antar politisi dan kekuatan politik yang digerakkan oleh para politisi Muhammadiyah secara cerdas dan dewasa.

Peluruhan Nilai

Bagaimana dengan politik dalam kehidupan kebangsaan di Indonesia mutakhir? Masalah yang satu termasuk yang sama rumitnya baik karena realitas yang ternadi maupun pihak yang mengkonstruksikannya. Kemajuan demokrasi dalam kehidupan politik di negeri ini sangat pesat, tetapi liberalisasi politik yang menyertainya juga melahirkan banyak masalah yang tidak sederhana. Di antara masalah politik kebangsaan di negeri ini ialah problem disorientasi nilai diukur dari idelaisme kebangsaan yang diletakkan oleh para pendiri Indonesia.

Bahwa setelah lebih73 tahun merdeka, Indonesia masih mengalami kejumudan (stagnasi), penyimpangan (deviasi), dan peluruhan (distorsi) dalam berbagai bidang kehidupan kebangsaan ditimbang dari semangat, pemikiran, dan cita-cita nasional yang diletakkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Meskipun terdapat banyak kemajuan, seperti dalam kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan suasana kemajemukan bangsa yang terpelihara dengan baik, tak dapat dipungkiri masih banyak persoalan rumit dan mendesak yang harus segera diselesaikan. Di antara masalah yang cukup serius adalah korupsi yang masif, penegakan hukum yang lemah, kesenjangan sosial yang melebar, sumberdaya alam yang dieksploitasi dan dikuasai pihak asing, dan hal-hal lain yang berdampak luas pada kehidupan kebangsaan yang jauh dari cita-cita nasional.

Kehidupan kebangsaan di Indonesia saat ini diwarnai oleh krisis moral dan etika, disertai berbagai paradoks dan pengingkaran atas nilai-nilai keutamaan yang selama ini diakui sebagai nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kenyataan ini ditunjukkan oleh perilaku elite dan warga masyarakat yang korup, konsumtif, hedonis, materialistik, suka menerabas, dan beragam tindakan menyimpang lainnya. Sementara itu proses pembodohan, kebohongan publik, kecurangan, pengaburan nilai, dan bentuk-bentuk kezaliman lainnya (*tazlim*) semakin merajalela di tengah usaha-usaha untuk mencerahkan (*tanwir*) kehidupan bangsa. Situasi paradoks dan konflik nilai tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia kehilangan makna dalam banyak aspek kehidupan dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara (*PP Muhammadiyah*, 2014).

Dalam pandangan Muhammadiyah dalam Buku Indonesia Berkemajuan (2015) bahwa kehidupan kebangsaan di Indonesia memerlukan rekonstruksi bermakna di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh salah satunya faktor dinamis karakter kepemimpinan dalam seluruh struktur kehidupan kebangsaan. Indonesia saat ini memerlukan karakter kepemimpinan yang progresif, reformatif, inspiratif dan berakhlak mulia yang mampu menyerap aspirasi masyarakat dan mengkristalisasikan nilai-nilai etika keagamaan dan moral Pancasila secara aktual sebagai landasan kebijakan di pelbagai sektor kehidupan kebangsaan. Dalam konteks kehidupan kebangsaan, kepemimpinan profetik adalah kepemimpinan yang memiliki komitmen terhadap kebenaran, mendorong terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi, berpihak kepada hak-hak masyarakat, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya.

Dalam kehidupan kebangsaan saat banyak krisis terjadi, justru jadikan agama sebagai kekuatan moral dan intelektual yang mencerahkan. Jadikan agama sebgai *Din at-Tanwir*, ajaran yang mencerahkan kehidupan untuk menerangi kegelapan jiwa, pikiran, dan tindakan manusia dari apa yang oleh Peter L Berger disebut *chaos* yang memerlukan kanopi suci agama. Nilai-nilai agama merupakan pandangan hidup yang kokoh dan menjadi bagian terpenting dari denyut-nadi kehidupan bangsa Indonesia.

Agama manapun bukan hanya kumpulan tuntunan ritual ibadah dan doktrin moral yang terkandung dalam ajaran kitab suci. Lebih dari itu, agama merupakan model perilaku yang tercermin dalam tindakan nyata yang mendorong penganutnya memiliki watak jujur dan dipercaya, dinamis, kreatif, dan berkemajuan. Dalam pandangan Islam, Agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah yang Maha Pencipta (*habl min Allah*), tetapi juga mengatur dan memberi arah kehidupan dalam hubungan antar umat manusia (*habl min al-nas*)yang membentuk peradaban hidup yang utama. Di sinilah letak esensi agama dalam kehidupan umat manusia.

Tantangan dan Harapan

Muhammadiyah, umat, dan bangsa Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan politik saat ini. Kehidupan politik saat ini berproses dan mengarah kuat pada liberalisasi. Dalam buku "Indonesia Berkemajuan" (2015) disebutkan, bahwa kehidupan kebangsaan masih diwarnai oleh krisis moral dan etika, disertai berbagai paradoks dan pengingkaran atas nilai-nilai keutamaan yang selama ini diakui sebagai nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kenyataan ini ditunjukkan oleh perilaku

elite dan warga masyarakat yang korup, konsumtif, hedonis, materialistik, suka menerabas, dan beragam tindakan menyimpang lainnya. Sementara itu proses pembodohan, kebohongan" publik, kecurangan, pengaburan nilai, dan bentuk-bentuk kezaliman lainnya (*tazlim*) semakin merajalela di tengah usaha-usaha untuk mencerahkan (*tanwir*) kehidupan bangsa. Situasi paradoks dan konflik nilai tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia kehilangan makna dalam banyak aspek kehidupan dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara.

Demokrasi yang berkembang di Indonesia masih dianggap bersifat prosedural. Anggapan ini akhir-akhir ini berkonotasi negatif karena praktik pemilu yang bertentangan dengan prinsip bebas dan adil (*free and fair elections*). Ketidak beranian untuk memutuskan sistem atau rezim pemilu yang tegas -apakah distrik, proporsional, atau gabungan keduanya-hanya menimbulkan praktik pemilu yang disertai jual-beli suara, penggelembungan suara, politik uang, dan kanibalisme politik yang ditandai oleh rivalitas antar calon dalam satu partai. Di tengah suasana di mana integritas dan kejujuran politik, praktik demokrasi kita masih diwarnai oleh banyak penyelenggara pemilu yang partisan dan tidak netral. Dalam situasi demikian, sulit diharapkan demokrasi prosedural bisa berjalan seiring dengan demokrasi substansial, di mana kepentingan masyarakat terdahulukan daripada kepentingan kelompok dan perseorangan.

Selain itu, persoalan etika dan budaya terkait erat dengan implementasi dasar filosofi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya hal ini justru terabaikan sejak Indonesia mengalami periode reformasi atau memasuki masa transisi ke demokrasi. Krisis multi-dimensi yang muncul akibat masalah finansial dan akonomi yang luar biasa pada tahun 1997/1998 menyebabkan banyak orang berperilaku pragmatis dan *zero-sum-game*. Otoritarianisme dan pengekangan kebebasn yang berkepanjangan menyebabkan banyak pihak mengambil sikap pintas, kehilangan solidaritas, dan mementingkan kepentingan kelompok atau individu yang sempit dan berdimensi jangka pendek. Kondisi kejiwaan seperti inilah yang membuat masyarakat bertindak mengabaikan etika dan budaya dalam kehidupan sosial-politik mereka.

Dalam menghadapi masalah dan tantangan tersebut, Indonesia diharapkan selain melakukan rekonstruksi sistem kehidupan politik nasional yang bermakna (*with meaning*), bersamaan dengan itu membangun konstruksi nilai yang menjadi landasan berperilaku politik (*political behavior*) yang positif dan juga bermakna sesuai dengan nilai-nilai luhur

agama yang hidup di negeri ini, Pancasila, dan kebudayaan nasional yang luhur sebagai basis tindakan politik individual dan kolektif.

Dalam konteks inilah harapannya Muhammadiyah secara institusi menjadi kekuatan pemandu nilai politik yang utama serta orang-orangnya menjadi *uswah hasanah* (suri teladan) dalam berpolitik. Politik amar ma'ruf dan nahi munkar benar-benar diperankan dalam posisi dan fungsi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan organisasi kemasyarakatan yang mencerahkan sekaligus berkemajuan, yang tidak boleh terbawa arus ke kanan maupun ke kiri dalam pusaran politik praktis yang keras dan penuh pertaruhan saat ini.

Dalam forum "Halaqah Kebangsaan" yang dihadiri para pimpinan Partai Politik nasional tanggal 12 Mei 2018 di Jakarta, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan pesan politik nilai yang bertajuk "Memperkuat Demokrasi, Membangun Idealisme dan Kemajuan Bangsa", yang berisi beberapa pokok pikiran antara lain sebagai berikut:

Pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didirikan oleh para pejuang dan pendiri bangsa tahun 1945 memiliki tiga fondasi penting. Pertama, memiliki cita-cita nasional yaitu terbentuknya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur untuk diwujudkan. Kedua, memiliki fondasi kokoh yang terkandung dalam nilai-nilai fundamental Pancasila sebagai dasar negara. Ketiga, terbentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal-hal yang ideal dan fundamental tersebut harus menjadi komitmen kolektif sekaligus menjadi misi dan visi utama seluruh kekuatan nasional, termasuk di dalamnya pemerintah dan partai politik sebagai pilar utama dan strategis pemerintahan negara.

Kedua, Kehidupan kebangsaan masih diwarnai oleh krisis moral dan etika, disertai berbagai paradoks dan pengingkaran atas nilai-nilai keutamaan yang selama ini diakui sebagai nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kenyataan ini ditunjukkan oleh perilaku elite dan warga masyarakat yang korup, konsumtif, hedonis, materialistik, suka menerabas, dan beragam tindakan menyimpang lainnya. Sementara itu proses pembodohan, kebohongan publik, kecurangan, pengaburan nilai, dan bentuk-bentuk kezaliman lainnya (*tazlim*) masih menjadi kenyataan di tengah usaha-usaha untuk mencerahkan (*tanwir*) kehidupan bangsa. Situasi paradoks

dan konflik nilai tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia kehilangan makna dalam banyak aspek kehidupan dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Akibat lebih jauh dari masalah-masalah krusial dan kondisi paradoks itu, Indonesia semakin tertinggal dalam banyak hal dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Indonesia telah banyak kehilangan peluang untuk berkembang menjadi bangsa atau negara yang berkemajuan. Jika permasalahan ini tidak memperoleh pemecahan yang sungguh-sungguh melalui upaya-upaya rekonstruksi yang bermakna, maka Indonesia berpotensi menjadi negara gagal, salah arah dalam menempuh perjalanan ke depan. Situasi demikian jelas bertentangan dengan makna dan cita-cita kemerdekaan.

Ketiga, Indonesia merdeka atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Karenanya segenap komponen bangsa, termasuk partai politik dan lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, serta lainnya diharapkan tetap menjunjung nilai-nilai luhur Ketuhanan Yang Maha Esa serta nilai-nilai kebangsaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Agama sangat penting dan utama dalam perikehidupan bangsa Indonesia yang harus dijunjungtinggi dan diamalkan nilai-nilai ajarannya. Perkembangan demokrasi, kesadaran hak asasi manusia, dan kehidupan kebangsaan yang semakin terbuka meniscayakan proses spiritualisasi, moralitas, dan peneguhan nilai-nilai transendental dalam kehidupan kebangsaan sebagaimana terkandung dalam ajaran Agama dan Pancasila. Jangan sampai ada penegasian, lebih-lebih pelecehan dan penistaan terhadap nilai-nilai luhur bangsa tersebut karena yang dirugikan adalah bangsa Indonesia sendiri. Karenanya baik organisasi kemasyarakatan maupun partai politik serta seluruh kekuatan bangsa termasuk pemerintah niscaya menjunjung tinggi dan seyogyanya berkomitmen tinggi dalam menjaga dan mewujudkan nilai-nilai luhur Agama, Pancasila, dan kebudayaan Indonesia yang luhur itu sebgai dasar moral dan spiritual yang penting dan utama.

Keempat, Dalam memasuki tahun politik 2019 pemerintah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh lembaga dan komponen bangsa diharapkan tetap memelihara keadaban, kebersamaan, kedamaian, toleransi, kebajikan, dan keutamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegera. Kontestasi politik tidak perlu menjadi penyebab dan membawa pada situasi keretakkan, konflik, dan permusuhan antar komponen bangsa. Semua dituntut berkomitmen menjaga politik dari berbagai penyimpangan

dan transaksi yang menyebabkan kerugian bear bagi kehidupan bangsa dan negara. Kontestasi politik juga diharapkan tidak semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan, tetapi tidak kalah pentingnya meniscayakan komitmen dan usaha yang sungguh-sungguh dalam mewujudkan idealisme, nilai dasar, dan cita-cita nasional yang luhur sebagaimana telah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Inilah yang penting menjadi komitmen dan visi kenegaraaan para pemimpin, elite, dan segenap komponen bangsa saat ini dan ke depan.

Peran Pemimpin

Keberadaan dan kemajuan suatu bangsa dari faktor aktor tergantung pada para pemimpinnya. Menjadi pemimpin bangsa perlu visi kepemimpinan negarawan yang memiliki pemikiran luas dan mendalam, serta bagaimana menjadikan rakyat bahagia lahir dan batin secara nyata. Jiwa, pikiran, dan kemampuan para pemimpin negeri di mana pun mesti melampaui, sehingga bukan sekadar nakhoda biasa. Menurut Thomas Jefferson, Pesiden Amerika Serikat ketiga, bahwa objek pemerintahan yang baik ialah "kepedulian terhadap kehidupan manusia dan kebahagiaan". Artinya, menjadi pemimpin pemerintahan itu di tingkatan manapun tiada lain untuk membangun kehidupan manusia dan menyejahterakannya secara lahir dan batin. Jangan merasa sukses membangun fisik rakyat, tetapi bangunlah keutuhan diri warga selaku manusia yang berkehendak. Sebagaimana salah satu potongan lirik lagu Indonesia Raya, "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya".

Pemimpin pemerintah Indonesia tak kalah penting ialah visi kenegaraan. Visi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana mandat UUD 1945 harus menjadi komitmen utama para pemimpin pemerintahan negara. Jangan biarkan rakyat di negeri ini terabaikan hak-hak dasarnya. Penuhi tuntutan hidup rakyat secara sesungguhnya, bukan sekadar kulit luar dalam citra populisme yang sumir.

Indonesia dengan segala kekayaanya yang disebut tanah air hendaknya dijaga, dilindungi, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan kemakmuran bangsa secara keseluruhan. Jangan ringan kebijakan melego tanah air dan segala kandungan kekayaannya kepada pihak-pihak yang rakus serta gemar menyandera dan menjadikan negeri

ini sekadar menjadi objek keuntungan semata seperti praktik VOC di masa kolonial. Jangan sampai alam yang makmur ini tergadaikan dan terkuras habis oleh para *muthrafun* (elite rakus) yang merugikan generasi bangsa turun temurun. Pada setiap jengkal tanah dan kekayaan alam yang dilepas terdapat pertanggungjawaban moral para pemimpin negeri yang bersifat Ilahiah sekaligus insaniyah yang urusannya dunia-akhirat.

Jangan biarkan ada anak-anak bangsa yang terluka dan menderita nasibnya karena banyak sebab. Tidak boleh dibiarkan generasi bangsa ini menjadi korban kerakusan para pihak yang hanya ingin menangguk untuk di Republik ini. Pun jangan ada pembiaran terhadap kemiskinan, marjinalisasi, dan terenggutnya hak rakyat oleh kepongahan mereka yang digdaya. Kesenjangan sosial tak boleh dibiarkan terus menganga, ketika kelompok kecil makin makmur dan perkasa, sementara mayoritas rakyat makin jelata dan merana. Ingat pesan Bung Karno, negeri ini milik semua, bukan milik segelintir orang!

Didiklah rakyat dengan penuh cinta dan pengkhidmatan agar mereka menjadi warga bangsa yang cerdas, mandiri, beradab, dan berkemajuan menuju masa depan nan cerah-mencerahkan. Jangan manjakan rakyat dengan segala ninabobok yang instan dan mematikan akal-sehat mereka. Meski kebutuhan fisik dan sarana-prasarana rakyat dipenuhi dengan secukup-cukupnya, rakyat di negeri ini tidak boleh menjadi kaum miskin-jiwa dan pikiran. Bikin rakyat benar-benar berdaya layaknya bangsa merdeka dan berkakter utama. Bung Hatta pernah berpesan penuh hikmah, “agar perut rakyat terisi, kedaulatan rakyat perlu ditegakkan. Rakyat hampir selalu lapar bukan karena panen buruk atau alam miskin, melainkan karena rakyat tidak berdaya.”.

PROLOG: TUJUH FALSAFAH INKLUSIVITAS AJARAN AHMAD DAHLAN

Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P.
Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dalam konteks keumatan dan keindonesiaan, boleh jadi Muhammadiyah merupakan organisasi sosial yang paling lengkap merajut rasa kebangsaan dan persatuan yang tanpa lelah rela menjadi pagar hidup keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum negara RI berdiri, KH Ahmad Dahlan memainkan politik inklusif dan berada pada posisi non-konfrontatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Dengan pengetahuan, keilmuan, dan dilengkapi dengan pergaulannya di tengah tokoh penggerak kebangsaan, Dahlan memilih posisi yang sangat cerdas dalam memulai pergerakannya yaitu memajukan kehidupan umat melalui gerakan pencerdasan dan aktualisasi ajaran Islam. Setelah Republik Indonesia berdiri, para murid dan penerusnya mendapatkan inspirasi bebas hambatan untuk lebih mengembangkan konsep dan nilai kesatuan bangsa dengan berlandaskan ajaran Islam, dan inilah Muhammadiyah sebuah organisasi Islam yang bergerak di bidang dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar dengan ciri jalinan ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an.

KH Ahmad Dahlan mengajarkan tujuh falsafah (inklusivitas) yang kesemuanya mencerminkan kondisi sosial, mental, dan kualitas keimanan umat Islam, dan kecerdasan pemikiran beliau telah dapat dibuktikan bahwa tujuh falsafah inklusivitas ini berkesuaian dengan kondisi Indonesia saat ini.

Falsafah pertama yang diberikan adalah "Manusia itu semuanya mati (perasaanya) kecuali para ulama yaitu orang-orang yang berilmu. Dan ulama-ulama itu dalam kondisi kebingungan, kecuali mereka yang beramal. Dan mereka yang beramal pun semuanya dalam kekhawatiran, kecuali mereka yang ikhlas atau bersih hatinya". Pelajaran ini sangat jelas bagaimana Ahmad Dahlan mementingkan golongan orang-orang yang

berilmu yang ringan tangan untuk selalu beramal sholeh dengan ikhlas (hati bersih). Kondisi kepemimpinan bangsa (ulama dan umara) di Indonesia sangatlah jauh di bawah kriteria Ahmad Dahlan tersebut. Seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami, bagaimana susahnya mendapatkan figur kepemimpinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Ahmad Dahlan. Selain itu, Ahmad Dahlan juga menambahkan bahwa sebagian pemimpin telah mempertuhankan nafsu duniawi serta melupakan akhirat, karena perkara-perkara akhirat yang selalu disitirnya tidak untuk mendapatkan kemulyaan akhirat tetapi justru untuk memperoleh kemashuran dan kemanfaatan duniawi.

Falsafah kedua yang disampaikan beliau adalah ”Kebanyakan di antara para manusia berwatak angkuh dan takabur, mereka mengambil keputusan sendiri-sendiri”. Dalam masalah ini, Dahlan mengajarkan bagaimana pentingnya bermufakat dan bermusyawaran dalam berorganisasi secara benar dan tertib. Dahlan menegaskan bahwa organisasi (perkumpulan) merupakan sarana efektif untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan dan mencerahkan umat.

Falsafah ketiga lebih banyak mengritik kebiasaan manusia dalam menepati suatu pokok pikiran atau kepercayaan/keyakinan yang cenderung sukar berubah dan tidak mau menerima pendapat orang lain. ”Manusia itu kalau mengerjakan pekerjaan apapun, sekali, dua kali dan berkali-kali, maka kemudian jadi biasa. Kalau sudah menjadi kebiasaan dan kesenangan yang dicintainya, maka kebiasaan yang dicintai itu sukar untuk diubah. Sudah menjadi tabiat, bahwa kebanyakan manusia akan membela adat kebiasaan yang telah diterima, baik itu dari sudut keyakinan (*i'tiqad*), perasaan kehendak maupun amal perbuatan. Kalau ada yang mengubah, mereka akan sanggup membela dengan mengorbankan jiwa raga. Demikian itu karena anggapannya bahwa apa yang dimiliki adalah (paling) benar”.

Falsafah keempat yang disampaikan Ahmad Dahlan adalah mementingkan upaya manusia untuk selalu mencari pemurnian amalan dan keyakinan ajaran Islam yang telah ada. Manusia harus menggunakan pikirannya untuk mengoreksi soal *i'tiqad* kepercayaannya, tujuan hidup, dan tingkah lakunya, mencari kebenaran yang sejati. Pelajaran ini sangatlah kental nuansa perpaduan antara kepentingan manusia untuk selalu meningkatkan kualitas pikiran dan ilmunya untuk memurnikan ajaran Islam sesuai dengan apa yang dimaksudkan Allah SWT.

Falsafah kelima lebih banyak memperingatkan orang-orang yang selalu penuh dengan keraguan dan kekhawatiran serta akhirnya tidak berani

mengerjakan barang yang benar, sehingga hidupnya seperti mahluk yang tidak berakal sebagaimana QS. Al-Furqan: 44, ”Adakah engkau mengira bahwa kebanyakan manusia itu suka mendengarkan (pelajaran yang benar) atau suka memikir-mikir? Sungguh tidak, tak lain dan tak bukan mereka itu hanyalah seperti hewan, malah mereka itu lebih sesat lagi jalan yang ditempuhnya”.

Falsafah keenam disampaikan Ahmad Dahlan sebagai berikut: ” Kebanyakan pemimpin-pemimpin rakyat belum berani mengorbankan harta benda dan jiwanya untuk berusaha mengadakan golongan umat manusia dalam kebenaran. Malah pemimpin-pemimpin itu biasanya hanya mempermainkan, memperalat yang bodoh-bodoh dan lemah”.

Falsafah ketujuh merupakan pelajaran yang paling sering ditekankan Ahmad Dahlan yaitu belajar ilmu dan belajar amal. Dalam proses pemblejaran, nampaknya Ahmad Dahlan sudah mengutamakan keberhasilan sebuah proses pendidikan yaitu kognitif (keilmuan), Afeksi (sikap), dan psikomotorik (ketrampilan dalam memanfaatkan ilmu). Dalam hal ini, Ahmad Dahlan mengutamakan kesimbangan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan demi terwujudnya Islam yang berkemajuan.

Perhelatan Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu Tahun 2019, menjadi ajang tanwir yang boleh jadi sarat dengan pesan dalam rangka untuk memperkokoh konstruksi gerakan karena diselenggarakan dalam tahun politik. Harus pula disadari bahwa distorsi makna gerakan dapat muncul di setiap level pimpinan persyarikatan. Harus pula disadari bahwa warga Muhammadiyah tidak semuanya dapat bersifat ”*open mind*” terhadap segala bentuk perbedaan, apalagi telah dikemas dalam idiom-idiom politik dan sosial demi sebuah elektabilitas.

Buku ini merupakan respon terhadap distorsi makna ber-Muhammadiyah yang menggejala akhir-akhir ini. Dengan kembali menggali dan memahami inti gerakan Muhammadiyah diharapkan tahun politik yang merupakan peristiwa lima tahunan tidak akan menggoyahkan sendi-sendi gerakan sebagai upaya untuk menjadikan Muhammadiyah tetap cerdas menjalan politik inklusif, terus bergerak memberi untuk negeri. Buku ini merupakan goresan kepedulian penggiat muda Muhammadiyah baik dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta maupun beberapa angkatan muda Muhammadiyah. Selamat Tanwir.

PENDAHULUAN: MENAKAR INKLUSIVITAS MUHAMMADIYAH DALAM POLITIK KEBANGSAAN

Hilman Latief
Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ketua Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketika berdirinya di awal abad keduapuluh, Muhammadiyah berada dalam alam politik Hindia Belanda. Dalam iklim politik kolonial Belanda, Ahmad Dahlan, dibantu para murid utamanya, mengajukan secara resmi pendirian sebuah organisasi sosial keagamaan berbasis Islam di Yogyakarta. Setelah melalui proses yang cukup panjang, dan tentu saja proses "seleksi" dan "validasi" yang ketat dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan, akhirnya Muhammadiyah resmi berdiri. Saya yakin, Pemerintah Kolonial Belanda paham bahwa Dahlan pernah aktif dalam organisasi Boedi Oetomo, sebuah organisasi pergerakan kepemudaan yang dipimpin oleh Dr. Soetomo dan dekat dengan Syarikat Islam, sebuah organisasi politik di bawah binaan H. O. S. Tjokro Aminoto. Saya tidak tahu, apakah sudah terbayangkan sebelumnya oleh Pemerintah Kolonial bahwa Persyarikatan Muhammadiyah yang waktu itu hanya sebuah gerakan kecil didirikan oleh seorang anak muda dan didukung oleh beberapa remaja yang memiliki hubungan kekerabatan di Kampung Kauman, akan menjadi besar seperti sekarang ini. Yang jelas, izin diberikan dan Muhammadiyah resmi berdiri pada 18 November 1912 di Yogyakarta dengan ruang lingkup wilayah yang terbatas waktu itu.

Ahmad Dahlan sendiri sebagai pribadi adalah sosok yang dikenal luas pergaulan dan pengalamannya, selain tentunya sebagai seorang pembelajar. Hubungan baik yang dibangunnya dengan para aktivis kepemudaan dan politik pada waktu sebelum dan awal berdirinya Muhammadiyah, seperti dengan para aktivis Boedi Oetomo dan Syarikat Islam, menunjukkan bahwa ia memiliki sikap yang terbuka dan mampu

berkomunikasi secara politik dengan baik dengan organisasi lain. Tercatat bahwa meskipun belakangan Muhammadiyah terus berkembang menjadi organsiasi yang fokus dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan, tetapi hubungan Ahmad Dahlan dengan organisasi lain memungkinkan Muhammadiyah menjadi "tuan rumah" bagi pertemuan-pertemuan Boedi Oetomo maupun Syarikat. Uniknya, Ahmad Dahlan tidak tertarik dalam "diskursus politik" gaya Syarikat Islam, dan salah satu muridnyalah yang kemudian sempat terlibat lebih jauh dalam Syarikat Islam, seperti Haji Fakhruddin. Setidaknya tahun-tahun diantara 1912-1918 diskusi di kalangan pemuda dan aktivis pemuda di Jawa pada waktu adalah mulai dari kemajuan (*progress*), demokrasi (*democracy*), kesetaraan (*equity*) dan solidaritas (*solidarity*) atau dikenal dengan istilah "sama rata sama rasa". Gambaran radikalisasi diskursus di kalangan pemuda tanah air, khususnya di Jawa pada waktu itu tergambar apik dalam karya Takashi Shiraishi (1990) berjudul *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java 1912-1926*. Konteks dan makna radikalisme dalam buku Takashi Shiraishi tentunya lebih kepada diskursus politik, bukan keagamaan seperti yang berkembang saat ini.

Uniknya, Dahlan mengambil jalan lain dari generasinya. Ia memilih fokus dalam arena perjuangan lain, menjadikan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam. Tentu ia menyadari, sebagaimana pengalaman yang dimilikinya, bahwa Muhammadiyah akan senantiasi berada dalam—atau dikelilingi oleh—ruang politik yang kompleks. Jalan yang dipilih Ahmad Dahlan tidaklah populer. Ia memilih mendirikan sekolah dan mulai melalukan kegiatan sosial kemanusiaan. Semangat inilah yang kemudian ditangkap oleh penerusnya dan kader-kader Muhammadiyah selanjutnya. Apalagi beberapa generasi pengganti Ahmad Dahlan dalam memimpin Muhammadiyah generasi awal adalah kyai, seperti Kyai Hisyam dan Kyai Mas Mansur, sehingga karakter Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang fokus dalam kegiatan sosial dan pendidikan terus menguat.

Tentu, sebagai organisasi masyarakat sipil Muhammadiyah tidak akan lepas dari hiruk pikuk politik dan pasang surut ekonomi. Apalagi, aura perjuangan masa pra-kemerdekaan begitu kuat yang mau tidak mau membangkitkan kesadaran politik pimpinan dan warga Muhammadiyah, khususnya tentang pentingnya kemerdekaan. Belum lagi, secara kultural dan sosial keagamaan, Muhammadiyah yang dulu tampil beda dibanding dengan organsiasi di zamannya karena gagasan modernisasi dan reformasi keagamaan yang diusungnya, juga tidak lepas dari ketegangan dialektis dalam mendefnisikan dan mengekspresikan Islam di Indonesia.

Muhammadiyah punya beban yang cukup berat dalam menjalani sejarah perjalanannya, dan juga sangat dinamis. Apalagi karakter Muhammadiyah sebagai gerakan modernis yang bercorak puritan atau "pemurnian agama" semakin mengental setelah Ahmad Dahlan meninggal. Oleh karena itu, menarik untuk mencermati konsep inklusivitas Muhammadiyah dalam konteks kebangsaan di Indonesia dan bagaimana inklusivitas itu diterjemahkan secara dinamis dan kadang cukup pelik dalam masyarakat Indonesia yang heterogen. Riak-riak dinamis terjadi dalam persentuhan Muhammadiyah dengan kelompok keagamaan lain. Bagaimanapun, Muhammadiyah adalah salah satu bagian dari skema besar Islamisasi di Jawa pada khususnya. Sejarahwan Merle C. Ricklefs dalam bukunya *Islamisation and Its Opponents in Java* menggambarkan bagaimana gerakan-gerakan Islam di Indonesia mengalami fragmentasi sepanjang sejarah, baik secara politik maupun kultural. Hal yang sama dialami oleh persyarikatan Muhammadiyah.

Karya Alwi Shihab memberikan kontribusi tersendiri dalam memahami karakteristik gerakan persyarikatan Muhammadiyah dan hubungannya dengan Kristen di Indonesia. Disertasinya yang ditulis di Temple University dengan judul *The Muhammadiyah Movement and Its Controversy with Christian Mission in Indonesia* menunjukkan bahwa kendati Muhammadiyah bersikap resisten terhadap gerakan misionaris Kristen, namun tindakan yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan dan para muridnya dalam membendung arus Kristenisasi di awal abad keduapuluh bukanlah dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Sebaliknya, Muhammadiyah mempelajari pola pergerakan yang dilakukan organisasi Kristen di Indonesia dan mengadopsi model pergerakan yang cocok untuk dikembangkan dalam Muhammadiyah, khususnya di bidang pendidikan dan sosial. Dengan demikian, gerakan Kristen dianggap sebagai rival dan "*sparring partner*" dalam meningkatkan mutu dan pola pergerakan persyarikatan Muhammadiyah maupun untuk memperkuat komitmen kader-kader organisasinya.

Inklusivisme dan Politik kebangsaan

Buku ini hadir untuk memotret kiprah dan partisipasi Muhammadiyah dalam membangun politik kebangsaan di Indonesia berdasarkan berbagai pengalaman, penghayatan dan pengamatan dari para aktivis Muhammadiyah yang bergerak di berbagai bidang. Inklusivisme yang dimaksud dalam tulisan ini ada sikap keterbukaan terhadap perbedaan

dan kemampuan merespon keragaman yang ada di sekitarnya dengan cara menghormati kelompok-kelompok yang berbeda. Dalam konteks tertentu, sikap inklusif diekspresikan dengan kemampuan memberikan manfaatkan kepada banyak kalangan di luar dirinya (*the others*) baik dalam ranah sosial, ekonomi maupun politik. Karena itu, pandangan-pandangan politik Muhammadiyah maupun aksi-aksi sosialnya dirumuskan dan dilakukan bukan hanya untuk memperjuangkan kepentingan internal organsiasi, melainkan juga untuk memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat terlepas dari perbedaan pandangan politik, latar belakang budaya, ras, dan agama. Tanpa kehilangan esensi, jati diri dan nilai-nilai keislaman yang dipegangnya, Muhammadiyah mampu berinteraksi dan bekerjasama dengan banyak pihak. Dengan kata lain, sikap inklusif adalah ekpresi dari sebuah tindakan yang adil tanpa diskriminasi dan memberikan toleransi terhadap adanya perbedaan dengan menjunjung kemanusiaan universal.

Salah satu dokumen paling penting dari sikap dan pandangan politik inklusif Muhammadiyah tentang masalah kebangsaan adalah tentang *Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah* yang disahkan pada Muktamar ke-47 di Makasar tahun 2015. Dokumen ini merupakan kontinum atau kelanjutan dari perdebatan bertahun-tahun dalam tubuh persyarikatan tentang sikap Muhammadiyah terhadap Pancasila, khususnya setelah pemerintah Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai Asas Tunggal. Sama halnya dengan banyak peristiwa politik yang terjadi pasca reformasi, di mana pandangan warga dan aktivis Muhammadiyah terbelah dalam urusan Pemilihan Presiden, warga dan aktivis Muhammadiyah pun sempat terbelah ketika menyikapi isu Asas Tunggal Pancasila. Padahal sudah bertahun-tahun warga memahami bahwa beberapa perumus Piagam Jakarta adalah tokoh Muhammadiyah, yaitu Ki Bagus Hadikusumo dan Mr. Kasman Singodimedjo. Dengan demikian, kehadiran dokumen ini mempertegas dan memperjelas pandangan kebangsaan Muhammadiyah. Dalam salah satu bagian dari dokumen ini dijelaskan bahwa Muhammadiyah berpegang kepada bentuk keislaman "yang secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan dan kebudayaan. Islam yang menyebarkan pesan damai, toleran dan sikap tengahan sekaligus berkemajuan di segela bidang kehidupan sehingga mampu mengembangkan tatanan peradaban yang utama dan berkeunggulan baik di ranah nasional maupun internasional" (2015: 9).

Tentu ada banyak aspek yang dapat dieksplorasi dari sikap inklusif dan pandangan politik kebangsaan Muhammadiyah sebagai bentuk ekspresi

Islam yang berkemajuan. Dalam buku ini terdapat beberapa sub tema yang menjadi perhatian para penulis, yaitu masalah keamanan dan perdamaian, pembangunan kesejahteraan, serta politik kebangsaan. Pertama, bagi Muhammadiyah, tema keamanan dan perdamaian bukanlah semata-mata bersifat naratif, melainkan sebuah agenda aksi yang sudah dan tengah dijalankan bertahun-tahun. Muhammadiyah tidak hanya menempatkan diri sebagai organisasi yang berpandangan moderat, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam berbagai arena perdamaian di lingkup regional maupun internasional. Kedua, begitu pula dengan pembangunan kesejahateraan, aksi, dan narasi Muhammadiyah tidak hanya dalam konteks domestik tetapi juga internasional. Salah satu yang menjadi garapan Muhammadiyah saat ini adalah mereduksi kesenjangan wilayah yang terjadi di Indonesia dan penguatan gerakan berorientasi kesejahteraan di daerah-derah terpencil.

Ketiga, meski tidak terjun dalam politik praktis, Muhammadiyah senantisa mendorong pengambil keputusan untuk dapat membuat kebijakan-kebijakan strategis yang memberikan dampak bagi sebesar-besarnya kepantingan masyarakat dan bangsa, baik melalui dialog ataupun menawarkan gagasan-gagasan. Karena itulah, dalam buku ini potret inklusivisme Muhammadiyah dan dinamikanya tergambar dengan cukup bervariatif, dan saya yakin, buku ini akan menjadi catatan penting bagi persyarikatan Muhammadiyah dalam merumuskan agenda-agenda besar di masa akan datang.

BAB 1

INKLUSIVITAS GERAKAN POLITIK MUHAMMADIYAH

NARASI KEBAJIKAN MUHAMMADIYAH DALAM PERSPEKTIF KEBANGSAAN

Gunawan Budiyanto
Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

KHA Dahlan adalah sosok Kyai kampung yang mampu berpikir melesat jauh melampuai jamannya. Perkumpulan Muhammadiyah yang kemudian berkembang menjadi salah satu organisasi dakwah paling terkemuka di muka bumi merupakan bukti konkrit bahwa karya nyatanya dilandasi oleh hasil pemikiran jenius yang tidak dimiliki tokoh pembaharu lain. Dimulai dengan upaya untuk memurnikan ajaran Islam yang bercampur aduk dengan prilaku tradisi, KHA Dahlan berhasil membangun jiwa sosial kepada murid-murid dan pengikutnya. Surat Ali-Imron 104 yang memuat tiga komponen utama yaitu prilaku kebajikan, amar ma'ruf dan nahi munkar secara cerdas diterjemahkan dan dihubungkan dengan surat Al-Ashr (keutamaan beriman, beramal shaleh, saling mengingatkan dan bersifat sabar dalam menjalaninya) dalam setiap pengajian pengajian yang diadakannya, bahkan pengajian ini (pengajian Wal Asri di Kauman) sampai sekarang masih berjalan. Dialog akademis terjadi pada saat salah seorang muridnya merasa jenuh dan bosan atas kajian Al-Ashr ini, maka KHA Dahlan menjawabnya dengan cerdas, "sudahkah kalian laksanakan ajaran ayat ini?". Sebuah jawaban yang menghentak sanubari murid-murid untuk berbuat nyata. Kyai kauman ini telah mengajarkan kepada murid-murid nilai kebajikan antar sesama manusia.

Gebrakan intelektual kembali berlanjut pada pelajaran kedua yaitu surat Al-Maun yang kemudian menjadi dasar filantropi ajaran KHA Dahlan. Penekanan terhadap kelompok umat yang mendustakan agama jika mereka tidak mau memberikan santunan kepada kaum fakir dan anak yatim. Keberpihakan kepada kaum tidak mampu ini sama sekali tidak pernah dihubungkan dengan kelompok pemeluk agama tertentu. Diskursus kaum tidak mampu adalah golongan yang tidak memiliki akses kemajuan

dan masa depan dan hal ini menyangkut semua anak manusia, Kyai kampung ini kembali mengajarkan hal baru kepada murid-muridnya apa yang dinamakan dengan keterbukaan (inklusivitas), dan bahkan pelajaran tersebut ditutup dengan peringatan Kyai terhadap orang-orang yang lalai dalam shalatnya, yaitu melaksanakan ibadah tanpa mau berpihak kepada prilaku kebajikan dan nilai-nilai kemanusiaan. Konsep beragama yang mecerahkan telah dapat dirasakan bukan saja bagi umat Islam tetapi juga umat agama lain (70% mahasiswa Universitas Muhammadiyah di Kupang dan Sorong berasal dari umat agama lain).

Ali-Imran 104, Al-Ashr dan Al-Maun adalah tonggak utama gerakan KHA Dahlan, lewat artikulasi sosial yang tepat dan cerdas, narasi kebajikan ajarannya menjadi meteor gerakan yang kemudian memperkembangkan Muhammadiyah ke seantero negeri. Dalam waktu singkat Muhammadiyah berkembang tanpa harus memunculkan kontraksi sosial, karena jiwa gerakan yang memang dibutuhkan masyarakat dan lebih dikenal dengan organisasi dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan kemjauan amal usaha kesehatan dan pendidikan sebagai 2(dua) pilar utama dakwah Muhammadiyah, dan dengan Tanfidz Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar, telah dicanangkan pilar ke 3 dakwah Muhammadiyah yaitu pilar ekonomi.

Narasi kebajikan model KHA Dahlan telah memberikan sesuatu yang terbaik buat bangsa ini, bahkan sebelum Republik Indonesia lahir. Dalam perspektif kebangsaan, Muhammadiyah telah melahirkan para tokoh nasional seperti Ki Bagus Hadikusuma, Kasman Singodimejo dan Abdul Kahar Muzakir yang terlibat dalam perumusan dasar negara dan beberapa Pahlawan Nasional lainnya (diantaranya KHA Dahlan, Nyai Dahlan, Haji Fakhruddin, Ki Bagus Hadikusuma, Kasman Singodimejo). Kebanyakan tokoh – tokoh tersebut bukan saja pemikir tetapi pelaku kebajikan di tengah masyarakat. Celupan Al-Maun dijadikan sebagai fondasi yang kuat untuk meningkatkan kinerja pembedayaan umat baik melalui pesantren, panti asuhan, balai latihan kerja dan banyak aktifitas dalam masyarakat, terutama pada saat timbulnya kerentanan sosial.

Dalam memenuhi hajad hidupnya, manusia telah sampai pada batas ambang yang dapat menurunkan kualitas lingkungan. Pemanfaatan energi dalam struktur rantai hidrokarbon telah memproduksi miliaran senyawa karbon-monoksida yang dapat mengurangi oksigen dan merusak kualitas atmosfer. Pemanasan global (global warming) sebagai akibat selimut CO_2 telah menyebabkan perubahan iklim global. Dunia mengalami ancaman

penyediaan pangan, karena perubahan iklim dikhawatirkan diikuti oleh bergeser atau berkurangnya zona-zona penghasil pangan sebagai akibat gagalnya tanaman beradaptasi dengan corak iklim baru. Kompleksitas kerawanan pangan dan peningkatan kapasitas petani juga menjadi garapan utama Muhammadiyah lewat Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM). Pembentukan dan pendampingan komunitas petani terus digalakkan dalam rangka menciptakan produksi pangan yang sehat dan berkualitas. MPM juga telah berhasil menciptakan rantai produksi dan pasar yang dapat menjamin keterserapan produksi pangan petani binaan.

Di sisi lain Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan tropis terluas, tetapi di sisi lain Indonesia juga menduduki peringkat pertama negara-negara tercepat mengalami kehilangan luasan hutannya. Ketidaktegasan dalam penerapan hukum, konspirasi penyalahgunaan wewenang, pelacuran jabatan dan penebangan liar mengakibatkan percepatan kerusakan hutan tropis Indonesia yang signifikan menyumbang proses perubahan iklim, bencana banjir dan longsor. Kerusakan ekosistem akibat penurunan fungsi hutan menyebabkan timbulnya proses pemiskinan rakyat. Sejak terjadinya bencana tsunami Aceh tahun 2004, gempa Jogja 2006, gempa Tasik-Garut serta Padang 2009, erupsi Merapi 2010, gempa NTB 2018 dan tsunami Palu 2018 kita disadarkan bahwa Indonesia merupakan negara rawan bencana. Kedudukan Indonesia yang berada di kawasan pertemuan dua lempeng dunia yaitu Indoaustralia dan Eurasia, seolah-olah berada di bawah ancaman pelepasan energi pertemuan ke dua lempeng bumi tersebut. Rentetan bencana tersebut ternyata melanda wilayah yang selama ini dikenal sebagai basis warga Muhammadiyah.

Kerentanan sosial sebagian besar korban bencana telah menjadi pemikiran Muhammadiyah dan akan terus berjalan tanpa harus membedakan suku dan agama. Dengan demikian Muhammadiyah selalu berusaha kembali ke akar rumput dan menjadi garda terdepan elemen bangsa dalam memberikan santunan kebajikan sebagaimana gerakan KHA Dahlan. Sejak tsunami Aceh 2004 telah dibentuk Posko Kemanusiaan Muhammadiyah yang waktu itu bertempat di Universitas Muhammadiyah Banda Aceh. Bencana gempa Jogja 2006 telah melahirkan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) yang sempat berkiprah di Yogyakarta, Tasikmalaya, Padang, Banjarnegara, NTB, Palu dan Bencana tsunami Selat Sunda. Upaya-upaya tersebut dapat berjalan baik, tetapi hal ini lebih merupakan respon terhadap datangnya bencana yang biasanya melemah pada saat masa tanggap darurat telah selesai. Pengalaman penanganan

bencana dapat menjadi pelajaran dan membuahkan program yang dapat menjadi tanfidz keputusan Muktamar.

Program tersebut tidak sebatas menangani terjadinya bencana saja, tetapi lebih dititikberatkan pada program pengurangan risiko bencana (Disaster Risk Reduction), terutama ditujukan pada kantong-kantong warga Muhammadiyah yang ternyata berdampingan dengan potensi bencana alam seperti gempa, tsunami, longsor, gunung berapi dan bahkan bencana konflik sosial. Pengalaman penanganan bencana Gempa Jogja telah memberikan pelajaran cukup mahal, Muhammadiyah berserta ortom-ortom dan lembaga pendidikannya secara bahu membahu telah berhasil memberikan kinerja pelayanan pemulihan yang baik. Program penanganan gempa Jogja akhirnya dijadikan model penanganan bencana di beberapa daerah. Keberhasilan Muhammadiyah dalam hal ini lebih banyak terbantu oleh adanya ikatan jamaah yang masih cukup terbina dan termonitor aktivitasnya. Penanganan bencana alam berbasis masyarakat atau komunitas (Community Based Disaster Management) lebih memberikan peluang jika di tempat tersebut jamaah Muhammadiyah atau paling tidak pimpinan rantingnya dapat memainkan peran tokoh informal dalam masyarakatnya. Sedangkan program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (Community Based Disaster Risk Reduction) telah dapat diupayakan Muhammadiyah akan menjadi sarana paling efektif dalam melancarkan dakwah jamaah kawasan rawan bencana.

Berdirinya Lembaga Amal Zakat dan Infaq Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) telah menjadi suntikan semangat baru. Amal kebajikan Muhammadiyah lebih dapat memiliki peningkatan kapasitas karena dukungan yang selalu diberikan Lazismu. Amal kebajikan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat telah dapat menembus kawasan 3 T (tertinggal, terdepan, terluar). Klinik apung Said Tuhuleley yang beroperasi di perairan Ambon merupakan salah satu kinerja sosial komponen-komponen kebajikan Muhammadiyah. Dengan motto “berbuat untuk negeri”, Lazismu telah berhasil memperkuat narasi kebajikan Muhammadiyah dalam berbuat untuk bangsa ini.

GOVERNANCE WITH PROGRESS: WARISAN MUHAMMADIYAH UNTUK BUDAYA POLITIK BANGSA

Ahmad-Norma Permata
Ketua LPCR PP Muhammadiyah Periode 2010-2020,
Dosen Sosiologi Politik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Muhammadiyah tidak terpisahkan dari narasi Indonesia Modern. Ia menjadi salah satu motor gerakan nasionalisme dan lahirnya negara bangsa Indonesia. Muhammadiyah memainkan peran penting pasca kemerdekaan: di pusat maupun daerah, secara personal, institusional maupun kultural. Pada poin terakhir inilah Muhammadiyah memiliki warisan untuk Indonesia yaitu budaya tata kelola (*corporate culture*) yang menekankan pada integritas, kredibilitas, aktualitas, yang secara sederhana dapat dinamakan tata kelola berkemajuan (*governance with progress*).

Budaya politik merupakan cara masyarakat mengelola sistem organisasi, terutama dalam kaitan dengan relasi kuasa, akses, dan distribusi sumber daya, serta suksesi kekuasaan. Relasi kuasa adalah bagaimana masyarakat menempatkan hubungan antar anggotanya: hirarkis atau egaliter. Akses dan distribusi sumber daya artinya siapa saja yang berhak menikmati kekayaan kolektif: hanya kelompok tertentu atau semua orang; ataukah kelompok tertentu memiliki peluang lebih besar dibanding kelompok lain. Suksesi kekuasaan artinya siapa yang berhak menggantikan posisi sebagai pemimpin: semua orang, kelompok tertentu, atau dinasti tertentu.

Budaya politik yang berkembang di Indonesia dikenal sebagai sistem patrimonial, yaitu sistem yang didasarkan kepada kedekatan hubungan personal, baik yang sifatnya kekerabatan, kesukuan, persahabatan, atau golongan (ideologi/agama). Dalam sistem patrimonial kedekatan personal seseorang dengan pejabat atau penguasa lebih menentukan dalam meraih kedudukan, mengakses sumber daya maupun dalam meniti karir, dibanding dengan relasi-relasi administratif. Sedemikian parahnya dimensi

informal dalam sistem budaya politik di Indonesia, sampai-sampai istilah 'administratif' memiliki konotasi negatif yang berarti hampa atau tidak substantif.

Kondisi ini tidak terlalu mengherankan karena patrimonialisme memiliki akar sangat panjang dalam sejarah politik Indonesia. Sebagaimana dikatakan Mason Hoadley, meskipun Indonesia pernah mengalami pergantian berbagai jenis sistem pemerintahan: kerajaan, kolonialisme VOC, kolonialisme Belanda, fasisme Jepang, Orde Lama, Orde Baru, dan saat ini Orde Reformasi: namun sebenarnya budaya politik tidak pernah berubah. Birokrat di Indonesia tidak pernah mengabdi kepada tugas dan jabatannya, melainkan mengabdi kepada atasan.

Fenomena ini bahkan dianggap cukup unik sehingga secara internasional patrimonialisme Indonesia disebut sebagai '*Bapak-isme*'. hubungan atasan dan bawahan diibaratkan seperti hubungan orang tua dan anak. Di satu sisi orang tua wajib melindungi dan berhak mengendalikan, di sisi lain anak wajib saat ngomong juga berarti mendapatkan kecukupan. Terlihat baik pada level personal, namun sebenarnya sangat buruk pada level institusional karena akan melahirkan pola relasi yang partisan dan transaksional: atasan hanya akan memenuhi kebutuhan bawahan jika bawahan loyal kepada dirinya, sementara bawahan tidak akan bekerja jika tidak mendapatkan imbalan material.

Budaya patrimonialisme ini terbukti berdampak sangat buruk bagi kondisi bangsa Indonesia, terutama di sektor publik. Pertama dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah. Upaya reformasi birokrasi terlihat belum efektif karena di dunia nyata Indonesia, kedekatan personal dengan atasan lebih menentukan prestasi seseorang dibanding prestasi dan kinerja. Program peningkatan kesejahteraan juga mengalami kebuntuan karena tingginya angka korupsi serta problem teknis lain akibat rendahnya kinerja birokrasi. Lebih parah lagi, patrimonialisme merusak upaya membangun supremasi hukum, karena orang akan cenderung bangga menyelesaikan persoalan Lewat Pintu Belakang sebagai bukti bahwa ia memiliki relasi dengan kalangan pejabat.

Secara retrospektif, budaya patrimonial ini mengakibatkan daya saing Indonesia semakin merosot dibanding dengan negara-negara lain. Tahun 1960-an, kita sejajar dengan Korea Selatan, sekarang kita terlihat Tertinggal terlalu jauh. Tahun 1970-an, kita setara dengan Taiwan, sekarang ketinggalan kita juga sangat jauh. Tahun 1980, kita selevel dengan Malaysia, sekarang rasanya sulit untuk membandingkan dengan mereka. Tahun

2000-an, kita bersaing dengan Thailand, sekarang kita mulai belajar pada mereka. Tahun 2010, Vietnam masih mengejar kita, sekarang kita impor kebutuhan pokok dari mereka.

Jika situasi ini kita biarkan maka masa depan bangsa ini akan suram. Sebenarnya sudah banyak upaya dilakukan untuk mengubah atau memperbaiki budaya politik di Indonesia, meskipun sebagian besar berbasis isu: seperti demokrasi, masyarakat sipil, gender, pelestarian lingkungan, dan lain-lain. Namun upaya ini belum banyak membawa hasil karena pola yang dikembangkan cenderung bersifat *exogenous*, yaitu meniru contoh dari luar negeri yang dianggap sukses dan diterapkan di Indonesia; dan belum *endogenous*, atau mengembangkan model yang sudah mengakar dalam sejarah masyarakat Indonesia.

Dalam konteks inilah, Muhammadiyah memiliki prestasi dan *legacy* yang dapat ditularkan kepada bangsa Indonesia--yaitu budaya politik berkemajuan. Secara ringkas paling tidak ada tiga komponen. *Pertama,* integritas, yaitu keteguhan di dalam memegang nilai-nilai ideal yang diyakininya dalam kondisi apapun. Ada tiga poin yang selalu menjadi nilai ideal bagi Muhammadiyah: Keislaman, Kebangsaan, dan Kepedulian Sosial. Tiga nilai ini selalu dipegang teguh dan tidak pernah ditinggalkan, apapun yang terjadi pada kondisi internal organisasi maupun relasi eksternalnya dengan rezim yang berkuasa. Integritas ini dibangun melalui disiplin organisasi yang tinggi.

Kedua, kredibilitas, yaitu kesanggupan untuk mewujudkan apa yang dijanjikan atau diprogramkan. Dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan ketulusan yang disemai sejak dini menjadikan warga Muhammadiyah komunitas yang tangguh dan pilih tanding dalam menjalankan tugas dan menyelesaikan persoalan. Melalui tiga matra amal usaha--pendidikan, kesehatan, sosial--kinerja dan karya Muhammadiyah mengembangkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kepedulian sosial selalu meningkat, meskipun stabilitas politik dan ekonomi naik dan turun. Tidak heran jika Muhammadiyah diakui sebagai organisasi sosial Islam terkaya di seluruh dunia.

Ketiga, aktualitas, dimana para pimpinan dan aktivis Muhammadiyah tidak hanya sekadar menjalankan tugas yang diamanatkan melainkan selalu mencari cara paling efektif menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, sehingga program-program organisasi tetap aktual. Zaman penjajahan ketika masyarakat masih terbelakang dan penuh penderitaan, Muhammadiyah mengembangkan Majelis Pustaka dan PKO (Penolong

Kesengsaraan Oemoem). Di zaman pembangunan, Muhammadiyah mengembangkan sekolah, universitas, dan lembaga-lembaga kesehatan untuk membangun sumber daya manusia. Sekarang di saat sering terjadi bencana alam dan krisis kemanusiaan, Muhammadiyah kembali lagi eksis melalui Lembaga Penanggulangan Bencana (a.k.a. *Muhammadiyah Disaster Management Center*, MDMC) yang kinerjanya mendapatkan apresiasi dari banyak kalangan.

Sudah waktunya warga Muhammadiyah tidak hanya bekerja dengan baik sebagaimana biasa, melainkan juga mengajarkan cara kerja yang baik ini kepada komponen bangsa yang lain, terutama para pekerja di sektor publik, agar kita memiliki budaya politik yang lebih baik, yaitu budaya politik berkemajuan!

Daftar Pustaka

David Bourchier, 2015. *Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of Family State*, New York: Routledge.

Lucian Pye, 1965. *Political Culture And Political Development*, Princeton: Princeton University Press.

Mason Hoadley, 2006. *Public Administration: Indonesian Norms vs Western Forms*. Graha Ilmu, Yogyakarta, Indonesia.

Shmuel N. Eisenstadt, 1973. *Traditional Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism*. Beverly Hills, CA: Sage

POLITIK AMAL INKLUSIF MUHAMMADIYAH

Fauzan Anwar Sandiah
Mahasiswa Doktor Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pengurus PP IPM Periode 2014-2016

Eva Nurlaila
Mahasiswa Doktor Studi Islam UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

Sejarah kelahiran Muhammadiyah adalah penanda penting era baru gerakan keagamaan modernis di Asia Tenggara. Menyusul berbagai gelombang reformisme di Timur Tengah, KH. Ahmad Dahlan bersama muridnya mendirikan Muhammadiyah. Gerakan reformisme yang lahir pada 1912 di Yogyakarta ini telah berkembang sangat pesat dan menjadi satu-satunya yang hingga hari inimampu tersebar di seluruh Indonesia. Lembaga pendidikan dan pelayanan kesehatan Muhammadiyah bahkan hanya dapat ditandingi oleh negara. Jumlahnya meningkat drastis sejak tahun 1920an, dengan jumlah ribuan, Muhammadiyah tercatat sebagai gerakan sosial-keagamaan terbesar di dunia. Sejak tahun 2000an, Muhammadiyah telah menjadi wajah Islam moderat Indonesia, memperkenalkan Islam yang berorientasi filantropi dan edukasi.

Pengamat Islam di Asia Tenggara menganggap Muhammadiyah sebagai representasi penting gerakan keislaman yang berhasil melakukan proses Islamisasi sekaligus mewujud sebagai gerakan sipil dalam iklim politik demokrasi.Carool Kersten (2017) menganggap peran Muhammadiyah sangat penting dalam proses transisi bangsa Indonesia, tidak saja berperan memperkenalkan wacana Islam modernis tapi juga turut mengkonstruksi identitas nasional. Majalah *Suara Muhammadiyah*, medium publikasi organisasi ini pada tahun 1922 memperkenalkan penggunaan Bahasa Melayu kendati mayoritas pembacanya adalah orang-orang Jawa. Publikasi

cetak ini tercatat telah menggunakan nama Indonesia sebagai pengganti Hindia-Belanda pada tahun 1924, empat tahun lebih awal sebelum momen Nasionalisme dalam *Sumpah Pemuda.* Muhammadiyah berperan penting dalam mengaktifkan kesadaran politik elit Islam dari masa ke masa. Ki Bagus Hadikisumo Ketua Umum Muhammadiyah periode 1944-1953 merupakan tokoh kunci perumusan Pancasila. Tiga rezim politik Indonesia era Soekarno, Soeharto, hingga reformasi, Muhammadiyah tetap berperan penting meskipun berupaya dirimenjaga jarakdengan politik elektoral.

Robert Hefner (2000) menanggap Muhammadiyah sebagai modal sosial yang sangat penting bagi Indonesia untuk merebut kembali otoritas sipil atas politik represif negara. Sebagian besar pengamat mengakui kontribusi Muhammadiyah dalam menjembatani krisis sosial-politik. Baik pada masa-masa pergolakan politik awal abad XX, masa pendudukan Jepang, era demokrasi terpimpin, hingga ke era reformasi. Muhammadiyah sukses beradaptasi di bawah berbagai dinamika politik.

Apa yang menjadi kunci keberhasilan semacam ini terletak pada teologi dan etos gerakan Muhammadiyah. Sebagaimana dijelaskan oleh Hyung-Jun Kim (wawancara, 2019), Muhammadiyah secara struktural telah berhasil mereformasi sistem pengelolaan organisasi. Muhammadiyah sudah egaliter sejak awal. Begitu Kim menjelaskan. Muhammadiyah mengadopsi manajemen modern yang berhasil meredam pembentukan kekuasaan terpusat. Apalagi dalam pengelolaan Muhammadiyah di berbagai tingkatan, mulai dari masjid atau RT/RW hingga nasional yang sangat lentur. Pola meristokrasi suksesi kepemimpinan terlihat sangat jelas. Organisasi ini juga terbukti terus menerus mengadaptasi diri dengan perubahan platform sosial yang semakin egaliter dan meluas, dibuktikan dengan tumbuhnya pengakuan terhadap eksisten komunitas-komunitas non-struktural di Muhammadiyah. Karakter egaliter diakui oleh Kim sangat mencolok di Muhammadiyah dibandingkan dengan kelembagaan Islam lainnya. Muhammadiyah memang didinamisasi oleh kelompok muda yang tersebar di dalam struktur maupun di organisasi sayap seperti IPM, IMM, NA, dan Pemuda Muhammadiyah.Besarnya jumlah generasi muda di Muhammadiyah telah menjadi faktor lain mengapa gerakan ini sangat cepat merespon perubahan. Selain itu Muhammadiyah dihidupkan secara kultural oleh jejaring sosial yang sangat kuat. Penerimaan terhadap spirit Islam moderat Muhammadiyah ditunjukkan oleh besarnya partisipan gerakan ini. Kendati bukanbagian formal, partisipan yang terdiri dari kelas menengah muslim ini mengidentifikasi diri dengan wacana keagamaan Muhammadiyah.

Politik Amal Inklusif

Kisah sukses Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis dengan visi filantropi, pendidikan, dan kesehatan menampilkan amal inklusif yang besar. Sebagai contoh, lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah tidak saja ditujukan bagi kaum muslim tapi juga non-muslim. Setidaknya ada empat tempat lembaga pendidikan Muhammadiyah yang diakses oleh penganut agama Kristen. Lembaga pendidikan Muhammadiyah di Kupang (NTT), Yapen Waropen (Papua), Putussibau (Kalimantan Barat), dan Manado (Sulawesi Utara). Muhammadiyah juga punya sekolah bagi difabel (SLB), menjelaskan peran terhadap politik pendidikan yang inklusif. Sekolah-sekolah Muhammadiyah adalah potret praktik politik infklusif secara formal. Membuktikan bahwa bukan cuma akses pendidikan lintas agama dan suku yang dibuka tetapi juga pro-keragaman literasi yang mencakup kebutuhan-kebutuhan khusus. Tidak ada kebijakan apa pun yang membatasi keterlibatan Muhammadiyah terhadap hajat hidup orang banyak. Semua Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) didirikan murni sebagai praktik lembaga sosial yang terbuka untuk diakses semua orang. Tidak ada juga batasan yang ketat tentang definisi simpatisan Muhammadiyah. Hal ini memberi peluang secara formal bagi politik inklusif Muhammadiyah.

Sebetulnya politik inklusif Muhammadiyah sudah menghiasi perjalanan organisasi Islam modernis ini. Muhammadiyah memegang peran kunci dalam proses-proses politik inklusif di tingkat lokal hingga internasional. Ahmad Syafii Maarif, Ketua Muhammadiyah periode 2000-2005 dikenal luas dengan ide-ide pro-inklusif merupakan tokoh Islam moderat terkemuka yang aktif mengampanyekan perdamaian, pro-keragaman, dan multikulturalisme. Penerusnya, Din Syamsudin juga berhasil mengembangkan lembaga-lembaga baru di Muhammadiyah yang berorientasi pada politik inklusif Muhammadiyah seperti MDMC (*Muhammadiyah Disaster Management Center*) dan Majelis Lingkungan Hidup. Dua lembaga yang disebut ini merupakan formalisasi diskursus humanitarianisme di Muhammadiyah. Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS menjadi representasi yang tepat untuk menjelaskan bagaimana organisasi berupaya keras mengembangkan kajian sosial yang pro-inklusif. Di tingkat lokal ada banyak aktivis Muhammadiyah yang aktif mempelopori masyarakat pro-inklusif. Mereka terdiri atas pimpinan struktural Muhammadiyah hingga aktivis di organisasi otonom seperti IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), Nasyiatul 'Aisyiyah, dan Pemuda Muhammadiyah. Akademisi yang aktif di perguruan tinggi Muhammmadiyah juga turut serta dalam proses penting ini.

Era Baru Humanitarianisme

Dalam eksperimen terkini, sejak tahun 2004 Muhammadiyah mendirikan MDMC, dianggap sebagai babak baru inovasi kemanusiaan. MDMC merupakan lembaga bantuan yang menyediakan fasilitas penanganan, pengelolaan dan mitigasi kebencanaan.MDMC menampakkan dakwah ekologi ala Muhammadiyah yang memandang bencana alam sebagai peluang untuk mempromosikan kesadaran pro-alam (Baidhawy, 2015). Robin Bush (2015) mencatat bahwa dengan hadirnya MDMC, Muhammadiyah tidak saja membuktikan diri sebagai NGO Islam yang berpengaruh, tapi juga menyumbang diskursus politik kemanusiaan kancah global (lih, Brassard, Howitt, dan Giles, 2014). Sebagaimana dijelaskan oleh Bush, peranan Muhammadiyah sebagai mitra negara terlihat sangat menonjol dengan besarnya sumber daya yang dimiliki oleh organisasi ini. MDMC adalah fase terbaru inovasi politik kemanusiaan yang menunjukkan bahwa ajaran Islam dapat ditransformasikan untuk merefleksikan tantangan kehidupan manusia modern.

Jika sebelumnya banyak pengamat fokus pada lembaga pendidikan dan kesehatan sebagai ujung tombak amal inklusif ala Muhammadiyah, maka kemunculan lembaga seperti MDMC membuka momen baru keberpihakan gerakan ini terhadap problem kemanusiaan dan relasinya dengan problem negara berkembang memfasilitasi praktik mitigasi.Sebagai inovasi penting neo-filantropisme di Muhammadiyah, MDMC menjadi wujud yang berbeda dengan politik literasi melalui sekolah dan perguruan tinggi. MDMC melibatkan interpretasi baru atas praktik kemanusiaan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan Islam. Lembaga pendidikan selama ini menjadi tampilan dominan peran Muhammadiyah, dengan munculnya MDMC praktik sosial kian meluas dan mencakup kampanye pro-ekologis.

Catatan

Politik inklusif merupakan praktik-praktik sosial yang luas. Dalam konteks Muhammadiyah dengan lembaga pendidikan, filantropi, dan kesehatan, politik inklusif adalah arena konstruksi identitas Islam modernis. Pegiat-pegiat Muhammadiyah menyadari arti penting nilai historis gerakan Islam ini. Mereka mengaktifkan ajaran Islam sebagai praktik pelembagaan amal sosial. Etos seperti inilah yang sekian lama menjadi latar di balik persuasi Islam *kemadjoen* Muhammadiyah.Politik inklusif adalah praktik "pembantu kesengsaraan oemoem" (PKO) yang terus menerus disesuaikan dengan diskursus humanitarianisme. Sebetulnya ini adalah keterampilan

memfasilitasi ajaran Islam sebagai entitas keyakinan spesifik menjadi universal bagi kemanusiaan. Keberhasilan mentransformasikan ide dan ajaran Islam menjadi berdaya guna bagi keberlangsungan kehidupan adalah fondasi mendasar filosofi gerakan Muhammadiyah.

POLITIK BUAH MANGGIS MUHAMMADIYAH

Piet Hizbullah Khaidir
Sekretaris Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an dan Sains al-Ishlah (STIQSI) Lamongan, Mahasiswa Doktor Bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya

Sejak awal didirikan pada 1912, Muhammadiyah seperti sengaja memilih ruang gerakan social keagamaan sebagai pengejawantahan kiprahnya. Dalam peta politik kebangsaan, pilihan gerakan Muhammadiyah telah membawanya kepada model politik kebangsaan yang inklusif. Muhammadiyah memang pernah menjadi anggota istimewa Partai Masyumi, tetapi tidak membuat pimpinan dan anggotanya menomor-duakan organisasi modernis terbesar yang didirikan KH. Ahmad Dahlan ini. Khittah Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan social keagamaan tetap dipegang-teguh.

Prinsip teguh Muhammadiyah berpegang pada khittah ini menegaskan sekali lagi tentang politik kebangsaan inklusif Muhammadiyah. Politik kebangsaan inklusif di sini adalah tetap aktif dalam kancah politik dengan identitas social keagamaan, berkawan dengan siapapun dengan mengandalkan prinsip keagamaan Islam yaitu rasionalitas dan konfirmasi (tafakkur 'amali dan tabayyun), serta menebar manfaat kebangsaan yang hebat nan luas dalam ruang yang tidak *melulu* politik sebagai kontribusi Muhammadiyah bagi seluruh lapisan masyarakat terutama yang lemah baik secara social, ekonomi, dan juga pengetahuan.

Secara historis, politik kebangsaan yang inklusif ini dipraktekkan Muhammadiyah dari masa ke masa. Mulai dari kepemimpinan KH. Ahmad Dahlan hingga periode kepemimpinan Haedar Nashir saat ini, dengan model dan format yang berbeda-beda meski dengan landasan sikap nilai yang sama: menebar Islam yang rasional, jujur, penuh rahmat dan yang bisa dijadikan landasan kemajuan umatnya.Dalam kaitan ini, Abdul

Munir Mulkhan pernah mengatakan bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi yang cekatan dan pragmatis bertindak untuk menebarkan semangat pembaharuan Islam dalam tubuh umat Islam. Mengacu kepada beberapa poin tentang politik kebangsaan inklusif Muhammadiyah di atas mengingatkan penulis kepada sifat manggis. Mungkin tepat jika disebut dengan Politik buah manggis Muhammadiyah.

Kenapa Politik Buah Manggis?

Penulis suatu kali mengisi pengajian Ahad pagi di daerah Pantenan Gresik. Temanya juga tentang politik kebangsaan. Suguhannya di antara kue-kue, ada buah-buahan. Salah satunya manggis. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Pantenan bisik-bisik memberi informasi ke penulis tentang buah manggis ini: "Mas, manggis ini buah yang tidak pernah bohong. Jumlah kode berbentuk bunga di kuncup buah manggis menunjukkan jumlah isi buah putih yang ada di dalam buah manggis itu." Penulis yang belum tahu lalu mengambil buah manggis di meja, membukanya untuk membuktikan kaedah dari Ketua PCM Pantenan. Dan memang benar, manggis adalah buah yang tidak pernah bohong.

Dalam pikiran penulis, ketika mengurai tentang buah manggis dan seluruh nilai manfaatnya, sifat buah manggis ini mungkin mirip dengan sikap nilai politik kebangsaan Muhammadiyah yang inklusif. Selalu jujur terhadap realitas. Tidak terbiasa bertindak dengan hoaks. Apalagi untuk provokasi dalam rangka hanya mencari keuntungan politik. Sikap Muhammadiyah yang mandiri dalam melaksanakan seluruh program gerakan social keagamaannya juga menjadikannya sangat rasional dan terkadang pahit bagai obat. Tetapi sungguh, sikap-sikap itu adalah untuk rasionalitas sikap dan untuk mengerti secara langsung apa dan bagaimana orang lain berpikir dan bersikap, sehingga organisasi Islam tertua ini berpikir dapat menegaskan sikap jujurnya dengan data dan informasi yang komplit setelah memperolehnya dengan sikap rasional dan adil.

Dengan kata lain, politik buah manggis Muhammadiyah ini menegaskan pola dan strategi Muhammadiyah dalam menjalankan politik kebangsaan yang inklusif. Yaitu, pertama, menerapkan kejujuran dengan memperoleh data sebanyak mungkin dari sudut pandang dan pihak manapun. Kedua, menggunakan rasionalitas dan keadilan pikiran-sikap dalam mencari data dan informasi yang jujur itu. Di sini, dengan tetap memegang teguh khittah dan identitas keislaman, Muhammadiyah bias bersikap dan bekerjasama dengan siapapun yang terkait dengan persoalan yang harus disikapi.

Ketiga, lembut, tegas dan percaya diri dalam menyampaikan informasi yang diyakininya benar. Sikap ini tentu dalam konteks buah manggis adalah keyakinan bahwa pahitnya kulit buah manggis yang dirasakan oleh mereka yang terdampak langsung oleh pikiran dan sikap Muhammadiyah pasti akan menyehatkan dan menjadi daya kesembuhan.

Keep Distance dan Keep Closed

Pada periode KH. Ahmad Dahlan, untuk mendapatkan informasi secara langsung dari sumbernya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tidak segan dan sudah terbiasa mengambil resiko mengundang kelompok lain ke markas bahkan ketika kelompok itu berseberangan dengan Muhammadiyah. Penerjemahan pikiran dan sikap yang hampir sama, pada periode Ahmad Syafii Maarif dan M. Din Syamsuddin adalah politik kebangsaan inklusif dalam rangka menjaga jarak dan kedekatan yang sama dengan partai politik era Reformasi. Bahkan sikap tersebut ditunjukkan dengan cara yang sama terhadap Partai Amanat Nasional (PAN) yang didirikan oleh M. Amien Rais, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah sebelum Ahmad Syafii Maarif.

Adalah Maarif yang menandaskan perlunya menjaga jarak yang sama (keep distance) dengan seluruh partai politik, sedangkan Din Syamsuddin menegaskan pentingnya menjaga kedekatan yang sama (keep closed) dengan seluruh partai politik. Tujuan pola dan strategi politik kebangsaan ini adalah menegaskan gerakan politik inklusif Muhammadiyah, serta menjaga Muhammadiyah dari keterseretan arus politik kepartaian, sementara dasar khittahnya adalah gerakan social keagamaan. Apa yang dilakukan baik Maarif ataupun Din Syamsuddin adalah penegasan internal dan sekaligus eksternal. Kerangka pikir gerakannya adalah menjadi kekuatan mediasi dan moderasi di antara kekuatan-kekuatan yang ada (*mediating and moderating forces*).

Nalar Kritis Masyarakat Demokratis

Pada periode Haedar Nashir dengan tantangan yang lebih kompleks terkait revolusi 4.0, juga secara actual berada pada waktu Pemilu 2019, politik kebangsaan inklusifnya ditegaskan dengan pikiran dan sikap 'perlunya menjaga akal sehat', 'pentingnya merawat nalar kritis kebangsaan', dan 'Pentingnya Nalar literasi dan bahaya Nalar politik sumbu pendek',misalnya. Secara garis besar, nilai, pikiran dan sikap para pimpinan Muhammadiyah itu adalah menegaskan sikap politik kebangsaan yang

inklusif, yang bolehlah kita sebut sekali lagi sebagai politik buah manggis Muhammadiyah.

Masih dalam kerangka politik buah manggis, terutama terkait dengan khasiat penyembuhan kulitnya yang pahit, apa yang dilakukan oleh M. Amien Rais ketika menggunakan nalar kritis prinsip gerakan amar ma'ruf nahyi munkar, merupakan pola dan strategi politik kebangsaan inklusif Muhammadiyah juga. Dalam konteks keseimbangan politik yang selalu diharapkan inklusif, yang dilakukan Amien Rais merupakan upaya menegakkan kesejatian masyarakat demokratis. Kesejatian masyarakat demokratis kata Alfred Stepan dan Anders Uhlin bila memenuhi lima pilar demokratisasi, yaitu: (i) partai politik yang demokratis, (ii) masyarakat ekonomi yang berkeadilan, (iii) penegakan hukum, (iv) media massa yang berperan aktif dalam gerakan demokratisasi, serta (v) masyarakat sipil yang independen dan berani menyuarakan nalar kritis terhadap jalannya kekuasaan.

Gerakan Masyarakat Sipil Demokratis untuk Kemanusiaan

Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa politik buah manggis yang dilakukan Muhammadiyah merupakan gerakan masyarakat sipil yang demokratis dan untuk kemanusiaan. Karena Muhammadiyah sampai hari ini masih konsisten merawat nalar kritis yang rasional, independen, nir-kekerasan, bersahabat dengan siapapun, menebar manfaat kebangsaan secara inklusif. Dalam kaitan ini, program visioner Muhammadiyah dalam berkiprah memang tidak melulu politik. Tetapi, lebih dari itu, bahkan asal-muasalnya adalah gerakan social keagamaan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta menolong masyarakat pada umumnya.

Gerakan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan penolong kesengsaraan umum yang dilakukan Muhammadiyah juga sangat inklusif. Baik dari segi pikiran visionernya ataupun amaliah programatiknya. Misalnya, pendidikan Muhammadiyah diperuntukkan tidak hanya untuk orang kaya, suku tertentu ataupun agama tertentu. Lembaga pendidikan Muhammadiyah sangat terbuka. Begitupula rumah sakit Muhammadiyah dan lembaga penolong kesengsaraan umum Muhammadiyah tidak hanya menolong suku dan agama Islam saja. Menolong tidak dibatasi oleh sekat-sekat bawaan tersebut. Melainkan kemanusiaan.Dapat disimpulkan bahwa patutlah bila dikatakan politik buah manggis Muhammadiyah adalah gerakan masyarakat sipil demokratis yang bertujuan untuk Islam dan kemanusiaan. Yakni, menerjemahkan Islam secara terbuka, jujur,

independen, rasional, memihak kebenaran serta untuk kemanusiaan. Pendeknya, politik buah manggis Muhammadiyah dalam hal ini merupakan penerjemahan Islam berkemajuan yang rahmatal lil ‘alamin.

POLITIK DAKWAH DUPLIKASI ALA MUHAMMADIYAH MENGHADAPI ZENDING DAN MISI DI MASA KOLONIAL (1912-1931)

Ghifari Yuristiadhi
Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada

Muhammadiyah sejak lahir pada 1912 tidak memilih jalan-jalan kekerasan dalam berdakwah. Dalam perjalanan dakwah Muhammadiyah di masa Kolonial, ada episode menarik saat Muhammadiyah menerapkan apa yang disebut sebagai politik duplikasi.

Kedatangan orang-orang Eropa di Yogyakarta yang mengusahakan perkebunan disusul dengan kedatangan para penyebar agama sesuai yang diyakini oleh orang-orang Eropa tersebut yakni Protestan dengan gerakan *zending*-nya dan Katholik dengan gerakan *missie*-nya.[1] Banyak gereja yang dibangun tidak jauh dari perkebunan milik swasta Eropa tersebut, antara lain Pugeran dan Bambanglipuro. Selain gereja yang menjadi tempat ibadah, *zending* dan *missie* juga membangun sekolah dan rumah sakit sebagai sarana pelayanan dan kedermawanan mereka.[2]

Aktivitas pelayanan melalui pendidikan mulai dibangun *zending* seiring digulirkannya Politik Etis yang digulirkan pemerintah kolonial Belanda akibat mulai menurunnya kesejahtaraan masyarakat bumiputera di akhir abad XIX. Jika pemerintah kolonial membangun sekolah-sekolah netral, maka *zending* mulai membangun sekolah-sekolah *zending*. Di Yogyakarta pada 1920an, *zending* telah memiliki sekolah di Gondolayu, Bintaran,

1 *Missie* hadir pertama kali di Hindia Belanda pada 1914 di Muntilan dan berkembang ke daerah-daerah sekitarnya. Sedangkan *zending* lebih dulu datang dan beraktivitas di Hindia Belanda khususnya Yogyakarta (Steenbrink, 2006: 375) dan Haryono (2009).

2 Tercatat pada 1899, *zending* telah membangun *ziekenhuis* di Yogyakarta (www.bethesda.or.id).

Gondokusuman, *Bedogweg*, Lempuyangan dan Ngupasan (Surjomiharjo, 2008: 82-83). Begitu juga *missie* yang kemudian membangun sekolah di *Kidullodjie* dan Gondomanan.

Zending mengawali gerakan penyebaran agama di Yogyakarta dengan mengembangkan bidang pendidikan dan kesehatan. Pada kurun 1920an, *zending* telah memiliki beberapa sekolah Kristen, antara lain ELS "Filial" MULO di Gondolayu, Bintaran Tengah dan Petronellaweg; *Meisjescholen* di Gondokusuman dan Bedogweg, HCS di Lempuyangan dan Ngupasan, Sekolah Schakel dan HIS di Gondokusuman dan juga *Hooge Hollandsch Indlandsch Onderwijs* (sekolah pendidikan untuk pembantu penyebaran injil bagi bumipuera dan Tionghoa di Klitren Lor (Surjomiharjo, 2008: 82-83). Selain sekolah *zending* juga memiliki Balai Pertemuan Kristen di Gondokusuman 41 dan *Zendingclubhuis* di Kaliurang.

Missie hadir menyusul *zending* yang terlebih dahulu menyebarkan agamanya di Yogyakarta. *Missie* juga mengembangkan pelayanan pendidikan dan kesehatan meski lebih mengawali gerakan dari bidang pendidikan. Strategi *missie* di Hindia-Belanda menurut Pater Lv Rijckevorsel sebagaimana dikutip Surjomiharjo dimulai dari sekolah baru mendatangkan pastor (Surjomiharjo, 2008: 85). Sekolah *missie* pada 1923 telah memiliki gedung bertingkat dua, dengan 18 ruang kelas, 14 ruang untuk HIS dan empat ruang untuk MULO. Sekolah-sekolah *missie* pada akhir 1924 berpusat di *kampemenstraat(kidullodji)*, mulai dari *Frobelschool* sampai MULO (tujuh macam sekolah) yang melibatkan 25 guru Eropa dan 11 guru bumiputera. Muridnya berjumlah 408 murid Eropa dan 808 murid bumiputera. Sedangkan sekolah Schakel Kumendaman, Wirobrajan dan Gowongan memiliki 22 guru bumiputera dan 700 murid (Surjomiharjo, 2008: 85-86).

Respon Muhammadiyah dan Lainnya

Aktivitas pelayanan dari *zending* serta *missie* ini yang kemudian menginspirasi bumiputera muslim, yang mulai tumbuh kesadaran untuk mengorganisir gerak dan aktivitasnya melalui organisasi, melakukan hal yang sama. Latar belakang aktivitas pelayanan *zending* dan *missie* yang berlandaskan agama juga direspon oleh organisasi-organisasi Islam yang berkembang cukup dinamis di Yogyakarta ketika itu dengan aktivitas yang sama, yakni pelayanan berbasis kedermawanan. Selain Serikat Islam (kemudian berubah menjadi Partai Serikat Islam) dan Muhammadiyah, organisasi Islam lain yang berkembang ketika itu adalah Takwimuddin, Sumara Allah dan Ikhwanul Muslimin.

Organisasi-organisasi Islam tersebut juga membuat pelayanan-pelayanan kesehatan dan pendidikan serupa dengan *zending* dan *missie*, meskipun belum semua terlembagakan secara formal. Partai Serikat Islam dan *Hoofdbestuur* Muhammadiyah misalnya, pada 1926 bersinergi membangun klinik dan poliklinik di *Ngabeanstraat* yang sebelumnya sudah dirintis oleh *Hoofdbestuur* Muhammadiyah bagian PKO pada 1923 (*Soerabaijasch Handelsblad*, 8 Oktober 1931). Selain klinik dan poklinliniek, Muhammadiyah juga melembagakan secara formal sekolah-sekolahnya menjadi HIS dan *Kweekschool*, meskipun sebagian masih sebatas *Desaschool* ataupun Sekolah *Ongko Loro.*[3] Sedangkan organisasi-organisasi Islam lainnya skalanya lebih kecil dan belum memformalkan lembaga pendidikannya.

Pelayanan-pelayanan yang coba direspon oleh organisasi-organisasi Islam di Yogyakarta yang berisikan orang-orang yang terpelajar dan mempunyai pemahaman agama yang cukup baik, menghadirkan transformasi model kedermawanan yang ada ketika itu. Jika sebelumnya bumiputera muslim setiap setahun sekali mengumpulkan zakat yang ternyata kurang optimal karena kekurangprofresionalan struktur Kawedanan Pengulon dalam pengelolaannya hingga kemudian ada perbaikan manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat pada 1914 (Nakamura, 1983: 112), model kedermawanan berkembang menjadi bermacam derma dengan beragam tujuan. Hingga kemudian muncul wakaf seiring dimungkinkannya penyerahan hak milik tanah karena reorganisaasi tanah yang diberlakukan di Yogyakarta sejak 1911 hingga 1925 (Setiawati, 2011: 113).

Dari perspektif perkembangan pemikiran, pertumbuhan kuantitas kedermawanan Islam di Yogyakarta pada 1920-an-1930-an terjadi karena menguatnya kesadaran bumiputera muslim Yogyakarta untuk menyalakan fungsi sosial agama yang meredup. Menguatnya posisi kelas menengah di perkotaan Yogyakarta terutama dalam bidang ekonomi memungkinkan bagi mereka untuk mengeluarkan sebagian surplus ekonomi mereka untuk kegiatan keagamaan melalui kedermawanan. Kelas menengah ini merupakan "borjuis pinggiran" lain yang memegang peran ekonomi signifikan di perkotaan Jawa (Yogyakarta, Solo, Kudus, dll) yang mengembangkan ekonomi *non-farm* seiring dikuasainya lahan-lahan

3 Sebelumnya Muhammadiyah telah membuat sekolah *Madrasah Ibtidaiyyah Diniyah Islamiyah* (untuk tingkat dasar) pada 1912 dan *Qismul Arqa* (untuk tingkat lanjut) pada 1918 (Muarif, 2012: 57).

pertanian oleh swasta Eropa.[4] Kelas menengah tersebut tak lain adalah para wirausahawan yang punya kekuatan ekonomi sekaligus kesadaran religius yang didapatkan dari pendidikan yang mereka enyam. Dalam strata sosial masyarakat, golongan ini menurut Kuntowijoyo mulai mampu menandingi posisi kaum bangsawan yang mulai kehabisan modal ekonomi akibat tanah-tanah mereka habis disewakan kepada pengusaha swasta Eropa.[5]

Tidak bisa dipungkiri, karakter kedermawanan yang dikembangkan oleh Muhammadiyah pada kurun 1920an hingga menjelang 1930-an terkesan bersifat reaktif. Muhammadiyah tergerak untuk giat melakukan banyak kegiatan filantropi yang dikembangkan dari kedermawanan dalam rangka merespon aktivitas *zending* dan *missie* di Yogyakarta yang terus bergeliat. Menurut catatan Steenbrink, Pater van Lith mendapatkan izin pertama kali untuk membuka pos misi di Muntilan sebagai misi permanen pertama di jantung Pulau Jawa pada 21 Oktober 1897 (Steenbrink, 2006: 375; Haryono, 2009). Artinya seiring dengan berkembangnya perkebunan swasta di Yogyakarta dan sebelum Politik Etis diambil sebagai kebijakan pemerintah kolonial Belanda, masyarakat Yogyakarta telah bersinggungan dengan pelayanan-pelayanan *zending* dan *missie*.

De Indische Courant tertanggal 16 Juni 1926 memberitakan bahwa perwakilan *zending*, *missie* dan Muhammadiyah diberi kesempatan untuk berbicara pada saat penyambutan kedatangan J.E. Jasper sebagai residen Yogyakarta yang baru. Dalam kesempatan itu *zending* menyampaikan permohonan dukungan dalam kerja-kerja pelayanan yang mereka lakukan di Yogyakarta. Begitu juga perwakilan dari *missie* yang berharap ada kerjasama yang terjalin dalam rangka mengembangkan otoritas sipil dan kebahagiaan penduduk Yogyakarta. Sedangkan Muhammadiyah menjabarkan aktivisme pelayanan umum yang telah mereka lakukan selama ini yang mencakup pada empat hal: *armenhuis*, *poliklinik*, *weeshuis* dan *scholen* (*De Indische*

---

4 Terminologi "borjuis pinggiran" dikutip dari Farchan Bulkin yang menyebut para pengusaha swasta Eropa merupakan "kapitalis pinggiran" (*peripheral capitalism*) yang memanfaatkan kesempatan mengembangkan ekonomi perkebunan di Hindia Belanda di saat melemahnya ekonomi negara kolonial pada 1880. Analogi Bulkin ini saya ambil untuk menggambarkan kelas menengah baru yang tumbuh di Yogyakarta dari bidang *non-farm* yang seakan menciptakan peluang baru ketika modal utama ekonomi yakni tanah dan tenaga kerja sudah dikuasai oleh pemilik perkebunan (Bulkin, 1984).

5 Kuntowijoyo menjelaskan bahwa ketika ekonomi di pedesaan tidak lagi bisa dikembangkan akibat dikuasainya tanah-tanah oleh pengusaha perkebunan, maka lahirlah banyak pedangang yang menekuni kerajinan batik dan perak di perkotaan Jawa. Sebagian besar dari mereka adalah kalangan santri yang mengembangkan ekonominya di bekas wilayah-wilayah perdikan (Kuntowijoyo, 1991: 78).

Courant, 16 Juni 1926). Keempat lembaga ini menjadi bentuk varian proses transformasi kedermawanan yang berkembang di Yogyakarta pada kurun 1912-1931 menjadi sebuah institusi kedermawanan yang tidak lain merupakan hasil duplikasi strategi Zending dan Missi.

Melawan gagasan dengan gagasan. Melawan aksi dengan aksi. Itulah Muhammadiyah!

GERAKAN INKLUSIF MUHAMMADIYAH DI LUAR NEGERI: PENGALAMAN DARI JERMAN

Ridho Al-Hamdi
Direktur *International Program of Government Affairs and Administration* (IGOV) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ketua PCIM Jerman Raya Periode 2015-2017, Anggota LPCR PP Muhammadiyah 2015-2020

Perkembangan Muhammadiyah di Level Internasional

Sejak awal era 2000an, Muhammadiyah telah berkembang di luar negeri ditandai dengan berdirinya cabang istimewa Muhammadiyah pertama kali di Mesir pada tahun 2002. Sejak saat itu, cabang istimewa Muhammadiyah berdiri di berbagai negara. Saat ini setidaknya ada 22 cabang istimewa Muhammadiyah. Di Timur Tengah, cabang istimewa ada di Mesir, Maroko, Tunisia, Sudan, Libya, dan Saudi Arabia. Di Asia, cabang istimewa dapat dijumpai di Malaysia, Taiwan, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Pakistan, Iran, dan Turki. Di daratan Eropa ada di Jerman, Inggris, Belanda, dan Perancis. Selain itu, cabang istimewa berkembang juga di Rusia, Amerika, dan Australia. Disebut sebagai "cabang istimewa", karena kedudukannya di luar negeri di bawah binaan langsung Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan luas area dakwah tidak ditentukan, bisa berbasis negara, kota, atau kawasan tertentu di sebuah negara.

Selain itu, Muhammadiyah juga memiliki "sister organization" di berbagai negara seperti di Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Timor Leste, Vietnam, dan Mauritius. Disebut "sister organization", karena gerakan di luar Indonesia tersebut juga menggunakan nama "Muhammadiyah" sebagai identitas mereka, tetapi mereka tidak memiliki hubungan struktural dengan Muhammadiyah di Indonesia. Komunikasi dan interaksi antara Muhammadiyah di Indonesia dengan "sister organization" tersebut terus dilakukan dalam berbagai acara.

Meluasnya gerakan Muhammadiyah hingga ke berbagai negara tersebut menunjukkan, bahwa organisasi yang didirikan oleh Ahmad Dahlan pada 1912 ini telah memberikan inspirasi kepada generasi berikutnya untuk terus menyebarluaskan ajaran dakwah Islam yang moderat dan inklusif untuk kemaslahatan manusia. Dengan spirit al-Ma'un yang terus menjadi nutrisi dalam perjuangan para kader Muhammadiyah, getaran dakwah organisasi ini dapat menjadi magnet kuat bagi gerakan Islam tidak hanya di Indonesia tetapi juga menjadi duta peradaban Islam di dunia.

Gerakan Inklusif Muhammadiyah di Jerman

Muhammadiyah masuk ke Jerman sejak awal 2000-an, tetapi secara resmi berdiri pada awal 2007 yang dipelopori oleh Rasjid Soeparwata, Ahmad-Norma Permata, dan timnya. Sebelum Muhammadiyah berdiri di Jerman, Tapak Suci telah berkembang terlebih dahulu sebagai duta budaya Islam terutama di Jerman Barat di bawah binaan Joko Suseno.

Disadari sejak awal, bahwa Muhammadiyah Jerman hadir tengah minoritas Muslim di mana saat itu, secara kuantitas, Muslim Jerman masih sedikit serta Eropa saat itu hingga kini dihantui oleh isu yang bernama "Islamophobia" yang terus mendiskriminasikan Islam sebagai agama teroris, anti-perdamaian, dan anti-HAM. Situasi yang demikian membuat Muhammadiyah Jerman harus menjadi gerakan yang terbuka untuk berkomunikasi dengan berbagai elemen masyarakat lokal Jerman.

Karena itu, melalui Tapak Suci, Muhammadiyah berdakwah ke warga lokal Jerman dengan pendekatan budaya dan seni. Dalam obrolan santai antara penulis dengan pendekar Joko Suseno di kediamannya di Bonheim, sebuah kota kecil antara Bonn and Köln di Jerman Barat, Tapak Suci telah menunjukkan dirinya sebagai alternatif pencak silat yang dapat menarik perhatian warga Jerman. Hal ini terbukti dengan banyaknya murid yang tergabung dalam Tapak Suci Jerman tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak kecil. Saat ini, Joko Suseno telah memiliki puluhan murid dan sejumlah kader asli warga Jerman yang telah menjadi pendekar muda Tapak Suci. Bahkan, istri Joko Suseno adalah murid tapak sucinya yang merupakan warga asli keturunan Jerman. Saat ini keluarga Joko Suseno dikaruniai dua orang anak yang mulai beranjak dewasa.

Tapak Suci Jerman telah pentas di berbagai ajang seni pencak silat baik di Jerman maupun di negara Eropa lainnya. Selain membina Tapak Suci Jerman, Joko pun membina Tapak Suci di Austria serta memberikan seminar dalam berbagai forum internasional. Ini merupakan bukti nyata

bahwa Muhammadiyah adalah gerakan inklusif yang mampu menembus batas-batas agama dan etnis.

Selain melalui Tapak Suci, Muhammadiyah di Jerman juga mengembangkan dirinya melalui gerakan filantropi atau gerakan kedermawanan. Lazismu Jerman mulai berdiri di tahun 2016 yang diawali dengan pengumpulan zakat fitrah dan zakat maal menjelang Ramadhan. Awalnya, pengurus pesimis apakah gerakan ini akan berhasil atau tidak. Namun, dengan niat ikhlas untuk berdakwah, gebrakan pertama ini di luar dugaan. Respon warga Muslim Jerman cukup antusias terhadap kehadiran Lazismu Jerman sehingga baik warga Muslim Indonesia yang tinggal di Jerman maupun warga Muslim lokal Jerman dengan senang hati memberikan zakat fitrah dan maal mereka ke Lazismu Jerman. Hal ini tentunya didukung kuat oleh peran kader-kader Muhammadiyah Jerman yang tak henti-hentinya mensosialisasikan gerakan zakat fitrah ini ke berbagai komunitas Muslim Jerman.

Selain gerakan zakat fitrah dan maal yang rutin diadakan setiap tahun, Lazismu Jerman juga memiliki "Gerakan Infaq Satu Euro" (GIRO) yang bertujuan menghimpun dana dari warga Jerman untuk tujuan bantuan kemanusiaan baik itu untuk korban bencana maupun ke kawasan negara konflik yang membutuhkan bantuan. Secara teknis, setiap warga Jerman yang ingin menyedekahkan hartanya ke GIRO, setiap bulan mereka akan transfer ke rekening Lazismu Jerman dan tentunya, laporan akan terus diinformasikan kepada mereka agar ada transparansi dan kepercayaan publik terhadap Lazismu Jerman.

Tak kalah hebat juga adalah, bahwa Muhammadiyah Jerman memiliki siaran rutin bulanan bernama "Pengajian Online Uni-Eropa" (PENNA) bekerjasama dengan Radio PPI Dunia dan RadioMu. PENNA telah konsisten mengudara sejak Januari 2016 hingga sekarang. Narasumber yang diminta mengisi acara tersebut juga beragam, tidak hanya mereka yang ada di Eropa tetapi juga Amerika maupun negara-negara lainnya. Dengan berdakwah melalui PENNA, diharapkan nilai-nilai Islam moderat dapat diterima oleh warga negara di luar Indonesia terutama mereka yang tinggal di Eropa.

Selain gerakan-gerakan tersebut di atas, kerjasama dan diplomasi Muhammadiyah juga dilakukan dengan berbagai komunitas Muslim Jerman, tentunya atas dukungan perwakilan pemerintah Indonesia di KBRI Berlin, KJRI Frankfurt, dan KJRI Hamburg. Selain itu, peran para kader Muhammadiyah saat mereka berinteraksi dengan warga lokal Jerman maupun dengan dunia kampus juga sangat membantu mengembangkan

dakwah Muhammadiyah ke berbagai lapisan masyarakat. Melalui peran para kader inilah, gerakan Muhammadiyah Jerman yang terbuka mampu menembus batas-batas keyakinan maupun etnisitas.

Sebagai contoh, selama tiga tahun penulis menempu studi doktor di Jerman, diskusi tentang Islam maupun Eropa selalu dilakukan dengan berbagai teman sejawat lokal Jerman dalam berbagai kesempatan. Melalui obrolan non formal semacam ini, mereka mulai memahami Islam bukanlah agama kekerasan sebagaimana yang dikesankan negatif oleh media. Sikap ramah dan tolong menolong pun selalu penulis tunjukkan kepada mereka agar memunculkan kesan bahwa Muslim adalah orang baik yang peduli dan membantu orang lain. Sikap pribadi Muslim yang dimiliki oleh para kader Muhammadiyah Jerman sangat menentukan pandangan warga lokal Jerman, apakah Islam itu agama yang bermanfaat ataukah sebaliknya.

Pengalaman praktis dari Jerman ini menjadi satu bukti nyata bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah yang terbuka terhadap siapa saja untuk kemanfaatan bersama. Transformasi gerakan Muhammadiyah yang berkembang dari waktu ke waktu semakin meneguhkan tesis bahwa gerakan Islam moderat ini melakuan apa yang disebut, meminjam istilah Fazlurrahman, dengan "double movement": di satu sisi melakukan purifikasi atau pemurnian ajaran Islam agar tidak tercampur dengan nilai-nilai lokal yang tidak sesuai tetapi di sisi lain secara bersamaan melakukan dinamisasi bahwa Islam kontekstual sepanjang zaman dengan tetap berdialektika bersama realitas serta mampu hadir untuk menyelesaikan permasalahan ummat. Karena itu, Muhammadiyah mengembangkan gerakannya tidak hanya di dunia pendidikan dan kesehatan, tetapi juga ke ranah sosial keummatan seperti bencana, filantropi, dan pemberdayaan komunitas yang kemudian dikenal sebagai "Trisula Baru" gerakan Muhammadiyah.

Inilah apa yang disebut oleh Kuntowijoyo sebagai misi Islam profetik. Sebagai gerakan Islam yang meneladani ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, Muhammadiyah konsisten untuk hadir menjadi bagian dari aktivisme sejarah. Dalam *Maktifat Daun – Daun Maktifat*, Kuntowijoyo mengatakan "Sebagai hadiah malaikat menanyakan apakah aku ingin berjalan di atas mega dan aku menolak karena kakiku masih di bumi sampai kejahatan terakhir dimusnahkan sampai dhuafa dan mustadhafin diangkat Tuhan dari penderitaan". Doakan, Muhammadiyah Jerman beserta cabang istimewa Muhammadiyah lainnya tetap konsisten menyeberluaskan ajaran Islam yang membawa manfaat untuk kehidupan tidak hanya untuk manusia tetapi alam semesta. Tabik.

MUHAMMADIYAH DAN INKLUSIVITAS: PENGALAMAN DI PCIM UK

Arie Kusuma Paksi
Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dalam tulisan ini, ada pengalaman menarik yang hendak diceritakan selama hampir empat tahun tinggal di Inggris dan menjadi pengurus Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah United Kingdom (PCIM UK). Pengalaman ini menjadi penting karena membuat penulis menjadi yakin bahwa adalah benar Muhammadiyah merupakan gerakan yang berbeda dalam arti selalu terbuka dan mampu menerima berbagai perbedaan. Adapun pengalaman ini bisa dibagi menjadi dua bagian: pertama, ketika saya hidup di kota Bradford (salah satu kota penting di Provinsi West Yorkshire) dan menjalani hari-hari sebagai mahasiswa doktor dan juga seorang Muslim yang terlibat kegiatan keagamaan lokal. Kedua, ketika menjadi pengurus PCIM UK, dimana saya dan rekan-rekan pengurus diminta untuk mendorong dan menyokong kegiatan pertukaran pemimpin Muslim yang melibatkan para tokoh Muslim dari Inggris dan Indonesia. Adapun kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama Muhammadiyah dan Kedutaan Inggris di Jakarta.

Pertama-tama penulis menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pengalaman selama studi di Kota Bradford. Kota Bradford sendiri adalah kota yang Indah dengan beberapa bangunan tua yang masih kokoh berdiri hingga saat ini – beberapa bangunan merupakan bekas pabrik yang dulu menjadi pusat produksi wol. Kontur tanahnya landai dan banyak perbukitan. Oleh karena itu, selama musim dingin, biasanya bulan Oktober-Februari, kota ini biasanya diselimuti salju. Pun, ketika musim panas bulan April-Agustus, kota ini tidak terlalu panas karena berada di daerah yang cukup tinggi. Kota Bradford, selain cukup terkenal dengan kuliner yang khas Asia Selatan (khususnya Pakistan dan India), juga memiliki komunitas Muslim

yang cukup besar. Dulunya, komunitas Muslim yang sekarang menjadi warga Inggris dan tinggal di Bradford merupakan anak cucu dari imigran yang khusus didatangkan dari Pakistan untuk bekerja sebagai buruh kasar di pabrik wol. Selama puluhan tahun bekerja di Inggris akhirnya mereka pun menjadi warga negara lokal. Kebutuhan untuk beribadah mendorong para British-Pakistani (orang Inggris berdarah Pakistan) mendirikan masjid-masjid.

Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya jumlah Muslim yang datang dari berbagai negara dan menjadi imigran dan atau kemudian menjadi warna negara lokal, masjid-masjid bermunculan sesuai dengan siapa peyandang dananya. Ada Masjid Doha yang didanai oleh Pemerintah Qatar, ada masjid yang khusus dikelola oleh jamaah tabligh dan ada juga masjid yang dikelola oleh kelompok-kelompok Muslim lainnya. Singkatnya ini membuat Islam bervariasi dari sisi waktu shalat sampai bagaimana teknis pelaksanaan shalat Jumat (beberapa menggunakan Bahasa Inggris, lebih banyak menggunakan bahasa lokal Pakistan) dan jarang sekali satu dengan yang lainnya berinteraksi. Masing-masing jamaah juga sudah punya masjid tersendiri dan nyaman dengan ajaran yang mereka biasa dapatkan. Kemudian, kegiatan ibadah antara perempuan dan laki-laki terpisah, begitu pula terjadi dalam kegiatan sosial. Hal ini mengingatkan saya pribadi betapa beruntungnya dalam ber-Muhammadiyah yang mengajarkan kesetaraan dan menerima perbedaan yang merupakan sunatullah. Oleh karenanya, sebagai warga Muhammadiyah, dalam banyak kesempatan shalat, saya selalu beribadah di masjid yang berbeda supaya dapat merasakan pengalaman betapa indahnya hidup di tengah-tengah warga Muslim yang memiliki berbeda pandangan dan saling berinterkasi dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Kedua, ketika menjadi pengurus PCIM UK, saya dan rekan pengurus diajak untuk mengunjungi komunitas Muslim yang ada di Inggris utara (khususnya di wilayah Provinsi West Yorkshire yang mencakup Kota Leeds, Bradford, dan Huddersfield). Saya berkesempatan langsung menemui beberapa tokoh Muslim setempat dan melihat bagaimana aktivitas keagaaman dan sosial yang rutin dilakukan oleh komunitas lokal. Pertemuan juga turut dihadiri oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik. Adapun maksud dari pertemuan tersebut untuk meminta pendapat dan pengalaman dari beberapa tokoh Muslim UK yang sebelumnya pernah merasakan tinggal dan mengenal Muhammadiyah selama di Yogyakarta dan Jakarta. Singkatnya, para pemimpin Muslim tersebut takjub dengan

Muhammadiyah dan kontribusinya dalam peradaban. Kerja-kerja yang dilakukan oleh Muhammadiyah, walaupun merupakan lembaga yang berbasis Islam, sifatnya untuk umat tanpa melihat siapa latar belakangnya, apa ideologinya, dari mana suku bangsa, ras, dan golongannya. Program-program yang dilakukan tidak hanya terfokus pada kegiatan keagamaan, tetapi telah meluas sampai kegiataan kebencanaan dan kemanusiaan yang lainnya.

Hal ini menjadi inspirasi tersendiri bagi para pemimpin Muslim UK yang terkadang masih berfikiran kolot yang menganggap ajarannya paling benar. Yang paling ektrim, menurut salah satu pemimpin Muslim UK yang hadir, jika salah satu umat berfikiran yang menyimpang dari kebiasaan golongan maka seketika nyawanya bisa melayang. Sementara itu, program-program yang dilakukan di masjid-masjidnya masih didominasi kegiatan keagaamaan daripada kegiatan sosial dan belum menyentuh aspek persatuan dan kesatuan umat. Makanya, mereka mendorong supaya ada banyak lagi pemimpin Muslim yang belajar pada Muhammadiyah sehingga dapat lebih terbuka. Bagi saya, yang telah ber-Muhammadiyah selama puluhan tahun, perbedaan pandangan di Muhammadiyah acapkali terjadi tetapi dialog atau *tabayyun* adalah hal selalu dikedepankan. Buktinya, konflik baik antar sesama anggota maupun dengan lembaga di luar Muhammadiyah jarang terjadi.

Ada satu hal yang menjadi pesan para pemimpin Muslim UK pada Muhammadiyah. Mereka tahu bahwa Muhammadiyah memiliki banyak cendikiawan yang kaya akan keilmuan dan pengalaman. Sayangnya ketika para kader Muhammadiyah ini ke UK mereka tidak tahu informasinya sehingga tidak bisa mempersiapkan acara tertentu untuk belajar banyak tentang Muhammadiyah dan perannya dalam membangun bangsa yang inklusif di Indonesia. Mereka berharap Muhammadiyah membangun komunikasi dengan komunitas Muslim di UK dan menginformasikan jika ada kader-kadernya yang akan datang berkunjung atau sengaja datang selama beberapa bulan untuk tinggal dan hidup bersama komunitas Muslim lokal. Mereka juga berharap Muhammadiyah dapat menterjemahkan buku-buku, artikel, risalah jumah yang mereka bisa baca dan pelajari tentang Muslim di Indonesia.

MENJAGA MUHAMMADIYAH

Muhammad Izzul Muslimin
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah
Periode 2006-2010

Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 tinggal menghitung hari. Aura 'pertarungan' sudah mulai terasa, tidak hanya di kancah perpolitikan tetapi juga masuk ke dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Tarikan politik yang kuat menyebabkan hubungan sosial antar masyarakat kadang terganggu. Hubungan persahabatan, keluarga, organisasi, antar warga, bahkan antar suami istri bisa memanas karena perbedaan sikap dan pilihan politik. Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan pun tidak lepas dari persoalan tersebut. Pilihan politik antar pimpinan dan warga Muhammadiyah yang mungkin berbeda juga memicu memanasnya hubungan dalam ber-Muhammadiyah. Sanggupkah Muhammadiyah melewatinya?

Sebagai organisasi yang sudah berusia 106 tahun lebih, Muhammadiyah sudah banyak merasakan asam garam dinamika politik, bahkan sejak sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia. Alhamdulillah, Muhammadiyah selalu bisa melewati dinamika politik yang terjadi, bahkan pada saat yang paling kritis sekalipun. Apa yang menjadi resep sehingga Muhammadiyah tidak terjerumus dalam perpecahan dan konflik dalam menghadapi dinamika politik nasional? Setidaknya ada beberapa prinsip yang bisa dikemukakan di sini untuk menjelaskannya:

1. Fokus Kepada Maksud dan Tujuan Muhammadiyah

Kesadaran akan maksud dan tujuan ber-Muhammadiyah menyebabkan Muhammadiyah tidak terjebak kepada kepentingan jangka pendek dan kepentingan sesaat. Muhammadiyah tidak bisa dibeli apalagi dikelabui. Ada pengalaman menarik saat Muhammadiyah pernah dituduh mengkhianati

perjuangan perintisan kemerdekaan Indonesia manakala saat itu Muhammadiyah bersedia menerima ordonansi pemerintah Hindia Belanda untuk lembaga Pendidikan Muhammadiyah. Padahal pada saat itu banyak organisasi pergerakan yang menerapkan sikap non-kooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda. Akibatnya anggota Muhammadiyah dikenai sanksi disiplin partai di Syarikat Islam. Saat itu bagi warga Muhammadiyah diminta memilih tetap di Syarikat Islam atau di Muhammadiyah. Meskipun tindakan itu cukup menyakitkan tetapi akhirnya Muhammadiyah bisa membuktikan bahwa kebijakan menerima ordonansi bukanlah karena Muhammadiyah tidak berkeinginan untuk kompromi kepada pemerintah Belanda, tetapi Muhammadiyah berkewajiban menyelamatkan lembaga pendidikannya dan tetap berkomitmen kepada perjuangan bagi kemerdekaan Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya tokoh, warga dan anak didik Muhammadiyah yang turut berjuang dalam merintis, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia.

2. Kepemimpinan yang Amanah, Bukan untuk Kepentingan Pribadi

Komitmen akan perjuangan menyebabkan para pemimpin Muhammadiyah lebih mendahulukan kepentingan organisasi dan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Pada saat Masyumi membubarkan diri atas desakan rezim Orde Lama, Muhammadiyah sebagai anggota istimewa Masyumi terkena getahnya. Kegiatan Muhammadiyah banyak dicurigai dan dihambat. Tokoh dan aktivis Muhammadiyah banyak yang mengalami ancaman bahkan pemidanaan contohnya seperti Buya HAMKA. Pada saat itu sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah KH Ahmad Badawi melakukan kebijakan melobi Presiden Soekarno secara pribadi. Soekarno adalah anggota Muhammadiyah dan pernah menjadi pengurus pendidikan Muhammadiyah di Bengkulu. Atas kerja lobi KH Ahmad Badawi, pergerakan Muhammadiyah terhindar dari gangguan pihak-pihak yang tidak menyukai Muhammadiyah. Meskipun pada saat itu KH Ahmad Badawi juga banyak dikritik karena mau berdekat-dekatan dengan Bung Karno. Bahkan setelah Orde Lama tumbang, KH Ahmad Badawi tidak lagi memimpin Muhammadiyah. Namun semua konsekuensi itu beliau terima dengan lapang hati dan tidak pernah mengeluh. Beliau tetap berkhidmat di Muhammadiyah meskipun tidak lagi menjadi pimpinan, hingga akhir hayatnya.

3. Politik sebagai Salah Satu Strategi Dakwah, Bukan Satu-satunya Jalan Dakwah

Muhammadiyah tidak pernah menempatkan politik sebagai satu-satunya jalan dakwah, tetapi hanyalah sebagai salah satu jalan dakwah. Meskipun demikian Muhammadiyah tidak pernah meremehkan apalagi tidak memperdulikan jalan dakwah lewat politik. Oleh karena itu, Muhammadiyah juga mendorong kader-kadernya untuk disiapkan maju ke gelanggang politik baik politik kepartaian maupun politik kebangsaan. Bahkan Muhammadiyah merelakan kader terbaiknya untuk terjun ke gelanggang politik seperti saat KH Mas Mansur yang saat itu menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah terpilih menjadi salah satu pimpinan PUTERA yang terdiri dari Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantoro, dan KH Mas Mansur. Mereka disebut sebagai empat serangkai pemimpin PUTERA. Hal yang sama juga terjadi saat Amien Rais memperjuangkan proses reformasi di Indonesia. Melalui Sidang Tanwir di Semarang tahun 1998, Muhammadiyah memberikan jalan kepada Amien Rais untuk melanjutkan perjuangan politik kebangsaan dan memandatkan kepemimpinan Muhammadiyah kepada Ahmad Syafii Ma'arif. Ini semua adalah bentuk keseriusan Muhammadiyah memikirkan kepentingan berbangsa dan bernegara.

4. Mendahulukan Keutuhan Muhammadiyah, Bukan Sekadar Mencari Peluang Politik

Dalam menghadapi setiap momen politik khususnya yang berhubungan dengan perubahan politik, Muhammadiyah berprinsip untuk lebih mendahulukan keutuhan Muhammadiyah, dari sekadar mendapatkan keuntungan atau peluang politik. Oleh karena itu Muhammadiyah memberi keleluasaan kader-kadernya untuk terlibat dalam proses politik, tetapi tetap menjaga agar Muhammadiyah tidak tercerai-berai karena politik. Di sinilah perlunya kedewasaan dan pemahaman yang tinggi agar dalam menghadapi turbulensi politik, Muhammadiyah tetap bisa selamat. Salah satu hal yang paling penting adalah tetap menjaga komunikasi dan silaturrahmi antar kader Muhammadiyah. Muhammadiyah juga mendahulukan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan yang penting dan menjadi acuan bersama bagi seluruh warga Persyarikatan.

5. Kesadaran akan Keikhlasan dalam ber-Muhammadiyah.

Ketika kepemimpinan Muhammadiyah bisa menjaga keikhlasan dalam ber-Muhammadiyah maka insya Allah akan membawa keselamatan bagi Muhammadiyah. AR Fakhruddin adalah contoh nyata bagaimana bisa memberikan contoh keikhlasan tersebut. Pada saat Beliau diminta Presiden Soeharto untuk menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Pak AR baru menyanggupi setelah Beliau tidak lagi menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Padahal permintaan itu sebenarnya sudah cukup lama, tetapi selalu ditolak. Beliau ingin memberi contoh kepada warga Muhammadiyah bahwa jabatan Ketua Umum PP Muhammadiyah bukan sebagai ajang aji mumpung, meskipun peluang itu ada. Bahkan saat Beliau mendapatkan jatah mobil operasional sebagai anggota DPA, mobil itu diserahkan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan alasan Beliau khawatir tidak sanggup merawat dengan baik mobil tersebut. Ini sebuah alasan yang sangat luar biasa. Karena keikhlasan AR Fachruddin, Muhammadiyah tetap bisa menghadapi berbagai persoalan besar seperti saat menghadapi kewajiban berasas tunggal Pancasila. Karena tuntutan itu Muhammadiyah sampai memundurkan jadwal Muktamar hampir dua tahun lamanya. Akhirnya Pak AR bisa menjembatani tuntutan pemerintah itu dengan memberi pengandaian orang memakai helm. Jika ada kewajiban berkendaraan bermotor harus pakai helm, tidak ada salahnya ditaati dengan catatan kepalanya tidak yang menyesuaikan dengan helm, tapi helmnya lah yang justru menyesuaikan ukuran kepala. Akhirnya tuntutan asas tunggal bisa dilewati Muhammadiyah dengan mulus tanpa harus mengubah prinsip dan ciri gerakan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan gerakan Islam.

Demikianlah beberapa hal prinsip yang membuat Muhammadiyah tetap bisa terjaga hingga saat ini meskipun beberapa kali menghadapi cobaan dan tantangan yang sulit. Semoga kita sebagai warganya bisa tetap istiqomah. Aamiin.

BAB 2

MUHAMMADIYAH DAN POLITIK KESEJAHTERAAN: *BEST PRACTICES* DI BIDANG PEMBERDAYAAN, LINGKUNGAN, KEBENCANAAN, DAN KONSTITUSI

MUHAMMADIYAH DAN KEBERDAYAAN KAUM RENTAN

Ahmad Ma'ruf
Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Wakil Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat
PP Muhammadiyah

Sekarang ini, semakin banyak masalah yang dihadapi oleh banyak negara, seperti berkurangnya keanekaragaman hayati, kemiskinan, krisis kepercayaan dan lain-lain. Salah satu pendekatan menjawab problema pembangunan tersebut adalah komitmen pembangunan yang bervisi pembangunan berkelanjutan (Walkowiak, 1996; Heal, 1998; Broman & Robert, 2015; Jaiyesimi, 2016). Kunci implementasi pembangunan berkelanjutan adalah proses partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Pendekatan yang paling relevan tidak lain adalah pemberdayaan masyarakat. Orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu masyarakat agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi, diterapkan secara partisipatoris, berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tiga jalur yaitu e*nabling, empowering,* dan *protecting* (Einsidel, 1968; Korten, 1980; Sikhonze, 1999; Sumodiningrat, 1999)

Secara riil kemiskinan masih menjadi agenda besar dalam pembangunan Indonesia. Hal ini merupakan permasalahan yang kompleks dan memerlukan intervensi semua pihak, termasuk peran persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar terus bergerak dalam berbagai bidang, baik bidang keagamaan, sosial masyarakat, ekonomi, pendidikan, lingkungan, maupun kesehatan. Kiprah Muhammadiyah dalam menjawab problema pembangunan terlihat dari kontribusi ribuan ragam amal usaha yang secara nyata menyentuh hajat hidup orang banyak.

Pemberdayaan Kaum Rentan

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat pada kaum rentan, salah satu organ persyarikatan yang bergerak adalah Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM). Bidang garap majelis ini adalah penyadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, pengembangan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan termarjinalisasi, advokasi kebijakan, pengembangan pusat penanggulangan krisis yang berfungsi sebagai antisipasi problem-problem psikososial di masyarakat (MPM, 2018).

Program-program yang dijalankan MPM yang memperkuat tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Konsep pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Muhammadiyah menjadi titik kunci untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Penulis bersama beberapa asisten melakukan evaluasi sederhana atas peran Muhammadiyah dalam pembangunan berkelanjutan melalui program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh MPM.

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh MPM pada dasarnya untuk mendorong agar para anggota dampingan memiliki pengetahuan dan mental yang positif. Kegiatan pendampingan baik berupa sosialisasi, pelatihan dan hal lainnya selain dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan para anggota dampingan juga untuk meningkatkan sikap dan keterampilan, sehingga akan mendorong para anggota untuk melakukan kegiatan yang efektif bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.

Hasil olah data dari 266 responden dampingan MPM PP Muhammadiyah periode 2015-2018 yang dianalisis dengan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut. Secara statistik, kemanfaatan program MPM dirasakan oleh komunitas dampingan. Pada aspek pengetahuan rata-rata sebesar 4,1 point dari skala penilaian 1 sampai 5, aspek sikap rata-rata sebesar 3,9 point, dan aspek keterampilan rata-rata sebesar 3,7 point. Pada semua aspek nilai standar deviasi lebih kecil dari mean yang berarti data terdistribusi dengan baik. Berdasarkan hasil kuesioner yang dianalisis dan didukung oleh hasil wawancara pada ketua kelompok masyarakat dampingan MPM, diperoleh persepsi atas hasil pelaksanaan program Muhammadiyah dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan untuk setiap aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagaimana terlihat dalam Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3.
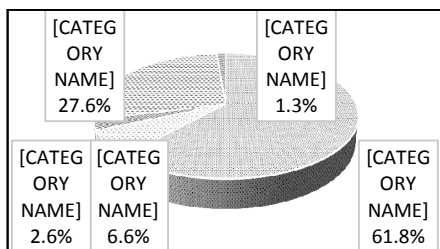
Gambar 1. Peningkatan Pengetahuan
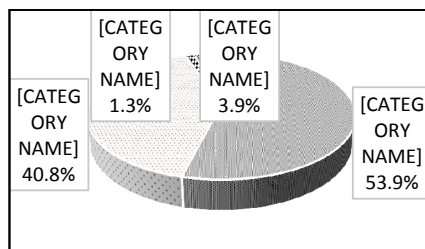
Gambar 2. Perubahan Sikap
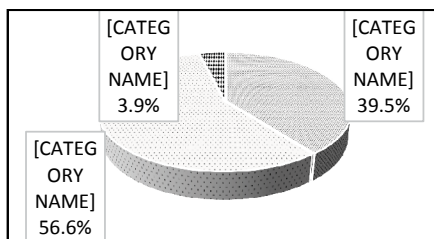
Gambar 1. Peningkatan Keterampilan

Tingkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan semua anggota dampingan MPM PP Muhammadiyah setelah didampingi mayoritas tergolong baik. Hal tersebut terlihat dari persepsi responden atas hasil program MPM yang mayoritas responden (61,8%) menyatakan terjadi terjadi peningkatan pengetahuan (lihat Gambar 1), mayoritas responden (53,9%) juga menyatakan terjadi perubahan sikap positif (lihat Gambar 2), dan mayoritas responden (56,6%) menyatakan peningkatan keterampilan (Lihat Gambar 3). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat oleh MPM telah meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan bagi para penerima manfaat program restorasi hutan maupun program sosial ekonomi pada komunitas rentan.

Salah satu program yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan oleh MPM adalah program restorasi ekosistem hutan tropis melalui pengembangan hasil hutan non kayu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pengurangan emisi karbon di Provinsi Kalimantan Timur telah dilaksanakan pada tahun 2015-2017. Program dilaksanakan pada masyarakat yang hidup di Kampung Batu Rajang, Kampung Siduung Indah dan Long Keluh di Kecamatan Kelay dan Segah yang menjalani kehidupan di sekitar wilayah hutan masih berada kondisi kemiskinan, sehingga diperlukan upaya pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi rendah karbon sehingga 75% dari wilayah Kabupaten Berau yang masih berhutan dapat dipertahankan dari penebangan hutan, perkebunan dan

pertambangan. Proses pendampingan pada komunitas ini masih berlanjut hingga sekarang dengan pendekatan kolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Program ini telah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada 190 rumah tangga penerima manfaat di kampung Sidung Indah, Batu Rajang dan Longkeluh meningkat yang menerapkan praktek budidaya pertanian di sekitar hutan yang terorganisir dalam 9 kelompok tani. Terbentuk kelembagaan ekonomi satu koperasi dan 3 kelompok usaha industri olehan hasil hutan. Selain menanam padi, sebagian dari masyarakat juga sudah ada yang menanam tanaman perkebunan lain seperti cokelat, karet, lada, gaharu, sayur-sayuran, dan lain-lain.

Program pembangunan berkelanjutan oleh Muhammadiyah lainnya adalah program pemberdayaan msyarakat pada kelompok rentan, khususnya para penyandang disabilitas, pemulung, dan pedangan asongan di Provinsi Yogyakarta. Bentuk kegiatan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan lingkungan ini difokuskan pada usaha memberikan pengetahuan keterampilan serta kemauan dalam diri. Kegiatan yang ditempuh seperti pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan dan keterlibatan berorganisasi demi menumbuhkan motivasi hidup dan pekerjaan.

Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan keagamaan dilakukan dalam bentuk pengajian rutin di tiap kelompok dan pengajian inspirati lintas kelompok dengan proses saling belajar, memotivasi, tukar pengalaman serta menginspirasi. Pendampingan kesehatan, MPM menggunakan pendekatanpreventif melalui penyuluhan tentang kesehatan dan kuratif melalui pengobatan gratis bekerjasama dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah.

Pemberdayaan masyarakat pada kelompok pedagang asongan mengarah pada makanan yang sehat dan halal. Pendampingan yang yang pertama dilakukan adalah peningkatan kapasitas organisasi dengan membentuk kelompok bernama Asongan Surya Mandiri. MPM melakukan pengecekan kualitas produk makanan yang dijual pedagang asongan untuk mengetahui apakah makanan yang mereka produksi mengandung bahan berbahaya seperti boraks, pengawet dan lain-lain. Kegiatan pengecekan ini MPM bekerja sama dengan beberapa laboratorium universitas. Pendampingan yang dilakukan setelah pengujian berupa pelatihan dan sosialisasi tentang makanan sehat, bersih dan halal. Kegiatan pelatihan ini MPM bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan fasilitas kepada anggota dampingan berupa sertifikasi sehat dan baik terhadap

makanan para anggota, sehingga dapat diterima oleh pihak-pihak sekolah. Bentuk pendampingan lainnya yang dilakukan seperi pemberian bantuan gerobak untuk berjualan agar memudahkan para anggota untuk berdagang di sekolah-sekolah.

Pemberdayaan sosial ekonomi pada kelompok usaha mikro juga dilakukan melalui kegiatan peningkatan kapasitas organisasi dengan membentuk kelompok organisasi. Kelompok ini terdiri dari ibu-ibu rumah tangga, sehingga para anggota mengadakan kegiatan arisan sebagai alat pemersatu sesama anggota di dalam kelompok. Adapun pendampingan yang dilakukan yaitu peningkatan kapasitas produksi dengan biaya yang rendah. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi tentang cara pembuatan produk yang benar serta pengadaan pelatihan mengenai pengemasan dan pemasaran produk.

Pemberdayaan masyarakat pada komunitas pemulung. Pendampingan yang pertama dilakukan yaitu penguatan kelompok dengan membentuk organisasi bernama Guyub Makmur. Kegiatan yang dilakukan mengarah pada angkringan sehat seperti pelatihan pembuatan makanan seperti yang pernah dilakukan yaitu pembuatan donat telo, pemberian bantuan gerobak angkringan pada kelompok, kegiatan sosialisasi tentang manajemen keuangan rumah tangga dan senam agar membangun kekompakan para anggota di dalam kelompok.

Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan oleh MPM pada para penyandang disabilitas. Pemberdayaan dalam kelompok penyandang disabilitas ini diawali dengan pelatihan koperasi, dengan tujuan meningkatkan pemahaman kelompok difabel mengenai tata kelola koperasi. Selanjutnya dilakukan pembentukan sebuah koperasi simpan pinjam *"Bank Difabel"*yang dijalankan oleh anggota kelompok penyandang disabilitas. Kegiatan pendampingan terus dilakukan untuk mengontrol jalannya koperasi. Selain membentuk koperasi simpan pinjam, MPM juga melakukan berbagai macam kegiatan lain meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas, dimulai dari pelatihan kewirausahaan hingga pengecekan kesehatan yang dilakukan melalui kerja sama dengan dinas kesehatan setempat. Selain itu, juga dilakukan advokasi kebijakan berupa peraturan daerah pada 5 kabupaten/kota sebagai model untuk advokasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Proses advokasi ini MPM bekerjasama dengan lembaga lain yang sevisi untuk keberdayaan difabel.

Penutup

Muhammadiyah melalui MPM secara nyata telah berperan dalam pembangunan masyarakat khususnya pada kelompok rentan. Dalam hal ini, peranan Muhammadiyah sebagai fasilitator, inspirator, dan mediator dalam program pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan. Hasil pemberdayaan masyarakat terlihat dari tiga aspek yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang meningkat setelah mengikuti program pemberdayaan masyarakat oleh Muhammadiyah.

Hasil dari proses pemberdayaan tidaklah selalu sejalan dengan rencana majelis. Tantangan terberat adalah keterbatasan sumberdaya manusia untuk mendampingi secara intensif pada komunitas rentan. Masih sangat diperlukan sinergitas antar MPM dengan amal usaha Muhammadiyah, khususnya perguruan tinggi, rumah sakit, dan LazisMU serta majelis dan lembaga lain untuk memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat rentan. Jiwa juang pemberdayaan oleh Muhammadiyah terus terjaga dengan satu kredo: *"Selama rakyat masih menderita, tidak ada kata istirahat".*

Daftar Pustaka

Broman, G. I., & Robert, K.-H. (2015). A Framework for Strategic Sustainable Development. Journal of Cleaner Production.

Walkowiak, E. (1996). Sustainable development as an economic development strategy. Economic Development Review, 75–77.

Heal, G. (1998) Valuing the Future:Economic Theory and Sustainability. Columbia UniversityPress.New York.

Jaiyesimi, R., (2016), The Challenge of Implementing the Sustainable Development Goals in Africa: The Way Forward, African Journal of Reproductive Health, Pp. 13-18.

Einsidel, Luz, A, 1968. Succes and Failure of Some Community Development in Batanggas. University of The Philippines: A Community Development Research Counsil Publication.

Sikhondze, Wilson B. (1999). "The Role of Extension in Farmer Education and Information Dissemination in Swaziland". Journal: Adult Education and Development No. 53

Korten, DC., (1980), Community Organization and Rural Development: A Learning Process Approach, Public Administration Review, September/October 1980 p.480509.

Sumodiningrat, G(1999) Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengamanan Sosial. Yogyakarta, Ghalia Indonesia.

Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pengurus Pusat Muhammadiyah. (2018). Ruang Lingkup dan Peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat. http://mpm.muhammadiyah.or.id

MUHAMMADIYAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT

Hempri Suyatna
Anggota LHKP PWM DIY, Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial (SODEC) Departemen PSdK Fisipol Universitas Gadjah Mada

Kebijakan-kebijakan pengembangan ekonomi rakyat sudah banyak dilakukan oleh pemerintah. Namun berbagai kebijakan tersebut tidak banyak membantu pelaku ekonomi rakyat untuk berkembang. Konsep-konsep ekonomi kerakyatan hanya muncul sebagai jargon, retorika belaka dan konsumsi politik Sektor ekonomi rakyat seringkali hanya menjadi obyek dan sekedar pemain pinggiran dari berbagai kebijakan-kebijakan yang ada di negeri ini. Liberalisasi perekonomian dengan kedok globalisasi dan revolusi industri 4.0 juga turut memberikan dampak buruk bagi sektor ekonomi rakyat yang tidak mampu bersaing dengan produk-produk pabrikan dan impor. Koperasi yang diyakini sebagai pilar perekonomian rakyat ternyata tidak berdaya menghadapi penetrasi-penetrasi kekuatan kapitalis. Apalagi euforia pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) menjadikan perhatian pemerintah terhadap koperasi terabaikan. Dari berbagai perspetif teoritik telah dijelaskan bahwa di dalam perekomomian liberal ini, para pemilik kapital yang kemudian memiliki otoritas untuk mengontrol berbagai kebijakan negara sehingga yang muncul kemudian adalah *shadow state* (negara bayangan).Dalam hal ini, negara dan pemerintah ada akan tetapi kebijakan-kebijakan yang ada di kendalikan oleh aktor-aktor di luar negara.

Politik transaksional yang semakin marak di negeri ini baik di level pusat maupun daerah juga menyebabkan regulasi-regulasi yang ada cenderung lebih memihak kepada pemilik dan penguasa modal dibandingkan berpihak pada kepentingan rakyat. Rakyat hanya sekedar menjadi obyek dari berbagai kebijakan tersebut. Secara faktual,memang

banyak kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada penguatan sektor ekonomi rakyat seperti permolan, pemasaran, teknologi dan sebagianya akan tetapi banyak kebijakan-kebijakan yang secara struktural memdorong deindustrialisasi sektor ekonomi rakyat sebagai kebijakan impor, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan yang terbaru kenaikan tiket pesawat dan pemberlakukan bagasi berbayar.

Tantangan dan Hambatan

Ada banyak problema yang dihadapi oleh sektor ekonomi rakyat di Indonesia yang menyebabkan mengapa sektor ekonomi rakyat ini tidak berkembang. *Problem pertama* adalah kuatnya nuansa politik transaksional di negeri ini sehingga mengakibatkan banyak regulasi yang tidak berpihak kepada rakyat. Kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik dari kelompok-kelompok kepentingan semakin kuat mendominasi dan mewarnai proses kebijakan ekonomi dan politik di negeri ini. Di saat rakyat kecil disibukkan dengan upaya bagaimana mereka dapat bertahan hidup, para elite di negeri ini justu disibukkan dengan politik transaksional dan bagi-bagi kekuasaan. Tinjauan historis perkembangan kebijakan UMKM dari era pra kolonial hingga sekarang menunjukkan bahwa sektor UMKM ini seringkali sekedar menjadi obyek yang dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan penguasa. Di era pra kolonial, kebijakan-kebijakan pengembangan ekonomi rakyat lebih banyak diperuntukkan untuk ,mendukung kepentingan raja-raja dan penguasa yang ada pada waktu itu. Sedangkan di era kolonial, kebijakan-kebijakan perekonomian lebih banyak ditujukan untuk mendukung kepentingan VOC, pemerintah Hindia Belanda maupun pemerintah Jepang. Kemudian di era pemerintah orde lama, sebenarnya ada upaya untuk mengangkat UMKM menjadi sektor yang lebih mandiri dengan munculnya Program Benteng akan tetapi celah-celah kebijakan yang ada pada waktu itu justru banyak dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha China untuk melakukan investasi usaha mereka. Di era rejim pemerintahan orde baru, kebijakan-kebijakan yang ada justru lebih memberikan keberpihakan kepada para pengusaha besar dibandingkan pengusaha-pengusaha kecil. Pasca runtuhnya rejim orde baru, sebenarnya ada upaya untuk memberikan prioritas pengembangan UMKM. Namun sayangnya, pemerintah terkesan kurang serius untuk mewujudkan hal tersebut. Inkonsistensi dan sinkronisasi kebijakan masih menjadi kendala dalam pengembangan UMKM. Persoalan ini tidak sekedar terjadi pada kementerian di level pemerintah pusat akan tetapi

antara kebijakan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini seringkali tidak sejalan. Selain itu, di era demokrasi yang dilaksanakan dengan pemilihan langsung ini, sektor UMKM seringkali hanya dijadikan sebagai komoditi politik dari para politisi dan elite politik untuk merengkuh dan melegitimasi kekuasaan mereka.

Problem kedua, adalah pola fikir dari elite politik dan pemerintah yang cenderung masih bias ekonomi kapitalistik. Pola fikir semacam ini yang menyebabkan kebijakan-kebijakan dan anggaran-anggaran yang dikeluarkan tidak pro terhadap ekonomi rakyat. Ataupun jika ada kebijakan untuk pengembangan ekonomi rakyat, kebijakan tersebut hanya dilakukan dengan setengah hati. Akibat kebijakan yang setengah-setengah ini mengakibatkan hasil yang diperoleh dalam pemberdayaan ekonomi rakyat pun tidak pernah optimal. Banyak fakta kongkret yang menunjukkan masih kurangnya komitmen pemerintah terhadap ekonomi rakyat. Sebagai contoh banyak pemerintah-pemerintah daerah selalu memanjakan berdirinya ritel-ritel asing tanpa memikirkan berapa hektar lahan subur pertanian yang harus tergusur, berapa banyak pasar tradisional yang harus mati dan berapa banyak Usaha Mikro dan Kecil yang harus gulung tikar karena tak kuasa melawan ekspansi ritel –ritel asing tersebut. Liberalisasi perdagangan yang dilakukan pemerintah pun telah membuat produk-produk luar negeri membanjiri produk-produk Indonesia. Dari produk yang memang kita tidak dapat memproduksi sampai produk-produk yang sebenarnya banyak dihasilkan oleh masyarakat seperti buah-buahan, sayur-sayuran . Sungguh sangat ironis, kita negara agraris dan pemerintah sekarang ini telah mengklaim swasembada pangan akan tetapi di pasar-pasar tradisional banyak dijumpai produk-produk impor.

Problem ketiga adalah persoalan daya saing produk-produk ekonomi rakyat yang sangat lemah karena pola pemberdayaan yang dilakukan belum dilakukan secara komprehensif. Daya saing yang lemah tersebut tidak saja di pasaran internasional, di pasar domestik pun produk kita sudah banyak yang kalah bersaing dengan produk impor. Dalam konteks tersebut, maka perlu ada upaya fasilitasi secara kontinyu dalam pengembangan ekonomi rakyat dan berbagai kebijakan *affirmative action* yang memberikan peluang bagi produk-produk ekonomi rakyat dapat bersaing. Dalam konteks pemberian fasilitasi perlu difikirkan bagaiman model pembiayaan yang benar-benar sesuai dengan karakteristik pelaku ekonomi rakyat. Dalam konteks pemasaran pun,perlu dibuat sebuah format bagaimana agar pelaku UMKM tidak didikte oleh para *buyers* maupun *trading*. Banyak

produk-produk hasil dari rakyat kita yang kemudian disalurkan ke luar negeri tetapi tidak memakai label produk Indonesia namun menggunakan label jaringan luar dari dari *buyers* tersebut.

Problem keempat,problem yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi rakyat adalah kurang optimalnya institusi lokal yang dapat dijadikan sebagai sarana pemberdayaan sektor ekonomi rakyat. Kondisi ini menyebakan sektor ekonomi rakyat menjadi semakin tidak berdaya. Lembaga-lembaga keuangan mikro dan koperasi cenderung berjalan di tempat dan tidak mendapatkan perhatian serius pemerintahpadahal institusi ini sebenarnya dapat dioptimalkan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Masih banyak Lembaga Keuangan Mikro yang masih illegal karena tidak dilindungi oleh Undang-Undang. Pengembangan BUMDes juga belum semuanya berhasil karena realitas yang ada banyak BUMDes yang kurang mewadahi potensi ekonomi rakyat.

Peran Muhammadiyah dan Agenda Ke Depan

Gerakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dengan berbasis pada Rumusan teologi Al maun selama ini menjadi salah satu spirit bagi Muhammadiyah di dalam melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat dan keberpihakan terhadap kaum yang lemah. Dalam rumusan tersebut, terkandung rumusan penting untuk berpihak kepada kaum miskin. Ada dimensi memuliakan, keberpihakan, keadilan dan kebaikan yang seharusnya menjadi dasar di dalam bertindak. Jika dikembangkan spirit Al Mauun ini dapat diperluas bahwa golongan-golongan yang termasuk pendusta agama adalah kelompok yang tidak peduli pada kaum miskin, pemimpin organisasi yang tidak peduli pada kaum miskin dan pemerintah yang alokasi anggarannya tidak berpihak pada masyarakat miskin.

Sejak Muhammadiyah berdiri, ribuan amal usaha Muhammadiyah sudah berdiri baik di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Gerakan-gerakan yang telah dilakukan Muhammadiyah juga telah berhasil menjadi contoh dari pemerintah dalam mengembangakn berbagai kegiatan tersebut. Program-program pemberdayaan ekonomi juga banyak dilakukan oleh Muhammadiyah. Tahun 2017, Muhammadiyah juga berhasil melakukan jihad konstitusi dengan dengan melakukan judicial review atas UU Nomer 7 Tahun 2004 mengenai suumber daya air. Meskipun telah banyak peran Muhammadiyah, namun demikian masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah di dalam mengembangkan ekonomi rakyat.

Sebagai salah satu aktor *civil society* penting di negeri ini, sudah selayaknyalah Muhammadiyah memiliki peran strategis di dalam pengembangan ekonomi rakyat. Seperti telah di paparkan di atas, telah banyak peran Muhammadiyah yang diberikan untuk pengembangan ekonomi rakyat baik dari aspek advokasi maupun pendampingan. Tidak hanya spirit Q.S Al maun yang seharusnya menjadi basis keberpihakan terhadap masyarakat lemah. Beberapa teologi lain seperti Q.S Nisa ayat 29, Q.S Al-An-am ayat 135 misalnya sebernanya juga dapat dijadikan sebagai arah pembnagunan ke depan.

Allah SWT sebenarnya telah banyak berfirman di dalam Al quran mengenai bagaimana seharusnya ummat manusia memilki konsep tauhid Sosial. Misalnya dalam Q.S Nisa ayat 29 Allah SWT berfiman : " *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu (Q.S. an-Nisaa' : 29*). Kemudian di dalam Q.S Al-An'am Allah ayat 135 juga berfirman :"Katakanlah : Hai Kaumku, Berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang yang dzalim itu tidak akan mendapat keberuntungan. Sementara di dalam Hadits Riwayat Ahmad juga dijelaskan sabda Nabi : *Barangsiapa yang memonopoli perdagangan makanan pokok selama 40 hari maka dia lepas dari control-Nya dan Allah lepas kontrolnya (HR Ahmad*).

Ayat Alquran dan Hadits tersebut menjelaskan bagaimana seharusnya Umat Islam bertindak da berperilaku. Rasulullah SAW telah menjadi uswatun hasanah bagi umat manusia terkait etos kerja Islami. Beliau telah mampu memainkan peran peran yang penting di dalam hidupnya baik ketika menjadi rasul, kepala dan pemimpin sebuah masyarakat heterogen, panglima perang, kepala rumah tangga dan sebagai seorang *entrepeneuer* (Sutanto, 2013 :55). Pola perilaku Rasulullah ini lah yang seharusnya mampu menjadi rujukan bagi umat Islam di dalam hidupnya. Dengan demikian ummat muslim dapat benar-benar menjadi orang yang bertaqa dan tentunya hal ini akan memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah-masalah sosial di masyarakat.

Berbasis pada spirit teoligi tersebut, setidaknya ada beberapa langkah yang harus dilakuakan oleh Muhammadiyah ke depan. *Pertama*, Gerakan-gerakan advokasi dengan melakukan jihad konstitusi dapat dilakukan secara lebih masif , tidak hanya di level pusat akan tetapi juga di level daerah karena

banyak regulasi-regulasi di level daerah yang sebenarnya tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Pendidikan politik bagi masyarakat bawah agar mereka tidak terus dipolitisasi menjadi penting. Harus ada perubah pikir masyarakat bahwa mereka miskin bukan karena mereka bodoh atau malas akan tetapi karena struktur kebijakan yang secara sengaja menindas dan memiskinkan mereka. *Kedua*, Muhammadiyah harus memformulasikan pola-pola pemberdayaan yang berbasis pada konsep-konsep teologi di atas. Oleh karena itu, pola-pola pemberdayaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah seharusnya berbeda dengan pola-pola pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, LSM maupun lembaga-lembaga lainnya. Pola-pola pemberdayaan terhadap ekonomi rakyat harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir. *Ketiga*¸upaya pemberdayaan terhadap ekonomi rakyat tidak dapat dilakukan oleh Muhammadiyah sendiri akan tetapi sinkronisasi dengan lembaga lain dan optimalisasi kepengurusan Muhammadiyah dari pusat sampai level ranting beserta ortom-ortomnya menjadi penting untuk dilakukan. Agar gerakan tersebut terarah maka *grand design* atau semacam manifesto pemberdayaan ekonomi rakyat dapat dikembangkan sehingga menjadi panduan bagi Gerakan Muhammadiyah di dalam berkiprah.

Penutup

Meskipun upaya memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat ini bukan sesuatu yang mudah akan tetapi harus tetap ada upaya secara sistematis dan kolektif untuk membela kepentingan rakyat. Kalangan intelektual dan berbagai organisasi sosial-keagamaan seharusya menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan cita-cita rakyat ini. Muhammadiyah memiliki kekuatan dan potensi struktur orgaisasi yang luar biasa dan tersebar sampai ke bawah sehingga memiliki kekuatan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat sampai ke lapisan bawah. Sikap kritis harus terus digelorakan untuk mengawal demokrasi Indonesia mencapai tujuan substansial demokrasi kesejahteraan.

TRANSFORMASI SPIRIT AL-MAUN DALAM TIGA GERAKAN DAKWAH BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN

Andi Azhar
Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Taiwan, Kandidat Doktor di Asia University, Taiwan

*"Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan Agama?
Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin.
Maka, kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,
yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat ria, dan enggan mengulurkan pertolongan/ bantuan secara berhasil guna dan berdaya guna."
(Q.S. Al Ma'un ayat 1-7)*

Muhammadiyah, sebagai organisasi muslim termodern dan terbesar dalam hal asset dana amal usahanya, tahun ini memuncaki usianya yang ke 109 tahun. Sebuah usia yang "tak lazim" bagi sebuah organisasi modern yang mampu bertahan dalam pusaran zaman. Muhammadiyah telah melampaui masa sebelum Indonesia lahir, kemerdekaan, hingga era reformasi. Bahkan di usinya yang beranjak ke abad keduanya, Muhammadiyah dihadapkan pada suatu masa yang disebut sebagai era disruptif dengan teknologi sebagai topik pembicaraan utama di semua lini kehidupan. Saat berbicara tentang Muhammadiyah, maka pokok-pokok kandungan Surat Al-Maun menjadi relevan untuk dibicarakan, karena menjadi spirit pendirian organisasi ini. Seiring berjalannya waktu, semangat ini lantas mengkristal menjadi sebuah istilah baru yang bernama Teologi Al Maun yang dipopulerkan oleh Muslim Abdurrahman, salah seorang intelektual Muhammadiyah.

Sayyid Quth (dalam Tafsir fi Zhilalil Qur'an Vol. 24) menjelaskan bahwa

surat pendek ini mampu memecahkan hakikat besar yang mendominasi pengertian iman dan kufur secara total. Boleh jadi definisi iman dan kufur di sini sangat berbeda bila dibandingkan definisi tradisional. Karena kufur (mendustakan agama) di sini diartikan sebagai menghardik anak yatim dan atau menyakitinya (Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin). Logika kufur muncul karena seharusnya saat iman seorang sudah mantap di hati, niscaya anak-anak yatim dan orang miskin tentu tidak akan diterlantarkan.

Pada dasarnya, Allah tidak hanya menghendaki pernyataan-pernyataan dari manusia. Tetapi menghendaki pernyataan itu disertai dengan amalan-amalan sebagai pembuktiannya. Kalau tidak, pernyataan tersebut tidak lebih hanya debu yang tidak ada bobotnya di sisi Allah. Karena memang, islam bukanlah agama simbol dan lambang semata. Iman akan tidak berwujud bila tidak direfleksikan ke dalam gerakan amal shaleh.

Surat Al Maun ini mengajarkan bahwa ibadah ritual itu tidak ada artinya jika pelakunya tidak melakukan amal sosial. Pemaknaan sosial ini lantas diejawantahkan oleh KH Ahmad Dahlan dan murid-muridnya dengan mencari orang paling miskin yang bisa ditemui di masyarakat, kemudian memandikannya dan menyuapinya. Ini adalah implementasi paling awal dari pemahaman semangat Al Maun yang diyakini oleh generasi awal Muhammadiyah. Lantas dengan digandengnya Budi Utomo dan Kraton Yogyakarta, KH Ahmad Dahlan mendirikan sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan.

Seiring perkembangan zaman, semangat dalam teologi Al Maun ini lantas menjadi trilogi-trilogi baru yang menjadi arah gerak Muhammadiyah untuk mengambil perannya sebagai organisasi dakwah Islam. Di babak awal Muhammadiyah, trilogi tersebut didefinisikan sebagai healing (pelayanan kesehatan), schooling (pendidikan), dan feeding (pelayanan sosial). Dalam hal pelayanan kesehatan, Muhammadiyah meyakini bahwa umat Islam harus sehat dan selalu kuat. Nabi Muhammad SAW sendiri telah bersabda bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada Muslim yang lemah. Karena itu, disamping kuat dari segi ilmu pengetahuan, umat juga harus kuat secara fisik.

Dalam hal pendidikan, Muhammadiyah meyakini bahwa pendidikan sangat penting karena akan melahirkan kesadaran, sehingga umat bisa bangkit dan berjuang untuk mengaktualisasikan dirinya. Sedangkan dalam hal pelayanan social, Muhammadiyah yakin bahwa salah satu poin penting dalam narasi Al Maun adalah melakukan pelayanan social kepada

kaum papa yang kala itu tidak terperhatikan. Memperhatikan kaum papa merupakan salah satu ibadah utama yang pemaknaannya berasal dari surat Al-Maun.

Metomonia Semangat Al-Maun di Taiwan

Sejak awal berdirinya Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Taiwan (selanjutnya disebut sebagai Muhammadiyah Taiwan), para *assabiqunal awwalun*nya telah merumuskan trilogi dan trisula Muhammadiyah Taiwan sebagai ciri khas gerakan Muhammadiyah di bumi Formosa berdasarkan teologi Al-Maun yang terbagi dalam dua gerakan mendasar, yaitu gerakan liberasi dan emansipasi. Gerakan liberasi ini dimaknai sebagai gerakan untuk membebaskan umat dari keterbelakangan, dari kebodohan, dan dari ketidakberdayaan. Karena itu Muhammadiyah Taiwan sedari awal berdiri berusaha fokus pada upaya melakukan pembangunan dalam bidang pendidikan (informal) bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan, kesehatan, dan menjadikan umat (dalam hal ini adalah para PMI) agar lebih berdaya sekembalinya ke Indonesia. Sedangkan gerakan emansipasi dimaknai dengan upaya mengangkat harkat dan martabat umat sebagai manusia. Jadi umat bukan hanya menjadi taat secara ritual tapi juga menjadikan umat itu terangkat harkat dan martabatnya.

Dari pemahaman akan teologi Al Maun tersebut, Muhammadiyah Taiwan lantas menjabarkannya menjadi sebuah trilogi yang menjadi ciri khas gerakan bagi Muhammadiyah di Taiwan. Trilogi tersebut adalah gerakan filantropi, gerakan pemberdayaan TKI, dan gerakan dakwah maya.

Gerakan Filantropi (Al-Khairat)

Di Taiwan, terdapat kurang lebih 261.782 warga negara Indonesia yang kuliah, kerja, dan tinggal di Taiwan. Dari jumlah tersebut, 6.000 orang diantaranya berstatus sebagai mahasiswa, 50.000 orang bekerja di ekspatriat, 70.000 orang tinggal dan menikah dengan orang Taiwan, dan selebihnya bekerja sebagai PMI di berbagai sector (formal dan informal). Jumlah tenaga kerja yang fantastis ini cukup dimaklumi seiring adanya kenaikan gaji yang juga fantastis bagi para PMI. Semakin baiknya jumlah gaji bagi para pekerja asing di Taiwan ini ternyata juga diimbangi dengan tingginya semangat berbagi dari para pekerja untuk berbagai hal, seperti sedekah, bantuan bencana, dan lain sebagainya. Sehingga Muhammadiyah Taiwan mencoba memfasilitasi niat baik dari para migran Indonesia di

Taiwan ini untuk menyalurkannya melalui program pemanfaatan yang tepat guna. Muhammadiyah Taiwan melalui lembaga zakatnya menawarkan berbagai program filantropis yang bisa diikuti oleh para WNI yang menetap di Taiwan dengan berbagai program nyata, seperti sedekah dakwah, sedekah untuk para pekerja Indonesia di Taiwan yang mengalami musibah/ kecelekaan kerja, sedekah bencana alam di Indonesia dan berbagai negara di dunia, sedekah untuk Palestina, Kurban untuk Palestina, Zakat dan Infaq yang ditasyarufkan di Taiwan (bagi muallaf) dan daerah-daerah terisolir di Indonesia, serta sedekah pembangunan masjid di Indonesia maupun di Taiwan. Sejak hadir pertama kalinya di tahun 2014 hingga kini, gerakan filantropis Muhammadiyah Taiwan mampu mengumpulkan dan menyalurkan dana mencapai 1 Miliar rupiah yang kesemuanya disalurkan melalui program tepat guna bekerjasama dengan berbagai pihak / lembaga.

Muhammadiyah Taiwan berusaha selalu hadir untuk membantu siapapun yang memerlukan bantuan tanpa membedakan organisasi, suku, agama, ras, bahkan kewarganegaraan. Semangat dari Al-Maun senantiasa dipupuk untuk terus tumbuh diantara semua kader Muhammadiyah Taiwan agar terus bergerak memberikan manfaat bagi sesama melalui gerakan filantropi.

Gerakan Pemberdayaan PMI (At-Tanmiyah)

Dengan semakin banyaknya jumlah PMI di Taiwan, ini berimbas pada berbagai masalah yang timbul dan dihadapi. Salah satunya adalah kemandirian pasca selesai kontrak kerja di Taiwan. Tidak sedikit para PMI yang pada akhirnya harus kembali ke Taiwan untuk bekerja sekembalinya ke Indonesia. Ada banyak factor yang melatarbelakanginya, salah satunya adalah ketidakmampuan mereka dalam mengelola gaji yang telah mereka dapat agar menjadi kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Banyak juga yang pada akhirnya menghabiskan gaji mereka untuk hal-hal yang konsumtifdan tidak bisa digunakan untuk menopang ekonomi keluarga. Ketiadaan *softskill* untuk mengelola aset semacam ini adalah problem yang jamak ditemui diantara para PMI yang telah purna. Alhasil, pasca habis, mereka banyak yang kembali ke Taiwan. Selain itu, ada juga factor lain yang mendasari mengapa mereka kembali lagi ke Taiwan sebagai PMI.

Melalui Majelis yang khusus membidangi pemberdayaan ini, Muhammadiyah Taiwan berusaha untuk memfasilitas berbagai pelatihan *life skill, economic skill, management skill* dan banyak hal lainnya bagi para PMI. Dakwah-dakwah Muhammadiyah Taiwan berusaha menyasar

problem-problem yang riil dihadapi oleh para PMI di lapangan. Bagi Muhammadiyah Taiwan, semangat Al Maun berusaha diejawantahkan dengan semangat untuk terus menjadikan para PMI berdaya dan mandiri sepulangnya ke Indonesia. Muhammadiyah Taiwan berkeyakinan bahwa gerakan liberasi dan emansipasi dari Al Maun salah satunya mewujud saat para PMI ini mampu melanjutkan hidupnya di Indonesia dengan lebih baik tanpa harus kembali ke Taiwan untuk bekerja sebagai PMI. Dengan mereka mampu berdaya dan mandiri di Indonesia, ini akan memberikan efek karambol bagi orang sekelilingnya. Sebagai contoh, saat seorang ibu tidak perlu lagi bekerja sebagai PMI dan bisa berdaya serta mandiri di daerah asalnya, maka akanada anak-anak, suami, dan keluarga yang merasakan kasih sayang secara langsung dari seorang ibu dan istri. Ini akan berbeda saat seorang ibu harus pergi jauh bekerja di Taiwan dan tidak bisa mendampingi proses tumbuh kembang anak dan menjadi tempat yang paling nyaman bagi suami dan keluarganya.

Oleh karena itu, Muhammadiyah Taiwan berkeyakinan, menjadikan PMI Purna sebagai masyarakat yang berdaya dan mandiri adalah sebuah jalan baik dari sebuah gerakan dakwah yang terinspirasi dari semangat Al Maun.

Gerakan Dakwah Maya (Ad-Da'wah)

Secara geografis, Taiwan bukanlah negara yang berpulau-pulau dan terpisah-pisah seperti di Indonesia. Mayoritas masyarakatnya tinggal di kota-kota dan desa yang masih bisa diakses melalui transportasi darat yang sangat nyaman. Namun, sayangnya kemudahan ini tidak bisa dinikmati secara bebas bagi para WNI yang menetap di Taiwan. Kultur kerja di Taiwan mensyaratkan bekerja secara profesional, yang artinya jam kerja di Taiwan sangat ketat. Banyak para PMI dan mahasiswa yang baru bisa istirahat setelah jam 8 malam. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi gerakan dakwah.

Sedari awal, Muhammadiyah Taiwan hadir dengan selalu berusaha mensiasati kondisi ini dengan menghadirkan program-program dakwah melalui jaringan internet (dunia maya). Di masa-masa awal, dikenal KOMAT (Kajian Online Muhammadiyah Taiwan) yang senantiasa hadir tiap minggunya dengan berbagai narasumber yang kompeten. Kajian ini tidak mempertemukan antar personal. Tak jarang narasumber berasal dari Mesir, Russia, Turki, dan Indonesia sendiri. Sedangkan moderator/pembawa acara berada di Taiwan. Dan jamaah cukup mendengarkannya via *radio*

streaming yang bisa diakses melalui handphone mereka masing-masing. Tanpa harus bersusah payah keluar dari rumah atau cuti kerja, para jamaah bisa tetap *ngaji* dari tempat mereka berada dengan cukup bermodalkan sebuah gawai pintar dan koneksi internet. Inilah yang kemudian di patenkan oleh Muhammadiyah Taiwan sebagai ciri khas dakwahnya guna mensiasati kondisi yang ada.

Tak hanya itu, Muhammadiyah Taiwan pun selalu berusaha memberikan inovasi-inovasi dakwahnya melalui jaringan internet, seperti membuka Pesantren Virtual, Tadarus Online, hingga bimbingan membaca Al Quran secara online bagi para pemula. Keterbatasan kondisi yang ada tak lantas membatasi arah gerak dakwah Muhammadiyah Taiwan. Muhammadiyah Taiwan meyakini bahwa perkembangan zaman harus selalu dilihat dari sisi positifnya dan berusaha menariknya dalam konteks gerakan dakwah, sehingga Muhammadiyah Taiwan mampu mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkannya sebagai senjata untuk mencapai misi dakwah Islam yang diemban oleh Muhammadiyah Taiwan.

Trisula Muhammadiyah Taiwan

Dari trilogi Muhammadiyah Taiwan, kemudian diruncingkan lagi menjadi trisula bagi gerakan dakwah Muhammadiyah Taiwan. Seperti namanya, trisula yang berarti sebuah senjata yang sakti, maka trisula ini merupakan senjata-senjata yang dimiliki oleh Muhammadiyah Taiwan guna mencapai tujuan akhir untuk mewujudkan misi dakwah Islam yang didasari semangat Al Maun. Masing-masing trisula dikelompokkan berdasarkan sifat gerakannya seperti yang sudah dijelaskan di poin sebelumnya. Trisula ini berwujud majelis dan lembaga dibawah naungan Muhammadiyah Taiwan.

Trisula ini masing-masing adalah

1. Gerakan Filantropi: Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh Muhammadiyah (LazisMu Taiwan), Lembaga Pengembangan Ranting, Ortom, dan AUM (LPROA).
2. Gerakan Pemberdayaan PMI: Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), Majelis Pelayanan Sosial (MPS), Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU), dan Lembaga Seni Budaya dan Olahraga (LSBO).
3. Gerakan Dakwah Maya: Lembaga Informasi Komunikasi dan Kerjasama Internasional (LIKKI), Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus (MTDK), Lembaga Hikmah Kebijakan Publik dan Advokasi (LHKPA), dan Majelis Pendidikan Kader (MPK).

Selain itu, trisula-trisula Muhammadiyah Taiwan juga mewujud dalam berbagai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan organisasi otonom (Ortom) yang dikembangkan di Taiwan yang jumlahnya tak kurang dari 8 AUM dan 2 Ortom. Keberadaan mereka ini untuk menyokong dakwah Muhammadiyah Taiwan di berbagai bidang, baik ekonomi, social, budaya, dan lainnya. Adanya AUM, secara lebih spesifik, memberikan sokongan dalam hal ekonomi untuk berjalannya program-program dakwah yang dilakukan. Bagi Muhammadiyah Taiwan, ada dua hal yang menjadi kunci agar kegiatan dakwah Muhammadiyah Taiwan senantiasa hidup dan berjalan. Dua hal tersebut adalah amanah dan kemandirian. Dalam upaya menerapkan kemandirian ini, maka Muhammadiyah Taiwan berusaha membangun AUM nya sendiri untuk terus menyokong kegiatan dakwah tanpa membebani pihak lain. Sedangkan dalam hal amanah, Muhammadiyah Taiwan senantiasa berusaha memberikan keterbukaan, laporan, dan informasi terhadap amanah dari masyarakat yang dititipkan melalui Muhammadiyah Taiwan agar terbangun rasa saling percaya, aman, dan memberikan rasa nyaman bagi para pemberi amanah.

Itulah spirit Al-Maun yang ditransformasikan menjadi dakwah berkemajuan *ala* Muhammadiyah Taiwan dengan menjadikan Al-Maun sebagai pusat orbit gerakannya. Ini yang kemudian menjadikan Muhammadiyah Taiwan memiliki ciri khas yang berbeda dengan gerakan dakwah lainnya di Taiwan. Semoga spirit ini senantiasa terbangun dan terpupuk dalam diri setiap kader Muhammadiyah di Taiwan.

ETIKA HIJAU MUHAMMADIYAH

David Efendi
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Pengurus Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Ketua Serikat Taman Pustaka

Tindakan kolektif kaum agamawan menyelamatkan lingkungan disebut dengan "kanan ekologis" atau "kanan hijau"untuk membedakan dengan kiri ekologis—komunitas berideologi Marxis yang terlibat dalam isu ekologi. Islam sebagai 'agama hijau' (Abdul-Matin, 2010) itu sudah tepat karena memang telah mendapatkan pijakan filosofis dan teologis di dalam al-Quran. Kaum islam disebuat dengan 'Kaum Hijau" di dalam bukunya Taufik Abdullah (2017). Keterlibatan ummat islam atau kalangan agamawan di dalam isu ekologi ada juga yang menyebut sebagai kanan hijau (Aditjondro 2003). Ada banyak buku ihwal kanan hijau ini dalam literature mutakhir, seperti Ziauddin Sardar, *The Touch of Midas: Science, values and environment in Islam and the West*(1984),Hamid Dabashi dalam *The Green Movement in Iran* (2011) dan dalam *Iran, the Green Movement and the USA: The Fox and the Paradox* (2010), karya Harfiyah Abdel Haleem *Islam and environment (1998),* buku Negin Nabavi (ed)*, Iran: From Theocracy to the Green Movement* (2012), dan lain-lain yang tak disebutkan satu per satu di sini.

Etika pro lingkungan adalah istilah lainnya dari islam hijau atau islam ekologis. Terminologi 'islam hijau' atau islam sebagai agama yang harusnya ramah lingkungan sudah banyak disinggung dari beragam buku yang kian banyak di sepuluh tahun terakhir ini. Walau demikian, masih sangat membutuhkan penguatan di sana-sini agar gerakan hijau di dalam konteks masyraakat Islam menjadi lebih manifest dan berkesinambungan di dalam mewujudkan upaya pertahanan keseimbangan alam semesta—tempat manusia menyandarkan dan menggantungkan kehidupan dunianya. Manusia secara mutlak tak dapat hdiup tanpa lingkungan hidup itu sendiri sehingga etika lingkungan menjadi salah satu kunci bagaimana manusia

dan alam dapat memandu dan memadu harmoni (*equilibrium*) untuk jangka waktu yang panjang.

Muhammadiyah sebagai lokomitif gerakan islam berkemajuan jelas berada di dalam tanggungjawab mempertahankan keseimbangan lingkungan. Muhammadiyah telah merajut peran ini mulai dari aspek fllosofis, teologis, dan praksis. Misalnya, dalam panduan hidup warga Muhamamdiyah ada nilai-nilai konservasi alam, di Fikih Air, Fikih kebencanaan, dan juga aktifitas pro Lingkungan seperti sekolah sungai (Pendidikan lingkungan), sedekah sampah, dan sebagainya.

Ayat-ayat ekoliterasi atau lingkungan dalam islam jelas cukup banyak walau mendapatkan posisi minor di kalangan agamawan dan pemeluk Islam itu sendiri. Sebagian besar ayat-ayat perintah agama Islam lebih banyak dipelajari dan dikaji dalam konteks kemuliaan hubungan verital antara hamba dan pencipta (khalik, atau hablum mina Allah), dan juga hubungan manusia dengan manusia (hablu minaan nass). Dimensi ketiga hubungan symbiosis mutualisme dalam konteks hubungan manusia dengan alam ciptaanNya kurang mendapatkan pengarusutamaan dan seringkali jatuh pada konsep ontologis penciptaan yang sempit: alam diciptakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran manusia. Orientasi antroposentrisme akut ini juga menjadi nilai-nilai konstitusi di dalam memperlakukan alam sebagai obyek eksploitasi sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 pra dan pasca amandemen yaitu: '…bumi dan air dan apa-apa yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat….." jelas itu merupakan undang-undang yang 'meracuni' orang-orang yang berfikirian sempit bahwa, 'untuk manusia, penghancuran alam sangat diperbolehkan dan alam punya cara sendiri membangun keseimbangan. Peran manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi untuk menjaga alam kemudian dinegasikan—diabaikan secara sadar. Inilah kesesatan epistimologis dan kejahatan ontology yang harus dipangkas segera.

Beragam kejahatatan yang sah menurut aturan di Indonesia: penguasaan SDA, pembalakan hutan, penghancuran biota laut, pembakaran lahan untuk sawit, dan beragam praktik keserakahan yang membuat alam menderita sepanjang hayat ini barangkali menjadi perhatian serius Muhammadiyah. Selain mengeluarkan 'etika hijau' yang saya format terminologi ini dari pelajaran enam ayat di dalam panduan hidup islami warga Muhammadiyah. Juga, dari teologi lingkungan yang diterbitkan oleh majelis lingkungan hidup PP Muhammadiyah.

Etika Lingkungan

Etika merupakan nilai-nilai yang terdiri dari bangunan ontologi, epistimologi, dan aksiologi yang mengutamakan dan memuliakan alam sebagai sesuatu yang bernilai tinggi dan mampu mengantarkan masyarakat dan kehidupan dalam satu bentuk keseimbangan hidup. Etika juga dekat dengan etos hidup, sebuah kerja-kerja yang didasarkan pada spirit pro-lingkungan. Etos itu sebagai karakter kuat seorang muslim. Maka karakter muslim hijau itu juga dapat dijadikan rumus sebagai Muhammadiyah sejati, bukan hanya bendera dan cat papan nama yang berwarna hijau.

Terdapat enam 'ayat' di dalam membangun pemahaman onotologi dan praktik islam hijau atau islam ekologis di Muhammadiyah. Pertama, pandangan Muhammadiyah bahwa. "lingkungan hidup merupakan alam sekitar dengan segala isi yang terkandung di dalamnya merupakan anugerah dan ciptaan Allah yang harus diolah/dimakmurkan, diperlihara, dan tidak boleh dirusak." Dasar dari pemahaman ini adalah dari surat Al Baqoroh ayat 27 & 60; Asy-uara 152, al qashash ayat 77. Kedua, warga Muhammadiyah berkewajiban menjaga lingkungan dengan peran-peran konservasi di dalamnya. Peran konservasi ini akan menentukan kelangsungan proses ekologis yang menjadi penopang kelangsungan hidup, terpeliharanya ekosistem demi terwujudnya kebahagiaan, keselamatan, kesekajteraan, dan kelansungan hidup manusia dan keseimbangan sistem kehidupan di alam raya. Selemah-lemah iman, setidaknya seorang muslim hijau atau warga Muhammadiyah tidak berbuat kerusakan yang menimbulkan mala petaka di dalam alam semesta baik jangka pendek maupun panjang. Kehancuran ekologis yang sengaja dilakukuan seorang muslim, tafsir saya, adalah bentuk kafir terhadap penciptaan alam yang disebut dengan kafir ekologis yang secara langsung juga akan mendatangkan beragam dosa-dosa sosial dan dosa dalam arti yang seluas-luasnya. Muhammadiyah melarang keras warganya menyebabkan bencana alam. Ini etika tentang pelarangan menistakan dna praktik tindakan persekusi terhadap lingkungan hidup.

Ketiga, tindakan amar ma'ruf nahi munkar di bidang pertahanan ekologis. Selain di bidang sosial politik keagamaan, tindakan aktif mengajak memperbaiki lingkungan dan mencegah dari kehancuran sebagai amalan mulia yang melengkapi bidang-bidang lainnya. Banyak kedzaliman, keserakahan, kebijakan yang kontra-ekologis yang harus diurus oleh Muhammadiyah. Panduan ini mengarahkan pada model jihad ekologis semesta yang menysratakan mobilisasi sumber daya islam dan Muhammadiyah untuk memenangkan pertempuran ini. Jihad konstitusi,

jihad agrarian prp keadilan lingkungan yang secara perlahan tapi pasti mulai diupayakan oleh elemen-elemen Muhamamdiyah dan aktifisnya. Orientasi gerakan ini bukan semata-mata untuk keadilan ekonomi, tetapi juga keamanan ekologi yang kini berhadapan dengan sistem global yang complicated, misal, isu perubahan iklim dan global warming. Posisi Muhammadiyah bagaimana? Petisi perubaha Iklim Din Syamsuddin yang ditandatangani lebih dari tiga ratus ribu di change.org? Amanah Muktamar ke-47 tentang perubahan iklim? Muhammadiyah dapat dikata sedang mencari posisi strategis pasca penguatan ontologisnya dalam sistem politik internasional. Panggilan tindakan-tindakan kreatif untuk kelestarian ekologis di ranah lokal dan nasional juga tak kalah mendesaknya.

Terakhir, dari panduan buku hidup ekologis warga Muhammadiyah yaitu mengupayakan tindakan-tindakan nyata dan keberanian berkolaborasi demi terjaganya dan kembalinya keseimbangan lingkungan hidup. Sebagaimana point sebelumnya, posisi startegis Muhammadiyah dapat dirintis dengan pelibatan organisasi di dalam beragam tindakan kolektif berbagai level untuk kedaulatan dan keamanan lingkungan. Upaya-upaya ini sudah mulai terlihat di organisasi otonom, universitas Muhammadiyah, pusat penanggulangan bencana, mejelis lingkungan hidup, dan tentu saja masjid-masjid Muhammadiyah yang semakin banyak menuju pro-hijau: hemat air,konservasi air, tenaga surya, dan seterusnya sebagai kondisi ideal yang mustinya diperjuangkan. Gagasan masjid organic ada di dalam keputusan musypimwil Muhamammadiyah DIY tahun 2016, juga ada beragam upaya mendorong fikih Lingkungan di majelis Tarjih, juga terbitan MPI Kalimantan selatan tentang fikih lingkungan dalam faham Islam/ Muhammadiyah.

Bukan Muhammadiyah yang sebenar-benarnya jika terus menerus melakukan tindakan anti-keseimbangan ekologis, mendustakan keindahan alam raya beserta sistem jaringan hidupnya yang telah diangerahkan serta diamanahkan kepada ummat manusia terkhusus ummat Islam-Muhammadiyah. Bukan juga disebut Muhammadiyah dengan islam sebenar-benarnya, jika pasif tak melakukan upaya preventif, antisipatif, dan konservasi terhadap beragam persoalan alam di era kapitalisme dan neoliberalisme—dimana untuk memuaskan nafsu manusia, pasar, negara mereka tanpa merasa dosa melakukan penghancuran alam kehidupan secara massif, terstruktur, dan sistemik. Muhammadiyah juga perlu memiliki peta yang jelas tentang kerusakan lingkungan dengan melacak berbagai lokasi di Nusantara, saya rasa ekspedisi Islam Hijau

harus dipelopori Muhammadiyah untuk mendapatkan peta yang nyata dan beserta rancangan tindakan-tindakan yang dapat diupayakan secara sungguh-sungguh, konsisten, komitmen, dan terus menerus sebagai bentuk jihad yang aktual.

Gerakan radikal para mafia dan korporasi penghancur planet bumi ini sudah tak terkendalikan, tak dapat dihentikan daya rusaknya, maka yang bisa dilakukan adalah upaya membangun kembali basis pengetahuan ontologis mengenai manusia dan posisinya di alam raya. Sepertinya pilihan ini tindakan lambat, tapi itu tetap berguna karena ini juga soal pertempuran makna—dunia akan hancur, tetapi kehancuran itu memposisikan Muhammadiyah sebagai arus mulia dan sehat, bukan sebagai gerombolan penista lingkungan. Gagasan etika lingkungan ala Muhammadiyah menjadi mendesak untuk ditemukan formulasi atau panduan praktis bagaimana Muhamamdiyah turut aktif terlibat di dalam memproteksi jagad raya dan isinya. Wallahu ‘alam bi ashowab.

PENYELAMATAN LINGKUNGAN SEBAGAI JIHAD MUHAMMADIYAH DI ABAD KEDUA

Rijal Ramdani
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Anggota Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Mahasiswa Doktor
Institute of Natural Resources,
University of Eastern Finland

Sekitar tahun 2013, saat mengikuti diskusi yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Kader PP. Muhammadiah, salah satu pembicara, Hilman Latief PhD, yang baru saja pulang dari studinya di Belanda menyampaikan satu kalimat yang penulis catat dan penulis ingat dengan baik. Kata beliau "Muhammadiyah abad pertama telah berhasil menyelesaikan pendakian satu gunung. Saatnya di abad kedua mendaki gunung yang lain". Yang dimaksud dengan gunung pertama adalah bidang pendidikan, kesehatan, dan urusan yatim-piatu, sementara gunung kedua yang seharusnya mulai didaki adalah issue baru. Menurut hemat penulis, salah satu issue yang harus mendapatkan prioritas utama selain dari issue bencana adalah issue lingkungan.

Pertama, di Indonesia, saat ini, kita dihadapkan pada kerusakan-kerusakan lingkungan yang sangat massive seperti banjir, kekeringan, longsor, kebakaran hutan, sampah, air sungai yang tercemar, abrasi, dan sebagainya. Hal tersebut, baik sebagai akibat dari kebijakan pemerintahan masa lalu yang memberikan konsesi besar-besaran atas izin penguasan lahan, hutan, tambang, dan perkebunan kepada perusahaan-perusahaan tertentu (McCarthy, 2010), maupun ekspansi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap sumberdaya alam akibat dari tekanan kebutuhan ekonomi jangka pendek (Nesadurai, 2018). Thesis Maltus perlu kita

renungkan ulang, semakin tinggi pertumbuhan populasi penduduk maka semakin berat tekanan yang dihadapi oleh alam dari kebutuhan hidup manusia(Urdal, 2005). Lebih-lebih, baik perusahan maupun masyarakat sudah dijangkiti penyakit "serakah"dengan seenaknya menghabisi sumberdaya alam untuk keinginan dirinya sendiri. Inilah yang dinamakan oleh Garret Hardin sebagai 'greedy' (Hardin, 1968) dan di dalam al-Qur'an surat Arrum (30:41) Allah nyatakan:

> (1) *"Telah Nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia (maksiat/ rakus), supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."*

Kedua, ada issue substantial yang harus sama-sama kita renungkan atas konsitusi yang kita miliki. Di dalam UUD 1945 pasal 33 dikatakan, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menegasakan, bahwa Negara adalah satu-satu aktor, yang menguasai seluruh sumberdayaalam, mengontrolnya untuk memberikan izin bagi yang ingin menggunakan, seberapa besar yang bisa digunakan, bagaimana batas-batas penggunaannya, dan seberapa lama penggunaannya itu.Inilah yang dinamakan dengan *state-control regime*, yaitu negara dominan dalam penguasaan sumberdaya alam(Grafton, 2000).

Beberapa ilmuan memberikan kritik, seperti misalkan Nancy Lee Pelluso (1993). Dimana menurutnya, dalam kenyataannya sebetulnya negara, melalui pemerintah, memiliki keterbatasan untuk mengontrol sumberdaya alam yang terlalu banyak tersebut(Peluso, 1993). Sebagai contoh, 60 persen daratan Indonesia ditetapkan sebagai Kawasan hutan(Safitri, 2010), mampukah pemerintah mengontrol sumberdaya hutan seluas itu? Tentu saja berat, dengan keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan, waktu dan dukungan finansial yang ada. Sumber daya alam tersebut lebih banyak menjadi barang bebas yang tidak terurus, atau sebagai*open access common-pool*(Ostrom, 1990). Akibatnya banyak orang yang merambahnya dengan tidak bertanggung jawab baik yang dilakukan oleh korporasi, kelompok masyarakat, maupun perorangan. Sudah dapat dipastikan, yang terjadi adalah kehancuran-kehancuran yang sukar untuk diselesaikan. Garrett Hardin (1968) menyebutnya sebagai "*ruin*". Keseimbangan sebagai titik *equilibrium* menjadi hilang karena alam sebagai penyeimbang dan pengendalinya hancur.

Ketiga, arah pembangunan dunia telah berubah dari *human centre* ke *environmental protection*. Sebagai contoh sebelum tahun 2015, United Nation of Developments Programme (UNDP) menjadikan Millenium Development Goals (MDGs) sebagai target dari pembangunan dunia yang diadopsi oleh hampir seluruh negara di dunia. Sehingga issu Pendidikan, kesehatan, dan pendapatan ekonomi menjadi sangat sentral di era tersebut (Sen, 2001; Ul Haq, 1995). Akan tetapi setelah tahun 2015, arah pembangunan dunia berubah dengan menjadikan lingkungan sebagai target utama atau lebih dikenal dengan istilah *sustainable development goals* (SDGs) (Sachs, 2015). Komunitas internasional selalu mewanti-wanti pentingnya mengedepankan proteksi terhadap lingkungan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi atau kemakmuran yang justru dikemudian hari akan menyisakan kerusakan-kerusakan llingkungan yang tidak terkendali (Harris, 2000).

Sebagai kekuatan civil society dan kekuatan umat Islam terbesar di Indonesia, maka Muhammadiyah memliki tanggung jawab besar untuk menjawab tantangan-tantangan dari kerusakan lingkungan tersebut. Tanggung jawab tersebut, baik dalam tataran fiolosphis dalam memberikan sumbangsih ide tata kelolola baru sumberdaya alam di Indonesia, maupun dalamtataran praksis ikut menyelesaikan masalah-masalah lingkungan yang ada dan mengusahakan terbentuknya masyarakat Islam yang ramah terhadap lingkungan. Tanggung jawab ini tidak boleh dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menjawab tantangan dari luar, seperti tututan dunia internasional dan pemerintah, akan tetapi kita harus memaknainya sebagai bentuk kesadaran Muhammadiyah, sebagai bentuk ibadah dan dakwah warga Muhammadiyah, dan lebih jauh sebagai bentuk jihad Muhammadiyah di abad Ke-2. Sehingga Muhammadiyah bisa benar-benar menjadi “ummatan wasata” dan “khaira ummah”. Umat yang pantas dijadikan sebagai contoh bagi umat lain karena apa yang kita lakukan hanya representasi dari keagungan dan keindahan aklak Nabi Muhammad SAW(Katsir, 1999).

Konsepsi Masyarakat Islam Sebenarnya Yang Ramah Lingkungan

Secara ideologis, Muhammadiyah memiliki basis untuk mengatakan bahwa bergerak menyelamatkan lingkungan dan mengusakan masyarakat yang ramah lingkungan merupakan jihad Muhammadiyah di abad Ke-2. Di dalam Anggaran Dasar dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari

Muhammadiyah adalah “menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”. Banyak ragam tafsir yang menjelaskan bagaimana sebetulnya bentuk atau kriteria dari masyarakat Islam yang sebenarnya tersebut. Akan tetapi mayoritas menjadikan masyarakat Madinah dan negri Saba, yang Allah abadikan di dalam al-Qur’an sebagai cerminan dari masyarakat Islam tersebut.

Sebagai contoh,dengan merujuk pada masyarakat Madinah, M. Yunan Yusuf yang menjelaskan bahwa masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu adalah apabila Individu-individunya utama, sadar akan keberadaannya sebagai abdullah dan kedudukannya sebagai khalifatullah (Nashir, 2010). Di sisi lain sistem dan tatanan sosial, serta budaya yang dikembangkan kondusif bagi terwujudya kehidupan yang aman, adil dan makmur, baik secara materil dan spiritual (Nashir, 2010). Ahmad Salaby membandingkannya dengan masyarakat Jahilayah yang senang mabuk-mabukan, makan bangkai, zinah, tanpa hukum, perbudakan, perempuan direndahkan, dan perang antar suku (Nashir, 2010). Kondisi tersebut berbeda dengan setelah datangnya Rasulullah dimana masyarakat begitu beradab dan teratur; dari mata pedang ke jalan damai, dari egoisitas kekuatan ke peraturan perundangan, dari balas dendam ke Qishas, dari serba halal ke kesucian, dan dari suka merampas ke kepercayaan (Nashir, 2010). Allah panggil di dalam al-Qur’an surat Ali Imran, keindahan masyarakat Islam tersebut dengan sebutan “Khaira Ummah” atau ummat terbaik yang mencontoh akhlak baginda Nabi Muhammad “al-ummah al-muhammadiyah (Katsir, 1999)”.

Sementara sebahagian cendikiawan lain merujuknya pada kata *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*yang terdapat di dalam surat Saba ayat 15 sebagai gambaran dari kesejahteraan penduduk dan kesuburan negri itu di masa lampau. Darinya diambil gambaran bahwa masyarakat Islam yang sebenarnya itu adalah masyarakat yang penduduknya memiliki pola hubungan harmonis sehingga kesatuan dan persatuan antar sesama penduduk dapat terpelihara dengan baik(Markus, 2009). Sekalipun tidak menutup kemungkinan penduduknya berbuat dosa dan durhaka, akan tetapi dengan segara melakukan kontemplasi untuk kemudianmemohon ampunan kepada Allah, dan Allah pun dengan segera memafkan kesalahan-kesalahannya. Keteraturan alam pun terjadi, kerusakan tidak terjadi, karena manusia mau dan dengan suka rela mengikuti aturan Allah, karena dengan seperti itulah niscaya manusia akan mendapati keamanan dan kesejahteraannya (Markus, 2009).

Dari Konsepsi-konsepi itulah, baik dengan merujuk pada kata *khaira umma* maupun *baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur* dapatlah diambil suatu konsepsi oprasional mengenai masyarakat Islam yang sebenar.Secara perseorangan, individu per individu, memiliki karakteristik berTuhan, beribadah serta hanya tunduk dan patuh kepada Allah; perjuangan dan langkahnya hanya berpegang teguh kepada ajaran Allah; beraktivitas di dalam setiap bidang hanya menempuh jalan yang diridhai Allah; dan menjunjung tinggi hukum Allah di atas hukum yang manapun (Markus, 2009). Sementara secara komunal; hidup dalam kesejahteraan baik atas dasar jaminan Negara, kedermawanan, ketersediaan dari alam atau buah dari semangat dalam bekerja; masyarakat yang demokratis karena mengedepankan permuyawaratan dalam setiap pengambilan kebijakan menyangkut urusan bersama; masyarakat yang kondusive karena hukum Allah yang menjadi landasan dan pijakan dalam berinteraksi secara komunal; dan bersifat adil satu sama lain karena saling menghargai dan menjunjung tinggi kesetaraan (Markus, 2009).

Akan tetapi dari konsepsi operasional tersebut belum terumuskan bagaimana sebetulnya kriteria lingkungan dari masyarakat Islam yang sebenarnya itu?Sehingga dalam tulisan ini akan dijelaskan bagaimana basis teologisnya. Dalam hemat penulis, *pertama*, dari sisi lingkungan masyarakat Islam itu dicirikan dengan banyaknya ketersediaan air jernih yang mengalir, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun tumbuhan dan pertanian. Penulis masih ingat, ketika Universitas Muhammadiya Yogyakarta (UMY) akan menyusun pedoman hidup Islami warga kampus, Professor. Dr. Syamsul Anwar, ketua Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah, memberikan nasihat bahwa penting kiranya menjadikan ketersediaan air yang mengalir sebagai kriteria dari kampus Islami. Hal ini dengan merujuk kepada al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 25, dimana bagi orang beriman Allah akan anugerakan Surga yang mengalir sungai-sungai padanya.

(2) “Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan: “Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu”. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya.”

Penulis rasanya patut bercerita bagaimana di sini, di Finlandia, betapa melimpahnya ketersediaan air jernih. Pemerintah kota menyediakan saluran-saluran air yang baik ke rumah-rumah penduduk dan apartemen. Sehingga kita bisa dengan mudah mendapatkannya. Dan air yang disalurkan tersebut, kualitasnya sangat baik. Semua masyarakat meminumnya secara langsung, dengan tanpa dimasak, baik di rumah maupun di kampus. Padahal di musim dingin, sungai dan danau membeku. Ini patut dijadikan sebagai contoh, betapa beradab-nya peradaban air di Finlandia, dibandingkan dengan di kita di Indonesia, dimana kita harus selalu membeli air untuk kita konsumsi sehari-hari, untuk rapat, untuk di rumah, untuk masak, dan untuk mandi melalui PDAM. Bahkan di beberapa tempat, baik di perkotaan maupun pedesaan Indonesia, masyarakat kekurangan air dan membelinya dengan harga yang mahal. Air sumur yang mengering akibat dari tidak terkendalinya konsumsi air tanah dan menghitamnya air sungai akibat dari limbah kimia. Masyarakat berkonfik akibat sumber mata air diklaim oleh perusahaan. Padahal air adalah kebutuhan dasar manusia. Para fislup di masa Yunani sampai pada kesimpulan, airlah sebagai sumber dan asal-muasal dari kehidupan(Gaarder, 1996). Allah nyatakan dalam al-Qur'an surat al-Haj ayat 63:

> *(3) "Apakah kamu tiada melihat, bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau? Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."*

Kedua, karakteristik lingkungan dari masyarakat Islam yang sebenarnya adalah ketersediaan pohon dan ruang terbuka hijau. Sebagaimana kita bisa merujukpada surat Saba ayat 15. Di negri Saba itu "*jannatani an-yaminin wa simalin*", terdapat pohon dan buah-buahan yang ranum di kiri dan kanannya. Keberadaan pohon dan hutan sangatlah penting bagi kehidupan baik sebagai penyedia oksigen maupun pengendali air. Dengan banyaknya menghirup oksigen dari pohon maka kita menjadi sehat. Di Finland ada kepercayaan masyarakat, untuk menjadi sehat itu kita harus sering-sering masuk ke hutan untuk terus memperbaharui kualitas oksigen di dalam tubuh kita. Penyakit-penyakit tertentu bisa disembuhkan dengan banyak beraktivitas di dalam hutan. Dan sejauh mata memandang, dalam perjalanan pertama penulis dari Helsinki ke North Karelia, yang terlihat adalah pohon-pohon rindang dan hutan basah (wetland) yang lebat. Di kampus, di kota, di perkampungan, maka yang terlihat adalah pohon-pohon yang rindang.

(4) “Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): “Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun”.

Lebih-lebih pohon memiliki fungsi untuk mengendalikan air di saat musim hujan, dimana daun pohon yang berjatuhan merupakan sumber makanan dari cacing. Lalu cacing membentuk pori-pori yang berfungsi untuk menyerap air dimusim hujan dan mengeluarkannya di musim kemarau. Akibat masifnya deforestasi dan hilangnya ruang terbuka hijau, maka yang kita saksikan di Indonesia adalah banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Dalam hemat penulis, maka kita bisa mengatakan semakin terjaga hutan di suatu daerah, atau semakin banyak ruang terbuka hijau di suatu kota, maka semakin Islami sebetulnya daerah dan kota tersebut. Begitupun dengan perkampungan, lingkungan kampus, sekolah, dan rumah sakit, semakin banyak pohon rindang yang ada di sekitarnya, maka semakin Islami lah kampung, kampus, sekolah, dan rumah sakit tersebut.

Imam Jalaludin As-Suyuti dan Al-Mahalli menambahkan kesitimewaan dari negri Saba itu tidak ada nyamuk, tidak ada lalat, tidak ada kutu, dan negrinya wangi (As-Suyuthi and Al-Mahalli, 2003). Hal ini menunjukan tidak hanya banyak pohon dan buah-buahan di kanan kirinya, tetapi juga bersih.Tidak ada nyamuk, menunjukan saluran pembuangan air tertutup dan tertata rapi. Tidak ada lalat, menggambarkan tidak adanya sampah yang terurai. Tidak ada kutu, masyarakat sadar akan kebersihan tubuh masing-masing, dan negrinya wangi tidak bau amis ataupun pesing. Betapa indahnya peradaban yang seperti itu. Istana Al-Hamra di Spanyol saat Islam memimpin peradaban di sana diceritakan memiliki karakteristik seperti itu, wangi semerbak, tanpa nyamuk, dan tanpa sampah. Kriteria tanpa nyamuk, lalat, dan sampah ini, pernah diceramahkan oleh sekretaris PP. Muhammadiyah Dr. Abdul Mu’ti di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Danterakhir,secaraindividual,sebagaiorangyangberiman,karakterisitik masyarakat Islam itu memiliki keasadaran bahwa alam ini merupakan ciptaan dan tanda kekuasaan Allah.Sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 164 bahwa “Sesungguhnya *dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera*

yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari berupa air, lalu dengan air itu". Semua yang kita lihat dari alam semesta ini merupakan pancaran dan cahaya dari kekuasaan Allah. Sementara cahaya itu sendiri sulit untuk ditangkap oleh indra.Ketika cahaya itu tiada maka benda-benda pun akan menjadi tiada. Begitulah setiap benda yang kita temukan, pada hakikatnya ia merupakan pantulan dari cahaya, yang apabila cahaya itu tiada maka benda-benda pun akan tiada.Dan tidak mungkin cahaya itu tiada, karena cahaya menjadi sebab sebagai asal-muasal dari setiap benda.

Di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 115 ada ungkapan, "Kemana saja engkau menghadap di sanalah wajah Allah." Hal ini menunjukan keasadaran orang beriman akan keberadaan Allah yang selalu hadir dari setiap apa yang ditemukannya. Sehingga bagaimana mungkin bagi orang yang beriman, memiliki keinginan untuk merusak alam semesta, untuk menghancurkan pohon, menghancurkan tanah, dan mengotori air apabila dia sadar bahwa semua itu adalah bukti kekuasaan Allah. Tantangannya, bagaimana nilai ini tidak hanya dipahami secara individual tetapi harus bisa menjadi etika bersama masyarakat Islam yang sebenarnya. Apalagi sebagaimana manusia, Allah telah menitipkan bumi ini kepada kita, karena Allah telah memilih manusia sebagai "khalifatullah fil ard". Makhluk yang bertanggung jawab untuk melestarikan dan menjaga kesimbangan dari bumi ini. Rusak, hancur dan lestarinya bumi ada di tangan kita.

Peran Dan Tantangan Majelis Lingkungan Hidup

Untuk mewujudkan cita-cita dakwah dari kriteria masyarakat Islam yang sebenarnya itu, Muhammadiyah berdasarkan pada putusan Mukatamar 2005 di Malang telah memiliki Lembaga Lingkungan Hidup yang kemudian hari berubah menjadi Majelis Lingkugan Hidup (MLH), PP. Muhammadiyah. Di dalam diskusi-diskusi yang penulis ikuti selama berkhidmat bersama majelis ini, langkah utama yang ditempuh oleh MLH adalah ingin memberikan kesadaran kepada umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah akan pentingnya masalah lingkungan. Dalam pandangan pimpinan MLH PP. Muhammadiyah, peradaban itu sangat erat kaitannya dengan kebiasaan dan prilaku manusia. Apabila umat Islam sudah memiliki kesadaran lingkungan, maka secara otomatis cita-cita peradaban lingkungan islami itu akan terwujud. Maka MLH PP. Muhammadiyah menerbitkan buku-buku, baik yang sifatnya Pendidikan maupun panduan. Seperti misalkan buku "Teologi Lingkungan", "Menyelamatkan Bumi

Melalui Perbaikan Aklaq dan Pendidikan Lingkungan", "Panduan Gerakan Shadaqah Sampah", "Aksi Hijau di Kantor", dan "Panduan Penggunaan Air".

Selain itu, secara aktiv, dalam menindak lanjuti amanah dakwah di abad industry 4.0 dari pengajian ramadhan PP, Muhammadiyah tahun 2018, MLH PP. Muhammadiyah mewujudkannya dengan mengaktivkan kembali Fcebook, Twitter, Instagram, dan Chanel YouTube. Semua itu ditujukan untuk menyebarluaskan dakwah lingkungan Muhammadiyah ke generasi milenial mellaui *flyer-flyer* yang diambil dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadits berkenaan dengan issue-issue lingkungan, Lebih-lebih, secara atraktive, MLH PP. Muhammadiyah memilki *website* "lingkunganmu. com" yang berfungsi untuk memberitakan, sebagai syiar, seluruh aktivitas Muhammadiyah, baik di tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting yang berknaan dengan dakwah lingkungan. Di dalam website tersebut, juga diupload seluruh dokumen dan buku yang telah diterbitkan oleh MLH PP. Muhammadiyah.

Dalam tetataran kebijakan organisatoris, melalui Rapat Kerja Nasional, MLH PP. Muhammadiyah yang diselenggarakan pada tahun 2016, telah ditetapkan pokok-pokok kebijakan utama dakwah lingkungan Muhammadiyah yaitu Shadaqoh Sampah, Audit Lingkungan Mandiri Muhammadiyah (ALIMM), Sekolah Sungai Muhammadiyah, Sekolah Adiwiyata Muhammadiyah, dan kerjasama Perhutanan Sosial dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK. Istilah shadaqoh sampah digunakan berbeda dengan Bank Sampah, dan ini sifatnya prinsipil. Dimana di dalam shadaqah sampah siapapun bisa bersedekah dengan sampah. Sehingga selain lingkungan bersih, juga mendapatkan pahala dari sedekah sampah tersebut. ALIMM ditujukan untuk melakukan audit terhadap bangunan-bangunan sekolah atau rumah sakit Muhammadiyah, apakah sudah ramah lingkungan atau belum, baik dari segi penggunaan energy maupun saluran limbah padat dan cairnya. Sementara Sekolah Sungai Muhammadiyah, saat ini baru dilaksanakan sebagai percontohan di Sungai Code Yogyakarta, sebagai bentuk dakwah melestarikan daerah aliran sungai yang bisa dikembangkan di daerah-daerah lainnya. Dan dalam perhutanan sosial, MLH PP. Muhammadiyah membantu Fakultas-Fakultas Kehutanan di kampus Muhammadiyah untuk memiliki Hutan Pendidikan.

Secara organisatoris, dalam menguatkan insitusi MLH, di periode ini MLH PP. Muhammadiyah telah dua kali menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional, dan Rapat-Rapat Kerja Regional, per wilayah, seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Indinesia Timur, dan yang akan dilangsungkan

wilayah Sumatera. Seluruh PWM di Indonesia, alhamdulillah sudah memiliki MLH atau bergabung dengan Majelis lain. Akan tetapi belum seluruh PDM dan PCM di Indonesia memiliki MLH. Hal ini tentu menjadi tantangan dalam melakukan konsolidasi untuk membumikan dakwah lingkungan Muhammadiyah.

Tentu saja dakwah lingkungan yang dimotori oleh MLH PP. Muhammadiyah masih jauh dari sempurna. Ada beberapa issue yang harus diresponse di dalam melakukan dakwah lingkungan ke depannya. Pertama, MLH PP. Muhammadiyah perlu kiranya melakukan kajian prinsipil terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah, dengan melibatkan berbagai pakar, untuk menggali, menafsirkan, memahami, ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkenaan dengan lingkungan. Seperti misalkan bagaimana kita memandang hutan, climate change, daerah aliran sungai, wilayah pesisir, sampah, menurut al-Qur'an dan hadits? Hasilnya bisa menjadi Fiqih Lingkungannya Muhammadiyah. Walaupun saat ini sudah ada buku Fiqih Lingkungan yang diterbitkan oleh MLH PP. Muhammadiyah, akan tetapi perlu kajian yang lebih dalam dan comprehensive bekerjasama dengan Majelis Tarjih, sehingga bisa lahir kajian mendalam seperti Fiqih Bencana yang dimiliki oleh MDMC. Hasil dari kajian tersebut, bisa menjadi basis utama dari langkah gerak dawah lingkungan Muhammadiyah.

Kedua, perlu adanya komitmen bersama dari seluruh pimpinan MLH, baik ditingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah, untuk mendedikasikan diri dalam dakwah lingkungan bersama Muhammadiyah. Selama ini, penulis melihat, termasuk diri penulis sendiri, hampir rata-rata pimpinan di pusat, wilayah, dan daerah, memiliki kesibukan masing-masing, baik di amal usaha maupun di non-amal usaha. Menjadi rektor, Dekan, Pejabat Eselon,sehingga waktu yang tersedia untuk dakwah di bidang lingkungan sangatlah terbatas, bahkan bisa dikatakan hanya sebagai waktu sisa. Kita di MLHPusat, Wilayah, dan Daerah patutut belajar, kepada almarhumSaid Tuhuleley yang telah mendedikasikan waktunya untuk berdakwah bersama Muhammadiyah. Apalabila seluruh kita memiliki komitmen yang teguh, maka kekuatan MLH dalam berdakwah akan sangat luar biasa. Mungkin minimal, bagi kita, bisa menyisihkan waktu Tiga hari dalam seminggu untuk kepentingan dakwah lingkungan Muhammadiyah.

Ketiga, perlunya penguatan jaringan MLH PP Muhammadiyah dengan komunitas internasional. Di Eropa misalkan, issue lingkungan menjadi sentral didiskusikan di mana-mana. Menjadi program perusahaan, sekolah, dan sektor-sektor lainnya. Beasiswa program doctoral dan master rata-

rata saat ini diarahkan untuk riset-riset yang berhubungan dengan issue-issue penyelamatan lingkungan. Sekarang kita masih belum maksimal mendapatkan peluang jaringan ini. Ke depan, kita perlu melakukan komunikasi dengan institusi-institusi di tingkatan Internasional tersebut. Langkah awal yang bisa kita lakukan bagaimana kita mengenalkan MHL Muhammadiyah kepada mereka dengan menyediakan website dalam Bahasa Inggris dan menterjemahkan buku-buku terbitan MLH PP. Muhammadiyah. Dan terakhir, perlunya melakukan regenerasi dengan merekrut kader-kader lingkungan dari ortom seperti Pemuda dan NA, IMM, IPM, HW, dan Tapak Suci. Sehingga, kita bisa menyiapkan kader-kader masa depan lingkungan yang akan menggerakan dakwah lingkungan di seluruh Indonesia.

Penutup

Sebagai penutup, di dalam melakukan dakwah, prinsip MLH PP. Muhammadiyah mengedepankan cara-cara "*mauidoh hasanah*". MLH PP. Muhammadiyah tidak ingin melakukan kritik frontal terhadap siapapun, baik pemerintah, swasta, maupun pihak lainnya. Karena prinsipnya, MLH PP. Muhammadiyah bersahabat dengan siapapun.Dakwah tidak boleh menyakiti yang lain dan dakwah harus dilakukan dengan cara yang baik "*Caina herang, laukna beunang*". Dengan kerasnya kritik kita terhadap pemerintah atau sektor swasta tidak menjadikan masalah lingkungan akan semakin ringan dan selesai. Akan tetapi dengan bekerja kolaboratif dengan berbagai pihak, maka mudah-mudahan menjadikan masalah degradasi ekologi bisa diselesaikan.

RESPON MUHAMMADIYAH ATAS PERSOALAN LINGKUNGAN

David Efendi
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Pengurus Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Ketua Serikat Taman Pustaka

Melekat dan kronis dalam tubuh bangsa ini terkait persoalan dehumanisasi, kekerasan, pengrusakan bumi akibat korporasi, dan kesewenang-wenangan 'negara' terhadap rakyat. Di sinilah ijtihad meluruskan kiblat bangsa dalam berbagai aksi mendapatkan pembenaran untuk dilakukan. Salah satu kiprah berkemajuan dalam bidang politik di awal abad kedua ini adalah apa yang dipopulerkan oleh Profesor Dien Syamsuddin (Ketua Umum PP Muhammadiyah) sebagai "Jihad Konstitusi"— mengembalikan dan memenuhi hak rakyat sebagaimana amanah konstitusi dan hukum nurani melalui *judicial review* atau uji material terhadap Undang-Undang. Teologi jihad konstitusi ala Muhammadiyah memberikan banyak 'pelajaran' berharga bagi rakyat terutama membangun kesadaran hak sipil bahwa Negara tak bisa semena-mena untuk mengeksplitasi kekayaan alam atas nama pembangunan dan kemajuan dengan meluluhlantakkan keseimbanan ekologis termasuk juga dampak jangka panjang bagi manusia yang ada di area proyek.

Peran ekologis organisasi Islam ini dapat dianalisa dari nalar etika utama yang digunakan oleh para teolog pembebasan dan teolog ekologi yaitu sebuah gerakan yang dipusatkan pada tiga argumentasi kunci yang meliputi (1) keadilan distribusi; (2) keadilan-lingkungan; dan (3) pertanggungjawaban kolektif (Aditjondro, 2003). Pertama, keadilan distributif melarang keras tindakan yang melanggengkan praktik mendapatkan keuntungan di atas penderitaan orang lain (Nelkin, 1984) sehingga juga tidak dibenarkan negara mengambil keuntungan

eksploitatif dari kekayaan alam dengan menyakiti masyarakat setempat secara berkepanjangan. Sebagaimana disebut oleh Erich Fromm dalam buku Revolution of Hope: Toward Humanized technology, logika pembangunan yang tidak manusiawi merupakan kejahatan besar yang harus dilawan.

Di dalam nilai-nilai Islam di Indonesia juga mendapatkan pembenaran, bahwa mudharat dari pembangunan itu harus lebih utama dihindarkan. Kesadaran etik yang dibalut dengan keyakinan agama merupakan kekuatan penting bagi kubu 'kanan-hijau'—kelompok agamawan yang mempunyai concern serius membela 'keseimbangan' alam karena kayakinan alam semesta adalah titipan Tuhan yang harus dijaga. Kedua, keadilan lingkungan yang merupakan dua sisi mata uang yang sama dari keadilan sosial (distributif) adalah sebuah keniscayaan. Islam madzab Indonesia adalah madzab ekologis yang tercermin dalam teologi Islam rahmatan lil alamien—Islam yang tidak mengancam bagi keberadaan benda dan makhluk ciptaan tuhan.

Dengan demikian, aliran antroposentrisme yang cenderung eksploitatif tidak mendapatkan pembenaran teologis dalam Islam sebab fungsi manusia sebagai 'khalifah' bukanlah tanpa tanggungjawab etik, profetik, dan kolektif. Semua perbuatan yang merusak akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Mahkamah Tuhan. Karenanya, manusia harus berusaha menerapkan laku adil sejak dalam pikiran karena adil dalam ajaran Islam merupakan hal yang paling dekat dengan ketaqwaaan. "Semua perbuatan yang merusak akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Mahkamah Tuhan. Karenanya, manusia harus berusaha menerapkan laku adil sejak dalam pikiran karena adil dalam ajaran Islam merupakan hal yang paling dekat dengan ketaqwaaan." Selain itu juga ada beragam ayat-ayat yang mengajak melestarikan alam ciptaan tuhan dan juga hukum keseimbangan yang menuntut peran manusia sebagai subyek.

Salah satu keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di usia yang melampaui satu abad adalah perhatian Muhammadiyah terhadap persoalan ekologi global. Dalam tanfidz keputusannya yang diberitakan secara resmi dalam BRM edisi 01/September 2015 isu perubahan iklim dan pemanasan global dimasukkan sebagai isu strategis kemanusiaan universal. Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai gerakan 'modern' dan berkontirbusi internasional ketika mampu merespon persoalan global, ketika terlibat di dalam memberikan solusi atas persoalan-persoalan kemanusiaa namun perhatian dan perebutan wacana ekologi Muhammadiyah masih dirasa kurang.

Kontribusi Muhammadiyah

Respon Muhamamdiyah terhadap persoalan global ini secara spekulatif dapat dikatakan sebagai arah baru gerakan Muhammadiyah yang keluar dari tempurungnya, dari *core business* utamanya yaitu dibidang pendidikan (*schooling*), kesehatan (*healing*), dan pelayanan sosial (*feeding*). Jika tidak dikatakan sebagai hal baru dikarenakan Muhammadiyah juga telah merumuskan persoalan lingkungan yang tidak otomatis menhubungkan dengan isu-isu climate change di level internasional yaitu dirumuskannya Fikih Air (Tanfidz keputusan tarjih dari Musyawarah Nasional XXVIII, 2014), lalu dibuatnya lembaga lingkungan hidup (LLH) tahun 2010 di struktur pimpinan pusat Muhammadiyah menjadi naik tingkat sebagai Majelis tahun 2015 (pasca Muktamar ke-47 2015), dan juga secara kerja-kerja kemanusiaan terkait persoalan degradasi lingkungan telah dibentuk Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah (MDMC) tahun 2010 baik di pusat maupun di daerah-daerah. Namun demikian, infrastturktur ekologi dan struktur organisasi ini belum serta merta dapat dikatakan sebagai upaya memberikan kontribusi pada persoalan global warming dan climate change sebagaimana yang divisualisasi secara apik oleh Reonaldo De Caprio dalam film dokumenternya, *before the flood.*

Salah satu bentuk wajah islam progresif di Muhammadiyah abad kedua adalah keterlibatan Muhammadiyah dalam berbagai isu krisis ekologi baik di level daerah, nasional, maupun global. Jika di abad pembaharuan pada level penolakan terhadap kejumudan cara berislam, di abad kedua ini gerakan Muhammadiyah menyasar pada praksis advokasi terhadap alam yang tak terpisahkan dari kebaradaan manusia itu sendiri.

Tiga buku antara lain berjudul: Fikih Air, Teologi Lingkungan: Menyelamatkan Bumi Melalui perbaikan akhlak dan Pendidikan Lingkungan, Fikih Bencana diterbitkan Muhammadiyah memiliki makna tersendiri dari upaya memproblemetasi krisis ekologi dalam format ontologi Islam dan daya transformasi yang akan dihasilkanya. Kontribusi Muhammadiyah juga terkait bagaimana posisi ummat di hadapan semesta raya sehingga peran-peran ekologisnya tidak kontraproduktif dari nilai-nilai ajaran Islam. Banyak praktik kehidupan yang mempertonontkan bahwa Ummat islam sangat konsumtif dan minim upaya-upaya konservasi terhadap alam. Terlebih persoalan air yang begitu besar dipakai oleh ummat Islam. Barangkali situasi ini mengilhami upaya pembuatan fikih air dan juga jihad konstitusi di Muhammadiyah.

Pandangan biosentrisme dan ekosentrisme tentang alam dan lingkungan, pada prinsipnya sejalan dengan pandangan agama Islam juga pandangan Muhammadiyah. Akan tetapi pandangan Islam tidak sejalan atau menolak pandangan antroposentrisme. Yang membedakan pandangan Islam dengan kedua pandangan (biosentrisme dan ekosentrisme), terletak pada "value" (nilai) dan bentuk hubungan antara manusia dengan alam, serta hubungan antara manusia dengan Allah swt yang Menciptakan alam. Menurut pandangan Islam, manusia merupakan bagian dari alam sehingga hak-hak dan kewajiban serta nilai moralnya sama dengan makhluk yang lain. Akan tetapi manusia mempunyai tugas khusus dari Yang Maha Menciptakan alam, yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain yakni tugas sebagai Khalifah (wakil) Allah di muka bumi. Perbedaan yang kedua terletak pada bentuk hubungan antara manusia dengan alam dan antara alam dan manusia terhadap Allah swt. Hubungan antara manusia dengan alam dan antara alam dan manusia dengan Allah swt merupakan bentuk hubungan yang tidak semata-mata bersifat sik, akan tetapi bersifat ruhaniah spiritual, karena berhubungan pula dengan Allah(MLH, 2016).

Muhammadiyah memiliki potensi besar sebagai civil society yang memiliki peran-peran advokasi ekologi dalam sepak terjangnya. Hal ini dibuktikan di kedua organisasi pada tahun 2015 dalam Muktamarnya memutuskan beberapa rencana strategis di dalam isu terkait termasuk persoalan agrarian dan persoalan pengurangan resiko dari perubahan iklim dan atau *global warming*. Di Muhammadiyah sejak 2010 telah intensif mengupayakan judicial review terkait undang-Undang yang mengelola sumber daya alam yaitu Sumber Daya Air dan juga Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Peran-peran ini telah dikenal sebagai gerakan jihad konstitusi yang cukup 'berhasil' dalam periode kepemimpinan Dien Syamsuddin.

Jihad konstitusi seringkali lebih kuat pesan-pesan keadilan dan kemaslahatan untuk manusia ketimbang untuk keberlangsungan ekosistem hidup itu sendiri. Hal ini menysiratkan paradigma yang mengemuka di Muhammadiyah masih sangat antroposentris karena memberikan titik tekan bahwa kerugian atau resiko bagi kehidupan manusia harus diutamakan untuk segera diantisipasi.

Ada empat UU yang 'dimenangkan' oleh Muhammadiyah dan elemen pendukungnya dalam gugatan uji material. Dua diantaranya sangat dekat dengan kepentingan Muhamamdiyah yaitu menyangkut ke-ormas-an (UU No.17 tahun 2013) dan Rumah sakit (UU No.4 tahun 2009), dan dua UU lainnya yaitu UU No.22 Tahun 2001 tentang UU Minyak dan gas Bumi dan UU

No.6 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terbilang sangat strategis sebagai bentuk advokasi dan keberpihakan Muhammadiyah terhadap kepentingan bangsa di masa yang akan datang. Ke-2 UU tersebut belakangan ini adalah keberanian Muhamamdiyah untuk berdiri di depan membela kepentingan rakyat Indonesia dan memang layak disebut pula sebagai bagian dari jihad ekologis. Karena ini jihad, tentu ada banyak tantangan yang menghadang dan konsekuensi resiko yang mesti harus dihadapi. Tentu, beraneka mafia dengan segala kekuasaan beserta kepongahannya akan melawan balik apa yang telah diikhtiarkan oleh Muhammadiyah. Harus diakui bahwa masih banyak kelompok yang menjadi predator bagi negara, baik yang beroperasi secara 'legal' maupun sebagai aktor *shadow state* yang menentukan kebijakan.

Jihad konstitusi Muhamamdiyah tidak hanya memperjuangkan kepentingan internal organisasi Muhamamdiyah karena Muhammadiyah juga harus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Persoalan kemanusian juga mutlak harus ditempatkan diatas nilai-nilai sentiment agama yang sempit. Terlebih yang penulis garis bawahi adalah 'jihad konstitusi' yang terkait dengan persoalan ekologis kekinian. Aksi berkemajuan Muhammadiyah ini mempunyai nilai-nilai yang sangat mendasar antara lain. Pertama, bagi internal Muhammadiyah ada pembaharuan tafsir teologi yang terus menerus dilakukan yaitu dari apa yang dapat disebut sebagai teologi 'tekstual' (fiqh) menjadi teologi al-Maun (transformatif), lalu kemudian teologi insani—dimana teologi insani ini menetik beratkan pada aspek humanism dan juga system manusia yang terhubung dengan system di luar diri manusia itu sendiri (ekosistem semesta). Keterkaitan inilah yang menurut Erich Fromm (2010) dapat menyelamatkan manusia dari ketidakbermaknaan hidup akibat terlalu berorientesi materi. Teologi insani mensyaratkan komitmen untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan, apabila melakukan pembangunan tidak melukai rakyat.

Politik alokatif atau politik nilai yang selama ini didengungkan oleh Muhamamdiyah mendapatkan 'tumpuan' dan 'harapan' bahwa ada tindakan yang dapat dilakukan untuk mengontrol kebijakan publik tanpa harus menjadi partai politik. Di saat yang sama ada kegalauan, bahwa Muhammadiyah dianggap kurang mendapatkan 'posisi' dan 'bargaining' di ranah politik kekuasaan. Upaya menggugat UU yang tidak pro-poor atau tidak manusiawi tidak bisa dianggap sebagai upaya minimalis. Ini adalah 'seruan moral' yang terakomodasi dalam system hokum di

Indonesia sehingga dampaknya lebih bergaung dari pada suara adzan. Jika ada partai yang menjunjung tinggi integritasnya, tentu mereka akan mendukung gerakan yang dipelopori oleh Muhammadiyah ini. Jika tidak pun, Muhamamdiyah akan terus menerus bekerja untuk 'meluruskan kiblat bangsa' dan mengembalikan langit moral anak bangsa yang nyaris melorot.

Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah representasi dari suara kelompok 'tercerahkan' yang galau melihat betapa banyak kekayaan alam Indonesia dijarah habis oleh kepentingan korporasi global, untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia dengan cara-cara yang 'licik' melalui beragam manipulasi pasal dalam Undang-Undang yang berujung pada nestapa bagi rakyat yang berkepanjangan. Sudah terlalu rusak alam nusantara akibat keserakahan kapitalis atas nama pembangunanisme dengan segala justifikasi moral dan akademiknya. Apa yang sedang dipertontonkan di republik ini adalah *the tragedy of the commons* (Hardin, 1968) di mana semua pemilik modal berlomba menggunakan kekuasaan dan kebebasannya untuk mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan dengan merusak keseimbangan ekologi. Kita bisa lihat sekarang apa yang terjadi di Rembang, Kulon Progo, Kebumen Utara, Sumbawa, sampai Timika,Papua. Mereka menunggu konstribusi dari semua pihak untuk menghentikan proyek yang tidak manusiawi.

Seringkali, negara melegitimasi agenda kerusakan lingkungan, dan masyarakat sipil seperti Muhammadiyah akan menuai dosa sosial apabila membiarkan kerusakan di daratan dan lautan akibat ulah tangan manusia (*human error*) yang disponsori pemodal. Tentu, anak-anak bangsa yang mampu melihat hari depan akan bersepakat dengan upaya penyelamatan lingkungan yang dilakukan oleh Muhammadiyah juga berbagai organisasi lingkungan yang sudah sekian puluh tahun bekerja memagari republik dari bandit-bandit lingkungan yang bersembunyi di balik Undang-Undang. Jihad konstitusi dan khususnya isu-isu lingkungan hidup yang kemudian penulis istilahkan 'jihad ekologis' harus berlanjut sebagai bagian dari langkah berkemajuan Muhammadiyah memasuki abad baru-nya.

Sebagai kekuatan 'civil Islam' dan sekaligus kekuatan politik Muhammadiyah sudah terlatih memberikan daya transformasi di tengah masyarakat dan sistem politik yang berubah. Visi pelayanan dan transfomatif sebuah gerakan sosial berbasis agama di bidang Lingkungan hidup sebagai proses yang masih berjalan di Indonesia. Kekuatan islam memiliki pijakan yang fondasional karena di dalamnya ada filsafat yang

digalih dari ajaran islam untuk membangun pemahaman etis, epistimologi, dan ontologi terkait posisi manusia di hadapan Tuhan dan di hadapan alam semesta yang harus dijaga sebagai manisfestai keimanan. Skala kontribusi ini ada di level mikro dan ada di level makro dalam konteks praktik dan juga advokasi politik. Munculnya ide-ide masjid ramah lingkungan, masjid organik, sekolah ramah lingkungan, gerakan kelola sampah di lingkungan Muhammadiyah adalah bagian dari dinamika praktik islam ekologis di organisasi modern ini.

Dinamika Muhammadiyah yang memperluas urusan konvensionalnya (Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial) kepada persoalan kedaulatan ekologis dan ketahanan lingkungan hidup global sangat menarik untuk diperhatikan. Walau masih sangat belum terlihat dampak yang signifikan dalam konteks global, namun kesadaran ini sudah mulai menggeliat di daerah-daerah dengan pengawalan dari Majelis Lingungan Hidup yang telah diperkuat statusnya dari Lembaga. Temuan-temuan ini mengkonfirmasi bagaimaa Islam memiliki kompatibilitas sangat kuat terhadap persoalan lingkungan dimana nilai-nilai kekhalifaan manusia dalam Islam sangat bisa ditransformasikan dalam kerja-kerja advokasi ekologi dan pengamanan ekosistem. Kapasitas organisasi ini menjadikan optimis bahwa Muhammadiyah sebagai civil islam besar dapat memperkuat perannya di masa depan dalam merespon perubahan iklim dan *global warming*.

Hal ini dapat diperlihatkan dalam peran di level nasionalnya yang mana secara akademik dan yuridis Muhamamdiyah telah berhasil memenangkan tuntutannya dalam serial judicial review membatalkan Undang-Undang yang dirasa membahayaakan ketahanan ekologi dan rasa keadilan di tengah masyarakat yang menghadapi beragam persoalan aktual. Dalam konteks ideologis dan teologis, Muhammadiyah juga telah memperbaharui tafsir atas fikih menjadi produk yang progresif dan dapat menjawab tantangan kontemporer. Jika Abu Fatiah Al-Adnani membuat istilah 'fikih global warming', maka di Muhammadiyah telah berhasil merumuskan fikih air (2015) dan fikih penanggulangan bencana (2016). Saya kira sedang ada upaya pengarusutamaan isu ekologis ini dengan pendekatan dan paradigma yang lebih komprehensif, tranformatif dari antroposentrisme Muhammadiyah menjadi eco-oriented (konservasi) sebagai manifestasi dari gerakan kanan-hijau yang spiritnya berasal dari ajaran-ajaran Islam-progresif.

GERAKAN SOSIAL-EKOLOGI MUHAMMADIYAH

David Efendi
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Wakil Ketua LHKP PWM DIY

Islam yang tidak mampu terlibat dalam penyelesaian urusan-urusan kemanusiaan dan lingkungan adalah bukan islam yang sebenar-benarnya. Analogi ini saya kutipkan dengan versi sedikit berbeda dari Prof Syafii Maarif dalam pengantar buku Syarifuddin Zuhri, Dinamika Poltik Muhammadiyah. Kalimat ini menjadi mendesak didiskusikan untuk meyakinkan pada mayoritas pemeluk Islam agar tidak tercerabut dari isu-isu ekologi dan lingkungan hidup manusiai. Sebaliknya, keterlibatan dan kesungguhan untuk masuk dan berjibagu dalam mengawal kedaulatan ekologi merupakan kekuatan teologi yang paling praksis untuk menjaga nalar tauhid sosial-ekologi. Karenanya, kita mencoba mendiskusikan beragam terma progresif dalam pergerakan Muhammadiyah seperti, 'gerakan sosial islam', Islam ekologis (Sandiah, 2016, islam hijau atau agama hijau (Abdul-Matin, 2009), kanan-hijau, teokologi, kanan ekologis, konstitusi hijau, dan lain sebagainaya yang dimaksudkanuntuk memperkuat praksis gerakan ekologi-sosial di tangan kaum beriman.

Salah satu bentuk wajah islam progresif di Muhammadiyah abad kedua adalah keterlibatan Muhammadiyah dalam berbagai isu krisis ekologi baik di level daerah, nasional, maupun global. Jika di abad pembaharuan pada level penolakan terhadap kejumudan cara berislam, di abad kedua ini gerakan Muhammadiyah menyasar pada praksis advokasi terhadap alam yang tak terpisahkan dari kebaradaan manusia itu sendiri. Hal ini pertama dimulai dari langkah jihad konstitusi dan kedua gerakan praksis oleh Pemuda Muhammadiyah. Untuk yang pertama, saya memahami jihad konstitusi sebagai terobosan baru yang [seharusnya] tidak terjebak dalam dikotomis

antara kelompok antroposentrisme dan etika lingkungan. Gerakan ini telah memberikan warna bahwa islam hijau bukanlah imajinasi yang tak pernah ada di muka bumi. Tulisan ini akan memberikan kredit pada praktik dan idealitas kelompok islam yang berada dalam posisi keberpihakannya kepada ekologi dan segala sesuatu yang berada di dalamnya, bergantung pada keberlanjutannya.

Kedua, untuk melihat sepak terjang dan keberanian Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah memasuki ranah-ranah 'gelap' dunia advokasi politik dan juga melalui tekanan-tekanan politik terkait kasus sengketa ekologi yang melibatkan aktor-aktor politik sangat luas mulai dari elite pusat, lokal, organisasi keagamaan, NGO/LSM dan kelompok petani. Gerakan sosial ekologi oleh pemuda Muhammadiyah telah mengisi ruang gerakan di tubuh Muhammadiyah yangs elama ini kosong dan berhenti pada diskusi fikih air atau pada ranah judicial review oleh PP Muhammadiyah dibantu oleh think tank dari Majelis Hukum Ham dan para ahli di Perguruan tinggi Muhammadiyah. Advokasi politik Petani Kerawang dan Petani Kendeng merupakan dua site gerakan yang Pemuda Muhammadiyah cukup Nampak warna dan kejelasan posisinya.

Basis Teoritis

Gerakan sosial berpijak pada kumpulan individu yang bertindak secara sukarela untuk membuat perubahan. Selama ini, gerakan sosial lebih dilihat sebagai 'power-oriented groups' dari pada 'participation-oriented movements'. Keuntungan didedikasikan untuk kepentingan luas ketimbang individual. Anggotanya lintas kelas, dan multi isu untuk gerakan sosial baru. Perubahan yang dikehendaki gerakan sosial adalah perubahan besar pada soal sosial politik. Struktur dan kultur demokratik mempengaruhi derajat sukses tidaknya gerakan sosial Social karena di sanalah perubahan sosial diterima atau ditolak. Gerakan sosial berbasis norma lebih sering ditemukan ketimbang berbasis nilai dalam mengupayakan perubahan sosial di dalam sistem (Morrison, 1971).

Melihat sepak terjang gerakan 'pro-mustadafin' dan keadilan sosial berkepanjangan yang dimanifestasikan dalam ragam advokasi, jihad konstitusi yang memiliki dimensimenjaga keseimbangan lingkungan hidup. Kebaradaan gerakan ini selain isu kebangsaan yang diemban Muhamamdiyah juga dapat dipahami sebagai model gerakan kolektif (Tarrow 1998, Rude 1964, Popenoe 1977) dari beragam basis teoritis yang menghampar mulai dari teori-teori gerakan sosial klasik maupun gerakan

sosial modern. Kiprah Muhammadiyah ini juga dapat dilihat dari model gerakan sosial baru diakibatkan adanya keluhan (Della Porta & Diani) dan terbukannya kesempatan politik (McAdam) dan juga praktik framing media (Snow & Banford) dan mobilisasi sumber daya (McCarthy).

Ketersediaan amunisi teoritis ini di sisi lain akan mendorong berbagai kajian mengenai dimensi akademik gerakan sosial-ekologi ala Muhammadiyah atau kelompok kanan-moderat. Namun disisi lain, keterjebakan dan keterpakauan pada teori dapat menghampat praksis gerakan karena akan banyak waktu dan energy digunakan hanya eksplorasi kemungkinan-kemungkinan, peluang dan ancaman. Untuk mendiskusikan jihad konstitusi, tulisan ini akan lebih banyak mendiskusikan teori gerakan sosial yang meliputi mobilisasi sumber daya, kesempatan politik, dan framing. Ketiga teori ini dianggap cukup representative untuk mengambarkan dinamika gerakan sosial Muhammadiyah menghadapi beragam regulasi atau Undang-Undang yang tidak memiliki orientasi keadilan sosial dan ekologi serta bertabrakan dengan konstitusi yang lebih tinggi.

Mobilisasi Sumber Dayadan Ideologi Keadilan

Pendiri Muhammadiyah, KH Dahlan, sebagai Pembaharu yang ingin mendekatkan agama islam dengan kehidupan sosial keseharian. Agama adalah praksis sosial (Theologi Al-Maun) dan dimaknai sebagai islam Transformatif oleh Muslim Abdurrahman. Jika melihat Kekuatan Muhammadiyah dari sumber daya di dalamnya dan disekelilingnya dapat kita petakan bahwa sebagai gerakan sosial Muhammadiyah adalah raksasa (tidur?) karena di sini kita melihat beberapa potensi besarnya yaitu antara lain, dimensi Lokal-Nasional-Global, Islam-kebangsaan-Kemuhammadiyah, Organisasi yang relatif autonom (Kim Jun, 2010), Organisasi multi-wajah (Nakamura, 1983).

Dalam perspektif Islam, jihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan segala sesuatu. Jihad memiliki akar kata yang sama dengan ijtihad, yakni jahd. Hanya, istilah ijtihad berasal dari hadis, sedangkan jihad dari Alquran. Meski demikian, substansi jihad dan ijtihad adalah mengerahkan seluruh tenaga, daya, dana, dan pikiran (*total endeavor*) sehingga terwujud nilai-nilai ilahiah. Dari berbagai referensi dapat dipahami, jihad tidak harus dimaknai perjuangan fisik. Sebagai contoh, A.R. Sutan Mansur (Ketua Muhammadiyah periode 1952–1957) memaknai jihad dengan pengertian bekerja sepenuh hati. Makna itu sangat

menarik karena jihad tidak dijelaskan dengan kata berperang, melainkan bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas (Biyanto, 2015). Perspektif Sutan Mansur ternyata begitu menginspirasi Muhammadiyah. Ajaran jihad diejawantahkan dalam bentuk gerakan sosial-ekologi untuk memperbaiki kondisi bangsa. Ibarat jarum jam, Muhammadiyah terus bergerak guna melahirkan amal-amal sosial yang bermanfaat bagi umat. Hal ini dapat dengan mudah dimengerti lantaran respon Muhammadiyah selama ini sudah terlihat dalam praksis sosial (*a faith with action*), Muhammadiyah telah berkarya dengan mendirikan berbagai infrastruktur pembangunana manusia seperti lembaga pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, serta lembaga perekonomian ummat.

Ilustrasi diatas penting untuk memperlihatkan bahwa teologi dan ideologi merupakan sumberdaya gerakan sosial yang sangat penting khususnya dalam gerakan Muhammadiyah yang selama ini berhasil disemai dan telah terbukti memiliki daya tahan yang sangat prima. Tentu saja, hal itu juga didukung oleh kekuatan pengetahuan kelompok, dukungan finansial, dan juga militansi individual.

Sedikit berbeda dengan mobilisasi sumberdaya *ala* jihad konstitusi, Pemuda Muhammadiyah juga sangat berhasil melakukan pemberdayaan kemampuan/kemandirian dan resources yang tersedia seperti kebaradaan PP Muhammadiyah dan segala fasilitasnya, media massa, organisasi pemuda lainnya, dan membangun kemitraan dengan NGO nasional maupun lokal. Misalnya, dalam isu reklamasi teluk Jakarta pemuda Muhammadiyah sangat piawai mengGandeng banyak kalangan termasuk menyasar isu-isu korupsi dalam sengketa ekologi. Keberanian ini menjadi sangat relevan untuk mendorong gerakan sosial ekologi yang keberlanjutan. Beberapa daerah, pemuda Muhammadiyah juga mulai cukup *concern* masuk dalam dunia advokasi lingkungan seperti Pemuda Muhammadiyah DIY.

Kesempatan Politik: Politik Harapan dan *Creative Diplomacy*

Teori ini penting untuk memperlihatkan dua sisi, pertama keadaan yang kacau di era demokrasi, dan juga ada harapan yang dapat dikejar untuk mewujudkan keadaan lebih baik. Konsekuensi demokrasi, adalah terbukannya ruang dialogis antara penguasa dan kelompok masyarakat sipil. Muhammadiyah tidak alergi dalam diplomasi bahkan banyak sekali kesempatan Muhamamdiyah bicara dengan elit penguasa. Pemuda Muhammadiyah juga tidak segan untuk menyampaikan masukkan kepada presiden terkait penyelesaian sengketa ekonomi politik yang dikhawatirkan

akan berujung pada petani sebagai korban paling parah—menerima konsekuensi pembangunanisme (meminjam Bahasa Tania Li, *will to improve*) oleh negara + korporasi yang paling berat dan mematikan.

Beberapa regulasi yang digugat Muhammadiyah antara lain: UU Minyak dan Gas Bumi (UU No.22 tahun 2001): BP Migas dinilai sangat berpotensi untuk terjadinya inefisiensi dan diduga, dalam praktiknya, telah membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan; UU kesehatan (UU No 4 Tahun 2009): pasal legalitas RS Swasta; UU Ormas (UU No.17 Tahun 2013): pasal2 birokratisasi organisasi; diskriminatif; UU Sumber Daya Air (UU No 6 Tahun 2004), berlaku UU 11 Tahun 1974 yang dianggap belum menjamin pembatasan pengelolaan air oleh pihak swasta dengan hasil batal total atau sebagian?. Masih ada delapan UU lagi yang akan menjadi sasaran gugatan Muhammadiyah yaitu UU No. 24 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Devisa dan Nilai Tukar, UU No. 25 Tahun 2007 tentang dan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Keberadaan gugatan ini dalam konteks kesempatan politik dan motif rasionalitas nilai adalah dapat dilihat dalam beberapa situasi yaitu sebagai konsekeunsi atas manifesto tafsir pembaharuan Muhammadiyah, karena situasi timpang (rakyat vs penguasa, relasi yang timpang) Mis: keadilan dan kesejahteraan (33 UUD 1945), dan model High politik/politik kebangsaan untuk meluruskan kiblat bangsa

Framing dan Pertempuran Kreatif

Disadari atau tidak, Muhammadiyah dalam jihad konstitusi sangat bergantung pada kebijakan redaksional media meanstream dalam pembangunan opini di media sehingga framing gerakan jihad konstitusi sebagai gerakan yang mendesak kurang membumi bahkan di kalangan kader Muhammadiyah sendiri. Hadirnya infrastruktur media sosial dan media online belum banyak didayagunakan untuk memenangkan opini publik sementara perang makna banyak terjadi di arena media ketimbang arena 'kenyataan'. Hal ini sekaligus memberikan penekanan bahwa sebuah gerakan sosial mutlak membutuhkan media yang gesit dan kreatif.

Selain itu, banyak orang menilai bahwa menguatnya isu jihad konstitusi di Muhammadiyah lebih disebabkan oleh faktor kepemimpinan/personal Dien Syamsuddin yang memang punya derajat kritis berlebih kepada rezim kekuasaan di zamannya. Selain itu, isu ini cukup menarik bagi media dan secara 'genealogi politik' atau posisi politik sangat kritis terhadap kebijakan pemerintahan SBY selama dua periode kekuasaan. Sementara format baru

dibutuhkan di saat rezim menerapkan strategi 'ultra akomodatif' terhadap kelompok Islam dan kelompok apa saja yang dianggap akan 'mengganggu' jalannya pemerintahan. Di sinilah juga tantangan dakwah Muhammadiyah di ruang kekuasan.

Dibandingkan dengan framing dalam jihad konstitusi yang terkesan elitis dan kaku, gerakan pro-keadilan ekologi oleh PP Pemuda Muhammadiyah relatif lebih gesit dan kreatif di dalam mendayagunakan beragam sumber daya mulai TV nasional, lokal, media cetak meanstream dan berbagai opini yang menjalar dari sosial media seperti twitter, Whastapp, facebook, dan sebagainya. Kreatifitas framing oleh pusat media PP Pemuda Muhammadiyah ini nampaknya perlu sekali mendapatkan apresiasi karena telah memperkuat dinamika gerakan lingkungan secara nasional. Pertempuran memang harus kreatif karena untuk mematakan mitos-mitos kesejahteraan yang diklaim oleh rezim negara-korporasi perlu tindakan tindakan yang terus menerus diperbaharui, dan nampaknya Muhammadiyah melalui pemuda Muhammadiyah telah menunjukkan dengan baik model-model gerakan ekologi yang kreatif untuk menghadang gejala menguatnya apa yang disebut oleh Joseph Schumpeter (1942) sebagai *creative destruction*.

Beberapa Catatan Akhir

Memilih jalur advokasi hukum dan politik populer adalah bentuk rasionalitas instrumental sekaligus nilai. Di Muhammadiyah kedua jalur dapat ditempuh karena sumberdayanya tercukupi untuk melakukannya—selain itu, ada bargaining position, kesempatan politik, dan struktur media yang dapat dikolaborasikan sedimikian rupa untuk mendorong kerja-kerja advokasi ekologi dan atau kemanusiaan secara lebih umum.

Untuk menjadikan jihad konstitusi dan gerakan ekologi dalam dimensi lebih luas (bukan melulu isu keadilan ekonomi sosial) akan tetapi persoalan konservasi yang dapat diupayakan dalam kehidupan keseharian (*everyday politics*).Sebagai model gerakan sosial baru Muhammadiiyah mempersayaratkan beberapa hal antara lain. Pertama, gerakan jihad konstitusi ini harus keluar dari jebakan politik aliran dan ideologi sempit. Kedua, sebagai bagian dari kelompok kepentingan harus tidak bertumpuh pada *will to power* tetapi *will to justice*. Ketiga, tidak sebagai gerakan personal yang elitis tapi kolektif—membumi dan populis. Terakhir, tidak mengandalkan struktur lama (yang terpola birokratis), tetapi fleksibel, cair, otonom, dan kreatif dalam program dan kegiatan misalnya dengan kolaborasi dan pemberdayaan sumber daya yang tersedia.

MUHAMMADIYAH, FILANTROPI, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Masmulyadi
Wakil Sekretaris Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah periode 2008-2015, Ketua Bidang Advokasi PP IPM Periode 2006-2008.

Berbagai pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara besar-besaran dalam kurung waktu dua puluh tahun terakhir disamping membawa efek positif, juga ada dampak negatif yang lahir sebagai ikutan dari kegiatan tersebut. Sebagai ilustrasi misalnya, program *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) yang diproyeksikan untuk menyediakan cadangan pangan melalui penyediaan lahan untuk investasi disatu sisi dapat menyediakan lumbung pangan bagi masyarakat di luar Papua. Tetapi bagi masyarakat Papua sendiri kehadiran proyek MIFEE tersebut dapat mengancam kebudayaan mereka yang menyandarkan pola konsumsinya pada sagu sebagai makanan pokoknya.

Pada masa Orde Baru misalnya, program revoluasi hijau yang didorong untuk meningkatkan produksi pangan disatu sisi berhasil meningkatkan produksi. Tetapi jangan salah, program revolusi hijau juga membawa dampak negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat pertanian misalnya hancurnya keanekaragaman hayati, menurunnya kualitas tanah, rapuhnya kelembagaan petani dan lingkungan secara keseluruhan. Lebih jauh revolusi hijau telah menyebabkan hilangnya kemandirian petani dan kemandirian Negara yang tercermin dari ketergantungan pertanian Indonesia terhadap industri petanian dunia mulai dari pengadaan benih, pupuk, perstisida, hingga mesin-mesin pertanian bahkan komoditas yang bisa kita produksi sendiri pun harus diimpor dari negara lain (Irham, 2007: 5).

Proyek-proyek pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah dan swasta yang mengabaikan dampak lingkungan bisa dipastikan tidak berkelanjutan. Bahkan dalam taraf tertentu proyek pembangunan yang

dikerjakan dan mengabaikan pertimbangan lingkungan cepat atau lambat akan melahirkan dampak lingkungan yang tidak diinginkan.

Kita tentu masih ingat bagaimana aspek ekonomi yang dominan mengabaikan pertimbangan teknis dan lingkungan, akibatnya seringkali terjadi penyimpangan seperti yang terjadi dalam kasus menyemburnya lumpur dari perut bumi yang terjadi di Kecamatan Porong, Sidoarjo akibat kekeliruan yang dilakukan oleh korporate swasta yang mengelola blok brantas itu. Dampaknya luar biasa, semburan lumpur tersebut menggenangi 16 desa di tiga kecamatan dengan 8.200 jiwa mengungsi karena terendam lumpur. Peristiwa yang kemudian diabadikan oleh Yazid R. Passandre dalam novelnya Lumpur memberikan pelajaran kepada kita bagaimana aspek lingkungan penting untuk diperhatikan guna menghindari apa yang disebut oleh George Junus Aditjondro sebagai korban-korban pembangunan.

Pada aspek yang lain, fenomena pemanasan global dan anomali cuaca el nino menyebabkan banyak perubahan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Jika eskalasi pembakaran bahan bakar fosil tidak dapat diperlambat, dalam waktu 40 tahun ke depan diprediksi perubahan iklim dan pemanasan global sebagai akibatnya akan menghambat kemampuan kita untuk menanam bahan makanan, merubah distribusi air, peningkatan frekuensi katastrope alam, beberapa wilayah urban tidak dapat dihuni lagi karena kekurangan pasokan sumber air bersih, banjir, dan tenggelam karena peningkatan muka air laut (Effendi, 2016: 5).

Bahkan pemanasan global dapat menyebabkan perubahan suhu air laut yang mengakibatkan dampak lanjutan yaitu kematian ekosistem terumbu karang. Dampak lingkungan tersebut pada akhirnya menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi yang berkepanjangan. Seperti rusaknya ekosistem sawah dan ladang akibat penggunaan pestisida yang berlebihan. Di masyarakat pesisir, kerusakan ekosistem terumbu karang cepat atau lambat akan mempengaruhi sumber penghidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari sumberdaya laut.

Dalam kondisi ekologis yang demikian rumit tersebut muncul pertanyaan bagaimana meletakkan persoalan lingkungan hidup dalam alam pikiran Muhammadiyah? dan bagaimana kontribusi Muhammadiyah dalam keberlanjutan lingkungan hidup melalui filantropi dan pengorganisasian masyarakat. Pertanyaan ini penting untuk melihat bagaimana pijakan konseptual yang menjadi kerangka pikir bagi aktivis Muhammadiyah dalam menggerakkan isu-isu ekologi dan sekaligus memandu aktivis Muhammadiyah dalam praksis gerakan lingkungan.

Muhammadiyah dan Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup merupakan hal yang baru di lingkungan Persyarikatan. Secara kelembagaan isu lingkungan menjadi bagian dari struktur Muhammadiyah terutama pasca reformasi saat PP Muhammadiyah membentuk Lembaga Studi dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup (LSPLH) pada tahun 2003. Sebagai lembaga baru dijajaran persyarikatan Muhammadiyah tidak banyak peran yang bisa dilakukan oleh LSPLH. Maka ketika Muktamar ke-45 di Malang lembaga tersebut bertransformasi menjadi Lembaga Lingkungan Hidup dan berhasil merumuskan teologi lingkungan hidup.

Ada dua fokus yang dikembangkan oleh lembaga tersebut yaitu terkait konsep Teologi Lingkungan dan Pendidikan Lingkungan. Pilihan ini didasarkan pada pemikiran bahwa perubahan *mindset* dan perilaku manusia terhadap alam dan lingkungan merupakan hal mendasar yang harus dilakukan agar proses gerakan dan budaya ramah lingkungan dalam kehidupan masyarakat dapat terwujud. Selain itu, periode ini berhasil melakukan komunikasi lembaga dengan berbagai komponen penggerak lingkungan, baik nasional maupun internasional (Miftahulhaq, 2012).

Bagi Muhammadiyah, keterlibatan diri dalam gerakan penyelamatan lingkungan merupakan hal niscaya yang harus terus digerakkan. Hal ini sebagai wujud tanggung jawab selaku khalifah di muka bumi (Q.S. Al-Baqarah: 30), gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan bagian dari upaya memakmurkan bumi dan alam semesta (Q.S. Hud: 61) (Miftahulhaq, 2012).

Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah melalui pendirian lembaga lingkungan hidup merupakan refleksi dari tumbuhnya kesadaran lingkungan untuk menyelamatkan umat manusia dari berbagai getir ekologis yang kian tergerus. Dan merumuskan teologi lingkungan adalah sebuah langkah cerdas untuk menjadi fondasi gerakan lingkungan di organisasi kaum modernis ini. Dengan dasar ini Muhammadiyah memulai upaya etis dalam perlindungan alam yang merupakan perintah Islam yang banyak terdapat dalam kitab suci. Muhammadiyah menyadari bahwa masalah konservasi dan perlindungan alam merupakan masalah yang sangat penting bagi manusia sebagai mahluk sekaligus bagian dari alam, baik untuk masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang (MLH PP Muhammadiyah, 2015: 59).

Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan kesimpulan bahwa teologi lingkungan hidup yang dirumuskan oleh Muhammadiyah merupakan

kerangka etis dan paradigmatik bagi aktivis dan seluruh elemen Persyarikatan dalam melakukan aksi di bidang lingkungan hidup.

Filantropi dan Lingkungan

Manusia sebagai khalifah Tuhan memiliki tanggungjawab terhadap lingkungan. Tanggungjawab itu menyangkut memelihara (*al-rab*) dan menebarkan rakhmat (*rakhmatan*) di alam semesta ini. Dalam kaitan dengan tanggungjawab manusia inilah, maka filantropi menemukan konteksnya. Jika filantropi dimaknai sebagai perwujudan cinta kasih kepada sesama manusia sebagaimana dalam terminologi bahasa Yunani yaitu philos dan antropos. Maka filantropi lingkungan merefleksikan kecintaan dan tanggungjawab manusia tidak hanya bagi sesama manusia, tetapi berkembang dalam konteks lingkungan hidup sebagai bagian yang eksisting dengan kehidupan manusia di muka bumi ini (Masmulyadi, 2019: 25).

Persoalan-persoalan ekologi yang dihadapi umat manusia sebagaimana digambarkan dibagian awal tulisan ini adalah kenyataan yang tidak bisa dielakkan. Sebagai gerakan, Muhammadiyah tentu perlu merumuskan peran apa yang harus dilakukan dalam kontribusinya terhadap upaya-upaya mempertahankan ekosistem yang ada dan ikut melakukan rehabilitasi terhadap kerusakan yang terjadi. Dengan modal teologi lingkungan yang telah dirumuskannya, Muhammadiyah sebenarnya sudah memiliki fondasi yang kuat dalam menggerakkan upaya-upaya penyelamatan lingkungan. Termasuk dalam hal ini, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah (keputusan Muktamar Jakarta, 2000) menyediakan dasar-dasar yang cukup dalam interaksi dengan lingkungan.

Bagaimana format gerakan filantropi lingkungan Muhammadiyah? Jika merujuk pada W.K. Kellogg Foundation yang mendifinisikan filantropi agak luas, yaitu "membarikan waktu, uang, dan pengetahuan bagaimana cara mengembangkan kebaikan bersama" (Latief, 2010: 37). Muhammadiyah bisa lebih kreatif untuk menformulasi praksis filantropi lingkungan. Artinya bahwa filantropi dibidang lingkungan hidup tidak hanya dalam format yang lazim yang selama ini dilakukan oleh Ornop lingkungan melalui pengorganisasi ditingkat basis, tetapi bagaimana Muhammadiyah mensinergikan banyak lembaga-lembaga yang dimiliki dalam mengerjakan agenda lingkungan hidup ini.

Di tingkat organisasi, focal point untuk kegiatan lingkungan hidup bisa dikoordinasi langsung oleh Majelis Lingkungan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang ada di Muhammadiyah. Misalnya, dalam

penggalangan dukungan uang sebagai pendanaan program-program lingkungan dapat dilakukan oleh Lazismu melalui skema donasi atau program *corporate social responsibility* (CSA) bermitra dengan Lazismu. Dari sisi pendampingan dan pengorganisasian bisa berkolaborasi dengan Majelis Pemberdayaan dan Organisasi Otonom untuk memobilisasi dukungan sumber daya pendamping. Demikian juga dengan perguruan tinggi Muhammadiyah yang dapat menyumbangkan pengetahuan dan bahkan sumber daya mahasiswa dan dosen melalui skema-skema riset dan kegiatan pengabdian masyarakat.

Sebagai ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana kolaborasi antara lembaga filantropi dalam hal ini Baznas dengan LSM/Ornop di Bali yaitu Yayasan Karang Lestari dalam rangka restorasi terumbu karang di beberapa wilayah di Indonesia Timur.

Nah, tentu Muhammadiyah dapat belajar bagaimana membangun kolaborasi, minimal di internal organisasi ini untuk melakukan kerja-kerja lingkungan hidup melalui pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Point yang ingin penulis kemukakan bahwa, kerja-kerja advokasi lingkungan hidup secara teologis di lingkup Persyarikatan tidak mempunyai lagi hambatan-hambatan yang dapat menyumbat akselerasi gerakan lingkungan dengan adanya teologi lingkungan yang telah disusun oleh Muhammadiyah melalui majelis lingkungan hidup. Yang perlu dipikirkan oleh Muhammadiyah kedepan adalah bagaimana membangun kolaborasi dan sinergi antar elemen gerakan lingkungan termasuk dengan lembaga-lembaga internal Muhammadiyah untuk mendukung upaya-upaya penyelamatan lingkungan yang kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan.

Daftar Pustaka

Irham. (2007). *Valuasi Ekonomi dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dalam Kerangka Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan*.

Effendi, H. (2016). *Lingkungan dalam Perspektif Kekinian*. Bogor: IPB Press.

Miftahulhaq. (2012). *Agama dan Penyelamatan Lingkungan*. Diakses 4 Februari 2019.

MLH PP Muhammadiyah. (2015). *Teologi Lingkungan*. Yogyakarta: MLH PP Muhammadiyah.

Masmulyadi. (2019). Filantropi dan Lingkungan Hidup. *Majalah Khittah*, Edisi XVI.

Latief, H. (2010). *Melayani Umat, Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis.* Jakarta: Gramedia.

MDMC: MENEGUHKAN PERAN KEMANUSIAN DAN KEBENCANAAN MUHAMMADIYAH

Rahmawati Husein
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah, Wakil Ketua MDMC PP Muhammadiyah

Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) adalah nama popular dari Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah yang dibentuk pada periode Muktamar 2010. Walaupun peran kemanusiaan dan kebencanaan Muhammadiyah sudah cukup lama, dan meningkat sejak terjadinya Gempa dan Tsunami di Aceh 2015, peran secara terstruktur baru bergerak dengan cepat sejak dibentuknya LPB. Unit baru dalam Muhammadiyah ini menguatkan visi Muhammadiyah yang sejak berdirinya mempunyai visi inklusif dalam memberikan pertolongan kepada siapa saja tanpa mengenal ras, suku, agama dan golongan.

Peran Kelembagaan

Peran secara kelembagaan mendorong terbentuknya MDMC di tingkat provinsi dan di Kabupaten/Kota jika dibutuhkan, khususnya daerah di kawasan bencana. Hingga saat ini tinggal 4 propinsi yang belum memiliki MDMC. Secara kelembagaan MDMC juga makin berpengaruh dan meningkatkan peran di tingkat Nasional, diantaranya dengan menjadi mitra dari Kementrian, Lembaga, dan Badan diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Kementrian Kesehatan, Kementrian Pendidikan, Kementrian Luar Negeri, Kementrian PU, Badan Metereologi dan Geofisika (BMKG). MDMC hampir selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan masukan terhadap kebijakan seperti pembuatan regulasi seperti peraturan Menteri dan peraturan kepala badan, rekomendasi kesepakatan dan kebijakan internasional, perencanaan dll. Di samping itu, MDMC juga dilibatkan dalam evaluasi kebijakan maupun program pemerintah serta

kerjasama pelaksanaan program baik secara nasional maupun turunan program di daerah.Pemerintah melalui kementrian dan lembaga maupun Dinas di tingkat propinsi dan kabupaten mengakui peran Muhammadiyah dalam bidang kebencanaan dan kemanusiaan yang makin kuat.

Di samping dengan pemerintah, peran MDMC di nasional sangat dirasakan khususnya dalam kaitannya pengembangan pembangunan masyarakat sipil melalui keterlibatannya dalam Humanitarian Forum Indonesia, forum organisasi lintas agama untuk kemanusiaan, dimana MDMC menjadi salah satu pendiri, pembina, pengawas dan pengurus. Anggota HFI menjadi pemain utama dalam bantuan kemanusiaan di Indonesia dan menjadi forum satu-satunya di dunia yang secara kelembagaan diakui secara nasional, regional dan Internasional. Secara nasioanal anggota HFI adalah actor utama dalam pemberian bantuan kemanusiaan khususnya pada saat tanggap darurat. Di samping itu Muhammadiyah yang diwakili oleh MDMC menjadi inisiator dan anggota Aliansi Kemanusiaan Indonesia utk Myanmar (AKIM) yang dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai Indonesian Humanitarian Alliance (IHA). Aliansi yang beranggota 11 organisasi kemanusiaan ini memberikan bantuan secara terpadu untuk masyarakat Rohingya yang menjadi korban konflik di Myanmar maupun yang mengungsi di Cox's Bazar, Bangladesh.

Peran dalam penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi

Muhammadiyah memiliki peran yang sangat signifikan dalam merespon kejadian bencana di Indonesia. Setiap tahunnya lebih dari 40 kejadian bencana dilakukan oleh Muhammadiyah dengan MDMC sebagai *leading agency* atau koordinator dari seluruh elemen Muhammadiyah yang bergerak di bidang kebencanaan. Di tahun 2017 bahkan Muhammadiyah merespon hingga 98 kejadian di Indonesia. Sementara tahun 2018 Muhammadiyah merespon hinga 50 kejadian bencana. Walaupun secara jumlah berkurang, namun kejadian bencananya terjadi secara beruntun dan cukup besar seperti Erupsi Gunung Agung Bali, Gempa di Lombok dan Sumbawa, Gempa, Tsunami, Likuifaksi dan Longsor di Sulawesi Tengah, hingga Tsunami di Banten dan Lampung serta Banjir di Sulawesi Selatan.

Dalam penanganan darurat tersebut, Muhammadiyah memberikan dukungan layanan menyeluruh tidak hanya bantuan medis, tetapi mulai dari SAR, pemberian kebutuhan dasar baik makanan, pakaian, hunian darurat maupun sementara, sanitasi, air bersih, penyelenggaraan dapur

umum, layanan psikososial dan pendidikan saat darurat. Sumberdaya Muhammadiyah tidak hanya dari tim MDMC yang sudah terlatih, tetapi juga melalui jaringan Muhammadiyah seperti rumah sakit yang mengirimkan tim medis, sekolah-sekolah yang mengirimkan tenaga gurunya, perguruan tinggi yang mengirimkan mahasiswa dan dosen hingga kelembagaan seperti organisasi Muhammadiyah di propinsi dan kabupaten dan kota serta organisasi otonom seperti Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah dan Kokamnya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci dan Hizbul Wathon yang mengerahkan pimpinan maupun anggotanya. Dalam satu kali operasi darurat yang besar seperti di Lombok dan Palu, Muhammadiyah mampu mengerahkan lebih dari 800 relawannya yang bekerja lebih dari satu minggu hingga berbulan-bulan

Selain sumberdaya manusian, dukungan sumberdaya finansial dikelola oleh lazismu yang beberapa tahun terakhir bisa menggalang dan mengumpulkan dana kemanusiaan yang tidak sedikit. Beberapa contoh jumlah dana yang berhasil terkumpul, untuk Rohingya, lazismu berhasil mengumpulkan dana sebesar 20 Milyar yang dikumpulkan melalui lazismu di seluruh Indonesia, sedangkan untuk Gempa di NTB dana yang berhasil dikumpulkan mencapai 14 Milyar, sementara untuk Palu berhasil mengumpulkan 13 Milyar walaupun jarak antara kejadian bencana di Lombok NTB dengan di Sulawesi Tengah sangat dekat. Potensi dana yang tidak sedikit ini menunjukkan kedermawanan di kalangan Muhammadiyah cukup tinggi. Belum lagi dukungan yang diberikan oleh Rumah Sakit, Perguruan Tinggi serta masyarakat luas baik secara langsung maupun dalam bentuk *in kind/natura.*

Melalui sumber daya manusia dan dana yang besar Muhammadiyah sudah melayani puluhan ribu penyintas dan masyarakat terdampak lainnya dilayani pada saat tanggap darurat. Untuk Palu saja ada 12.952 menerima manfaat kesehatan secara langsung dan puluhan ribu penerima manfaat secara tidak langsung. Sementara layanan kesehatan di Bangladesh penerima manfaat langsung mencapai 29.680. Di samping itu puluhan ribu menerima pelayanan lain seperti penerimaan logistik, Pendidikan saat darurat, hunian darurat, hunian sementara, air bersih maupun psikososial.

Pemberian layanan Muhammadiyah tidak hanya dilakukan pada masa tanggap darurat namun juga dilakukan pada masa pemulihan melalui upaya membangun kembali penghidupan masyarakat melalui kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, serta membangun fisik fasilitas umum seperti masjid,

panti asuhan, klinik, sekolah dan perguruan tinggi khususnya yang dimiliki Muhammadiyah untuk kepentingan umat yang lebih besar.

Keterlibatan Muhammadiyah dalam tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi ini sejak awal merupakan bagian dari visi Penolong Kesengsaraan Oemom (PKO) yang menjadi spirit KHA Dahlan sejak awal. Peran dalam tanggap darurat ini dirasakan tidak hanya untuk kalangan Muhammadiyah tetapi bangsa dan negara Indonesia hingga masyarakat di negara lainnya yang membutuhkan. Penghargaan yang diberikan kepada MDMC baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sebagai organisasi penanggulangan bencana yang terbaik ataupun organisasiyang punya peran pada saat tanggap darurat, menunjukkan bukti bahwa Muhammadiyah memiliki perang yang penting dalam penanganan bencana di Indonesia maupun Internasional.

Di samping penghargaan, pengakuan juga diberikan dengan ditunjukkan MDMC menjadi focal point EMT (*Emergency Medical Team*) di Indonesia serta diterima untuk melakukan proses akreditasi EMT yang dilakukan oleh Badan Kesehatan PBB (WHO). Selain itu, berkat peran yang signifikan dalam urusan kemanusiaan membuat MDMC dipilih untuk menjadi SC Regional Asia Utara dan Tenggara untuk Persiapan Pertemuan Puncak (KTT) Kemanusiaan atau World Humanitarian Summit mulai 2013-2016. Hal ini meneguhkan peran Muhammadiyah yang dipilih secara khusus untuk merepresentasikan, memberikan rekomendasi dan masukan berdasarkan pengalaman sebagai organisasi kemanusiaan nasional maupun lokal.

Di samping itu, dengan perannya di tingkat nasional, regional dan Internasional, maka wakil ketuaMDMC dinominasikan Kementerian luar negeri yang kemudian disetujui oleh Sekjen Persarikatan Bangs-Bangsa (PBB) untuk menjadi anggota pengarah dana PBB untuk tanggap darurat kemanusiaan global (UN CERF, United Nation Central Emergency Response Fund). Kepercayaan ini menunjukkan peran Muhammadiyah tidak lagi hanya di tingkat lokal dan nasional tetapi juga berkontribusi di tingkat global.

Peran dalam Kesiapsiagaan dan Mitigasi bencana

Penanggulangan bencana tidak hanya bertumpu pada penanganan darurat yang reaktif, namun perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana. Hal ini diperlukan karena Indonesia merupakan daerah yang rawan bencana baik bencana alam hidrometereologis seperti banjir, longsor, kekeringan,

dan puting beliung, bencana geologis seperti gempa bumi, tsunami, liquifaksi maupun ancaman bencana lain seperti epidemi dan bencana sosial seperti konflik. MDMC bekerjasama dengan majelis dan lembaga di Muhammadiyah lainnya bekerjasama.

Meningkatnya jumlah kejadian bencana dan tingginya risiko bencana yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, mendorong pentingnya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Sejak kejadian gempa di Aceh, Muhammadiyah telah mulai bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan upaya kesiapsiagaan khususnya di masyarakat, sekolah dan fasilitas kesehatan. Kegiatan tersebut menjadi lebih terstruktur dan meningkat setelah LPB atau MDMC dibentuuk tahun 2010.

Salah satu kontribusi besar Muhammadiyah terhadap kesiapsiagaan di Indonesia diantaranya adalah melalui terpilihnya MDMC menjadi Pembina dan Pengurus Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana serta menjadi anggota Konsorsium Pendidikan Bencana di Indonesia. Di samping itu Muhamamdiyah melalui kerjasama MDMC dan Majelis Tarjih telah menerbitkan Fikih Kebencanaan yang memberikan sumbangan tentang nilai, pedoman, petunjuk agama dalam memahami bencana dan memberikan dasar penanganan bencana. Fikih Bencana menjadi sumber rujukan keagamaan dan kebencanaan tidak hanya di Indonesia tetapi juga diminati negara-negara lain karena sudah diterjemahkan dalam Bahasa Inggris.

Di samping itu kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan juga diwujudkan dengan terbentuknya Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana yang ikut memberikan kontribusi terhadap penelitian dan pengembangan studi dan praktek tentang pengelolaan bencana di Indonesia. Kekhasan organisasi Muhammadiyah yang memiliki perguruan tinggi sekaligus memiliki jaringan dari pusat hingga di tingkat akar rumput, menjadikan produk penelitian dan pengabdian merupakan produk yang unik, terapan dan sering berdasarkan praktek nyata yang berbeda dengan perguruan tinggi yang tidak memiliki jaringan seperti Muhammadiyah.

Sebagai bagian dari jaringan dari Konsorsium Pendidikan Bencana, MDMC juga mengembangkan Sekolah dan Madrasah Aman Bencana (SMAB). Pengarus utamaan PRB ini menjadi penting karena jumlah sekolah, madrasah dan pondok pesantren serta boarding school Muhammadiyah yang banyak dan tersebar di Indonesia dan masuk di lokasi yang rawan bencana. Dengan adanya program ini tujuan sekolah aman tidak hanya fisik tetapi juga murid, guru serta orang tua siswa dan masyarakt sekitar juga dapat ditingkatnya ketangguhannya.

Di samping itu Muhammadiyah melalui program Kesiapsiagaan Rumah Sakit dan Kesiapan Masyarakat untuk Kedaruratan dan Bencanayang bekerjasama dengan DFAT Australian merupakan kontribusi nyata Muhammadiyah untuk tidak hanya menguatkan RS Muhammadiyah tetapi mendorong perlunya RS aman bencana dan sistem kesehatan kedaruratan di Indonesia. Pada program tersebut, MDMC Bersama MPKU Muhammadiyah mengadvokasi dan menyusun kurikulum, pedoman, petunjuk serta sistem kesehatan kedaruratan Bersama stakeholder lainnya seperti Kementrian Kesehatan, BNPB, Komite Akreditasi RS, serta Persatuan RS seluruh Indonesia. Peran Muhammadiyah dibidang kesehatan darurat dan bencana dalam meletakkan dan mempraktekkan sistem kedaruratan medis diakui dan dijadikan referensi berbagai pihak, termasuk menjadi fasilitator dan trainer di tingkat lokal, nasional dan regional. Melalui program tersebut, ada peningkatan kapasitas dan jumlah tim tim medis Muhammadiyah sehingga dapat berperan lebih banyak dan lebih lama dalam memberikan bantuan kemanusiaan.

Sementara itu, penguatan kesiapsiagaan di tingkat akar rumput melalui program Masyarakat Tangguh Bencana(Mastana) juga menjadi salah satu contoh bagaimana kesiapsiagaan di tingkat masyarakat bisa dilakukan tidak secara top down, tetapi secara bottom up. MDMC mampu memfasilitasi terbentuknya mastana yang produknya berupa rencana kesiapsiagaan desa yang ditanda tangani oleh Lurah/Kepala desa merupakan contoh keberhasilan mendorong ketangguhan masyarakat di tingkat yang paling bawah.

Selain itu MDMC terus menguatkan kapasitas anggota, pimpinan dan kelembagaan untuk penanggulangan bencana yang didukung oleh CRS melalui program PEER. Penguatan kapasitas ini mampu meningkatkan kecepatan dan efektifitas respon Muhammadiyah sehingga dapat membantu mengurangi risiko bencana di seluruh Indonesia.

SEKOLAH MUHAMMADIYAH AMAN BENCANA

Arif Jamali Muis
Wakil Ketua MDMC PP Muhammadiyah

Dalam catatan pusat studi gempa baru 20% patahan yang terpetakan dgn baik, masih ada 80% yang belum terdata karena kekurangan dana untuk penelitian. Bahkan pusat data gempa (pusgem) merilis fasilitas pendidikan di zona kerentanan tinggi sebanyak 2892 bangunan sekolah tempat anak – anak bangsa menimba ilmu dan merajut masa depan, 40 rumah sakit dan 126 puskesmas, ada 4.103.975 jiwa. Pusgem juga menyebut infrastruktur transportasi yang masuk daerah rawan ada 11 pelabuhan, 21 terminal, 237 ruas jalan propinsi sepanjang 652,3 km, 31 ruas jalur kereta api dengan sepanjang 83,3 km, dan 15 ruas jalan tol sepanjang 20,1 km.

Muhammadiyah Disaster Manajemen center juga merilis data kerawan banjir terutama untuk sekolah – sekolah Muhammadiyah di DIY dan Jateng, 445 sekolah muhammadiyah dalam kategori sedang, dan 77 sekolah dalam kategori kerawanan banjir tinggi, dari 1213 sekolah. Data indeks resiko bencana yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis ada 322 kabupaten/kota dari seluruh Kab/Kota di Indonesia memiliki indeks risiko bencana tinggi atau sekitar 65%, dan 174 kabupaten/kota memiliki resiko bencana sedang. Tidak ada kabupaten/ kota di Indonesia yang memiliki kelas risiko rendah terhadap ancaman bencana.

Majelis Dikti-Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah mencatat dana yang dibutuhkan untuk perbaikan Sekolah dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas akibat gempa Jogja-Jateng tahun 2006 Rp 189,179,370,000. Dana sebesar itu hanya untuk sekolah Muhammadiyah, belum lagi jika ditambahkan sekolah negeri dan sekolah swasta lainnya, betapa besar kerugian materi dan non materi akibat kejadian bencana. Data–data diatas seharunya menyadarkan kita, sebagian

besar masyarakat termasuk anak–anak yang bersekolah berdampingan dengan resiko bencana, dengan kesadaran tersebut pada tingkat lembaga pendidikan (sekolah) harus mulai melakukan langkah–langkah antisipasi untuk pengurangan resiko bencana.

Data diatas sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa masyarakat kita bersanding dengan kerawanan bencana, bagi masyarakat Indonesia mitigasi bencana merupakan hak sekaligus kewajiban, bahkan perlu diwacanakan untuk masuk dalam UUD Negara karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Mengetahui tingkat kerawanan berarti kita dapat meminimalisir kerugian baik jiwa maupun materi. Menarik definisi *disaster* yang sering kita terjemahkan sebagai bencana, menurut kamus *Cambridge Advanced Leaner's Dictionary "an event which result in great harm, damage or death or serious difficulty"*, suatu peristiwa yang menakibatkan kerugian besar, kerusakan atau kematian atau kesulitan yang serius, berlandaskan pengertian ini sesungguhnya kejadian alam atau kejadian disekitar kita tidak dapat secara otomatis menjadi bencana, ketika kejadian tersebut tidak menimbulkan apa yang didefinisikan sebagai *disaster*. Kejadian seperti gempa, banjir, longsor, dan lain sebagianya bisa jadi tidak menjadi bencana jika kita memahami cara mengurangi resikonya. Persyarikatan Muhammadiyah yang salah satu *core* amal usahanya adalah pendidikan menjadi penting untuk mengagasan dan menjadikan mitigasi bencana sebagai bagian penting dari proses pendidikan. Majelis Dikdasmen harus menjadikan sekolah aman bencana prioritas bagi sekolah–sekolah Muhammadiyah.

Membentuk Sekolah Aman

Sekolah adalah tempat bagi generasi masa depan merajut cita–cita, maka sekolah harus dirancang seaman mungkin agar anak–anak dapat merajut cita–citanya. Kesadaran ini penting dibangun oleh pelaku pendidikan, karena bencana kadang datang tidak dapat diduga. Disisi lain hak anak di sekolah adalah mendapatkan rasa aman.

Kesadaran membentuk sekolah aman bencana ini di lingkungan sekolah Muhammadiyah sudah mulai terbentuk, dalam catatan Lembaga Penanggulangan Bencana/*Muhammadiyah Disaster Management Center* Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah beberapa kali melakukan pendampingan untuk membentuk sekolah aman bencana, memang belum banyak kesadaran sekolah untuk melakukan mitigasi bencana di sekolah, baru ada 42 sekolah yang pernah dilakukan pendampingan untuk membentuk sekolah aman bencana.

Keinginan untuk memasukkan pendidikan kebencanaan dalam kurikulum, jangan hanya berhenti di pembelajaran saja yang hanya menghasilkan aspek kognitif, karena jika kurikulum diartikan hanya aspek pembelajaran dan mata pelajaran maka pendidikan kebencanaan tidak akan mengubah apapun, kita berharap pendidikan kebencanaan menyentuh pada aspek kepribadian yang menjadi sikap hidup peserta didik.

Ada tiga pilar utama membentuk sekolah aman bencana, pilar pertama fasilitas. Data menunjukkan banyak fasilitas sekolah yang rentan terhadap bencana, Sekolah dibangun tanpa mempertimbangkan faktor–faktor keamanan terhadap bencana. Ketika sekolah sudah berdiri seperti sekarang ini untuk melakukan perbaikan gedung tentu memakan dana yang tidak sedikit oleh karenanya yang bisa dilakukan adalah memperbaiki hal–hal kecil seperti meja kursi yang aman, tempat almari, pintu dan lain–lain agar anak–anak aman dalam bersekolah. Disisi lain jika pemerintah memberi bantuan fasilitas kepada lembaga pendidikan maka faktor aman bencana menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi.

Pilar kedua Manajemen Sekolah, sekolah adalah tempat terlama setelah rumah bagi anak–anak menghabiskan waktu hidupnya, ketika terjadi bencana dan mereka berada disekolah maka menjadi tanggung jawab sekolah untuk melakukan penyelamatan, oleh karenanya kepala sekolah, guru dan warga sekolah harus paham apa yang harus dilakukan. Harus mulai disusun panduan – panduan atau SOP oleh sekolah, sosialisasi hingga melakukan kegiatan simulasi secara berkala yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Manajemen Sekolah aman Bencana pada akhirnya dapat menjadi budaya dan membentuk karakter warga sekolah dalam menghadapi bencana.

Pilar ketiga Kurikulum, pendidikan pengurangan resiko bencana di sekolah sudah selayaknya masuk dalam kurikulum pembelajaran di kelas, tentu tidak dengan memunculkan mata pelajaran baru, akan tetapi terintegrasi melalui mata pelajaran yang sudah ada, misalkan mata pelajaran IPS, IPA, Agama dan mata pelajaran yang lainnya. Guru harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kebencanaan agar mampu mengkaitkan mata pelajaran yang diajarkan dengan kejadian bencana. Pengintegrasian pemahaman kebencanaan ke dalam mata pelajaran penting agar siswa tidak terbebani dengan materi baru tetapi dapat memahami tentang kebencanaan secara memadai.

Kesadaran Memulai

Kebetulan saya mempunyai kesempatan untuk hadir dalam konferensi nasional pendidikan bencana, dalam forum diskusi terlontar bahwa persoalan krusial dari implementasi pendidikan bencana ini adalah pertama kesadaran para pengelola pendidikan yang masih minim tentang resiko bencana, kalaupun ada yang melaksanakan kebanyakan karena ada proyek dari pemerintah. Kedua persepsi bencana adalah takdir tuhan yang harus diterima dengan ikhlas dan sabar. Benar adanya bencana adalah kehendak Tuhan akan tetapi usaha pencegahan dan pengurangan resiko bencana adalah perintah Tuhan juga, maka ikhlas dan sabar diwujudkan dalam kegiatan pengurangan resiko bencana di sekolah.

Sudah saatnya lembaga pendidikan harus menginisiasi sendiri program–program sekolah aman bencana tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah atau lembaga lain, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah harus mulai menginisiasi sekolah secara mandiri dapat memulai melakukan langkah–langkah kecil menerapkan sekolah aman bencana. Tentu berdosa bagi kita jika terjadi bencana saat anak–anak di sekolah, mengalami musibah karena kita tidak sigap melakukan antisipasi padahal sangat mungkin itu dilakukan.

BAB 3

MUHAMMADIYAH DAN POLITIK KEBANGSAAN YANG BERADAB

MUHAMMADIYAH, PANCASILA, DAN IDEOLOGI NEGARA-BANGSA

Bachtiar Dwi Kurniawan
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sekretaris Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah

Sejak zaman dahulu kala, bangsa Indonesia mempunyai peran penting dalam pergaulan dunia (global). Peran penting ini didukung oleh letak strategis bangsa yang berada di persilangan dua benua dan dua samudera yakni Benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Oleh karenanya nusantara sejak zaman dahulu kala menjadi arus manusia, barang dan jasa. Para pedagang nusantara dan lintas bangsa telah menjadikan nusantara sebagai jalur pelayaran kapal-kapal dagang para saudagar. Nusantara menjadi jalur yang sangat sibuk dan padat akan aktivitas ekonomi kala itu. Terlebih nusantara adalah daerah yang sangat kaya dengan sumberdaya alam yang melimpah.

Tidak hanya menjadi arus barang dan jasa, perdagangan dan ekonomi, arus manusia telah menjadikan nusantara sebagai *melting pot*, bertemunya berbagai macam cara pandang hidup masyarakat, pemikiran, khasanah antar bangsa, agama dan bahkan ideologi. Letak persilangan Nusantara yang di antara dua Benua dan dua Samudera ini, manjadikan Bangsa ini menjadi tempat persilangan ideologi-ideologi yang berkembang dalam masyarakat dunia. Persilangan itu telah menjadikan nusantara sebagai medan perebutan pengaruh dan pertempuran ideologi dunia untuk menancapkan pengaruhnya di bumi Nusantara. Entah berapa banyak ideologi yang sudah merasakan panasnya kontestasi ideologi di nusantara ini, mulai dari ideologi yang bercorak kapitalis, sosialis, komunis, nasionalis dan agama.

Uniknya, tidak ada ideologi besar dunia yang mampu mendominasi alam pikiran masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menemukan-

dan mempunyai corak ideologi tersendiri yang terlepas dari dominasi-pengaruh daripada beberapa ideologi besar yang berkembang di dunia kala itu. Ideologi Kapitalis-liberal tidak bisa menembus kerangka berfikir para pendiri bangsa untuk menjadikanya sebagai landasan-dasar negara ini. Ideologi sosialisme-komunisme walau pernah muncul dan bersemai tetapi gagal berkembang di tanah air. Ideologi agama tidak juga mendapat tempat untuk menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa. Bangsa Indonesia tidak bernegara berdasarkan ideologi sosialisme-komunisme dan bangsa ini juga tidak berdasarkan ideologi kapitalis yang memuja liberalisme atau juga bangsa ini tidak menjadikan agama sebagai ideologi negara.

Istilah Pancasila mengemuka pada saat Soekarno menyampaikannya dalam pidato di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dalam Pidato itu Soekarno menyampaikan lima prinsip yang menjadi titik persetujuan (*commondominator)* segenap elemen bangsa. Pancasila menurut Soekarno adalah filsafat dasar (*philosofischeGrondslag*) atau pandangan dunia (*weltanchauung*) yang menjadi pemersatu. Kelima prinsip itu adalah Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip itu disebut Soekarno sebagai Pancasila. Tawaran lima prinsip mendapat respon dan masukan-masukan yang beragam dari anggota BPUPKI hingga akhirnya lima prinsip pancasila itu menjadi seperti sekarang. Sila yang berarti dasar, atas dasar lima prinsip pancasila bangsa ini mendirikan negara (latif, 2011).

Bisa dikatakan rumusan Pancasila yang kita pakai sebagai dasar negara saat ini bukan merupakan pemikiran satu atau dua orang dari para pendiri bangsa yang tergabung dalam BPUPKI. Akan tetapi Pancasila adalah rumusan pemikiran bersama dari segenap elemen anak bangsa yang digali dari khasanah bumi pertiwi.

Pancasila menjadi titik kompromi bagi beragama aliran pemikiran-ideologi yang berkembang. Proses penemuan Pancasila sendiri membutuhkan waktu ,kemunculannya pun tidak dengan tiba-tiba, dia digali dari perut ibu bertiwi yang terbenam dalam lumpur hitam sejarah bangsa yang kelam. Sehingga Pancasila menjadi ideologi pengikat dan pemersatu bangsa serta menjadi tenda besar bagi segenap anak ibu pertiwi untuk hidup nyaman dan sejahtera dalam tenda besar Pancasila.

Sebagai perasan sari pati kehidupan berbangsa dan bernegara yang digali dari khasanah perut bumi pertiwi, Pancasila menjadi fondasi bangunan rumah bangsa. Tidak hanya fondasi bangunan, Pancasila bahkan

telah mengikat kita menjadi sebuah bangsa yang dilandasi dengan jiwa-perasan senasip dan sepenanggungan serta seperjuangan dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita hidup bersama. Di sinilah letak pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi harus dipahami bersama secara terbuka dengan mengembangkan wacana dan dialog (MPR RI, 2012).

Kalau kita tengok rumusan sederhana dari ideologi bisa diambil pengertian yang sederhana bahwa, ideologi memuat tentang pandangan hidup (*weltangchaung*) dalam kehidupan, ideologi juga memandu kita akan arah tujuan hidup bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, ideologi juga menuntun langkah kita bagaimana mewujudkan cita-cita dan tujuan kita hidup bernegara. Tiga unsur dari ideologi itu lengkap ada di dalam rumusan Pancasila yang diperjelas pada pembukaan UUD 45. Makna pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah; pertama; Pancasila merupakan kesepakatan luhur yang menjadi dasar cita-cita berdirinya negara Indonesia, kedua; Pancasila menjadi sumber pegangan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, ketiga; Pancasila adalah pengikat dan pemersatu negara kesatuan republik Indonesia.

Kita bisa melihat bahwa substansi doktrin ideologispancasila dalam sila-silanya tidak menegasikan agama (tuhan), karena memang bangsa ini adalah bangsa beragama yang kental akan sifat religius masyarakatnya. Pancasila juga tidak membuang jauh-jauh semangat kebersamaan-kolektivisme yang menjadi ruh dari jiwa sosial masyarakat dalam semangat mewujudkan keadilan sosial. Dan pancasila juga tidak mengesampingkan penghargaan atas hak dan kreativitas individu di dalam masyarakat. Hal itu tercermin dalam sila yang ada di dalam Pancasila *(five pilar-fiveprinciple).* Bisa dibilang Pancasila sangat akomodatif terhadap berbagai macam corak pemikiran dan ideologi-ideologi besar yang tumbuh berkembang di Masyarakat. Ideologi, Mutlak diperlukan dalam kehidupan khususnya bernegara, sehingga bangsa ini punya pegangan, punya arah dan pedoman mewujudkan mimpi dan arah hidupnya.

Ideologi mutlak diperlukan dalam kehidupan bernegara, sehingga bangsa ini punya pegangan, punya arah dan pedoman mewujudkan mimpi dan arah hidupnya. Dalam perkembangannya, menguatnya keegoan identitas sosial akhir-akhir ini kalau tidak dicermati dengan hati-hati bisa melunturkan spirit ideologis dari Pancasila. Di era demokrasi dan persaingan bebas ini juga, laju perubahan begitu cepat dan dahsyat

menerpa. Percepatan (revolusi) teknologi informasi dan transportasi yang mendorong budaya pragmatis dan serba instan, tanpa disadari bisa menjadi lonceng peluluhan ideologi Pancasila kalau kita gagal menyaring dengan bijak. Jangan sampai pancasila ditinggalkan dan menjadi tidak bermakna dalam masyarakat. Ini menjadi tugas dan tanggungjawab kita bersama untuk menjaga dan merawat Pancasila untuk menjadi ideologi yang hidup. Merawat pancasila adalah merawat Keindonesiaan kita, dengannya kita bisa berharap bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berkemajuan, *BaldatunThayyibatunwaRabbun Ghofur*, dan Muhammadiyah bekerja salah satunya untuk itu.

MEMPERKUAT PILAR KEADILAN UNTUK INDONESIA BERKEADABAN

Irvan Mawardi
Alumni Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Anggota Divisi Advokasi Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah Periode 2005-2020

Secara normatif konstitutif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menegaskan secara kokoh bahwa Indonesia adalah negara hukum (*recht state*) bukan berdasarkan kekuasaan (*macth state*). Visi negara hukum yakni memprioritaskan keadilan sebagai wujud supremasi hukum. Namun kenyataan yang terlihat saat ini fondasi dan wajah hukum yang dibangun tidak terlepas dari selera dan kehendak rezim yang berkuasa. Geneologi wajah hukum yang dikendalikan oleh kekuasaan yang tiran dapat dipotret dari awal mula kekuasaan itu muncul; kekuasaan yang lahir dari proses kontestasi pemilu yang didukung oleh cukong dan lingkaran oligark, maka dapat dipastikan seluruh kebijakan kekuasaan termasuk pilihan politik hukumnya akan berbasis pada kehendak "sponsor" kaum oligark yang melingkari kekuasaan. Pada titik yang sama, karena asal muasal kekuasaan itu tidak berbasis pada pijakan elektoral partisipatif, tidak didukung oleh pemilih yang berkesadaran dan hanya lahir dari politik transaksional, maka potensi korban dan yang tergusur dari lanskap penegakan hukum berbasis kekuasaan adalah lawan politik serta kaum mustadh'afin yang berada di pinggir nan jauh dari episentrum kekuasaan. Ketidakberpihakan hukum di tangan kekuasaan oligark dapat berbentuk dalam produk perundang-undangan yang tidak memiliki nilai patritotisme sebagai bangsa yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan visi negara hukum kita masih tertatih dalam mewujudkan Keadilan yang autentik. Pertama, sebagian besar wajah hukum yang dinormakan dalam bentuk undang-

undang dan perundang-undangan lahir dari proses politik yang serba pragmatis. Sudah banyak dipahami bahwa proses penyusunan perundang-undangan yang dirumuskan oleh Eksekutif dan Legislatif sering disertai dengan politik transaksional, sejak perencanaan sampai pada penempatan Pasal per Pasal. Kedua, masih terbatasnya upaya penguatan integritas dan kapasitas sumber daya manusia yang bergerak di sektor penegakan hukum. Masih sering ditemukan proses penegakan hukum diintervensi oleh kekuatan uang yang bersumber dari pemodal dan kekuatan politik rezim yang berkuasa. Dalam praktik penegakan hukum yang demikian akan memicu ketidakpercayaan pada penegakan hukum formal. Penegakan hukum dianggap hanya memihak pada elit politik dan pemodal kuat yang memiliki akses uang dan kekuasaan untuk mengatur jalannya sebuah proses penegakan hukum. Fungsi hukum yang seharusnya transformative, dalam praktiknya memihak dan dipolitisasi (Title, 2004: 388).

Ketiga, merespon kedua kondisi di atas masyarakat belum sepenuhnya terkonsolidasi untuk melakukan "perlawanan" dan melakukan kritik balik atas rapuhnya kualitas produk perundang-undangan dan lemahnya kapasitas dan integritas penegak hukum. Alih-alih merespon secara kritis, pada titik tertentu praktik oligarki penyusunan hukum dan prilaku koruptif penegak hukum, pada situasi tertentu sebagian masyarakat justru permissive terhadap kedua fenomena tersebut.

Posisi dan Potensi Muhammadiyah

Di tengah praktik hukum dan keadilan tersebut, Muhammadiyah yang merepsentasikan kelompok masyarakat sipil semestinya hadir untuk mempromosikan dan memperjuangkan nilai-nilai hukum keadilan agar semakin membumi dan menaikkan martabat bangsa Indonesia. Relasi Muhammadiyah dengan perkembangan hukum dan perundang-undangan memiliki hubungan historis ideologis. Salah satu rumusan ideologi Muhammadiyah adalah Kepribadian Muhammadiyah yang di dalamnya memuat 10 Sifat Muhammadiyah. Point kelima dari sepuluh sifat Muhammadiyah itu adalah: . "*Mengindahkan, segala Hukum, Undang-undang Serta dan Falsafah Negara Yang Sah*";. Rumusan ini menunjukkan bahwa sejatinya Muhammadiyah selalu tunduk dan patuh kepada aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Namun ketaatan kepada berbagai aturan tersebut tidak menempatkan Muhammadiyah hanya berdiam diri apabila terdapat berbagai aturan dan pelaksanaan aturan tersebut melenceng dari nilai-nilai keadilan ideologi dan falsafah bernegara. Sifat

Muhammadiyah tersebut juga menegaskan dan memberi pesan kepada kelompok dan pihak-pihak yang merasa diri paling nasionalis dan paling cinta NKRI bahwa Muhammadiyah sejak lahirnya telah memposisikan diri tunduk dan patuh kepada aturan main di negeri ini.

Kontribusi Muhammadiyah di bidang hukum tidak hanya terbatas komitmen pada teks semata, namun juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai keadilan hukum di negeri ini melalui kader-kadernya serta berbagai amal usaha di bidang hukum. Sejak awal kemerdekaan sampai saat ini tidak kurang mewakafkan kader-kadernya yang bergerak di bidang hukum dan penegakan hukum. Tersebutlah antara lain Panglima Besar Jenderal Sudirman, Jaksa Agung kedua Republik Indonesia(setelah Gatot Taroenamihardja) Kasman Singodimedjo, pakar Ilmu Hukum Tata Negara yang juga merupakan Doktor pertama di Indonesia dalam bidang hukum tata negara, Prof Ismail Sunny, Mantan Ketua Komisi Yudisial dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqaddas dan sampai saat ini Anggota Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada Azhari. Dari sisi kelembagaan, Muhammadiyah saat ini memiliki 38 Fakultas Hukum dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah yang tersebar di beberapa Universitas Muhammadiyah se-Indonesia.

Potensi yang demikian itu menjadi peluang bagi Muhammadiyah untuk ikut berkontribusi lebih intens lagi dalam memperkuat kehidupan bangsa Indonesia yang berbasis keadilan hukum. Terpenuhinya nilai keadilan sesungguhnya menjadi sebuah fitrah bagi setiap manusia. Ketika seseorang atau kelompok yang merasa terusik dan terkoyak rasa keadilannya maka secara naluri memiliki dorongan kekuatan untuk membela dan mempertahankan hak dan keadilannya. Namun kebutuhan dan kesadaran memperoleh hak dan keadilan terbentur oleh terbatasanya perangkat dan instrument yang dimiliki untuk memperjuangkannya.

Agenda Starategis

Salah satu falsafah bernegara yang harus menjadi spirit ketentuan perundang-undangan dan kebijakan negara adalah Keadilan Sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan semangat menjaga marwah dan fungsi negara harus tetap berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka Muhammadiyah perlu merumuskan beberapa agenda aksi dalam rangka Jihad Keadilan utuk Indonesia Bermartabat;

Pertama**,** merumuskan konsep teologi aksi Jihad Keadilan yang berbasis pada pemihakan kepada kelompok Mustadh'afin. Dalam hal ini teologi

aksi ini berbasis pada nalar surat Al Maun yang menjadi spirit berdirinya Muhammadiyah namun dalam tafsir yang kontekstual. Tiga ayat awal dari surat Al-Ma'un memberi inspirasi bagi dikembangkannya berbagai aktivitas untuk mengadvokasi masyarakat yang miskin dan terpinggirkan, tetapi sekaligus dengan itu mendorong juga upaya serius dalam rangka menjamin hak-hak dasar mereka; sandang, pangan termasuk hak hukum dan politik mereka. Kutukan sebagai pendusta agama ditujukan kepada individu, kelompok dan sistem yang apatis dan tidak memiliki solidaritas sosial atas kaum mustadh'afin. Karakteristik yang mudah dikenali pada diri mereka adalah suka menghardik, menakut-nakuti, mengancam, menindas individu, kelompok, masyarakat dan negara "yatim" yang tidak berdaya secara sosial, ekonomi dan politik.; mereka juga tidak peduli kepada kemiskinan dan pemiskinan; bahkan mereka sendiri pelaku pemiskinan dan penindasan atau kompradornya; melakukan "pembiaran" (yutm) atas kemiskinan dan pemiskinan; serta tidak berdiri dalam posisi memihak kepada kaum dhuafa (Baidhawy, 2009: 119).

Kedua, rekonstruksi gerakan Jihad Konstitusi. Pada tahun 2005 yang lalu Muhammadiyah sempat menggemparkan dunia politik hukum tanah air dengan deklarasi Jihad Konstitusi. Jihad ini untuk meluruskan kebijakan dan ketentaun perundang-undangan agar tetap sesuai dengan falsafah negara. Jihad konstitusi merupakan gerakan pembaruan di bidang hukum dan upaya korektif yang dilakukan melalui jalur formal, yakni dengan mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menginventarisasi setidaknya 115 beleid undang-undang yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat karena menabrak Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ratusan aturan tersebut justru dinilai mendukung upaya liberalisasi ekonomi. Pelan tapi pasti, satu per satu undang-undang telah digugat ke Mahkamah Konstitusi. Sebagian membuahkan hasil yang menggembirakan.

Namun ada beberapa persoalan yang harus dievaluasi dalam pelaksanaan Jihad Konstitusi. Pertama, gerakan ini belum didesain dalam sebuah program yang memiliki konsep dan terinstitusionalisasi secara baik. Sifatnya cenderung reaksioner temporer. Sehingga sejak tahun 2015 sampai saat ini gerakan Jihad Konstitusi tidak lagi terdapat aktivitas yang kongkrit. Kedua, nafas gerakan yang tidak kuat alias tidak memiliki daya kelanjutan. Idealnya pasca dibatalkan beberapa Undang-Undang tersebut, maka Muhammadiyah masih tetap konsisten untuk mengadvokasi produk

perundang-undangan dan kebijakan yang terkait dengan Pasal-Pasal yang dibatalkan namun masih dianggap berlaku dan berdampak merugikan kepada masyarakat. Misalnya mengadvokasi Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Faktor kedua ini terjadi karena secara identitas gerakan ini terlalu formil, terbatas pada pengujian konstitusi yakni Undang-Undang saja. Namun diperlukan gerakan Keadilan yang lebih substantif yang memiliki visi pemihakan terhadap korban ketidakadilan hukum akibat kesalahan norma perundang-undangan maupun kelemahan prilaku pelaksanaan penegakan hukum. Keberpihakan itu merupakan manifestasi atas kepedulian dan penghormatan terhadap hak hukum dan keadilan mereka yang terpinggirkan. Kepedulian utama akan hak asasi adalah menyuarakan jeritan orang-orang yang tertindas dan tidak berdaya (Kasim dkk, 2003: 212). Pilihan gerakan Jihad Keadilan ini melampui gerakan konstitusi untuk memperkuat pilar keadilan sebagai elan vital dalam mencerahkan peradaban bangsa.

Ketiga, mendesain Fakultas Hukum dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebagai kawah candradimuka calon penegak hukum dan keadilan (Hakim, Jaksa, Polisi dan advokat) yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi. Selain itu Perguruan Tinggi tersebut juga berfungsi untuk merumuskan dan mengkaji isu-isu hukum sebagai evaluasi dan rekomendasi bagi kekuasaan legislatif dan eksekutif sebagai perumus perundang-undangan dan kekuasaan yudikatif sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Keempat, di level praksis, melalui Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada di Pusat sampai Daerah, Muhammadiyah sudah saatnya mendirikan dan memperbanyak Lembaga Bantuan Hukum sebagai pilar gerakan advokasi bagi masyarakat atau kelompok yang menjadi korban ketidakadilan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan legal tekhnis yudisial, namun diperlukan SDM paralegal untuk memperkuat kerja-kerja advokasi non litigasi.

Akhirul Kalam, dalam catatannya ketika berada di Tahanan pada tahun 1963 Kasman Singodimedjo berpesan *"……agar Muhammadijah mendjadi alat perdjuangan disegala lapangan, djustru untuk mentjapai maksud dan tudjuannja, jaitu; mewudjudkan Islam jang sebenar-benarnja toch tidak mungkin diwudjudkan apabila ada satu lapangan jang di-abseni oleh Muhammadijah…"* (Singodimedjo, 1967: 12). Jadi, perjuangan atau jihad Muhammadiyah dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia harus

dimaknai sebagai bagian strategi untuk mewujudkan Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yakni masyarakat yang memiliki kemerdekaan dalam memperoleh keadilan dan hukum di negeri ini.

Daftar Pustaka

Kasim, I. dkk. (2003). Pencari Keadilan di Masa Transisi. Elsam. Jakarta.

Singodimedjo, K. (1967). Renungan dari Tahanan. Tintamas. Jakarta.

Titel, R. G. (2004). *Keadilan Transisional; Sebuah Tinjauan Komprehensif*. Elsam. Jakarta.

Baidhawy, Z. (2009). *Teologi Ne Al Ma-un, Manifesto Islam Menghadapi Globalisasi Kemiskinan Abad 21*. Civil Islamic Institute. Jakarta

BERAGAMA YANG MENCERAHKAN: IMPLEMENTASI KERJA KEMANUSIAAN RELAWAN MUHAMMADIYAH

Arif Jamali Muis
Wakil Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah, Wakil Ketua PWM Daerah Istimewa Yogyakarta

Beragama yang mencerahkan merupakan tema sidang tanwir Muhammadiyah yang dilaksanakan di Bengkulu 15 – 17 Februari 2019, permusyawaratan tertinggi di bawah muktamar. Tema beragama yang mencerahkan ini, sebenarnya ingin menandaskan bahwa beragama yang dilaksanakan oleh warga Muhammadiyah adalah cara beragama Islam yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia secara keseluruhan. Pada saat yang sama Muhammadiyah melalui tema tanwir ini ingin mengoreksi bahwa ada pemahaman beragama yang tidak mencerahkan, menjadikan umat berpandangan sempit hanya untuk kepentingan kelompoknya semata, jumud dan selalu berorientasi duniawi yang menghalalkan segala cara. Muhammadiyaah ingin menawarkan cara beragama yang tidak hanya berorientasi pada kesalehan pribadi belaka dengan orientasi akherat semata, tetapi juga mengembangkan diri untuk memegang peradaban di dunia ini demi kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah bangsa Indonesia memasuki tahun politik 2019, tema tanwir ini bak oase ditengah gurun atas terbelahnya masyarakat dalam pilihan orientasi politik terutama konstestasi pilpres..

Beragama yang Mencerahkan

Sejak digagas oleh KH Ahmad Dahlan, muhammadiyah menjadikan Al – qur'an sebagai landasan dan inspirasi untuk menjawab persoalan umat dan masyarakat. Penafsiran surat Al – ma'un oleh Kyai dahlan ketika ditanya santrinya kenapa tidak beralih ke surat dan ayat yang lain padahal para

santri sudah hafal dan sering dipakai dalam sholat. Jawaban Kyai Dahlan dengan mengajukan pertanyaan balik ke santrinya sudahkah menyantuni masyarakat miskin, anak – anak terlantar disekitar kauman? Jika belum maka berarti belum menerapkan surat al ma'un. kyai Dahlan mengajarkan para santrinya bahwa ayat Al qur'an tidak hanya dipakai untuk ibadah maqdhoh semata seperti sholat akan tetapi diterapkan dalam kehidupan kesaharian menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

Model Tafsir al ma'un ini menjadi spirit bagi aktivis Muhammadiyah untuk menjawab persoalan keumatan dan kemasyarakatan berlandaskan nilai – nilai Al-qur'an. Berdirinya madrasah mualimin pada tahun 1918, merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat saat itu untuk memperoleh pendidikan agama yang modern, begitu juga berdirinya klinik Muhammadiyah, panti asuhan merupakan usaha yang dilakukan semata berlandaskan nilai – nilai Al qur'an menjawab persoalan masyarakat. Menarik mencermati apa yang disampaikan Kyai Suja' pada kongres Muhammadiyah pada hari kamis tanggal 17 Juni 1920 saat ide mendirikan rumah sakit, rumah miskin, rumah yatim ditertawakan oleh peserta kongres, Kyai Suja' setengah kecewa menyampaikan isi pikirannya, "*Banyak orang diluar Islam (bukan orang Islam) yang sudah berbuat menyelenggarakan rumah panti asuhan untuk memelihara mereka si fakir, dan kanak-kanak yatim yang terlantar dengan cara sebaik – baiknya hanya terdorong dari rasa kemanusiaan saja tidak merasa bertanggungjawab dalam masyarakat dan tanggungjawab disisi Allah kelak di kemudia hari. Kalau mereka dapat berbuat karena berdasarkan kemanusiaan saja, maka saya heran sekali kalau umat Islam tidak dapat berbuat, padahal agama Islam adalah agama untuk manusia, bukan khalayak yang lain. Apakah kita bukan manusia?.* Begitulah sepenggal pidato kyai Suja' ketua bidang PKO (penolong Kesengsaraan Oemoem) tahun 1920 yang menggambarkan keinginan besar menerapkan ajaran – ajaran agama dalam mensejahterakan masyarakat. Hingga saat ini berdirinya sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, BMT dan berbagai amal usaha adalah ciri beragama yang mencerahkan, membentuk masyarakat utama. Beragama yang mencerahkan inilah yang disebut oleh Kyai Dahlan sebagai Islam yang maju, kemudian hari istilah ini dibakukan menjadi Islam berkemajuan, yaitu islam yang membawa perdamaian dan kebaikan umat manusia. Dalam tanfidz keputusan muktamar 1 abad muhammadiyah tahun 2010 disebut Islam yang berkemajuan adalah Islam yang menyemai benih – benih kedamian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia.

Kerja MDMC sebagai Implementasi Beragama yang Mencerahkan

Kerja kemanusiaan Muhammadiyah dalam membantu korban bencana alam merupakan contoh kongkret dari beragama yang mencerahkan, membantu sesama anak bangsa dengan berlandaskan nilai – nilai agama, tanpa pernah memandang atas dasar suku, ras maupun agama. Lembaga Penanggulangan Bencana/Muhammadiyahd disaster management center didukung oleh lazismu dan seluruh elemen Muhammadiyah dengan semboyan *one muhammadiyah one respon* telah melakukan kerja – kerja kemanusiaan yang merupakan implementasi nyata dari beragama yang mencerahkan, dalam catatan mdmc selama tahun 2018 telah melakukan respon berbagai kejadian bencana di tanah air melibatkan 2.646 personil relawan muhammadiyah, dengan penerima manfaat sebanyak 286.902 jiwa dengan rincian

Jenis Pelayanan	Jumlah Penerima Manfaat (Jiwa)
Psikososial	45.495
Kesehatan/medis	77.211
Pendidikan	8.090
Hunian darurat	6.112
Air bersih dan sanitasi	5.826
Distribusi logistic	106.542
Dapur umum	28.599
Hunian Sementara	3.404
Balai kampong	10.610
Jumlah	**286.902**

Membantu sebanyak 286.902 jiwa dalam bidang kebencanaan adalah langkah kongkret muhammadiyah menerapkan ajaran agama. Relawan muhammadiyah sadar betul yang meraka lakukan membawa spriti keagamaan dalam bidang kemanusiaan, kesadaran para relawan muhammadiyah itulah contoh beragama yang mencerahkan. Ada tiga ciri kerja – kerja kemanusiaan Muhammadiyah dalam membantu sesama sebagai implementasi beragama yang mencerahkan, pertama bersifat inklusif, menolong siapa saja yang membutuhkan. Sifat inklusif ini sejak lama tertanam dalam kepribadian warga Muhammadiyah, hal ini bisa kita lacak dari penggalan pidato KHA Dahlan ““bahwa hajat PKO itu menolong

dengan berbasis Islam tanpa membedakan suku, bangsa dan agama". Penggalan pidato KH Ahmad Dahlan menunjukkan semangat dan spirit untuk melakukan kebaikan kepada siapapun, yang perlu dicatat gagasan tersebut dicetuskan jauh sebelum Republik ini lahir, belum ada jargon kebhinekaan, NKRI harga mati, dan lain sebagainnya, Muhammadiyah telah sejak generasi awal menjalankan spirit bekerja dengan asas Islam dan kebermanfaatan untuk sesama. Pilihan diksi Umum pada Penolong Kesengsaran Oemoem (PKO) pada saat itu tentu bukan tanpa maksud, pertanyaan menarik kenapa tidak umat, atau umat Islam, atau warga Muhammadiyah ?

Tentu ini berdasarkan visi jauh kedepan Muhammadiyah yang ingin bekerja dengan landasan Islam untuk kemaslahatan masyarakat secara luas, mengutip apa yang disampaiakan Ketua umum PP Muhammadiyah Dr Haedar Nashir momentum Milad ke 106 ini untuk menegaskan kembali peran Muhammadiyah untuk semua (*Muhammadiyah for All)* sebagai implementasi Islam Rahmatan lil Alamin. Kedua kerja kemanusiaan Muhammadiyah bercirikan pemberdayaan. Bantuan yang diberikan Muhammadiyah tidak hanya sebatas model "bakti sosial", datang, selfie lalu pergi (*hit, take a picture and run)*. Dalam memberikan bantuan masyarakat Muhammadiyah selalu melakukan pemberdayaan agar masyarakat menjadi mandiri dan berdaya. Memberikan bantuan bukan berdasarkan apa yang diinginkan pemberi bantuan atau yang diinginkan penerima bantuan tetapi berdasarkan kebutuhan hasil dari analisis dilapangan sehingga tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. ketiga keberpihakan kepada kelompok – kelompok rentan, dalam setiap respon yang dilakukan oleh mdmc kelompok rentan seperti orangtua, anak – anak dan perempuan menjadi perhatian serius, karena kelompok rentan sering kali terlupakan padahal meraka yang lemah dalam kondisi kebencanaan. Sejak masa awal berdirinya keberpihakan muhammadiyah kepada kelompok rentang ini sangat terlihat, ide kyai suja' mendirikan rumah sakit, rumah miskin, dan rumah yatim menunjukkan keberpihakan kepada kelompok – kelompok rentan, kaum yang terpinggirkan.

Beragama yang mencerahkan menjadi syarat utama agar pesan langit yang penuh dengan nilai mulia dan maha unggul dapat terimplemntasikan dengan baik dalam kehidupan untuk kemaslahatan hidup di dunia dan akhirnya kebahagian pula di akherat.

SEKOLAH POLITIK MUHAMMADIYAH: UPAYA MENAMBAL DEFISIT KADER POLITIK INTELEKTUAL

Roni Tabroni
Pengurus Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah

Kendati sempat digusur ke ruang politik yang lebih praktis, namun Muhammadiyah konsisten berada di jalur dakwah kemasyarakatan. Bukan hanya di awal-awal kelahirannya tatkala KH. Ahmad Dahlan masih ada, nyatanya, tarikan ke politik praktis seringkali terjadi di saat ada dinamika politik yang cukup kencang.

Bahkan pasca reformasi, Muhammadiyah dihadapkan pada godaan yang tidak sederhana. Walaupun tidak menjadi pelaku utama, namun tidak sedikit fasilitas Muhammadiyah digunakan untuk kepentingan politik. Perjalanan itu belum berakhir, setiap perhelatan politik nasional dan daerah, sikap dan peran Muhammadiyah selalu dipertanyakan. Ormas sebesar Muhammadiyah selalu ditunggu kontribusinya dalam perhelatan politik.

Di periode Haedar Natsir, kini Muhammadiyah ingin membangun jembatan. Menyambungkan seluruh kepentingan politik dengan ummat yang berada di luar gelanggang politik praktis. Sikap ini menyempurnakan sikap Muhammadiyah yang digagas Din Syamsuddin yang membangun kedekatan sama dengan semua partai politik, dan pada Syafi'i Maarif yang ingin memposisikan Muhammadiyah dengan cara membangun jarak yang sama.

Menjadi jembatan tentu bukan hal mudah. Muhammadiyah harus berperan aktif dalam dinamika politik yang ada. Menghilangkan kegagapan dan maju ke depan untuk mengambil peran strategis. Menjadi jembatan diperlukan kepercayaan dari berbagai pihak. Maka menjadi penting di sini adalah membangun marwah persyarikatan agar dapat diterima oleh semua, menjadi tenda peradaban yang tidak condong pada kepentingan-kepentingan sempit.

Muhammadiyah menciptakan imajinasi politik untuk membangun bangsa yang berkeadaban. Cita-cita ini penting untuk didialogkan agar setiap elemen masyarakat yang terserak dapat membangun visinya untuk tujuan yang sama. Persoalan metode bagaimana cara mewujudkan visi itu, tidak menjadi soal bagi Muhammadiyah – selama tidak bertentangan dan al-Quran dan Sunnah.

Selain marwah organisasi, Muhammadiyah juga harus memiliki segudang kader yang menjadi pionir-pionir dalam berbagai hal termasuk politik. Keadaban demokrasi ala Muhammadiyah harus digerakkan oleh aktor-aktor yang memiliki intelektualisme tinggi dan humanis. Dunia politik tidak hanya dipandang sebagai aktivitas rutin yang hampa gagasan. Di sana dibutuhkan kemampuan berfikir kritis yang didasarkan pada referensi yang cukup untuk mengarungi bahtera politik yang sarat tantangan.

Lahir dan berkembangnya Muhammadiyah tidak berada dalam ruang kosong, melainkan dalam sebuah situasi sosial politik yang sarat persoalan. Jika pada masa-masa sulit sebelum kemerdekaan Muhammadiyah dapat menunjukkan peran besarnya, kini di abad modern, ketika jutaan kader tersebar di berbagai pelosok tanah air dan manca negara, peran Muhammadiyah menjadi lebih vital. Keberadaan kader yang melimpah dapat menjadi amunisi strategis untuk memasok salah satu sektor kehidupan bernegara kita yaitu ruang politik baik eksekutif maupun legislatif.

Seperti menjadi penggerak reformasi, tokoh Muhammadiyah Amien Rais menjadi aktor penting dalam mengubah arah politik tanah air. Dengan tauhid sosialnya, Amien Rais mengumandangkan nyanyian kritis yang memekakan telinga penguasa. Ketika semua orang tiarap, Amien Rais bersuara nyaring membangunkan semua yang terlelap. Dibantu gelombang massa, penguasa yang kokoh pun tumbang. Semilir angin segar demokrasi dirasakan bersama, setelah lebih dari 30 tahun ditekan penguasa diktator.

Di setiap perjalanan bangsa ini, selalu membutuhkan aktor-aktor intelektual untuk menyuarakan kebenaran. Suara-suara yang dapat mengisi ruang politik yang gagap menghadapi kebenaran. Suara-suara yang dapat mengingatkan kekhilafan dari sebuah rezim yang lalim. Bukan hanya cerdas dalam bersiasat secara praksis, tetapi juga memiliki visi politik dan orientasi kebangsaan yang baik. Politisi yang memiliki keberpihakan terhadap kemanusiaan dan kebenaran.

Kini, di tengah kegaduhan politik yang ada, kemudian publik bertanya kembali, kemana Muhammadiyah? Apa kontribusi Muhammadiyah?

Secara diam-diam, sebenarnya kader Muhammadiyah kini lebih tersebar di berbagai kekuatan politik yang sangat beragam. Hampir tidak ada partai politik yang tidak ada kader Muhammadiyah, baik di pusat maupun di daerah. Penyebaran kader Muhammadiyah di berbagai kekuatan politik sesungguhnya dapat dijadikan jembatan bagi persyarikatan untuk menyuarakan aspirasinya di berbagai lembaga dan struktur negara.

Aktivitas dakwah Muhammadiyah yang agresif di wilayah kultural akan lebih maksimal jika diamankan secara regulasi dan kebijakan melalui dakwah strtuktural. Kepentingan Muhammadiyah di ranah politik menjadi semakin urgen sebab keberadaannya akan menguntungkan ke dua belah pihak. Muhammadiyah secara kelembagaan memerlukan kader-kadernya yang berada di struktur kekuasaan dalam rangka melebarkan sayap dakwah sekaligus mengamankan garapan dakwah sosial lainnya. Sisi lain, struktur negara seyogyanya membutuhkan kader-kader Muhammadiyah karena dianggap memiliki kualifikasi tinggi dengan tingkat intelektualitas dan moral yang tinggi.

Pentingnya memiliki kader politik yang hebat sudah dikumandangkan Haedar Nashir sejak tahun 1995 dalam Majalah Suara Muhammadiyah edisi 13/80/1995. Dengan menggunakan inisial Abu Nuha, Haedar Nashir menegaskan bahwa dalam dunia politik, Muhammadiyah diharapkana memiliki kadernya yang handal dengan jumlah yang semakin banyak. Kader politik ini jika memungkinkan sama banyaknya dengan kader-kader profesional di bidang ekonomi, teknologi, akademisi, pengembangan masyarakat, dan sebagainya. Muhammadiyah kendatipun bukan organisasi politik, dapat berkiprah dalam percaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara konstitusional. Sesuai dengan khittahnya, peran politik Muhammadiyah perlu mempertegas orientasi, bukan sekedar pada capaian kekuasaan, tetapi juga dalam memperkokoh kekuatan dan kedaulatan rakyat melalui gerak pemberdayaan masyarakat.

Bagi Muhammadiyah, agar dapat seimbang dalam berdakwah, maka kader politik juga dianggap sama pentingnya sebagaimana halnya profesi yang lain. Tapi, semuanya perlu ada tempat dan perannya secara proporsional dan bersifat proyeksi strategis. Dengan demikian, dunia politik tidak dijalankan alakadarnya, tertapi harus terencana secara matang.

Maka disini, Muhammadiyah perlu memberi peluang seluas-luasnya bagi para kader politik dan kader profesional anak kandung Persyarikatan itu untuk mengembangkan profesi dan fungsinya secara maksimal di tempatnya masing-masing, termasuk di dunia politik, sehingga menjadi

lebih berkembang. Lebih-lebih kader politik yang sarat pertaruhan, yang senantiasa harus jaga setiap saat, dengan integritas moral dam kehandalan peran politiknya di organisasi sosial politik di mana mereka berada. Muhammadiyah harus mendukung para kadernya secara maksimal, baik secara kelembagaan maupun secara informal, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Langkah strategis Muhammadiyah untuk mewadahi kader-kader potensial yang memiliki minat di dunia politik baiknya menjadi agenda terstruktur dan berkelanjutan. Bahwa dunia politik terbuka bagi siapa saja, sudah mafhum semua. Tetapi secara kelembagaan institusi Muhammadiyah dituntut untuk memfasilitasi setiap kadernya agar menyiapkan diri sebelum terjun ke gelanggang politik yang penuh tantangan. Secara formal Muhammadiyah dapat menyelenggarakan pola pendidikan politik yang lebih formal, di dalamnya terdapat kurikulum dan metode layaknya lembaga pelatihan.

Sekolah politik ini dapat diselenggarakan untuk dua segmen, pertama, tingkat dasar yang akan memberikan pemahaman tentang dunia politik dari mulai dari pondasinya. Di sini setiap orang yang mungkin belum tentu akan terjun ke dunia politik praktis, akan belajar tentang filsafat, logika, etika serta landasan teologis terkait dengan dunia politik dan demokrasi. Warga Muhammadiyah juga akan diberikan materi-materi tentang landasar politik Muhammadiyah.

Kedua, kelas lanjutan yang akan diikuti oleh kader-kader yang berorientasi pada dunia politik baik di ranah legislatif, eksekutif, atau berbagai komisi yang tersedia. Maka bobot materi dalam kelas ini bersifat lanjutan baik aspek praktis maupun pendalaman pada setiap kelembagaan negara yang ada. Baik *soft skill* maupun hard skill harus dimiliki oleh kader-kader Muhammadiyah, sehingga lahir dengan sosok kader politik yang memiliki karakter khas Muhammadiyah dengan tingkat keilmuan teoritik dan kemampuan praktis yang mumpuni.

Sebagai organisasi berkemajuan, Muhammadiyah tidak mungkin mendistribusikan kader-kadernya dengan standar yang rendah. Melampaui kebutuhan formal, kader Muhammadiyah tidak menjadi pelengkap atas realitas politik yang dibutuhkan. Kader Muhammadiyah akan mengisi dunia politik dengan lengkap baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Di tengah hiruk pikut dunia politik yang kini mengumbar kegaduhan, maka kebutuhan demokrasi saat ini harus diisi oleh kader-kader Muhammadiyah yang memiliki imajinasi politik jauh ke depan. Imajinasi yang dapat

menghidupkan jagat demokrasi agar lebih hidup. Suasana demokrasi akan menjadi lebih bergizi bagi fikiran-fikiran publik yang membutuhkan vitamin secara berkelanjutan – bukan hanya ketika ada momentum suksesi. Dalam situasi seperti inilah dan dalam konteks inilah sebenarnya Muhammadiyah menjadikan politik sebagai ruang untuk mendistrubusikan kader-kader terbaiknya. Yaitu kader-kader yang telah melalui sebuah proses penggodogan dalam sekolah politik yang berkualitas itu, agar defisit intelektual politik di tanah air dapat ditambal oleh Muhammadiyah.

MENGGAGAS SEKOLAH POLITIK INDONESIA BERKEMAJUAN: STRATEGI POLITIK NON-PRAKTIS MUHAMMADIYAH DALAM KOMPETISI ELEKTORAL

Suswanta
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Salah satu masalah penting yang masih menjadi pekerjaan rumah Muhammadiyah sampai hari ini adalah kegagalan dalam mengusung kandidatnya dalam kompetisi elektoral di era reformasi, khususnya pemilihan presiden secara langsung (Solikhin, 2018). Muhammadiyah berkepentingan dengan kompetisi elektoral karena "*K.H. Ahmad Dahlan menginginkan ada pikiran-pikiran Muhammadiyah yang dituntun oleh Universitas Muhammadiyah, tapi diamankan melalui regulasi oleh para pejabat publik. Inilah pentingnya aktivis Muhammadiyah menjadi pejabat publik. Ini adalah fatwa pedagogis dari K.H. Ahmad Dahlan. Muhammadiyah tidak hanya sekadar merawat akal sehat melalui glorifikasi retorik, tapi Muhammadiyah secara mendasar mendirikan infra struktur akal sehat dengan pendirian sekolah dan perguruan tinggi. Persyarikatan Muhammadiyah memiliki 176 universitas di seluruh Indonesia. Kalau satu universitas rata-rata memiliki 7.000 mahasiswa, maka dalam lima tahun jumlahnya sama dengan 20 daerah pemilihan*" (Gerung, 2019).

Pernyataan Rocky Gerung tersebut menjadi provokasi positif dalam menyadarkan potensi besar sekaligus peran politik kontributif yang seharusnya dimainkan Muhammadiyah terkait kompetisi elektoral. Tulisan ini dimaksudkan untuk menambah bobot provokasi agar Muhammadiyah segera merumuskan strategi jitu dalam kompetisi elektoral sesuai dengan jati dirinya sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar modernis terbesar di Indonesia yang memiliki khittah politiksekaligus

menterjemahkan bentuk netralitas politik atau politik adiluhung (*high politics*). Asumsi tulisan ini adalah dengan potensi kader dan infrastruktur pendidikan yang dimilikinya, Muhammadiyah berpeluang besar melahirkan pejabat publik yang akan mampu membangun tatanan politik yang baik.

Netralitas Politik: Antara Idealita dan Realita

Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi sudah memiliki posisi dan sikap politik yang jelas dalam kompetisi elektoral, yaitu netral, dalam arti tidak berafiliasi dengan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Mengacu pada pemilihan presiden 2014, keputusan bersikap netral tertuang dalam Maklumat Kebangsaan Menghadapi Pemilihan Presiden 2014 yang dikeluarkan Muhammadiyah pada Tanwir di Samarinda, 23-25 Mei 2014. Dalam maklumat tersebut, Muhammadiyah memberi kebebasan kepada anggotanya untuk memilih capres/cawapres yang memenuhi tujuh kriteria, yaitu: relijius, negarawan, *decisive,* mampu mengelola negara dengan baik, mampu menjaga kewibawaan dan kedaulatan negara, *strategic* dan *committed* (Solikhin, 2018).

Muhammadiyah memang tidak pernah berubah menjadi partai politik, tetapi tidak berarti steril politik. Merujuk pada perjalanan sejarahnya, Muhammadiyah tidak mungkin menghindarkan diri dari arena politik. Ada dua pandangan terkait sikap netral Muhammadiyah dalam kompetisi elektoral. *Pertama,* Muhammadiyah menempatkan semua partai politik yang mengusung capres/cawapres sama, dalam arti menjaga jarak dengan semua partai, capres/cawapres dan tidak memiliki hubungan langsung. Dengan demikian, Muhammadiyah dapat menjadi penentu suara umat Islam Indonesia yang jumlahnya besar. *Kedua,* politik tinggi Muhammadiyah adalah politik kebangsaan melalui perilaku politik santun beretika dan bukan dukung mendukung pasangan capres/cawapres (Qodir, 2010).

Jika Pimpinan Pusat mampu menjaga Muhammadiyah secara organisasi netral dan jauh dari politik kekuasaan dalam kompetisi elektoral, akan tetapi tidak demikian dengan Pimpinan Daerah atau Wilayah Muhammadiyah. Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta, kabupaten Sleman dan Maros menunjukkan hal yang berbeda. Beberapa daerah tersebut mencoba memadukan *high politics* dan *low politics*. Amien Rais menjelaskan bahwa *high politics* adalah politik yang luhur, adiluhung, dan berdimensi moral serta etis. Sedangkan *low politics* adalah politik tingkat rendah yang berorientasi praktis atau meminta jabatan (Kuntowijoyo, 1995). Sikap Muhammadiyah yang sejalan dengan *high politics* dapat

diartikan tidak terlibat dalam politik praktis, namun dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti memerangi korupsi, menegakkan keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, tidak meminta jabatan, melakukan manuver politik untuk memperebutkan kursi, membuat tekanan, dan memperluas *vested interest*. (Kuntowijoyo, 1995).

Jarak teritorial dan politik menjadi faktor penjelas perbedaan ijtihad politik Muhammadiyah di level nasional dan lokal dalam kompetisi elektoral. Keseharian Muhammadiyah di level lokal memiliki urusan berkaitan dengan pemerintahan, di mana segala keputusan politik dapat dan perlu dinegosiasikan. Hal ini berbeda dengan level nasional, di mana jarak teritoral dan politik yang tidak terjangkau mengakibatkan orientasi politik menjadi kurang penting di level pusat Muhammadiyah. Selain jarak, perubahan filosofi berpolitik Muhammadiyah dari "menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik" menjadi "menjaga kedekatan yang sama dengan semua kekuatan politik" memiliki dampak serius bagi dinamika pola hubungan Muhammadiyah dan politik di daerah-daerah tertentu. Dukungan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap salah satu calon DPD RI tertentu pada Pemilu 2009, 2014 dan 2019, dan dukungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Sleman terhadap salah satu calon bupati/wakil bupati tertentu pada pilkada 2010 dan 2015 menunjukkan fenomena elit untuk mendapatkan representasi dari kekuasaan politik formal.

Arti Penting Sekolah Politik Indonesia Berkemajuan

Perbedaan pendapat tentang terjunnya kader Muhammadiyah dalam perebutan kekuasaan tidak serta merta berkonotasi negatif. Peran *high politics* dapat diartikan bahwa Muhammadiyah sebagai bagian dari *civil society* menjadi kawah candradimuka bagi lahirnya pemimpin yang memiliki kapabilitas, kapasitas, dan kepribadian Muhammadiyah. Dalam usianya yang satu abad, sudah selayaknya Muhammadiyah memiliki format yang jelas bagaimana mengartikulasikan politik yang aspiratif dengan kepentingan persyarikatan. Oleh karena itu, Muhammadiyah memerlukan sebuah konstruksi bagaimana membangun relasinya dengan dunia politik dan kenegaraan pada umumnya sehingga di masa mendatang Muhammadiyah tidak lagi terbata-bata saat mengeja kompleksitas alfabeta sosial politik yang mengitarinya (Solikhin, 2018). Salah satu strategi politik jitu non-praktis Muhammadiyah dalam kompetisi elektoral adalah mendirikan sekolah politik Indonesia berkemajuan.

Muhammadiyah telah memiliki semua piranti yang memungkinkan lahirnya politisi negarawan dengan kapabilitas dan kapasitas mumpuni serta berkepribadian Muhammadiyah melalui sekolah politik Indonesia berkemajuan, yaitu materi (kurikulum), guru (pembina), fasilitas, dan jejaring. Materi awal dalam sekolah ini akan menajamkan fokus pada bagaimana meraih kemenangan dalam kompetisi elektoral, yaitu: *leadership, personal branding*, *managing relation*, *emotional,* and *spiritual quotient for legislators*, strategi pemenangan, pendalaman regulasi terkait, dan penanaman nilai-nilai kebangsaan. Adapun materi lanjutan, tergantung peruntukkanya, untuk calon anggota legislatif dapat diajarkan bagaimana menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan serta pendalaman regulasi terkait. Sedangkan untuk eksekutif, materi yang diajarkan adalah tentang bagaimana mengelola negara di era global, baik terkait urusan di dalam maupun luar negeri, aspek-aspek apa yang harus mendapat perhatian agar rakyat yang berhimpun di dalamnya mendapatkan haknya, yaitu keamanan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lain secara manusiawi. Pendekatan penyampaian materi dapat dilakukan melalui teori dan praktik dengan mengundang narasumber yang berkompeten dan berpengalaman.

Untuk peserta dapat dibuat syarat-syarat khusus dan diperuntukkan untuk semua kader Muhammadiyah yang akan maju dalam kompetisi elektoral, baik di tingkat lokal, regional maupun nasional sebagai calon legislator (DPRD dan DPR), senator (DPD) atau calon bupati, walikota, gubernur atau presiden. Keberhasilan sekolah politik Indonesia berkemajuan ini tentu membutuhkan dukungan semua pihak terkait. Optimalisasi fungsi semua Majelis dan Lembaga serta Amal Usaha Muhammadiyah, khususnya Perguruan Tinggi Muhammadiyah akan mampu membuat Muhammadiyah tidak hanya akan melahirkan pejabat publik handal yang berkepribadian Muhammadiya, tetapi juga mampu menjadikan Muhammadiyah sebagai juru bicara bagi aspirasi politik rakyat dan aspirasi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta dampak pembangunan terhadap kualitas hidup rakyat. Pada akhirnya, kiprah dakwah Muhammadiyah akan semakin nyata dirasakan manfaatnya oleh rakyat dalam mendorong kemajuan untuk terwujudnya peradaban utama. Apakah hal ini akan terlaksana? Tentu tidak jika hanya menjadi wacana semata.

Daftar Pustaka

Boy ZTF, Pradana. 2009. *Para Pembela Islam, Pertarungan Konservatif dan Progresif di Tubuh Muhammadiyah*. Jakarta : Gramata.

Kuntowijoyo, dkk. *Intelektualisme Muhammadiyah Meyongsong Era Baru.* Bandung : Mizan. 1995

Nashir, Haedar. 2008. *Khittah Muhammadiyah Dalam Politik*. Yogyakarta: Bigraf Publishing

Nashir, Haedar. 2011. *Muhammadiyah Abad Kedua*. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.

Solikhin, Ahmad, 2018. Perbedaan Sikap Politik Elektoral Muhammadiyah Antara Pusat dan Daerah. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik Fisip UTA'45*. Jakarta, Vol. 3 No. 2 (September-Februari 2018).

Qodir, Zuly. 2010. *Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua.* Yogyakarta : Penerbit Kanisius.

MEWUJUDKAN MASJID SEBAGAI PUSAT DAKWAH MENCERAHKAN

Miftahulhaq
Dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Wakil Sekretaris Majelis Tabligh PP Muhammadiyah

Sejarah Islam menunjukkan bahwa masjid merupakan salah satu pondasi yang disiapkan oleh Rasulullah SAW dalam membangun peradaban umat manusia, khususnya umat Islam. Ketika Rasulullah SAW melakukan hijrah dan telah sampai ke kota Yastrib (Madinah), maka hal pertama yang dilakukan beliau adalah meletakkan asas-asas penting bagi pembangunan masyarakat. Asas-asas tersebut tercermin dalam tiga pekerjaan, yaitu; (1) pembangunan masjid, (2) mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Anshar, dan (3) membuat perjanjian yang mengatur kaum muslimin dan menjelaskan hubungannya dengan kaum Yahudi dan lainnya, yang kemudian dikenal dengan istilah Piagam Madinah.

Masjid dalam masyarakat Islam memiliki peran penting untuk proses pembangunan masyarakat. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, masjid menjadi perekat dan sumber kebersamaan. Penopang terciptanya kehidupan yang dibangun dengan komitmen terhadap sistem, aqidah dan tatanan Islam. Penumbuh ikatan ukhuwwah dan mahabbah sesama muslim, semangat persamaan dan keadilan, dan semangat belajar bersama untuk meraih kehidupan yang terbaik. Pendek kata, masjid hakekatnya merupakan pusat pembangunan peradaban manusia, khususnya umat Islam.

Masjid, menurut Dr. Yusuf al-Qardlawi, setidaknya memiliki beberapa fungsi. *Pertama*, masjid sebagai rumah Allah (Q.S. an-Nuur: 36-37), tempat umat Islam mengingat, mensyukuri, dan menyembah (beribadah) kepada Allah dengan baik. *Kedua,* masjid sebagai tempat mencerdaskan

umat dan memberikan orientasi dakwah. *Ketiga,* masjid sebagai tempat penguatan kohesifitas social dan kebersamaan umat, melalui kegiatan sholat berjama'ah, pengelolaan hari besar Islam, pembagian zakat, dan lain sebagainya. Apabila ketiga fungsi ini bisa diwujudkan, maka akan tercipta masjid *Jami'*, yaitu sebagai tempat ibadah kolektif, belajar bersama, lembaga pendidikan, pelayanan sosial, konsultasi, penyelesaian masalah kemasyarakatan, tempat berkumpul, regenerasi/kaderisasi dakwah, dan lain sebagainya.

Karenanya, membangun masjid bukanlah sebatas membangun fisik bangunan masjid dengan bangunan yang megah dan fasilitas yang lengkap. Membangun masjid juga harus memikirkan bagaimana memelihara dan memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan yang diorientasikan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Masjid Sebagai Pusat Dakwah Mencerahkan

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar mengembangkan berbagai amal usaha dan kegiatan untuk mewujudkan cita-citanya. Amal usaha Muhammadiyah tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga tempat beramal sholeh. Amal usaha merupakan salah satu usaha dari usaha-usaha Muhammadiyah dan media dakwah Peryarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan. Oleh karena itu, semua kegiatan amal usaha Muhammadiyah harus mengarah pada terwujud tujuan Persyarikatan dan pimpinan dan pengelolanya harus menjalankan misi Muhammadiyah.

Di antara amal usaha yang dimiliki oleh Muhammadiyah adalah masjid. Sebagai amal usaha, masjid dituntut dapat menjalankan usaha-usaha Muhammadiyah terkait penanaman keyakinan, pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta penyebarluasan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan yang bersumber kepada al-Qurán dan as-Sunnah al-maqbulah berdasar pemahaman Muhammadiyah. Masjid juga dituntut dapat mendorong masyarakat memiliki ruhul jihad, kesungguhan dalam beribadah dan perwujudan amal shalih lainnya dengan berbagai model dan pendekatan yang kontekstual. Masjid Muhammadiyah harus mampu menjadi pusat peningkatan harkat, martabat, dan kualitas sumberdaya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlaq mulia.

Masjid sebagai sentral dakwah Muhammadiyah setidaknya harus dibangun dari semangat urgensi, fungsi dan program yang berorientasi pada

perwujudan dakwah yang mencerahkan. Masjid tidak sekedar inventaris bangunan yang berfungsi sebagai tempat ibadah. Proses pembangunan masjid harus didasarkan pada kesadaran akan urgensi masjid itu sendiri, yaitu kesadaran akan kepentingan apakah yang hendak diwujudkan dari keberadaan masjid. Kesadaran ini akan kepentingan ini akan mengarahkan arsitektur masjid pada pemenuhan fungsi dan optimalisasi program atau kegiatan yang berdaya guna bagi kegiatan dakwah.

Beberapa urgensi yang bisa dimunculkan dari keberadaan masjid bagi Muhammadiyah adalah: (1) sarana pembinaan aqidah dan ibadah, yaitu sebagai tempat ibadah mahdah dan pengkajian ajaran Islam, (2) sarana pembinaan masyarakat, yaitu sebagai tempat kegiatan pelatihan dan pemberdayaan ekonomi, kesehatan, sosial, dan budaya dengan basis optimalisasi pendayagunaan zakat, infak, shodaqoh (ZIS), (3) sarana pengokoh ukhuwwah Islamiyah, (3) sarana layanan dakwah, seperti pembinaan baca al-qur'an, layanan konsultasi, layanan kesehatan, layanan Baitul Tamwil wa Maal (BTM), pembinaan mualaf, dan lain sebagainya, serta (4) sarana pendidikan dan kaderisasi, yaitu sebagai pusat pendidikan dan kaderisasi Persyarikatan.

Pemahaman terhadap urgensi tersebut, selanjutnya akan memposisikan fungsi masjid sebagai berikut; (1) tempat pelaksanaan ibadah, yatu menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan kegiatan ibadah, khususnya ibadah sholat berjama'ah, (2) tempat berdakwah, yaitu tempat berdakwah bagi masyarakat dengan berbagai layanannya, seperti pembinaan al-Qurán, kuliah subuh, kultum bakda sholat, penyantunan dhuafa, dan lain sebagainya, (3) tempat pertemuan kaum muslimin, khususnya warga Muhammadiyah, (4) tempat belajar dan pemberdayaan masyarakat, yaitu tempat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai pendekatan, baik itu ekonomi, sosial, lingkungan, pendidikan, seni budaya, olahraga, kesehatan maupun yang lainnya yang memungkinkan untuk dikembangkan sesuai potensi yang dimiliki oleh PRM/PCM atau jama'ah masjid, (5) tempat pendidikan kader dan mubaligh, yaitu tempat kegiatan pembinaan kader dan kaderisasi, baik berupa Baitul Arqom, pelatihan kepemimpinan, pelatihan keterampilan, pembinaan AMM, remaja masjid, maupun yang sejenisnya, (6) tempat penampungan ketika bencana atau kondisi darurat, dan (7) tempat sekretariat bersama Muhammadiyah.

Alternatif Program Dakwah

Sebagai pusat dakwah, masjid harus bisa menyusun dan mengelola program secara baik. Prinsip manajemen, seperti planning, organizing, action, dan controling (POAC), bisa diimplementasikan dalam proses perencanaan program masjid. Setiap pengurus masjid (Takmir Masjid atau DKM) dituntut secara kreatif dan inovatif mengembangkan berbagai macam program dan kegiatan berdasar identifikasi urgensi dan fungsi masjid yang ingin capainya.

Beberapa program dan model kegiatan yang bisa dikembangkan oleh pengurus masjid, di antaranya: (1) Bidang Ubudiyah. Program ini diorientasikan pada peningkatan pelayanan pengamalan Islam sesuai faham Muhammadiyah. Di antara kegiatan yang dapat dikembangkan dalam bidang ini misalnya pengelolaan sholat jama'ah, pengaturan imam sholat, penyusunan jadwal khotib jum'at, penyusunan kurikulum pengajian rutin, penerimaan zakat infak shodaqoh, bimbingan haji dan umroh, pembinaan sholat, dan lain sebagainya; (2) Bidang Pendidikan. Program ini dioreintasikan pada peningkatan pemahaman melalui pengkajian dan pembelajaran serta penyediaan referensi ajaran agama Islam berdasar faham Muhammadiyah. Di antara kegiatan yang dapat dikembangkan dalam bidang ini misalnya penyelenggaraan TPA/TKA, perpustakaan masjid, pembinaan tahsin dan tafhim al-qur'an, PHBI, pelatihan pengurusan jenazah, dan lain sebagainya.

Selanjutnya (3) Bidang Pelayanan. Bidang ini dioreintasikan pada bimbingan dan konseling pelaksanaan ajaran Islam dan layanan dalam kondisi darurat, baik secara individu, keluarga, maupun jama'ah. Di antara kegiatan yang dapat dikembangkan adalah layanan konsultasi individu, konsultasi keluarga sakinah, penampungan korban bencana alam, dapur umum, dan lain sebagainya; (4) Bidang Santunan Sosial dan Kesehatan. Bidang ini diorientasikan pada upaya pemberian santunan sosial dan kesehatan bagi para jama'ah. Di antara kegiatan yang dapat dilakukan adalah santunan anak asuh, bea siswa, santunan sosial keluarga miskin, santunan kesehatan mubaligh dan jama'ah, pendirian klinik, dan lain sebagainya; (5) Bidang Ekonomi. Bidang ini diorientasikan pada upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi jama'ah, misalnya dengan kegiatan pendirian BMT, pemberian modal usaha, pendirian toko sembako, dan lain sebagainya.

Berikutnya bisa berupa; (6) Bidang Lingkungan Hidup. Bidang ini diorientasikan pada upaya partisipasi masjid dalam pengelolaan lingkungan

hidup, misalnya pengelolaan sampah dengan model shodaqoh sampah, pengolahan air bekas wudlu, penyediaan sumur resapan, penghijauan, dan lain sebagainya; (7) Bidang Penerangan. Bidang ini diorientasikan pada upaya pemberian penerangan terkait berbagai macam hal kepada para jama'ah, baik yang bersifat ajaran Islam maupun informasi lainnya yang dibutuhkan oleh jama'ah, misalnya pembuatan buletin, seminar terkait parenting, dan lain-lain; (8) Bidang Usaha Dana. Bidang ini diorientasikan untuk penggalangan dana untuk pengelolaan dan kesejahteraan masjid. Di antara kegiatan yang dapat dilakukan misalnya optimalisasi penyelenggaraan LAZISMU, pembuatan toko, cuci motor/mobil, gedung pernikahan/serba guna, penginapan dan lain-lain; dan (9) Bidang Fisik dan Sarana Prasarana. Bidang ini diupayakan pada pemeliharaan fisik dan sarana prasarana. Misalnya pembuatan MCK yang layak, pembuatan lahan parkir, ada minum gratis, penitipan sepatu/barang/tas, layanan ramah difable, dan lain-lain.

Sedangkan pada aspek Persyarikatan secara khusus, bisa dikembangkan; (10) Bidang Kaderisasi. Bidang ini diupayakan pada penyiapan kader, misalnya dengan kegiatan pembinaan AMM, pembinaan remaja masjid, dan lain sebagainya; dan (11) Bidang Administrasi. Bidang ini diupayakan pada pengelolaan manajemen dan administrasi masjid secara keseluruhan. Kegiatan ini bisa diwujudkan dengan adanya tertib administrasi surat menyurat, daftar hadir jama'ah, peta dakwah, daftar inventaris, daftar keuangan, LPJ Pengurus, dan lain sebagainya. Fungsi ini akan lebih maksimal apabila sekretariat PRM/PCA menjadi satu atap.

Demikian beberapa bidang program yang dapat dikembangkan oleh masjid Muhammadiyah. Pengejawantahan program tersebut perlu didukung oleh kepemimpinan pengurus masjid yang kuat. Selain pengurus Takmir Masjid adalah mereka yang aktif dalam kegiatan masjid, tetapi juga diperlukan orang-orang yang kreatif mengembangkan berbagai program dan kegiatan masjid. Pimpinan Persyarikatan perlu mempersiapkan orang-orang tepat yang akan mengelola masjid. Tidak hanya tepat dapat kapasitasnya, tetapi juga tepat dalam pemahaman keagamaanya.

MUHAMMADIYAH, GERAKAN SOSIAL, DAN NALAR PEMBEBASAN

Bachtiar Dwi Kurniawan
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Sekretaris Majelis Pemberdayaan Masyarakat
PP Muhammadiyah Periode 2015-2020

Sejak kelahirannya pada tahun 1912, Muhammadiyah saat ini sudah berumur lebih dari 100 tahun berdasar kalender Hijriyah.[6] Sebuah rentang usia yang cukup tua bagi sebuah gerakan. Muhammadiyah lahir ketika atmosfir kehidupan masyarakat tengah uforia dan semangat-semangatnya untuk berkelompok dalam perkumpulan dan organisasi. Sarekat Dagang Islam (1905), Jamiat Khair (1905), Budi Utomo (1908), Persyarikatan Ulama (1911) adalah perkumpulan yang mendahului munculnya Muhammadiyah.

Kelahiran Muhamamdiyah tidak bisa dilepaskan dari semangat zaman yang melingkupinya. Dalam konteks keindonesiaan, Bangsa itu masih berada dalam cengkeraman kolonialisme dan imperialisme penjajah Belanda yang membuat umat berada dalam kondisi terpuruk, terjepit dalam kemiskinan dan kebodohan. Dalam konteks keislaman, kondisi umat Islam terperangkap dalam kejumudan, dan ritual keagamaan yang masih berbaur erat dengan tradisi sinkritis.

Beragam istilah yang sepadan dengan pembaharuan telah disematkan oleh banyak pakar, Deliar Noer, James L Peacock, William Sheapard mengkategorikan Muhammadiyah sebagai gerakan modern Islam, Alfian, Whertheim menggolongkan ke dalam gerakan reformisme Islam, Abu Bakar Atjeh menyebutkan dengan gerakan kembali kepada Salaf, Clifford Geertz, George Kahin, Robert Van Neil memasukkan Muhammadiyah ke dalam gerakan sosio-kultural (Nashir, 2010: 1).

---

6 Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 Nopember 1912 bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H, mendapat pengesahan dari pemerintah Hindia Belanda berdasar Besluit nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

Munculnya gerakan Muhammadiyah yang mengusung pembaruan mewakili gerakan modernis-reformis, merupakan respon dari kebutuhan umat Islam untuk memurnikan ajaran Islam dari berbagai pengaruh budaya lokal yang bertentangan dengan semangat Islam (Saleh, 2004: 21). Gerakan ini mempunyai kemiripan atau bahkan kesamaan dengan gerakan pembaharuan yang mendahuluinya, yakni Wahabi. Sehingga tidak aneh kiranya pada aspek purifikasi (pemurnian) ajaran agama Islam, Muhammadiyah sering dikaitkan dengan gerakan pembaruan yang ada di Makah, Timur Tengah tersebut. Bahkan ada anggapan bahwa kelahiran Muhammadiyah sering disalah tafsirkan sebagai kepanjangan tangan dari gerakan Wahabi, keterkaitan tersebut dihubungkan dengan pendiri Muhammadiyah yang pernah belajar di Mekah, Arab. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh dari aspek gerakan (praksis) Muhammadiyah, penilaian bahwa Muhammadiyah adalah Wahabi menjadi mungkin untuk diragukan. Apa mungkin Muhamamdiyah kalau dia mengusung ideologi Wahabi mau bekerjasama dengan kaum "kafir" dengan menerima sumbangan donasi dan tenaga dalam melakukan kerja-kerja sosial kemasyarakatan seperti yang dilakukan Muhamamdiyah ketika menghidupi rumah sakit, rumah miskin, rumah yatim? Apa mungkin juga kalau Muhammadiyah mengusung ideologi wahabi, bisa hidup berdampingan dengan Keraton Yogyakarta yang menjadi simbol budaya Jawa? Bahkan konon katanya keraton Yogyakarta juga punya andil besar dalam proses pendiriandanberkembangnya Muhammadiyah.

Muhammadiyah dalam hal kehidupan duniawi, membuka pintu ijtihad selebar-lebarnya dan tak segan-segan mengadaptasi cara-metode modern yang digunakan oleh Barat-Kristen (penjajah). Sebuah langkah yang cukup berani dan bahkan bisa dibilang liberal-radikal pada saat itu. Sehingga tidak heran jika Muhammadiyah pada fase awal sering disebut sebagai kafir lantaran meniru dan bergaya seperti apa yang dipraktekkan oleh para penjajah tersebut. Kuatnya diktum normatif *man tasabaha bi kaumin fahuwa minhum* begitu kuat menancap dalam ruang kesadaran umat Islam sehinggaMuhammadiyah dicurigai sebagai kristen alus kala itu.

Sebagai gerakan sosial yang berbasis agama, Muhammadiyah telah mendobrak tradisi dengan menghidupkan dan mengembangkan nalar pembebasan. Muhammadiyah lahir sebagai tesis dari ideologi pembebasan dengan misi suci membebaskan masyarakat dari kondisi umat yang masih terpuruk. Kelahiran Muhammadiyah menjadi pelita dalam mencerahkan masyarakat dengan memberikan pencerdasan dan karya nyata di tengah-

tengah masyarakat. Dia menjadi harapan baru bagi masa depan yang lebih baik, pelepas dahaga ketika institusi dan otoritas keagamaan mengalami kemarau dalam memecahkan problema keuamatan dan kemasyarakatan.

Muhammadiyah pada awal kemunculannya tidak bermula dari proses prakondisi diskursus wacana yang berat dan muluk-muluk. Sekarang Muhamamdiyah telah menjadi narasi besar dari sebuah gerakan sosial Islam. Ahmad Dahlan (1868-1923) sang pendiri Muhamamdiyah, tidak banyak melahirkan karya tulis, seperti layaknya para pemikir dan tokoh pembaharu yang lain. Menurut Kuntowijoyo, Dahlan buka tipe *man of thought* tetapi *man of action*. Gerakan ini pada awalnya semata-mata bersifat agama, tetapi ternyata kemudian semboyan itu juga punya konsekuesi logis yang bersifat duniawi (Kuntowujoyo, 2002: xvi).

Sosok Dahlan yang hidup dalam suasana gerakan telah memicunya untuk lebih banyak berbuat daripada sekedar berwacana. Satu hal yang menarik dari Muhammadiyah melalui Dahlan dan teman-temannya adalah, bahwa persyarikatan ini muncul dalam suasana batin ghairah dan semangat kaum muda untuk melakukan perubahan. Pada waktu dahlan mendirikan organisasi ini tahun 1912 umurnya masih relatif cukup muda, yakni 44 tahun, sehingga dalam hal ini bisa disebutkan bahwa munculnya gerakan Muhammadiyah merupakan gerakan kaum muda.

Pada fase awal Muhammadiyah berdiri, hal yang menjadi ciri pokok gerakan ini adalah langkah keberpihakannya kepada kaum miskin atau proletar. Organ atau lembaga yang pertama kali dibentuk oleh Muhamamdiyah selain bidang Pendidikan adalah Penolong Kesesngsaraan Oemoem (PKO)[7], yaitu sebuah lembaga yang berfungsi untuk menyantuni orang miskin dan memberikan pelayanan kesehatan gratis tanpa membedakan suku, agama, dan status sosial. Awal pembentukan PKO adalah untuk meringankan memberikan penyantunan terhadap korban meletusnya Gunung Kelud. Dalam perkembangan awalnya PKO melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan (humanitarian rescue) dengan membantu menolong para korban kebakaran di Yogyakarta, mendirikan klinik, rumah sakit, rumah yatim dan juga rumah miskin (Noer, 1996: 90).

Dahlan melalui Muhammadiyah begitu peduli dengan nasib rakyat miskin, kepedulianya seolah menjadi prisnsip etis yang melatari etika

7 PKO (U) dibentuk pada tahun 1918 yang pada awalnya adalah organisasi independen yang diirikan oleh tokoh-tokoh awal Muhammadiyah dengan nama yang sama. PKO (U) menjadi bagian resmi dari Muhammadiyah pada tahun 1921, dua tahun sebelum K.H. Ahmad Dahlan wafat, Pendiri dan sekaligus menjadi Ketua pertama dari lembaga ini adalah H. Sudjak.

welas asih sehingga menjadi model pelembagaan misi kemanusiaan Muhammadiyah.

Kisah fenomenal yang selalu dirujuk sehingga menginspirasi kepedulianya berawal dari surat Al-Maun. Kisah Dahlan mengajari tafsir surat Al Maun kepada para murid-muridnya kala itu menjadi cerita tentang spirit misi pembelaan dan pembebasan. Dikisahkan pada waktu itu murid Dahlan menjadi bosan dengan materi yang diajarkan oleh sang kyai karena selalu mengulangi kajian dengan surat yang sama yaitu Al-Maun, padahal para muridnya tersebut sudah hafal dan paham sama sekali. Para Murid memprotes meminta beralih kepada palajaran tafsir surat yang lain. Dahlan menanggapi kegelisahan dan protes para muridya itu dengan satu pertanyaan, apakah kalian semua sudah mengamalkan? Mendengar pertanyaan tersebut para murid Dahlan saling berpandangan, Dahlan berujar, agama itu untuk diamalkan, sekarang bergegas kalian mengumpulkan orang miskin dan anak yatim dan berilah makan dan pakaian pada mereka.[8]

Karena aksi kemanusiaannya tersebut Muhammadiyah mendapat banyak simpati dan dukungan luas dari masyarakat. Muhammadiyah begitu terbuka dan toleran, anggota Muhammadiyah pada waktyu awal berdirinya terdiri dari anggota biasa, anggota kehormatan atau istimewa dan anggota yang secara khusus disebut sebagai donatur. Selain anggota biasa, dua jenis anggota lainnya, yakni anggota istimewa dan anggota donatur, bisa terdiri atas pemeluk agama selain Islam dari beragam bangsa (Jurdi dkk, 2010: xxx-xxi).

Sebagai intitusi keagamaan yang pada awalnya begitu berpihak pada orang miskin-“kiri”, Muhammadiyah tidak boleh hanyut dan larut dengan pola definisi pendidikan dan layanan kesehatan sebagai kegiatan ekonomi, service-jasa. Kapitatalisasi adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah lagi, perlu strategi budaya dan siasat yang brilian dalam rangka melindungi dan menjaga spirit keberpihakan yang berbasis pada teologi Al-Maun. Salah satu jalan yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan dan memperkuat konsep filantropi dengan memaksimalkan potensi zakat, infaq, shodaqoh di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. Dengan jumlah anggota yang sangat besar maka seyogyannya hal tersebut tidak menjadi penghalang yang berarti. Tinggal inisiatif, kemauan dan kemampuan kepemimpinan yang kokoh sehingga mampu memobilasasi segala potensi

8 Kisah ini di Muhammadiyah seolah menjadi legenda, keterbatasan data yang menjadi dasar untuk dijadikan rujukan sangat terbatas.

zakat dan aset yang ada itu untuk kepentingan masyarakat pada umumnya dan masyarakat miskin, dhuafa, proletar pada khususnya.

Berbicara tentang Muhammadiyah saat ini, yang ada dalam benak banyak orang adalah seputar Sekolah, Rumah Sakit, serta Panti Asuhan. Gurita amal usaha Muhammadiyah yang menjamur tersebut telah membentuk persepsi masyarakat bahwa Muhamamdiyah tidak jauh dari hal tersebut. Persepsi publik tentang Muhammadiyah yang terkonstruk melalui jaringan amal usaha tersebut setidaknya telah mengikat anggapan masyarakat bahwa Muhammadiyah tidak mengurusi hal lain di luar apa yang sudah menjadi kosernya selama ini.

Muhammadiyah distigmakan sebagai gejala kota, aktivis dan penggerak Muhammadiyah yang kebanyakan adalah kaum terdidik dan mayoritas berada diperkotaan. Muhammadiyah adalah gerakan sosial kelas menengah yang dimotori oleh para priyayi-santri. Muhammadiyah tidaklah sebagai gerakan sosial murni akan tetapi gerakan sosial yang bertautan dengan Islam yang menjadikan Islam sebagai solusi atas persoalan sosial dan kehidupan (Mu'ti, 2009). Agaknya Muhammadiyah sudah mulai siuman dari tidur lamanya dan menyadari akan kekurangan dan kelemahanya. Saat ini Muhammadiyah sudah mulai berifikir untuk melakukan langkah terobosan untuk bisa berbuat lebih banyak lagi kepada masyarakat khususnya di masyarakat di akar rumput.

Komitmen keberpihakan kepada akar rumput sebenarnya sudah muncul sejak Muktamar Muhamamdiyah ke 44 di Jakarta tahun 2000, saat itu muncul keprihatinan bahwa Muhammadiyah kurang memberi perhatiaan kepada problem masyarakat kecil. Pada kepengurusan setelah muktamar ke 44 tersebut, Muhammadiyah melembagakan kepeduliannya tersebut dalam sebuah lembaga yakni Lembaga Buruh Tani Dan Nelayan (LBTN). Setelah 5 tahun berjalan, lembaga ini dirasa kurang bisa maksimal menyentuh rakyat miskin yang ada di bawah lantaran terhalang oleh struktur lembaga yang tidak disiapkan mengakar sampai ke bagian paling bawah dari organisasi. Pada muktamar ke 45 di Malang tahun 2005, komitmen keberpihakan kepada akar rumput semakin ditegaskan lagi dengan dibentuknya sebuah majelis yakni Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), sebuah bentuk yang lebih kokoh daripada sebuah lembaga.

Tercetusnya komitmen pemberdayaan masyarakat tersebut dalam rangka meningkatkan peran Muhammadiyah dalam pemberdayaan umat dan bangsa sebagai manifestasi dari peran Muhammadiyah. Komitmen pemberdayaan masyarakat dan umat ini tidak terlepas dari tuntutan

yang dihadapi oleh Muhammadiyah untuk dapat berpihak dan membela problem-problem masyarakat di akar rumput dan komunitas mustadh'afin dalam berbagai ruang lingkup dan variasinya.

Program pemberdayaan masyarakat dalam lima tahun terakhir ini sedikit banyak telah merubah wajah Muhammadiyah yang elitis menjadi populis dan pro kerakyatan. Muhammadiyah sudah mulai akrab dengan para petani, nelayan, peternak, buruh, kaum miskin kota, kaum difabel. Melalui program dan sentuhan MPM, masyarakat akar rumput menjadi tersadar bahwa Muhammadiyah ternyata bersama mereka untuk turut serta dalam memikirkan dan memperjuangkan masa depan dan nasib hidup mereka. Bahkan Mereka memberi pelajaran banyak kepada Muhammadiyah bahwa, selama ini masyarakat akar rumput tidak membutuhkan wacana yang muluk-muluk, bombastis apalagi "njlimet". Yang mereka butuhkan adalah kehadiran dan pembelaan yang nyata terhadap diri mereka. Muhammadiyah bisa menjadi benteng terakhir harapan masyarakat di tengah keterputusasaan lantaran para elit dan pemerintah tidak hadir dalam kehidupan mereka secara nyata. Mereka harus selalu rela dikorbankan demi citra dan pencitraan para pemimpin bangsa yang sudah mati rasa.

Komitmen Muhammadiyah pada akar rumput, tentu merupakan langkah dan terobosan baru yang perlu diapresiasi oleh semua pihak bahkan malah harus ditiru dan direplikasi, bisa jadi ini adalah tajdid jilid ke dua dari gerakan yang sudah berumur 100 tahun ini. Oleh karena ke depan gerakan ini harus senantiasa memperkuat program dan aktivitas gerakan pemberdayaan dengan cara memaksimalkan modal sumberdaya yang sudah dimiliki, baik itu modal sosial, SDM, jaringan, dan amal usaha. Potensi yang ada dalam persyarikatan perlu dimaksimalkan dalam rangka masifikasi gerakan pembelaan terhadap masyarakat miskin dan tertindas. Selain memaksimalkan potensi dari dalam, Muhammadiyah perlu membangun networking yang kuat dan kokoh. Bekerjasama dan berjejaring dengan elemen masyarakat yang lain dalam rangka memaksimalkan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Hal ini dipandang perlu sebab kerja pemberdayaan masyarakat adalah kerja keumatan yang membutuhkan kerjasama dengan semua pihak dengan cara bergotong royong.

VISI NASIONALISME DAN INTERNASIONALISME MUHAMMADIYAH

Hendra Darmawan
Dosen Universitas Ahmad Dahlan, Anggota Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, Ketua Majelis Tabligh PWM DIY

Mengingat Perkataan Guru besar kita Kyai Dahlan, "…Moehammadijah haroes hidoep. Moehammadijah akan hidoep boeat seloeroeh doenia. Moehammadijah jialah mendjadi Bapaknja doenia, jang akan mendidik doenia mendjadi baik dan benar. Kaoem Islam di doenia bakal berta'lok pada Moehammadijah". (H. A. Aziz, Soeara moehammadijah, Vol 20. 12 1344 H/ 1926: 283)

Although we are divided into nations, we human beings are one. In order for us all to live in prosperity and happiness we should unite our hearts . . . and should try something new and different, instead of merely following our own customs (Dahlan cited in Mulkhan 1986: 7–9).

Bagi Malik Bennabi (1997) seorang ulama Aljazair yang menulis *syurutunnahdhah* bahwa hanya ada satu kata kunci yang akan muncul jika kita generasi hari ini tidak memahami proses sejarah, yakni kegagalan dalam memahami realiatas. kegamangan bersikap, terjerembab dalam hoax, *incorpororated lies*/ kebohongan yang terus diproduksi dan direproduksi sehinggga seakan menjadi kebenaran.

Kutipan diawal tulisan ini menegaskan visi internasionalisme Muhammadiyah, dalam upayanya untuk terus tidak hanya piawai dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, tetapi esensi *istibaq* dalam ayat *Fastabiqul khairat* adalah mendahului, menjadi yang utama, atau pioner-pioner kebajikan. Visi internasionalisme tersebut melampaui nasonalisme yang telah dibuktikan dalam kesetiaan muhamamdiyah dalam mengawal keberlangsungan bangsa ini sejak zaman prakemerdekaan sampai sekarang. putra-putra terbaik

Muhamamdiyah sejak KH. Ahmad Dahlan, generasi awal Muhamamdiyah sampai founding fathers bangsa ini, Ki Bagus hadikusuma, Ir. Djuanda, Dr. Sukiman Wiryasenjoyo, Buya Hamka, Mas Mansur dan masih banyak lagi.

Kutipan yang kedua, mensyiratkan komitmen kemanusiaan tidak menyatukan kita semua, hatilah yang menyatukan kita, tidak hanya sekedar fisikal. Kesatuan hati itulah yang menyatukan kita dalam menggapai kesejahteraan dan kebahagiaan, lebih daripada itu kita harus terus melakukan ijtihad dalam menggali strategi untuk menggapai kemakmuran dan kebahagiaan tersebut. Kita ingat, awal KH Dahlan mendirikan rumah sakit PKO (Penoeloeng Kesengsaraan Oemoem) saat itu belum ada dokter muslim, lalu kyai mendapatkan bantuan atas hasil komunikasinya dengan pihak belanda yakni Dokter-dokter belanda yang notabenenya Non-Muslim dan berspakat dengan visi kemanusiaan ini.

Pasca konferensi Internasional tentang penelitian Muhammadiyah di Malang 2012 (International research conference on Muhammadiyah) yang dihadiri oleh para peneliti dalam dan luar negri, ada banyak harapan bahwa Muhammadiyah mampu berkontribusi lebih banyak dalam konteks keindonesiaan dan Internasional. Disatu sisi Muhammadiyah telah dikatakan seperti *holding company*, hampir memiliki segalanya dari hulu hingga hilir, namun sebagai organisasi yang menisbahkan diri sebagai organisasi sosial, inisitif dan sifat responsif terhadap isu-isu sosial harus ditingkatkan, ungkap Ricklef. Azra (2012), juga menggarisbawahi perlunya muhammadiyah mengantisipasi munculnya gerakan ultra puritanisme, yang mereka juga melakukan upaya purifikasi tetapi dalam ranah muamalah, seperti keharusan adanya satu kekhalifahan, atau segelintir kelompok yang terhubung dengan gerakan trans-national.

Dalam beberapa forum Internasional dunia Islam selain Organisasi Konferensi Islam, Muhammadiyah melalui representasinya telah mendapat masukan dari beberapa ulama internasional agar Muhammadiyah tidak hanya memikirkan Indonesia tetapi harus lebih jauh memikirkan dunia Islam, *wabil khushus* harus memikirkan Timur Tengah pasca *Arab Spring*, dimana Artefak kebudayaan Islam dan Peradaban Islam hancur berkeping-keping akibat perang, aksi kekerasan dan penghancuran. Ada betul juga saran Buya syafii agar umat islam indonesia tidak mengimport hal yang buruk dari Arab/ *misguided arabism.*

Al Amru bil Adli Wannahyu Anidzdzulmi

Selama satu abad Muhammadiyah sudah melakukan hal-hal yang terbaik dalam ranah amar ma;ruf nahi Munkar, di era Prof Dien Syamsuddin telah melakukan banyak terobosan memposisikan Muhammadiyah tidak hany sebagai gerakan Modernis, tetapi juga reformis. Langkah Dien mengintrodusir dan menggerakkan Muhammadiyah dan elemen bangsa yang lain untuk melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-undang yang merugikan masyarakat, undang-undang yang menyengsarakan rakyat, alhamdulillah cukup sukses dan perlu terus ditingkatkan.

Ini bagian dari kontribusi keummatan Muhammadiyah ditengah kemunkaran sosial yang terjadi, yang hampir sempurna kerusakannya, meminjam istilah Buya Syafii. Apresiasi atas Jihad konsitusi juga disampaikan oleh Prof M.Amien Rais, bahwa beliau juga menulis booklet singkat sebagai evaluasi dan refleksi serta tawaran konsep paradigmatis yang disampaikan kedalam forum Muktamar ke 47 di Makassar tahun 2015. Hasil refleksi beliau melihat dan mencermati dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang carut-marut, tercabik dan masih perlu banyak diperbaiki. Beliau menawarkan konsep Al Amru bil adli wannahyu anidzdzulmi sebagai paradigma Muhamamdiyah abad kedua, yakni menegakkan keadilan dan menghentikan kedzaliman. Dalam Al-quran ada banyak ayat yang bicara tentang keadilan dan keharusan menghentikan kedzaliman. belia menengarai kecenderungan dunia bergeser kearah yang *unjustice world, unfair*, bahkan kecenderungan dunia yang dihiasi dengan negara-negara gagal dengan variasi *Proxy war* yang juga mengancam.

Mengarusutamakan Gerakan Islam Tengahan/*Middle Path of Islam*

Beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 1-3 Mei 2018 diselenggarkan *High Level Consultation of World Muslim Scholars on WasatiyyatIslam (HLC-WSW)* di Bogor Indonesia. Forum tersebut digagas oleh Prof. Dien Syamsuddin, Prof. Amien Abdullah, Prof Azyumardi Azra dan beberapa pihak dalam rangka mengarusutamakan Islam tengahan, *best practices* yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan Ormas Keagamaan yang lain di Indonesia.

Muhammadiyah yang telah mendeklarasikan ideologi amal sebagai pilihan, sehingga dalam prakteknya tanpa harus berkacak dada paling nasionalis, tetapi membuktikan kontribusi yang real dalam kehidupan

kebangsaan, itulah yang dielaborasi oleh Haedar Nashir dengan tema "Taawun Untuk Negeri", sebagai bukti (syahadah) atas komitmen terhadap negeri pancasila yang juga sebagai Darul Ahdi-Negara Perjanjian.

Gagasan negara bangsa/ Nation-states (*al-Wataniyyah and al-Muwathanah*) merupakan revolusi yang dahsyat dalam pengelolaan negara setelah perang dunia kedua. hari ini, khususnya setelah terjadinya Arab Spring, istilah wasatiyat islam menjadi istilah yang dikontestasikan. terlebih Indonesia menjadi negara yang sangat terkenal dengat gerakan Islam moderatnya.

Dari perspektif Indonesia, menurut Amien Abdullah (2018) minimal ada 12 nilai dasar yang dimiliki Islam tengahan:

1. *Tawassut* (mengambil jalan tengah), yaitu memahami dan menerapkan agama (bukan ifrat dan bukan tafrit))
2. *Tawazun* (seimbang), yaitu Memahami dan mempraktikkan agama secara seimbang dalam mencari kebahagiaan hidup di sini di dunia dan kehidupan setelah kematian. Jelas membedakan antara inhiraf (penyimpangan) dan ikhtilaf (perbedaan)
3. *I'tidal* (undeviating and firm), yaitu berperilaku dan bertindak secara proporsional dalam melaksanakan hak seseorang dan memenuhi tanggung jawab seseorang
4. *Tasamuh* (toleransi), yaitu dalam mengenali dan menghargai perbedaan. Wasatiyyat menuntut keadilan dan berdiri di atas partai atau kelompok.
5. *Musawah* (Egaliter), yaitu memperlakukan tanpa pandang bulu kepada orang lain, tidak berdasarkan pada perbedaan keyakinan mereka, status sosial-ekonomi, tradisi atau gender.
6. *Syura* (musyawarah), menyelesaikan masalah secara konsultatif untuk mencapai konsensus, dengan menempatkan kepentingan semua di atas segalanya.
7. *Ishlah* (reformasi; perbaikan berkelanjutan), memprioritaskan prinsip-prinsip reformatif untuk mencapai kondisi yang lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan berdasarkan pada kebaikan bersama (*maslahah al-'ammah*).
8. *Aulawiyyah* (memberikan prioritas pada apa yang diprioritaskan), kemampuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang memiliki kepentingan lebih tinggi yang harus diprioritaskan dan diimplementasikan atas hal-hal yang kurang diminati.

9. *Tatawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif). Menjadi selalu terbuka untuk melakukan perubahan. Keterbukaan terhadap perubahan, siap untuk mempercepat menciptakan hal-hal baru untuk kepentingan dan kemajuan umat manusia.
10. *Tahadhdhur* (beradab). Melindungi dan mengembangkan martabat manusia (al-karamah al-insaniyyah) sebagai parameter untuk umat terbaik (khairu ummah) dalam menegakkan dan mempraktikkan al-akhlaq al-karimah
11. *Al-Wataniyyah wa al-Muwathanah*, Menerima keberadaan negara-bangsa dimana pun seseorang berada dan memberikan prioritas pada orientasi sipil.
12. *Al-Qudwatiyyah*. Yaitu melakukan inisiatif perintis untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama sebagai konsekuensi dari wasatiyyatas menjadi kesaksian *(shahadah*) bagi manusia.

Selain nilai-nilai diatas sebagai modal sosial *(social capital)* yang juga melekat pada Muhammadiyah, diseminasi pengalaman dan pemikiran serta terobosan yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah perlu terus digencarkan.

Langkah menjawab harapan dari dunia internasional salah satunya perlu diupayakan penterjemahan pemikiran-pemikiran resmi Muhammadiyah (MKCH, matan keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, PHIWM-Pedoman Hidup Islami warga Muhammadiyah, Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasysyahadah, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, dan lain-lain) kedalam bahasa Arab dan Inggris, termasuk tulisan populer tentang *best practices* dari apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan bahasa yang lebih populer. Sehingga karya tersebut lebih memiliki cakupan pembaca yang lebih luas, menghiasai toko-toko buku dunia. UMS dan Majelis Pustaka Informasi dan UAD serta beberapa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) sudah memulainya, tinggal ditingkatkan dan diakselerasi jumlahnya. Selain dengan adanya Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) dibeberapa negara yang hari ini sudah makin menunjukkan eksistensinya.

MENGAWAL POLITIK PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

Moh. Mudzakkir
Dosen Program Studi Sosiologi Universits Negeri Surabaya (Unesa), Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah Periode 2006-2008

Bukan rahasia lagi bila Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Muhammadiyah bukan hanya bergerak dalam bidang keagamanan tapi juga bergerak dalam berbagai bidang kehidupan lainnya, yaitu seperti ranah sosial, kesehatan, dan pendidikan. Tidak heran bila kemudian, Mukti Ali menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan yang memiliki banyak wajah. Dan salah satu "wajah" yang banyak dikenali dan disoroti adalah "wajah" sebagai gerakan pendidikan.

Secara objektif, Muhammadiyah telah memberikan konstribusi yang cukup besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Persyarikatan ini telah banyak mendirikan sekolah dan madrasah sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia hingga era sekarang. Dari rahim sekolah-sekolah Muhammadiyah itu pula banyak lahir para pejuang dan pemimpin bangsa Indonesia. Seiring perkembangan waktu, gerak perkembangan pendidikan Muhammadiyah semakin besar dan luas.

Amal usaha pendidikan terus semakin bertambah, dari Taman Kanak-Kanak (TK), SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, Pondok Pesantren, hingga Perguruan Tinggi. Amal usaha pendidikan tersebut tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Para alumni lembaga pendidikan Muhammadiyah tersebut juga tersebar dalam berbagai profesi yang memiliki peran dan fungsi yang beraneka ragam di masyarakat. Singkatnya, jutaan anak bangsa di Republik Indonesia ini banyak mendapatkan manfaat dari gerakan pendidikan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah.

Dalam konteks pendidikan tinggi, Muhammadiyah memiliki 173 perguruan tinggi (45 universitas diantaranya) yang berada di setiap

provinsi. Diantara sekian banyak Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) tersebut terdapat 5 universitas yang mendapatkan akreditasi A dari Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN PT), yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), dan Universitas Prof. Dr. HAMKA (Uhamka).Pencapaian yang diraih oleh kelima kampus unggulan Muhammadiyah tersebut tentu patut diapresiasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa PTM telah mengalami perkembangan bukan hanya secara kuantitas namun juga dalam hal kualitas kelembagaan akademik.

Meski Muhammadiyah telah lama berpartisipasi dan berkontribusi dalam "proses mencerdaskan kehidupan bangsa", namun belum menjadi pengambil kebijakan (politik) pendidikan pada level negara. Kesempatan politik untuk baru terbuka ketika perubahan politik terjadi saat reformasi. Gerakan reformasi yang salah satunya digerakkan oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Amien Rais, ikut membuahkan hasil. Hal ini bisa kita lihat ketika Abdul Malik Fadjar, mantan Rektor UMM dan UMS, dipilih menjadi Menteri Agama Republik Indonesia di bawah Presiden B.J Habibie. Dalam masa yang singkat tersebut Malik Fadjar menjadi pengambil kebijakan tertinggi pendidikan (Agama Islam) dalam Kementerian Agama.

Pasca pergantian kekuasaan dari Habibie kepadaAbdurrahman Wahid (Gus Dur), Yahya Muhaimin ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaanuntuk menggerakankebijakan pendidikan nasional. Baik Malik Fadjar dan Yahya Muhaimin tidak lama mengendalikan kebijakan pendidikan di lingkungan kementerian masing-masing karena memang situasi politik yang tidak stabil. Begitulah adanya. Dalam rentang waktu yang singkat tersebut, tentu keduanya tidak leluasa merumuskan dan merealisasikan kebijakan yang bersifat jangka panjang.

Ketika Megawati naik menjadi Presiden mengantikan Gus Dur, Malik Fadjar mendapatkan kesempatan kedua kalinya, namun bukan menjadi Menteri Agama tapi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika menjadi Dirjen Binbaga dan berlanjut menjadi Menteri Agama, Malik Fadjar membuat kebijakan yang cukup berani, yaitu mengembangkan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang sebelumnya adalah hasil perubahan dari fakultas filial atau fakultas cabang IAIN yang berjumlah 33 di seluruh Indonesia (Hudijono dan Thayyib, 2006). Bukan hanya itu, menurut Azyumardi Azra (2006), Malik Fadjar berperan penting dalam mendorong *wider mandate* IAIN berubah menjadi UIN.

Ketika menjadi Mendikbud Malik mengeluarkan kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sebagai respon terhadap perubahan di dunia pendidikan. Bukan hanya itu Malik juga menghapus Evaluasi Belajar Tahap Akhir (Ebtanas) pada tahun 2001. Kebijakan tersebut tentu sebuah terobosan yang terbilang berani sebagai respon untuk menjawab aspirasi masyarakat dan mengakhiri polemik yang berlarut-larut saat itu. Tapi dikemudian hari, Ebtanas dihidupkan kembali oleh Bambang Sudibyo, Menteri Pendidikan Nasional yang juga berasal dari Muhammadiyah, namun dengan nama yang berbeda yaitu Ujian Nasional dari SD hingga SMA.

Terakhir kebijakan yang cukup menyedot perhatian publik dan menjadi perdebatan politik di parlemen adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Ketika masih menjadi RUU, perdebatan terjadi antara kubu yang pro dan kontra terhadap UU tersebut. Bukan hanya itu, kedua kelompok juga melakukan pengerahan massa dan berpolemik di media massa. Salah satu isu yang sensitif di dalam UU Sisdiknas adalah terkait denganpasal 13 yang sering disebut sebagai "pasal agama" yang membuat UU ini tertunda disahkan. Pasal tersebut berbunyi "*setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan pendidikan yang seagama*".

Pasal di atas mempunyai konsekuensi setiap sekolah untuk memberikan pelajaran agama kepada siswa sesuai agamanya dan diajarkan oleh guru yang seagama juga. Kelompok Islam menerima, namun kelompok Protestan dan Katholik keberatan, protes keras dan menolak. Mereka menggangap RUU tersebut sarat kepentingan mayoritas dan negara terlalu masuk dan mengganggu kemandirian sekolah. Sedangkan kelompok Islam mengganggap penting dan agar siswa yang beragama Islam yang bersekolah di lembaga non-Islam terjaga agamanya. Meski mengalami perdebatan, protes keras, dan lobi dengan berbagai kelompok akhirnya RUU Sisdiknas yang sudah diajukan sejak Mendikbud era Yahya Muhaimin ditetapkan menjadi UU pada era Malik Fadjar.

Pergantian kekuasaan politik berdampak pula pergantian kekuasaan di ranah kekuasaanpendidikan. Pasca Megawati Soekarnoputri dikalahkan oleh Soesilo Bambang Yudhono (SBY), maka berganti kekuasaan di level pendidikan. Menteri Pendidikan Malik Fadjar digantikan oleh Bambang Sudibyo, seorang ekonom yang juga mantan Menteri Keuangan di era Gus Dur, yang juga berasal dari Muhammadiyah.Berbeda dengan Yahya

Muhaimin dan Malik Fadjar yang tidak berafiliasi pada partai politik tertentu, Bambang Sudibyo sebelumnya akademisi ketika terpilih menjadi Mendiknas adalah fungsionaris Partai Amanat Nasional (PAN). Di eranya, ia meluncurkan dua kebijakan pupuler, Ujian Nasional (UN) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). UN yang sebelumnya bernama Ebtanas dihidupkan kembali, padahal di era Malik Fadjar telah dihilangkan, khususnya untuk tingkat SD. Sedangkan BOS, meski mendapatkan kritik dalam pengelolaannya, program ini sangat membantu menggerakkan pendidikan di sekolah-sekolah yang tidak mampu dan membutuhkan.

Lebih lanjut, pada era kepemimpinan SBY yang kedua posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak lagi dijabat lagi oleh elit atau kader Muhammadiyah. Tetapi diemban oleh Muhammad Nuh mantan Menteri Komunikasi dan Informasi periode pertama SBY, mantan Rektor ITS dan berasal dari Nahdhatul Ulama (NU). Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak kalangan, khususnya di kalangan Muhammadiyah. Oleh beberapa kalangan, hal ini disebabkan elit Muhammadiyah sangat keras mengritik dan berseberangan dengan SBY dalam beberapa kebijakan. Meskipun beberapa elit Muhammadiyah lainnya juga menjadi pendukung SBY saat itu.

Pada periode kedua SBY (2009-2014), Muhammadiyah tidak lagi menjadi bagian sentral dalam menggerakan kebijakan pendidikan. Elit Muhammadiyah banyak menyoroti kebijakan-kebijakan pendidikan tinggi yang dikeluarkan oleh Muhammad Nuh. Yaitu kebijakan-kebijakan Nuh yang banyak memberikan *privilege* bantuan program serta mempermudah proses perizinan kampus-kampus di bawah naungan NU, yang secara objektif terkadang banyak yang tidak memenuhi persyaratan. Tapi sebaliknya bila berkaitan dengan kampus-kampus Muhammadiyah, Mendikbud terkesan sangat tidak resposif, padahal secara prosedural telah memenuhi persyaratan.

Harus diakui, pada era Muhammad Nuh, elit dan warga Muhammadiyah merasa tidak terwakili padahal selama ini merasa paling otoritatif mengemban posisi tersebut. Salah satu puncaknya adalah ketika Muhammad Nuh mengeluarkan kebijakan kurikulum 2013jelang berakhir masa jabatannya. Banyak kalangan mengkritisi kebijakan perubahan kurikulum tersebut yang terkesan tergesa-gesa dan mengejar setoran. Meski secara struktural Muhammadiyah tidak melakukan protes dan kritikan, tapi banyak aktivis Muhammadiyah yang melakukan kritik, baik secara internal ataupun secara terbuka dengan bersuara di media massa.

Protes bukan hanya berasal dari kalangan Muhammadiyah, tapi juga berasal dari kalangan akademisi, NGO, dan organisasi guru.

Kurikulum 2013 (K-13) akhirnya dihentikan oleh Anies Baswedan ketika menjabat Mendikbud di era Presiden Joko Widodo pada tahun 2015. Meski dalam praktiknya, Anies mengizinkan sekolah-sekolah yang telah menerapkan kurikulum 2013 secara terbatas. Bagi sekolah yang belum menerapkan K-13, tetap dianjurkan menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006.

Terpilihnya Anies Baswedan, membuat elit dan warga Muhammadiyah tidak terlalu kecewa seperti halnya ketika Muhammad Nuh menjadi Mendikbud. Saya membaca, baik elit dan warga Muhammadiyah terlihat bisa menerima dan tidak begitu kecewa ketika terpilihnya Anies menjadi Mendikbud. Hal ini disebabkan karena Anies direpresentasikan sebagai bagian dari Islam Modernis. Maka tidak heran bila pasca terpilih, Anies sering diundang di lingkungan Muhammadiyah. Minimal Anies juga bisa dijadikan "obat nyeri" sementara, karena Kementerian Risetdikti dipegang oleh Muhammad Nasir yang kebetulan bagian dari gerbong PKB yang secara kultural NU.

Setelah tujuh tahun Muhammadiyah tidak memegang posisi penting dalam kebijakan pendidikan, akhirnya Muhadjir Effedy, salah satu Ketua PP Muhammadiyah dan mantan Rektor UMM, ditunjuk menjadi Mendikbud menggantikan Anies Baswedan.

Terpilihnya Muhadjir tentu disambut suka cita baik elit maupun warga Muhammadiyah. Setelah hampir sewindu merasa tidak diakui dan termarjinalkan akhirnya Muhammadiyah memegang peran strategis dan penting di bidang pendidikan. Baru beberapa bulan mengemban jabatan Mendikbud menggeluarkan wacana *full-day school* yang kemudian menjadi kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) mendapatkan protes dan perlawanan dari publik. Kelompok yang paling vokal menentang kebijakan Mendikbud hasil reshuffle tersebut dari kalangan Nahdhiyyin. Sikap kontra bukan hanya disampaikan oleh PKB, tapi juga oleh PBNU, badan otonom dan simpatisannya. Secara kompak mereka melakukan perlawanan, hingga akhirnya kemudian Presiden juga ikut turun tangan menyelesaikan kebijakan tersebut.

Di atas saya mencoba menelusuri dinamika politik elit Muhammadiyah dalam pusaran kekuasaan pendidikan pasca reformasi. Memegang posisi strategis di lingkungan pembuat kebijakan pendidikan itu sangat penting dan perlu. Namun yang lebih penting lagi adalah para aktor tersebut

mampu menggunakan peran dan fungsi mereka untuk mempercepat "mencerdaskan kehidupan bangsa" bagi semua kalangan, bukan hanya untuk Muhammadiyah saja.

Oleh sebagian elit Muhammadiyah, dipilihnya salah satu kader Muhammadiyah menjadi Mendikbud dan Menristekdikti, sebagai sebuah pencapaian dalam politik pendidikan. Tapi itu mungkin hanya salah satu bagian dari proses panjang. Ada hal lain yang harus terus diperkuat dan dikembangkan bila Muhammadiyah ingin berperan lebih luas bukan hanya sekedar menjadi subjek strategis di level nasional, tapi juga padawacana dan praksis pendidikan secara luas. Muhammadiyah harus merumuskan agenda strategis politik pendidikan, salah satunya dengan membangun pusat kajian pendidikan dan kebijakan (politik) pendidikan.

Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) yang berjumlah ratusan belum mampu secara optimal menjadi sumber produksi wacana pemikiran pendidikan dan kebijakan pendidikan. Hal ini bisa kita lihat belum adanya pusat kajian yang unggul di bidang pendidikan, apakah itu pendidikan dasar dan menengah atau pendidikan tinggi. Padahal sudah berulang kali elit Muhammadiyah menyuarakan keinginannya untuk membangun pusat keunggulan, dalam konteks ini pusat kajian yang bisa merespon dan menawarkan gagasan, wacana dan ide-ide terkait kebijakan di dunia pendidikan. Saya melihat hingga kini para elit Muhammadiyah belum serius merealisasikan.

Melalui pusat-pusat kajian yang *concerns* pada pemikiran pendidikan dan kebijakan pendidikan, diharapkan bukan hanya memperkokoh tradisi keilmuan di lingkungan PTM tersebut tapi juga akan membantu memberi masukan bagi pengembangan pendidikan di lingkungan Muhammadiyah, baik aspek mikro (misal tata kelola, manajemen sekolah, kepemimpinan sekolah) maupun makro (kebijakan pendidikan Muhammadiyah dan negara).Pusat kajian tersebut bukan hanya mengkaji dan meneliti dinamika pendidikan di lingkungan Muhammadiyah, tapi juga dinamika politik pendidikan negeri maupun swasta. Pusat kajian ini juga secara serius mengikuti perkembangan wacana dan kebijakan-kebijakan pendidikan baik di tingkat nasional maupun lokal atau bahkan perbandingan pendidikan di tingkat regional dan internasional.

Bila pusat kajian ini berjalan di beberapa kampus besar Muhammadiyah, maka tidak ada ceritanya Muhammadiyah kekurangan ahli atau pakar pemikiran pendidikan dan pakar kebijakan pendidikan. Lembaga ini pula yang nantinya akan membantu Muhammadiyah dalam membaca dan

bersikap terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan yang diproduksi oleh negara. Termasuk bila negara membutuhkan masukan tentang suatu kebijakan pendidikan, pusat kajian inilah yang akan siap memberikan pemikiran dan alternatif kebijakan. Singkatnya, lembaga ini menjadi *think-tank* terkait kebijakan (politik) pendidikan.

Lebih lanjut, pusat kajian yang *concerns* pada pendidikan tinggi sangat dibutuhkan. Pelan tapi pasti perhatian terhadap dinamika politik pendidikan tinggi (*politics of higher education*) secara spesifik sangat dibutuhkan. Kajian pendidikan secara umum (dasar-menengah) harus dibedakan dengan pendidikan tinggi, termasuk dinamikanya dengan dunia politik. Maka pusat kajian ini selain berfungsi internal, mengkaji perkembangan perguruan tinggi muhammadiyah secara ilmiah dalam perpsektif *higher education studies*, termasuk juga dalam mengkaji dinamika kebijakan politik pendidikan tinggi di Indonesia. Pusat kajian ini bukan hanya sekedar mengkaji dan meneliti, namun juga memberikan masukan-masukan strategis bagi pengembangan pendidikan tinggi di Muhammadiyah. Secara eksternal,juga mengikuti perkembangan dinamika kebijakan politik pendidikan tinggi, baik level nasional, regional, maupun internasional.

Politik Pendidikan Muhammadiyah ke depan harus dirumuskan secara terencana dan terstruktur. Bukan hanya sekedar alokasi elit pada posisi pengambil kebijakan pendidikan di pemerintahan. Namun perlu diperkuat secara kelembagaan melalui pusat kajian pendidikan atau kajian kebijakan pendidikan di beberapa PTM. Melalui lembaga semacam inilah, internalisasi kesadaran akan politik pendidikan di lingkungan Muhammadiyah terwujud, baik secara wacana keilmuwan dan maupun gerakan.

POLITIK MUHAMMADIYAH: BAGAIMANA BISA KELUAR DARI DILEMA?

Paryanto
Mahasiswa Doktor Politik Islam-Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Peminat Kajian *Security*, Politik Islam, dan Terorisme.

Politik itu memang memikat dan selalu indah untuk diceritakan. Apalagi kalau politik hanya dilihat dan diambil pada dimensi luarnya sebagai posisi, otoritas, fasilitas dan segala bentuk kemewahan yang melekat pada seseorang yang sedang berada dalam posisi menggenggam kekuasaan. Tetapi politik sebagai realitas sosial dan sekaligus proses untuk menjadi (*being politician*) dan mendapatkan (*having politics*) yang ditampilkan oleh pelakunya tak sepi dari kekurangan, penyimpangan, kegaduhan, ketegangan, bahkan pengkhianatan. Makanya wajar kalau muncul anggapan bahwa politik itu dilema: pada satu sisi politik dicinta tapi pada waktu yang sama politik bisa menjadi sasaran sumpah serapah; pada satu sisi politik menjadi tumpuan harapan dan mimpi tetapi di sisi lain politik juga dibenci dan dijauhi.

Bagaimana sejatinya posisi politik Muhammadiyah? Apakah Muhammadiyah terjebak dalam trauma politik yang penuh dilema itu? Bagaimana memahami posisi dilema dan upaya apa yang perlu dilakukan untuk bisa keluar dari dilema tersebut?

Trauma Politik

Pengalaman interaksi Muhammadiyah dengan politik telah membentuk alam pikiran dan bahkan suasana batin yang memposisikan politik sebagai dilema. Pada level tertentu, jebakan dilema telah ikut mempengaruhi perjalanan sejarah Muhammadiyah, terutama pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Tamimy dan Hadikusuma, 1972; Kamsi, 2013). Apalagi tak lama

setelah berlakunya dekrit tersebut muncul pula kebijakan pembubaran Masyumi. Pemerintahan Soekarno kemudian juga membubarkan parlemen hasil Pemilu 1955 yang dicatat sejarah sebagai Pemilu paling demokratis. Sebagai gantinya, Soekarno kemudian membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dimana Masyumi sama sekali sudah ditinggalkan. Alasannya adalah karena Masyumi dianggap sebagai penghalang revolusi dan dituduh sebagai dalang pemberontakan PRRI-Permesta (Noor, 1983).

Secara politik pembubaran Masyumi dan kemudian disusul dengan peminggiran Islam dari panggung politik sebagaimana tercermin pada komposisi keanggotaan Parlemen DPRGR[9] telah berdampak pada Muhammadiyah. Sejauh kajian penulis dampak tersebut terlihat pada: *Pertama,* Muhammadiyah secara formal keorganisasian kehilangan kendaraan dan saluran politik. Karena Masyumi merupakan satu-satunya partai politik yang menjadi saluran aspirasi Muhammadiyah. Meskipun secara organisatoris Muhammadiyah bukan partai politik dan tidak terlibat dalam politik praktis tetapi Muhammadiyah adalah anggota istimewa Masyumi. *Kedua,* sebagai implikasi dari dampak pertama secara internal Muhammadiyah mengalami dinamika politik dan ketegangan sebagai akibat dari perbedaan pandangan dan artikulasi dalam menjalankan roda organisasi. Segera setelah Masyumi membubarkan diri terjadi "arus balik" dari para aktivis Muhammadiyah yang sebelumnya menjadi politisi di Masyumi ke dalam aktivitas internal Persyarikatan. *Ketiga,* adanya ketakutan dari kalangan elit Muhammadiyah akan kemungkinan Muhammadiyah terseret dalam konflik politik antara Masyumi dengan pemerintah yang dikendalikan oleh koalisi tiga kekuatan utama penyokong pemerintahan Soekarno: Nasional, agama, dan komunis (NASAKOM). *Keempat,* tumbuh dan berkembangnya trauma politik di kalangan elit Muhammadiyah sebagai akibat dari proses peminggiran secara sistematis terhadap kekuatan politik Islam.Pada kenyataannya, trauma terhadap politik ini tidak saja terjadi pada era demokrasi terpimpin (Maarif, 1988; Mahfud MD, 1999; Efendi, 2003) di akhir orde baru tetapi berlanjut pula pada era orde baru, 1969-1989 (Efendi, 2003; Kamsi, 2013).

---

9 Komposisi DPRGR terdiri dari 94 kursi untuk kaum nasionalis sekuler, 81 kursi untuk komunis, dan 67 kursi untuk kelompok Islam. Bandingkan dengan DPR hasil Pemilu 1955 sebanyak 115 kursi untuk kalangan Islam dengan komposisi terdiri dari Masyumi 57 kursi, NU 45 kursi, PSII 8 kursi, PERTI 4 kursi, dan PPTI 1 kursi (Maarif, 1988).

Pilihan Politik: *Disengagement Politics*

Realitas politik ini diresponds Muhammadiyah dengan membangun kembali posisioning politik sebagai organisasi sosial keagamaan yang tidak menjalankan peran politik praktis. Beberapa jargon diproduksi seperti "tidak berpolitik tapi paham politik", "tidak kemana-mana tapi ada dimana-mana", "menjaga jarak yang sama dengan kekuatan politik", menjaga kedekatan yang sama dengan semua partai politik", dan berbagai jargon lain. Apakah dengan penegasan kembali jatidirinya tersebut berarti Muhammadiah tidak berpolitik? Justru itulah pilihan politik Muhammadiyah, yaitu politik dengan jalan *disengagement politics.*

Pada perkembangan lebih lanjut, muncul banyak kritik terhadap pilihan Muhammadiyah yang meninggalkan gelanggang politik dan beralih fokus pada kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keagamaan, dan belakangan merambah bidang filantrofi. Fenomena banyak orang lari pada kehidupan beragama dikarenakan kalah bersaing dalam perebutan kekuasaan dan ekonomi bukan hal baru tetapi pernah terjadi di Eropa pada akhir abad ke-18 (Karl Marx, 1883; Nietsze, 1900).Marx menyatakan bahwa dengan menyibukkan diri pada aktivitas keagamaan seseorang akan mendapatkan penawar dan hiburan setelah mengalami pahit getir dan sakitnya kekalahan dalam pertarungan politik. Tak usah gusar akan kehilangan kenikmatan dunia karena Tuhan akan memberikan kenikmatan yang lebih di akhirat (Hidayat, 2017).

Apakah kritik kaum Marxian dan mazhab kritis terhadap pilihan jalur non politik ini sebagai politik pelarian dari kehidupan riel politik yang sarat kontestasi dan konflik kepentingan dan sekaligus sebagai bentuk upaya menghibur diri setelah mengalami kekalahan di gelanggang politik berlaku pada Muhammadiyah? Jawabannya tentu saja relatif: bisa ya dan bisa tidak. Menariknya adalah justru terletak pada proses rasionalisasi, legitimasi dan ideologisasi yang dilakukan Muhammadiyah atas pilihan pada *disengagement politics* ini. Apalagi kemudian proses ideologisasi ini mengalami proses pelembagaan yang terkonstruksi dalam apa yang dikenal sebagai "Kepribadian Muhammadiyah" (Pasha dan Darban, 2000; Nashir, 2015).

Rasionalisasi atas pilihan politik semacam ini pernah terjadi sebelumnya ketika Ki Bagus Hadikusuma merumuskan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang kemudian diputuskan sebagai dokumen ideologi resmi Muhammadiyah pada forum tanwir tahun 1951. Penyusunan teks Muqaddimah ini selain diinspirasi dari pengalaman Ki Bagus Hadikusumo

dalam penyusunan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Budianto, 2018) tentu juga sulit ditepis akibat kekalahan dalam mempertahankan 7 kata dalam Sila Pertama Pancasila, yaitu frasa "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Kekalahan ini dikemudian hari dihaluskan dengan kalimat "pengorbanan terbesar" umat Islam untuk bangsa dan negara Indonesia (Boland, 1972; Maarif, 1985; dan Mahfud MD, 1999) dan "kesediaan dan kelapangan dada Ki Bagus Hadikusuma dan tokoh-tokoh Nasionalis Muslim lainnya" (Ismail, 2018).

Self-Fulfilling Prophecy

Proses pelembagaan rasionalisasi dan ideologisasi atas pilihan politik Muhammadiyah terus mengalami keberlangsungan pada periode selanjutnya hingga era sekarang. Produksi ideologi Muhammadiyah terus mengalami proses internalisasi dan diversifikasi. Bersamaan dengan semakin membaiknya relasi antara Islam dan negara pasca ketegangan era asas tunggal, Muhammadiyah ikut menikmati iklim yang kondusif bagi perkembangannya. Kemesraan hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah ini tergambar memuncak pada momentum pemberian dukungan Muhammadiyah kepada Soeharto untuk kembali menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1992 (Gaffar, 2004) dan begitu massifnya dukungan pemerintah pada Muhammadiyah sejak Muktamar Aceh tahun 1995. Sebagian besar elit Muslim, termasuk elit Muhammadiyah yang menjadi Pegawai Negeri Sipil terserap ke dalam birokrasi pemerintah (Efendi, 1999). Sementara secara institusi Amal Usaha Muhammadiyah mengalami perkembangan yang juga signifikan.

Capaian dan progresifitas organisasi dan amal usaha Muhammadiyah di luar jalur politik ini mengkonfirmasi pilihan politik Muhammadiyah yang pada awalnya terkesan sebagai pelarian atas kekalahan dalam pertarungan di gelanggang politik. Kebijakan politik pemerintahan Soekarno pada era demokrasi terpimpin telah membuat jagad politik Muhammadiyah begitu terguncang. Belum lama menikmati "kemewahan" politik sebagai hasil Pemilu 1955 yang menempatkan banyak elit Muhammadiyah dalam posisi politik strategis terpaksa harus tanggal. Peristiwa politik ini sungguh memiliki makna yang khusus dan dalam di tubuh Muhammadiyah.

Kondisi yang dialami Muhammadiyah ini dapat dijelaskan dalam teori yang digagas Robert K. Merton yang disebut sebagai *self-fulfilling prophecy*. Perilaku manusia banyak ditentukan oleh persepsi dan makna yang diberikan pada situasi tertentu. Ketika seseorang meyakini bahwa situasi

tertentu yang terjadi pada diri dan lingkungannya memiliki makna dan arti tertentu, baik ataupun buruk, maka perilaku seseorang tersebut akan cenderung mendukung makna tersebut (Merton, 1948; Muscato, 2015). Begitu pula yang terjadi dengan Muhammadiyah, dimana Muhammadiyah berusaha memaknahi turbulensi politik yang involutif pada era demokrasi terpimpin itu dengan mereinterpretasi arah dan garis perjuangannya. Dalam banyak dokumen tentang ideologi Muhammadiyah dijelaskan bahwa pilihan di jalur non politik ini dinilai lebih tepat dan sejalan dengan tujuan ideal Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Nashir, 2015).

Kini, Muhammadiyah sudah melahirkan banyak produk ideologis yang semakin mengokohkan pilihannya untuk terus berkiprah di luar jalur politik praktis.

Produk Ideologi	Area Isu	Irisan Tersasar
Muqaddimah AD	Identitas Organisasi	Anggota dan pimpinan Muh
Kepribadian	Kepemimpinan dan Organisasi	Anggota dan pimpinan Muhammadiyah
Khittah	Ideologi dan Politik	Anggota dan Pimpinan
PHIWM	Keislaman, Kemuhammadiyahan, Politik, keluarga, organisasi, Amal Usaha	Warga persyarikatan
Pernyataan Muhammadiyah 1 Abad	Ideologi dan Politik	Penyelenggaran negara
Fiqh Air	Lingkungan	Aktivis dan pemerhati lingkungan, pemerintah
Fiqh Bencana	Kebencanaan	Aktivis peduli bencana dan korban bencana
Adabul mar'ah Fil Islam	Perempuan	Perempuan muda
Keluarga Sakinah	Keluarga	Keluarga dan masyarakat urban
Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah	Teologi Politik kenegaraan	Politisi, penyelenggara negara
Dakwah Kultural	Dakwah	Kelompok seniman, budayawan, dan budaya lokal
Fiqh Medsos	Dakwah medsos	Millenial

Beragam produk ideologis tersebut sudah menempatkan Muhammadiyah saat ini pada posisi yang memiliki irisan dengan banyak kelompok masyarakat. Posisi strategis ini bermakna dua hal, *pertama,* wilayah dakwah Muhammadiyah semakin lebar dan berarti semakin diterima masyarakat; dan *kedua,* Muhammadiyah semakin bergerak menuju satu diagram besar yang beririsan dengan berbagai kelompok strategis. Kedua trend yang terjadi ini tentu saja menuntut Muhammadiyah selalu berada pada posisi "centre" yang akan menjadi payung dan sekaligus tumpuan harapan publik secara keseluruhan. Sejatinya, posisi ini telah membawa Muhammadiyah pada titik pusat epicentrum politik dimana semua kekuatan sosial politik akan selalu mendekat dan menempel pada Muhammadiyah. Artinya, sebenarnya posisi politik Muhammadiyah jauh melampaui strategisnya partai politik.

Agenda ke Depan: Optimalisasi Sumber Daya dan Modal Sosial

Kini, Muhammadiyah sudah semakin besar dengan dukungan struktur dan amal usaha yang tersebar di seluruh Indonesia serta cabang istimewa di luar negeri. Penting bagi Muhammadiyah untuk memikirkan agenda ke depan, terutama bagaimana potensi sumber daya dan modal sosial yang besar tersebut bisa dikapitalisasi menjadi keuntungan politik tanpa harus ke luar dari pilihan jalur non politik. Tengoklah garis besar perjuangan Muhammadiyah yang diputuskan dalam khittah Ponorogo pada tahun 1969:

> *Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis konsepsional, secara operasional dan secara konkrit, riil, bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia materiil dan spirituil yang diridlai Allah swt.*

Artinya, meskipun Muhammadiyah menempatkan politik sebagai suatu dilema akibat trauma sejarah tetapi tetap saja Muhammadiyah memendam asa untuk bisa menggenggam kuasa dan tanggung jawab atas negara Indonesia. Tentu bukan hal baru apalagi tabu bagi Muhammadiyah. Buktinya sekitar lima dasa warsa yang lalu Muhammadiyah sudah menetapkan ancangan tersebut.

Selanjutnya, bagaimana peran politik itu bisa dijalankan oleh Muhammadiyah dengan tanpa mengubah jati dirinya yang sudah berbilang tahun dikonstruksi sebagai oganisasi non politik? Berikut penulis tawarkan beberapa agenda ke depan:

Agenda	Tujuan
Buat Roadmap Politik Muhammadiyah	Untuk memberikan panduan kepada seluruh kader tentang rencana strategis Muhammadiyah dalam meningkatkan peran dan partisipasi politik kader Muhammadiyah.
Sekolah kader politik	Untuk meningkatkan kesadaran, kecakapan, dan keterampilan berpolitik bagi kader Muhammadiyah
Mapping Potensi Kader	Untuk mengetahui potensi kader politik di Muhammadiyah untuk kemudian disiapkan dan diposkan pada berbagai posisi baik eksekutif, legislatif, jabatan struktural birokrasi (bagi ASN), dan pos strategis lainnya.
Analisis Parpol yang sevisi	Untuk memudahkan dalam menyalurkan aspirasi Muhammadiyah melalui jalur partai politik, baik untuk kepentingan posting kader maupun advokasi kebijakan.
Tracking Studi post Pemilu	Untuk mengetahui perkembangan peta politik dan perubahan trend politik elektoral.
Menyusun Data base kader politik	Untuk menjadi bahan pimpinan Muhammadiyah dalam mendistribusikan dan mentransformasikan kader
Pendampingan Legislatif kader Muhammadiyah	Meningkatkan kinerja legislatif dan sekaligus menjaga stabilotas komunikasi antara kader dengan persyarikatan
Financial Support: Fund Raising	Untuk membantu kader dalam pembiayaan politik

Dinamika interaksi antara Muhammadiyah dengan negara sudah tergambar jelas dalam lintasan sejarah. Peran politik Muhammadiyah terlihat mengalami pasang surut: manis di kala bulan madu dan saling akomodatif, pahit getir yang berujung trauma tatkalah terpinggirkan. Muhammadiyah tentu tidak boleh terjebak dalam dilema politik yang penuh traumatik. Dalam era politik elektoral yang liberal seperti saat

ini tentu Muhammadiyah harus pro aktif memberdayakan kadernya untuk kemudian ditransformasikan dan didistribusikan pada berbagai posisi penting. Meskipun demikian, jangan sampai pula muncul kesan inkonsistensi dan kegalauan ketika dituntut mengeluarkan kebijakan politik.

Publik akan selalu menilai dan menunggu konsistensi sikap politik Muhammadiyah yang tentu akan selalu berorientasi pada kemaslahatan negara, bangsa , dan umat. Inkonsistensi sikap, lebih-lebih ketika terjadi perbedaan sikap dan pilihan praktek politik antara Muhammadiyah di tingkat lokal terhadap sikap di pusat tentu saja akan menjadi sorotan publik. Dalam konteks mobilisasi dukungan struktur organisasi Muhammadiyah pada calon Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan pada Pemilu 2014 selain keluar dari "pakem" juga dianggap menentang kebijakan yang dikeluarkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Nurmadi et al., 2015).

Untuk itu, Muhammadiyah dituntut untuk merevitalisasi peran politik kebangsaannya. Pada satu sisi memperkuat posisi politik Muhammadiyah meskipun tetap berada di jalur non politik tetapi di sisi lain meningkatkan partisipasi dan peran politik kader. Ini penting dipahami oleh elit Muhammadiyah supaya tidak salah dalam menentukan pilihan strategi dan artikulasi politik. Dibutuhkan kedewasaan dan sekaligus kejernihan dalam melihat isu dan persoalan politik secara graduatif: strategis-kritis, penting-mendesak, berdampak massif-sistemik, dan seterusnya, serta kecakapan dalam memilih momentum yang tepat untuk eksekusi kebijakan politik strategis. Dengan demikian, Muhammadiyah bisa mengawal bangsa dan negara ini tetap berada di atas rel yang benar dalam mewujudkan Indonesia adil makmur yang berkemajuan.

MUHAMMADIYAH, MERITOKRASI, DAN PERSOALAN POLITIK IDENTITAS

Fajar Riza Ul Haq
Pengurus Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah

"Muhammadiyah senantiasa mengutamakan kepentingan dan kemajuan bangsa di atas segalanya serta membawa misi kebangsaan agar Indonesia dibangun secara bertanggungjawab dan tidak boleh ada kebijakan-kebijakan maupun tindakan-tindakan yang membawa kerusakan" (*Berita Resmi Muhammadiyah* No 1, September 2015: 72).

Muhammadiyah bukan hanya organisasi sosial melainkan juga sebuah kekuatan politik yang kuat sehingga keberadaannya menjadi keharusan bagi proses demokratisasi di Indonesia. Bersama NU, posisi organisasi ini telah bergeser dari alat mobilisasi massa menjadi organisasi perantara demokrasi paska jatuhnya Orde Baru. Kesimpulan ini ditarik oleh Suaidi Asyari dalam *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah* (LKiS, 2009). Fokus kajiannya adalah memeriksa pengaruh afiliasi dan loyalitas ormas keagamaan terhadap implementasi nilai-nilai demokrasi di luar Jawa. Berbeda dengan persepsi yang berkembang selama ini, pilihan politik warga Muhammadiyah di luar Jawa dipengaruhi oleh aspek loyalitas kelembagaan.

Dalam koridor politik kewargaan, perkembangan demokrasi dan penguatan kelembagaan politik di Indonesia tidak lepas dari perhatian dan kontribusi Muhammadiyah. Persyarikatan merepresentasikan kekuatan sipil Islam yang secara aktif mempromosikan nilai-nilai keadaban, perdamaian, dan kemajuan. Sebuah peran yang mengoreksi keberadaan kelompok-kelompok sipil yang justru mempertontonkan sikap-sikap tidak beradab atau *uncivil society* seperti organisasi para-militer dan pendukung kekerasan. Dalam konsepsi Beittinger-Lee (2009), "uncivil society" merupakan aktor-aktor di luar negara yang memberikan pengaruh negatif kepada pembangunan manusia, perdamaian, keamanan, dan demokrasi. Mereka membangun tembok segregasi dan eksklusi sosial, cenderung mengedepankan kekerasan dalam meraih kepentingannya, dan

mempersekusi pihak-pihak yang dianggap berseberangan dan sesat.

Kontras dengan karakter “uncivil society” itu, justru Muhammadiyah menularkan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas kemanusiaan serta menyerukan reformasi praktek bernegara dan mendorong tata kelola pemerintahan berbasis meritokrasi. “Jika ingin membangun negara modern, ya jangan berdasarkan kriteria golongan, apalagi menjadi milik golongan tertentu”, tegas Haedar Nashier, Ketua Umum PP Muhammadiyah (*Media Indonesia*, 28/1/2019). Menurut Kishore Mahbubani, meritoktasi merupakan salah satu pilar kearifan dari tradisi Barat. Prinsip meritokrasi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap individu yang memungkinkannya dapat mengembangkan semua potensinya sehingga berkontribusi kepada kemajuan masyarakat (Mahbubani, 2008). Semangat meritokrasi menjungjung tinggi kerja keras, prestasi, dan kesetaraan. Ia membandingkan sistem politik Partai Komunis China lebih baik dibanding sistem politik di Philipina karena politik klan / keluarga masih menghegemoni negara anggota ASEAN itu.

Komitmen Muhammadiyah terhadap pemerintahan demokratik berbasis meritokasi tersebut merupakan cerminan dari melembaganya sistem kepemimpinan demokratik di internal Muhammadiyah sendiri. Eunsook Jung (2010), peneliti asal Universitas Wisconsin, Amerika, menggambarkan peristiwa yang disaksikannya pada Muktamar Muhammadiyah 2010:

> *“Hal yang saya kagumi dari Muhammadiyah adalah bagaimana ormas tersebut memiliki proses unik dalam melaksanakan pemilihan pimpinannya hingga beberapa tahapan. Selain itu, semangat yang besar dari para peserta dalam menghadiri dan mengikuti Muktamar adalah hal yang luar biasa. Mereka datang beramai-ramai dengan senang dan tanpa digerakkan oleh siapa dan apapun juga merupakan sesuatu yang unik” (www.umy.ac.id, 14/7/2010).*

Antropolog Universitas Nasional Kangwon, Korea Selatan, Hyung-Jun Kim menemukan empat faktor yang menjadi landasannya tumbuh budaya demokrasi di Muhammadiyah (*Suara Muhammadiyah*, 12/8/2017). Pertama, Pertama, sistem pemilihan pemimpin di Muhammadiyah sangat terbuka dan demokratis. Organisasi ini menerapkan sistem kepemimpinan kolektif-kolegial. Kedua, tumbuhnya budaya musyawarah sebagai mekanisme merumuskan suatu keputusan. Ketiga, sistem otonomi dan hierarkis yang unik seperti terrefleksikan dalam tatacara pengelolaan amal

usaha. Keempat, mengakarnya nilai-nilai egaliter dalam interaksi organisasi.

Menggunakan kerangka Asyari (2009), politik Muhammadiyah pada ranah kenegaraan berbasis pada politik ijtihad. Berbeda dengan NU yang melandaskan nalar politiknya pada politik ijtima' (konsensus). Nalar politik ijtihad Muhammadiyah memberikan ruang kebebasan kepada warganya dalam menentukan pilihan politiknya. Meskipun ruang kedaulatan politik itu terbuka lebar, hubungan Muhammadiyah dan politik elektoral selalu diwarnai tarik-menarik kutub-kutub politik yang memburu insentif elektoral dari pengikut ormas ini. Sebagai contoh, sikap netral Muhammadiyah pada perhelatan pilpres 2014 tidak bisa sepenuhnya steril dari bias politik para elit organisasinya, baik elit formal maupun elit informal yang tidak lagi menempati posisi struktural.

Penelitian Ahmad Sholihin tentang perbedaan sikap politik elektoral Muhammadiyah antara pusat dan daerah menemukan ada faksionalisasi di tubuh elite internal Pimpinan Pusat Muhammadiyah meskipun sikap resmi organisasi berpatokan pada khittah politiknya. Namun dengan konsep kepemimpinan yang kolektif dan kolegial tidak menjamin para elitnya kedap dari sikap politik yang berbeda-beda. Kondisi ini berdampak pada deviasi netralitas politik elektoral Muhammadiyah pada level lokal (*Polinter* FISIP UTA '45 Jakarta, 2018). Perbedaan sikap politik dua mantan Ketua Muhammadiyah, Amien Rais dan Syafii Maarif, serta pilihan netralitas Muhammadiyah dibawah Din Syamsuddin pada ajang pilpres 2014 telah menimbulkan dinamika politik di kalangan warga.

Dukungan ekspresif Amien Rais terhadap Calon Presiden Prabowo pada forum Tanwir Muhammadiyah 2014 di Samarinda, Kalimantan Timur, tidak lantas mempengaruhi sikap netralitas forum tertinggi kedua setelah muktamar itu. "Merusak nilai forum tanwir", sentil Din menanggapi aksi Amien yang berlaku tidak etis karena menyuarakan dukungan di forum tersebut (*Tempo.co,* 25/5/2014). Pesaingnya, Joko Widodo hadir secara terpisah di forum yang sama. Sidang Tanwir itu pun memutuskan tanpa keraguan, Muhammadiyah bersikap netral pada pilpres 9 Juli 2014. Tidak bergeser dari keputusan Muktamar 1971.

Perbaikan kualitas parlemen tak lepas dari kepedulian politik Muhammadiyah. Absennya lembaga perwakilan rakyat yang terpercaya dan berkualitas akan berdampak pada buruknya kinerja legislatif. Sehingga, reformasi tata kelola pemerintahan harus dibarengi reformasi parlemen. Senapas dengan urgensi memilih pemimpin nasional atas dasar meritokrasi, Muhammadiyah menekankan agar anggotanya selektif memilih calon

anggota legislatif. Jelang Pemilu 2004, Sidang Pleno PP Muhammadiyah bersama seluruh pimpinan wilayah mengeluarkan pandangan:

> *"Lembaga legislatif dalam sistem politik Indonesia pada masa reformasi harus menjadi faktor pengontrol dan pengimbang terhadap eksekutif serta menjalankan fungsi-fungsi politik bagi kepentingan rakyat. Karena itu diperlukan para anggota legislatif, baik anggota DPR dan DPRD maupun DPD, yang benar-benar memiliki tanggungjawab, moralitas, visi, dan kemampuan yang tinggi untuk memperjuangkan sebesar-besarnya kepentingan rakyat"*

Memenangkan Meritokrasi

Ada kekhawatiran agenda Pemilu serentak tanggal 17 April mendatang akan meninggalkan polarisasi bahkan pembelahan sosial yang kian tajam. Kecemasan ini berangkat dari pengalaman agenda-agenda politik kenegaraan (pemilihan kepala daerah dan presiden) paska Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak lepas dari pengaruh fenomena aksi 212. Beberapa partai dan kelompok pendukung pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat telah memanfaatkan sentimen politik identitas guna meningkatkan elektoralnya. Stigma partai pendukung penista agama dikembangkan dan diperhadapkan dengan label partai pembela Islam. Peneliti Lembaga Survey Indonesia Burhanuddin Muhtadi (2018) menemukan adanya pengerasan politik identitas dan peningkatan intoleransi politik paska aksi 212. Salah satu dampaknya adalah keberterimaan terhadap pemimpin tidak seagama menurun.

Arus pasang populisme global yang berbaur dengan gelombang Islamisasi di tingkat domestik dan seiring dengan pengerasan sentimen politik identitas merupakan ancaman serius terhadap nilai-nilai demokratik - meritokratik yang ingin dilembagakan Muhammadiyah pada ranah kenegaraan. Menurut hemat penulis, model pemerintahan demokratik-meritokratik ini mengejawantahkan prinsip politik kebangsaan inklusif Muhammadiyah, yakni membangun budaya egalitarian dan sistem meritokrasi. Oleh karena itu, neo-feodalisme dan budaya parokhial merupakan penghambat kemajuan. Diperlukan perubahan regulasi politik yang memungkinkan masyarakat melakukan mobilitas sosial berdasarkan sistem meritokrasi dan budaya egalitarian dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan (*Berita Resmi Muhammadiyah,* 2015: 120).

Menjadi musykil menegakkan sistem meritokrasi jika persoalan politik identitas terus menebalkan tembok parokhialisme dan memperbesar

superioritas kelompok. Inilah fenomena tribalisme baru - dalam istilah Francis Fukuyama - yang menantang sistem meritoktrasi. “Masalah dengan politik kita adalah bahwa kita telah bergeser dari berdebat tentang kebijakan ekonomi ke berdebat tentang identitas”, kata Fukuyama (2018) dalam satu wawancara. Ketidakmampuan kita mengelola benturan antar politik identitas akan menyeret bangsa ini pada konflik yang sulit diatasi.

Hari-hari ini kita menyaksikan betapa media sosial begitu mudah mempabrikasi isu-isu kebencian dan permusuhan politik yang sebagian besarnya bersumbu pada politik identitas dan isu ketidakadilan *vis a vis* negara, lebih tepatnya pemerintah. Keberadaan kekuatan kritis dan penyeimbang, baik di parlemen maupun di luar parlemen (media, individu, dan kelompok sipil) merupakan suatu keharusan dalam sistem demokrasi. Ini juga yang melatarbelakangi Muhammadiyah mendorong munculnya legislator-legislator bertanggungjawab dari kader-kader Muhammadiyah seperti terungkap dalam keputusan rapat pleno tahun 2004 itu.

Namun sikap politik *check and balances* itu akan menjadi destruktif jika menyeret-nyeret sentimen politik identitas dan menabalkannya sebagai bentuk perlawanan terhadap kedholiman yang menimpa ”umat Islam”. Meringkus kompleksitas aspirasi politik umat Islam menjadi aspirasi politik yang tunggal jelas pembodohan. Masyarakat awam menjadi terbelah. Tidak ada (lagi) ruang bagi berseminya meritokrasi karena hukum yang berlaku adalah saling meminggirkan bahkan meniadakan atas dasar primordialisme dan superioritas golongan. Suatu sikap politik yang tidak mencerminkan akhlak bermuhammadiyah.

ISLAM DAN POLITIK KAUM MODERNIS

Zuly Qodir
Ketua Jurusan S3 Politik Islam
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Dosen Ilmu Pemerintahan UMY

Debat tentang Islam dan politik sampai saat ini masih menjadi topik hangat. Para pengkaji tentang Islam dan politik sebenarnya telah mendapatkan semacam kesimpulan. Hal ini ditunjukkan, bahwa dalam masalah Islam dan politik, sekurang-kurangnya terdapat tiga mazhab pemikiran. Ketiganya adalah, formalisasi Islam (penyatuan Islam dan politik), substansialisme Islam (etika Islam dalam politik) dan sekuler (pemisahan Islam dan Politik secara tegas).

Di antara tiga mazhab tersebut satu sama lainnya sama-sama berpengaruh di masyarakat. Hanya saja, terjadi dialektika di antara ketiganya siapa yang paling kuat mempengaruhi sehingga diskusinya kadang macet bahkan tidak terjadi secara diskursif. Fenomena ini menjadi khas di Indonesia hingga saat ini. Terutama saat-saat jelang Pemilu dilakukan menguatlah disuksi tentang posisi Islam dan politik untuk menarik calon pemilih.

Selain dalam pandangan tiga aliran pilihan politik Indonesia. Terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa Islam dan politik Indonesia bisa dilihat dalam beberapa perspektif, seperti sosiopolitik, ekonomi politik, sosiologis, dan historis, seperti dikemukakan Azyumardy Azra (1999). Dalam sisi historis Islam, Azyumardy Azra menyatakan adanya “teori balapan” yakni balapan antara Islam versus non Islam. Bahkan jika ditelusuri lebih jauh, balapan terjadi sesama muslim Indonesia. Apalagi jika kita perhatian kondisi sosial sekarang di kalangan Islam Indonesia sangat banyak variannya.

Kita dapat menyebutkan varian Islam Indonesia seperti Islam salafis, Islam jihadis, Islam militan, Islam puritan sampai Islam radikal. Semuanya merupakan ekspresi Islam Indonesia yang berkitab suci satu, nabinya

sama, kiblatnya sama namun ekspresi keislamannnya sangat variatif. Varian-varian ekspresi keislaman tidak bisa dihindarkan sebaba memiliki latar belakang sosiologis dari para pengikutnya. Kita pun tidak dapat menyalahkan beragamnya varian tersebut. Bahkan, gagasan menyatukan Islam Indonesia bisa dikatakan sebagai gagasan tidak realistik. Indonesia bukanlah Arab Saudi.

Sementara itu, Bahtiar Effendy, ahli politik dari UIN Jakarta menyatakan ada lima teori untuk melihat Islam dan politik di Indonesia. Kelimanya adalah teori dekonfesionalisasi Islam yang mengacu pada C.A.O. Van Nieuwenhuijze, teori domestikasi Islam mengacu pada Harry J Benda, teori skismatik dan aliran mengacu pada Clifford Geertz, teori trikotomi mengacu pada Alan Samsonn, dan teori Islam kultural mengacu pada Donnal K Emmerson. (Effendy, 1998: 23-45)

Sebagaimana dikemukakan Bahtiar Effendy, sebenarnya perluasan dari teori formalisasi Islam, substansialisasi Islam dan sekularisme Islam. Tulisan Bahtiar bisa dikatakan perluasan dari apa yang sudah ada selama ini, karena teori skisma dan aliran, dan domestikasi akhirnya memunculkan paham perlunya formalisasi Islam di Indonesia agar Islam Indonesia dapat menjadi bagian dari kekuasaan negara. Sedangkan teori kultural lebih dekat dengan mazhab substansialisme Islam, tidak menghendaki penyatuan antara Islam dan negara secara formalistik, tetapi moral dan etika Islam bisa menjadi bagian dari Islam Indonesia.

Pertengkaran sengit dalam bentuk diskusi terus berlangsung hingga sekarang, sehingga fenomena munculnya partai-partai Islam disinyalir sebagai bentuk dari kehendak adanya formalisasi Islam dalam politik Indonesia. Namun yang hemat saya menarik kemunculan-kemunculan partai Islam tidak mendapatkan dukungan siginifikan dari umat Islam dalam setiap Pemilu. Partai Islam kalah dalam merebut simpati pemilih Islam yang jumlahnya lebih dari 150 juta jiwa.

Ada banyak persoalan yang menumpuk dalam diskusi tentang Islam dan politik di Indonesia. Tentu saja membuat perdebatan seringkali mengalami keterlambatan, bahkan nyaris buntu. Hal ini seperti kata Ahmad Syafii Maarif. Ahmad Syafii Maarif, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah mengatakan diskusi tentang negara Islam di Indonesia merupakan fenomena yang masih relatif baru. Semuanya hampir dilakukan oleh penulis-penulis muslim dari kalangan modernis. Sekalipun kalangan modernis telah mulai membicarakan negara Islam pasca kemerdekaan. Tetapi tidak dijumpai satu karya pun yang berarti tentang masalah ini. Belum ada satu karya ilmiah yang disusun yang

mampu mengartikulasikan hakekat dan corak suatu negara Islam yang ingin mereka ciptakan di Indonesia. Sulitnya karya ini ternyata bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia Islam pada umumnya. (Maarif, 1987: 125)

Dalam konteks masyarakat Islam, sayap muslim modernis dan pesantren telah memiliki sistem tentang politik dan demokrasi. Menurut pandangan mereka, demokrasi adalah mekanisme politik yang lebih baik yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan dan cita-cita politik Islam. Golongan modenis, adalah kelompok yang membela demokrasi secara tangguh dalam menentang gerakan politik otoriter zaman Soekarno tahun 1950-an sampai membuahkan Demokrasi Terpimpin. (Maarif, 1987: 126)

Dalam perjalanan sejarah Islam Indonesia, ada dua tokoh Sarekat Islam yang mengajukan tentang kekuasaan Islam, yakni Surjopranoto, menggunakan istilah *een Islamiestische Regeering* (suatu pemerintahan Islam) dan Dr. Sukiman Wirjosanjdojo, menyebutnya *een eigen Islamietisch bestuur onder een eigen vlag* (suatu kekuasaan Islam di bawah benderanya sendiri). Menurut Sukiman, untuk menciptakan Islam Indonesia merupakan suatu cita-cita kemerdekaan. (Maarif, 1987: 126)

Pendapat Syafii Maarif sungguh menarik untuk dijadikan pijakan tentang tokoh Islam Indonesia yang berdebat tentang dasar ideologi Indonesia yang sampai sekarang tak kunjung berakhir bahkan terus bermunculan dalam berbagai skala yang berlainan. Tiap menjelang Pemilu gagasan formalisasi Islam dalam negara tetap merupakan gagasan yang oleh sebagian umat Islam mendapatkan legitimasi. Termasuk dikalangan Muhammadiyah, yang telah menuntaskan perdebatan Islam dan negara dalam kerangka *darul ahdi wa syahadah.* (PPM, 2015)

Gagasan Surjopranoto dan Dr. Sukiman baru menjadi perdebatan yang serius muncul pada tahun 1945, saat sidang pembukaan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Natsir merupakan kelompok modernis muslim yang menulis tentang Islam dan ideologi dalam bingkai yang lebih akademik dan memungkinkan adanya diskusi lanjut tentang hubungan Islam dan negara. Posisi M. Natsir memang lebih mendukung perlunya formalisasi Islam dalam politik ketimbang substansialisme Islam. Sekalipun Natsir sangat demokratis dalam mengajukan pemahamannya. M. Natsir mengajukan posisi pentingnya Islam dalam makna formal untuk politik Indonesia tetapi menghargai pemahaman bahwa Islam Indonesia tidak harus dalam makna formalisme dalam politik praktis.

Di tengah kerumitan diskusi tentang Islam dan Politik Indonesia, memunculkan persoalan yang sangat serius yakni adanya persoalan klaim yang seringkali melingkupi diskusi antara Islam dan politik bahwa Indonesia itu semestinya menjadi negara Islam. Ada klaim yang sebenarnya kurang kondusif bagi sebuah perkembangan pemikiran menuju kearah lebih baik dan meyakinkan banyak pihak jika hal itu kemudian dipaksakan oleh pihak umat Islam yang paling merasa berhak atas dasar negara Islam dikarenakan jumlah pengikutnya paling besar. Klaim perlunya Indonesia menjadi negara Islam datang dari kelompok puritan dan salafi jihadis yang belakangan mendapatkan dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera, eks Hizbut Tahrir Indonesia, Majlis Mujahiddin Indonesia, serta kelompok-kelompok kecil lainnya.

Apalagi belakangan klaim yang kuat adalah salah satu mazhab dalam pemikiran Islam dan politik bahwa Pancasila sebagai kompromi politik dianggap telah melemahkan ideologi politik Islam. Umat Islam dianggap telah "gagal" dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara. Hal ini tentu saja berpengaruh pada perkembangan pemikiran Islam dan politik di Indonesia, sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam. Indonesia menempati urutan teratas dalam prosentase penduduk muslim di dunia. Sekalipun mungkin jumlahnya masih kalah dengan India, Cina bahkan Amerika dari jumlah penduduk.

Sebab di India penduduknya mencapai 600 juta, Cina diatas 1,2 milyar dan Amerika di atas 500 juta jiwa. Di Indonesia umat cukup penting karena jumlahnya terbesar di muka bumi, sekalipun jumlah penduduknya hanya mencapai 257 juta jiwa. Umat Islam mencapai 88,6 %, dari seluruh penduduk beragama. Hal ini karena Indonesia tidak mengenal istilah ateisme. Sekalipun dalam sebuah survei yang dilakukan oleh John W Storey dan Glenn H Utter, survei tahun 2000 Indonesia dinyatakan terdapat 2,1 % penduduk Indonesia tidak berafiliasi keagamaan apa pun alias non religius atau atheis. (Strorey and Utter, 2006: 119)

Hal yang sangat menarik lainnya, memperhatikan peta politik Islam Indonesia adalah persoalan geopolitik internasional yang berpengaruh dan terpengaruh oleh Islam Indonesia. Oleh karena persoalan internasional itu, Indonesia selalu menjadi bagian penting dalam konteks perkembangan pemikiran dan praktek Islam dalam kaitannya dengan politik. Ada banyak aliran di Indonesia yang berkembang dan saling mempengaruhi secara simultan. Tidak ada satu paham atau aliran yang sepakat dalam melihat persoalan Islam dan politik di Indonesia. Antaraliran pun seringkali tarik menarik bahkan bersitegang dalam mempertahankan pahamnya.

Namun yang patut dperhatikan adalah tidak terjadi pertumpahan darah karena perbedaan paham dalam memahami Islam dan politik. Kita dapat memperhatikan para *founding fathers* yang telah mengantarkan Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Antara Soekarno, Hatta, Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Abi Kusnocokrokusumo, A.A Maramis dan M. Yamin maupun Kasman Singodimedjo berbeda dalam pandangan politik namun bersahabat dalam berkebangsaan. Mereka saling menghargai dan menghormati perbedaan pandangan dalam hal Islam dan politik. Para pendiri bangsa telah meletakkan fondasi kebangsaan yakni menghargai keragaman dan menjunjung tinggi perbedaan. Hal ini yang harus dilanjutkan oleh para generasi sekarang yang lahir belakangan.

Namun, tanpa disadari secara organisasional dan kolektif, bahwa hubungan Islam dan politik dianggap sesuatu yang meminggirkan Islam. Oleh karena itu, perdebatan yang terjadi, sebagian ahli Indonesia, menempatkan politik Indonesia sebagai "politik berbasis aliran"; yakni agamis, nasionalis dan sekuler. Pendapat seperti dapat dijumpai dalam karya Herbet Feith (1980), Herbet Feith dan Lance Castles (1985), Robert Jay (1978), dan Clifford Geertz (1957).

Dari sana kemudian berkembang pada pemikiran yang khusus berhubungan dengan agama (Islam) yakni formalisme, substansialisme dan sekularisme Islam. Namun sebetulnya perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam memahami antara Islam dan politik di Indonesia, tiga perspektif pemikiran yang berkembang dalam pemikiran politik dan Islam di Indonesia perlu dilakukan; formalism Islam, substansialism Islam dan sekularisme Islam. Harapannya sederhana, kita tidak dapat hanya mengandalkan pada pada pendekatan dan perspektif yang beragam. Tidak dapat memasaksakan satu pendekatan dan teori utnuk melihat Islam Indonesia.

****

Dalam dunia akademik, pandangan tentang Islam dan politik sebenarnya bukan perkara yang terlalu mengkhawatirkan. Semestinya sudah berakhir dengan diilihnya Pancasila sebagi dasar Negara Republik Indonesia, dan ditetapkan oleh Badan Panitia Persiapan untuk Penyelenggaraan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Penyelenggaraan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Pihak-pihak yang terlibat dalam perdebatan mempersiapkan dasar Negara telah sepakat dengan Pancasila yang termaktub dalam Mukadimmah UUD 1945, dengan tanpa menyertakan kalimat "dengan menjalankan syariat Islam bagi

pemeluk-pemeluknya". Kesepakan yang sangat cerdas dan dapat dikatakan sebagai kesepakatan yang sangat menjunjung harga kemerdekaan sebuah Negara yang telah dijajah beberapa tahun lamanya oleh kaum penjajah.

Hanya saja dalam prakteknya antara Islam dan politik seringkali dianggap sebagai wilayah yang sangat kontradiktif sehingga ada banyak pandangan yang berkembang. Kontradiksi tersebut agak serius sehingga membutuhkan kecermatan untuk memberikan pembahasan. Oleh karena itu, jika salah memahami kita terjebak dalam posisi pro dan kontra yang nyaris tidak kunjung usai dalam perdebatan. Kita berada dalam debat kusir tak bermakna. Berdebat hanya memperebutkan tulang belaka, bukan mempersoalkan substansi. Kondisi demikian yang seringkali menyebabkan umat Islam Indonesia kalah bertarung dengan Negara lain yang jauh lebih memikirkan hal apa yang memungkinkan menjadikan bangsanya atau rakyat sejahtera dengan dasar dan ideology Negara yang dianut sekarang ini. Sementara di Indonesia karena adanya persoalan soal ideology Negara yang dianggapnya belum selesai maka perdebatan berkisar dalam wilayah ideology yang hendak dipilih bukan pada bagaimana mengisi ideology yang telah dipilih saat kemerdekaan terjadi.

Perdebatan-perdebatan tersebut berkisar pada beberapa masalah sekitar ideology. Sebagian menganggap bahwa antara Islam dan politik tidak usah dipersoalkan karena keduanya merupakan wilayah yang sudah jelas berbeda. Politik wilayahnya adalah urusan publik (masyarakat) yang bersifat duniawi. Sementara Islam urusannya adalah ibadah (ukhrawi) akhirat, yang lebih banyak pertimbangan fikih (bahkan jurisprudensi Islam), pertimbangan mistik (sufisme) dan benar-salah sehingga akan banyak berbeda dengan padangan politik yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan.

Debat dalam hal politik karena menjadi bagian tak terpisahkan. Sementara dalam hal akidah (keimanan) yang harus diyakini tidak ada debat. Dan memang tampaknya demikian adanya sehingga para pembaru Islam Indonesia pun tidak pernah mempesoalkan hal-hal keyakinan (keimanan kepada Tuhan). Kecuali pemahaman tentang apa itu iman dan Islam yang menjadi konsentrasi para pembaru Islam semacam Nurcholish Madjid, Munawir Sadjzali, Harun Nasution, Abdurrahman Wahid, M. Quraish Shihab, masdar Farid Masudi maupun Jalaluddin Rakhmat. Dan tentu saja para pemabaru Islam Indonesia generasi 1990-an dan 2000-an tidak mempersoalkan tentang tauhid atau keimanan pada Tuhan.

****

Dalam konteks politik Islam Indonesia sekurang-kurangnya sebagaimana telah dikemukakan di atas, ada tiga mazhab yang berkembang dalam persoalan politik dan Islam. Ketiganya saling berpengaruh dan memiliki pengikut masing-masing. Antara satu dengan lainnya tidak bisa saling menafikan, sekalipun sering kita dengar dan melihat adanya kelompok yang hendak menegasikan kelompok lainnya. Tentu saja dengan pemahaman yang nyaris dipaksakan pada kelompok lain, dengan pelbagai klaim yang dialamatkan pada pihak yang berbeda pandangan. Dalam bagian pendahuluan ini hendak dipaparkan tentang mazhab-mazhab pemikiran Islam dan politik di Indonesia yang tampak menjadi arus utama, tentu saja dengan segala hiruk pikuk yang terjadi di sana, bahkan dalam kadar tertentu bisa saja dikatakan sebagai “klaim-klaim” untuk memenangkan kontestasi public sebab dalam kenyataannya antara Islam dan politik merupakan hal yang hendak dihadirkan dalam ruang public sehingga semuanya hadir dalam pasar raya kehidupan umat Islam Indonesia dan umat-umat agama lain.

Sebagai bagian dari bangsa ini, kelompok Islam yang senantiasa memersoalkan tentang ideology Pancasila, hendak mengggantinya menjadi dasar Negara yang lain, sebenarnya hal itu seringkali tidak didasarkan pada pemahaman dan pengkajian sejarah yang mendalam sehingga terjadi pendagkalan bahkan manipulasi atas gagasan ideology Pancasila yang dianggapnya bertentangan dengan Islam. Padahal sejatinya Pancasila merupakan ideology yang sudah sangat islamis, jika dilihat dari sila-sila yang termaktub di dalamnya. Hanya saja, sebagian umat Islam menempatkan Pancasila sebagai hal yang sekuler dan tidak Islami. Namun demikian, gagasan sebagian orang tentang penyatuan agama dan Negara merupakan gagasan yang akan selalu hadir di bumi Indonesia.

BAB 4

MUHAMMADIYAH DALAM POLITIK ELEKTRORAL

EKSPERIMENTASI MUHAMMADIYAH DALAM POLITIK ELEKTORAL: SUATU KEHARUSAN

Tunjung Sulaksono
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Posisi Politik Muhammadiyah

Perjuangan Muhammadiyah adalah perjuangan menegakkan danmenjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Perjuangan Muhammadiyah tersebut dilaksanakan melalui gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar di seluruh lapangan kehidupan baik pada level perseorangan maupun masyarakat.Ditinjau dari stuktur konsepsinya, pada hakekatnya perjuanganMuhammadiyah merupakan operasionalisasi strategis dari Khittah Muhammadiyah. Khitah atau garis perjuangan Muhammadiyah adalah landasan atau pola dasar Muhammadiyah dalam bertindak yang di dalamnya berisikan rumusan, teori, metode, strategi serta pemikiran Muhammadiyah dalam berjuang yang sifatnya dinamis. Sedangkan dilihat dari substansinya, Khittah Perjuangan Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai teori perjuangan, yakni sebagai kerangka berfikir untuk memahami dan memecahkan persoalan yang dihadapi Muhammadiyah sesuai dengan gerakannya dalam konteks situasi dan kondisi yang dihadapi.

Khittah Ujung Pandang (1971) barangkali merupakan khittah yang paling sering dirujuk sebagai pedoman atau acuan pokok dalam menentukan sikap organisasi Muhammadiyah dalam berpolitik. Poin pertama darikhittah perjuangan ini menyatakan, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam bidang manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari satu partai atau organisasi apa pun. Kedua, setiap anggota Muhammadiyah

dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari AD, ART, dan ketentuan lain dalam persyarikatan.

Di dalam Khittah Denpasar (2002), sikap Muhammadiyah terhadap politik dipertegas.Pertama, melalui kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kenegaraan (*real politics*) sebagaimana dilakukan oleh kekuatan politik lainnya.Kedua, kegiatan politik tidak langsung (*high politics*) yang bersifat memengaruhi kebijakan negara dalam perjuangan moral (*moral force*) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat bangsa dan negara. Politik nilai, politik alokatif, atau yang kadang disebut sebagai *high politics* itu adalah politik yang mendistribusikan nili-nilai Islami dan moral ke dalam proses politik sebagai dakwah amar ma'rf nahi munkar, yaitu usaha untuk mengajak manusia kepada kebenaran dan meninggalkan kemunkaran (Nashir, 2006: 105). Pada poin 6 dari 9 poin yang ada juga ditegaskan kembali bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan politik maupun organisasi mana pun.

Dengan demikian jika kemudian muncul pertanyaan, apakah Muhammadiyah berpolitik? Maka jawabannya adalah: tentu saja! Namun yang harus dipahami adalah metode berpolitiknya Muhammadiyah berbeda dengan metode berpolitiknya partai politik dalam politik elektoral. Karena Muhammadiyah merupakan gerakan non-politik, keterlibatannya berbeda dengan organisasi lain yang menjadikan politik sebagai profesinya (Alfian, 1989).

Sebagaimana diatur dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah; Kepribadian Muhammadiyah; Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah; Khittah Perjuangan Muhammadiyah; Khittah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, serta Keputusan-Keputusan Muktamar dan Tanwir-nya, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, dan amar ma'ruf nahiy munkar yang bersifat nonpolitik (Thohari, 2015). Meskipun seakan-akan dibatasi, akan tetapi posisi politik seperti ini bukan membelenggu, namun justru memberikan fleksibilitasluar biasa kepada Muhammadiyah dalam berpolitik.

Muhammadiyah dalam Politik Elektoral

Dalam politik elektoral, partai adalah institusi yang paling berpengaruh. Lewat pemilihan umum, partai-partai politikakan memproduksi kekuasaan politik dengan menempatkan kader-kadernya dalam konstelasi politik.

Sebagai manifestasinya, hari ini, di Indonesia nyaris tidak ada jabatan publik tanpa intervensi partai politik baik di ranah legislatif maupun eksekutif, di level pusat maupun daerah. Dengan demikian dalam politik elektoral partai politik menjadi kendaraan politik yang paling efektif untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang membawa dampak bagi seluruh masyarakat.Kebijakan publik yang tepat akan secara efektif menyelesaikan persoalan-persoalan publik dan menjadi solusi permasalahan bangsa.

Meskipun posisi Muhammadiyah dalam politik sudah jelas sebagaimana digambarkan pada bagian awal tulisan ini, akan tetapi situasi politik nasional pada akhirnya menjadi variabel independen yang menentukan sejauh mana persentuhan Muhammadiyah dengan politik elektoral atau partai politik. Sebagai ilustrasi, pada masa awal kemerdekaan Muhammadiyah pernah menjadi anggota istimewa dari Partai Masyumi (Siregar, 2013: 91). Posisi politik umat Islam yang dipandang tidak menguntungkan yang mendorong Muhammadiyah menjadi bagian dari partai politik. Masuknya tokoh Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo dalam Majelis Syuro Masyumi semakin menegaskan hubungan erat antara keduanya. Bahkan pada waktuitu Muhammadiyah sempat punya semboyan: Berpolitik dengan Masyumi, Berdakwah dengan Muhammadiyah. (Qodir dkk., 2015:2). Pada awal Orde Baru, Muhammadiyah juga turut membidani berdirinya Parmusi, partai yang dianggap sebagai penerus Masyumi.

Kelahiran Partai Amanat Nasional beberapa saat pasca runtuhnya Orde Barupun bagaimanapun terlalu susah disangkal dilahirkan dari rahim Muhammadiyah. Mekipun sering disebut sebagai hasil ijtihad politik Amien Rais, keputusan mendirikan PAN sendiri lahir dari keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah antara tanggal 5 sampai 7 Juli 1998 di Semarang (Syahputra, 2014: 13). Meskipun banyak kader Muhammadiyah yang mengisi jajaran kepengurusan PAN, dan hingga hari ini PAN masih dianggap “rumah politik” oleh warga Muhammadiyah, akan tetapi tidak ada hubungan organisatoris antara Muhammadiyah dengan PAN.

Pasca pendirian PAN, bukan berarti eksperimentasi Muhammadiyah dalam politik elektoral berakhir. Keputusan Muspimwilsus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk memilih anggota DPD yang berafiliasi kepada Muhammadiyah menunjukkan masuknya Muhammadiyah dalam politik elektoral. Dukungan beberapa pimpinan daerah Muhammadiyah terhadap kandidat-kandidat tertentu yang bertarung dalam pilkada seperti di Sleman dan Maros (Nurmandi, dkk, 2015; Sholikin, 2015), juga memperkuat argumentasi bahwa Muhammadiyah tidak pernahsama sekali lepas dari politik elektoral.

Melembagakan Pola Relasi Persarikatan dengan Kader Persarikatan di Partai

Ketika Muhammadiyah berani memproklamirkan dirinya sebagai gerakan amar ma'ruf nahi munkar dalam level individual maupun masyarakat, maka pada saat itu pula Muhammadiyah harus menyadari bahwa dirinya tidak dapat lepas dari politik elektoral begitu saja. Kekuatan aktor-aktor politik yang bermain dalam pemilu yang nanti akan menghasilkan parlemen yang menghasilkan kebijakan publik yang berdampak luas bagi masyarakat harus menjadi perhatian Muhammadiyah. Tidak cukup sekedar memberikan dukungan kepada kandidat DPD atau kepala daerah melalui keputusan musyawarah pimpinan, namun perjuangan politik Muhammadiyah perlu diperkuat dengan keberadaan kader-kader Muhammadiyah dalam lembaga-lembaga legislatif di level pusat maupun daerah, sehingga kebijakan-kebijakan publik yang muncul bisa lebih selaras dengan tujuan Muhammadiyah.

Tidak masalah jika kader-kader terbaikMuhammadiyah berdiaspora ke berbagai partai politik yang tidak bertentangan dengan arah perjuangan Muhammadiyah.Biarkan mereka mengeksplorasi dan bereksperimentasi dengan perjuangan lewat jalur politik elektoral, karenaMuhammadiyah tidak ke mana-mana, tetapi ada di mana-mana.Yang kemudian perlu difikirkan adalah bagaimana Muhammadiyah memastikan agar secara insitusional keputusan Muhammadiyah dalam memberikan dukungan kepada kandidat eksekutif maupun legislatif tetap selaras dengan khittah. Demikian juga harus dilembagakan bagaimana kader-kader potensial yang sedang mengkesplorasi eksperimentasi elektoral tersebut tetap berperilaku politik secara santun sesuai warna Muhammadiyah, tetap "direngkuh" oleh ikatan-ikatan dan ghirah ber-Muhammadiyah, maupun tetap kontribusi terhadap perserikatan. Merumuskan formula tentang hal-hal itu tentu bukan hal yang mudah. Namun kemampuan Muhammadiyah untuk *survive* dalam berbagai rezim selama ini memunculkan keyakinan bahwa Muhammadiyah akan mampu mengelola pola relasi tersebut sehingga tetap sejalan dengan khittah Muhammadiyah.

Daftar Pustaka

Alfian. (1989). *Islamic Modernism in Indonesian Politics, the Muhammadiyah Movement during the Dutch Colonial Period 1912-1942.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nashir, H. (2006). *Dinamika Politik Muhammadiyah*. Malang: UMM Press.

Nurmandi, A., Efendi, D., & Priyanto, A. L. (2015). Politik Elektoral Muhammadiyah di Aras Lokal: Di Kabupaten Sleman dan di Kabupaten Maros. Dalam Qodir, Z., Nurmandi, A., & Yamin, N. (2015), *Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik Sebagai Amal Usaha*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Qodir, Z., Nurmandi, A., & Yamin, N. (2015). *Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik Sebagai Amal Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sholikin. (2015). *Deviasi Sikap Politik Elektoral Muhammadiyah antara Pusat dan Daerah (Studi Kasus Sikap Politik Elite Muhammadiyah pada Pilihan Presiden 2014 dan Pilkada 2010 di Sleman dan Maros)*, Tesis S2 Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: UGM.

Siregar, I. F. (2013). Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960), *Thaqafiyyat* Vol. 14 No. 1.

Syahputra, H. (2014). Peran Politik Muhammdiyah Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang*, edisi September.

Thohari, H. (2015). Muhammadiyah Berpolitik, Republika, 7 Mei.

PERAN STRATEGIS MUHAMMADIYAH DALAM POLITIK

Moh. Mudzakkir
Dosen Program Studi Sosiologi Universits Negeri Surabaya (Unesa), Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah Periode 2006-2008

Muhammadiyah dan Politik

Wacana Muhammadiyah dan politik akan terus menarik dibicarakan, baik oleh orang-orang Muhammadiyah sendiri maupun kelompok yang berada di luar persyarikatan, termasuk para ahli *Muhammadiyah Studies*. Kalau kita telusuri, hubungan serta interaksi Muhammadiyah dandunia perpolitikan Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Meskipun persyarikatan ini bukan organisasi politik dan partai politik, tapi sejak kelahirannya, para pendiri Muhammadiyah sangat melek dan mampu mengartikulasikan kepentingan politik secara elegan. Mereka tidak alergi, tapi mereka juga tidak "silau" dengan politik praktis. Hal ini bisa kita lihat bagaimana KHA Dahlan mampu berinteraksi dengan berbagai kelompok dan organisasi yang mempunyai orientasi politik yang berbeda-beda, namun tetap istiqomah dengan prinsip yang diyakini.

Dalam lintasan sejarah, pemimpin dan kader Muhammadiyah terlibat aktif dalam dinamika politik kebangsaan Republik Indonesia. Bukan rahasia lagi bila tokoh-tokoh Muhammadiyah terlibat aktif dalam penyusunan dasar-dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti KH Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo, serta Prof. Kahar Mudzakkir. Mereka berinteraksi, berdiskusi, dan berdebat dengan berbagai macam kelompok, golongan, agama, dan ideologi politik yang berbeda untuk membangun kesapakatan bersama (*common platform*). Mereka telah memberi contoh, teladan dan sekaligus memberi inspirasi bagi generasi selanjutnya untuk terlibat dan berperan aktif dalam upaya membangun politik bangsa yang bermartabat.

Secara normatif, cara pandang dan sikap Muhammadiyah terhadap dunia politik sangat jelas. Bahwa politik adalah ranah kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat penting dan strategis, baik dari segi kepemimpinan, pemerintahan, tata kelola dan kebijakan yang dihasilkan. Melaui proses politik, berbagai macam kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak diputuskan, seperti persoalan ekonomi, pendidikan, budaya, hingga persoalan agama dan bidang kehidupan pentinglainnya. Lebih lanjut, pengawasan terhadap jalannya kepemimpinan dan pemerintahan harus dikontrol parlemen yang dipilih melalui partai politik. Mereka bukan hanya mengontrol tapi juga sebagi mitra strategis dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan publik bersama pemerintah. Baik kepala pemerintahan dan parlemen (legislatif), mereka merupakan produk dari proses politik.

Varian Muhammadiyah dalam Politik Elektoral

Cara padang dan sikap Muhammadiyah secara organisatoris pasca reformasi ini menurut saya sudah proporsional dan mampu mengikuti dinamika dan dialektika politik bangsa. Namun secara empiris, cara pandang tersebut diterjemahkan secara berbeda-beda oleh aktor-aktor persyarikatan di berbagai level. Fenomena ini digambarkan misalnya oleh David Efendi (2014) dalam studinya tentang pandangan dan sikap elit Muhammadiyah di level nasional pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2009.

Dari hasil kajiannya, David menemukan empat varian sikap politik elit Muhammadiyah dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2009. *Pertama*, kelompok *fundamentalisme politik* atau kubu yang cenderung terlibat dan aktif dalam politik praktis. Kelompok ini mendapatkan legitimasi historis bahwa dalam sejarah perpolitikan dan kepartian, tokoh-tokoh Muhammadiyah terlibat dalam Masyumi, tapi bedanya mereka tidak pragmatis dan sangat ideologis. Mereka yakin bahwa perjuangan Islam harus lewat jalur struktural, yaitu merebut peran-peran startegis di level negara. Maka secara sadar mereka memanfaatkan politik elektoral sebagai media meraih posisi politik termasuk meng-kapitalisasi Muhammadiyah.

Kedua, kelompok *moderat pasif*. Kubu ini sering mengemukakan bahwa Muhammadiyah adalah "*ummatan washatan*", berada di tengah-tengah umat dan tidak menghendaki perpecahan atau pertengakaran, termasuk dalam dunia politik. Keyakinan mereka adalah bahwa dakwah jauh lebih penting dari urusan dunia politik. Mereka juga berkeyakinan bahwa "politik

itu memecah dan dakwah itu merangkul".Meskipun dalam kenyataannya, politik juga bisa melakukan kedua-duanya, baik merangkul, memecah dan juga memukul. Kelompok ini tidak secara aktif melakukan mobilisasi, tapi hanya sekedar berpartisipasi *ala* kadarnya.*Ketiga*, kelompok *moderat aktif*. Berbeda dengan kelompok moderat pasif, kelompok ini bersikap aktif mengikuti, mencari, mengumpulkan berita dan menganalisanya sebagai bahan untuk menentukan pilihan politik sadarnya dan para jama'ahnya.

Keempat, kelompok *khittahisme.* Yaitu kelompok yangmengikuti keputusan organisasi secarataat, "*sami'na waatho'na*". Artinya mereka selalu menggunakan Khittah sebagai tolak ukur perjuangan dalam ranah politik. Dalam praksisme politik, mereka cenderung menjaga jarak dan tidak mau terjebak dalam "lumpur" politik yang dianggapnya penuh intrik. Kelompok ini juga mengklaim bahwa berdakwah lewat Muhammadiyah juga tidak kalah mulia dengan berjuang ditempat lain seperti arena politik misalnya. Bahkan, menurut mereka melalui organisasi Islam ini jauh lebih mampu membuktikan teologi keikhlasan atau yang kerap disebut teologi al-Maun. Sementara di ranah politik banyak hal selalu bisa dikonversikan dengan uang dan jabatan. Bila tidak tidak diantisipasi secara baik, bisa memiliki efek samping, yaitu lunturnya tradisi voluntarisme dan keikhlasan di persyarikatan.

Terakhir, *kelima* adalah kelompok *apolitis*. Kelompok ini ada dua macam yang pertama kelompok yang berteriak Muhamamdiyah apolitis dan kelompok Muhammadiyah yang benar-benar apolitis. Mereka tidak mau 'menuhankan' politik dan fokus pada urusan ibadah. Kelompok ini cukup pesimis dan kurang percaya pada mekanisme demokrasi. Jamaah yang mengikutinya juga mengambang dalam pilihan politiknya, mereka memutuskan pilihan politiknya secara spontan.

Berangkat dari uraian di atas, terlihat bahwa Muhammadiyah secara normative-organisatoris telah memiliki sikap resmi (ini bisa dilihat di dokumen persyarkatan), namun ditafsirkan dan diaktualisasikan berbeda-beda oleh elit dan para pengikutnya di lingkungan Muhammadiyah. Itulah fakta yang terjadi di lapangan. Meski kajian tersebut bertujuan untuk membaca sikap politik elit Muhammadiyah pada Pemilu dan Pilpres 2009, meskipun demikian masih relevan digunakan untuk membaca situasi saat ini. Tentu mungkin ada perubahan dan perkembangan di level empiriknya bila dikaitkan dengan politik elektoral dalam proses demokrasi ini.

Agenda Strategis Politik Birokasi

Politik Elektoral sangat penting dan strategis bukan hanya bagi partai politik dan masyarakat di republik ini, tidak terkecuali juga Muhammadiyah. Kader-kader Muhammadiyah yang potensial berkiprah dan berjuang di partai politik harus didorong dan disiapkan secara sistemik yang merupakan bagian dari desain gerakan masa depan, bukan sekedar karena "kebetulan". Kemampuan berkomunikasi dan diplomasi elit dan kader Muhammadiyah dengan *stakeholders* politik di semua tingkatan, baik di pusat, wilayah hingga daerah menjadi penting. Tanpa kemampuan tersebut, mustahil Muhammadiyah dapat berperan dalam mendistrubusikan kader-kader potensialnya bergabung dengan berbagai macam partai politik dan posisi strategis di birokrasi pemerintahan dan negara. Kelenturan dalam berinterkasi dengan berbagai kalangan, namun tetap memegang prinsip-prinsip persyarikatan justru menjadi ciri khas dalam membangun gerakan politik berkemajuan.

Harus diingat bahwa proses politik bukan hanya sekedar pada masa elektoral, pilpres, pilkada dan pileg. Proses setelah itu juga sangat penting, salah satunya dalam konteks politik penempatan/penunjukkan posisi-posisi strategis di lingkungan birokrasi pemerintahan, misal di kementerian atau lembaga non kementerian yang vital. Selain kader-kader potensial politik, Muhammadiyah juga harus mempersiapkan, memetakan dan mendorong kader-kader potensial yang memiliki komitmen berjuang di lingkungan birokrasi pemerintahan yang strategis.

Jujur harus diakui, dalam konteks politik birokrasi pemerintahan/negara ini Muhammadiyah masih terkesan belum begitu mempersiapkan kader-kadernya secara sistematik. Yang terjadi adalah kegagapan ketika struktur birokrasi pemerintahan membutuhkan kader-kader yang meritokrat dan teruji *track record* dan komitment mereka terhadap perjuangan Muhammadiyah.Akibat kegagapan tersebut, biasanya elit Muhammadiyah akan menunjuk orang-orang yang terkadang secara *track record* ke-*Muhammadiyahan*-nya dipertanyakan. Mengapa hal ini terjadi, karena memang "rekayasa sistemik" untuk menginvetaris, merawat, serta mendorong kader-kader potensial di ranah birokrasi pemerintahan Negara tidak atau belum disiapkan secara struktural organisatoris. Tapi justru sebaliknya, mengelolanya hanya bersifat jaringan personal, seingatnya elit saja, dan bukan didesain secara struktural organisatoris yang memiliki strategi dan tujuan jangka panjang.

Selama ini, elit Muhammadiyah lebih senang mengajak elit birokrasi (yang mungkin belum menjadi anggota) ke dalam kepemimpinan Muhammadiyah, dari pada merancang bagaimana mempersiapkan kader-kader potensialnya masuk dan berjuang menjadi elit birokrasi. Itu bagus, tapi tidak strategis untuk jangka panjang. Dan semakin mengesankan bila para elit Muhammadiyah malas berfikir untukmerancang strategi jangka panjang dalam konteks politik alokatif di jajaran birokrasi pemerintahan.

Lebih lanjut, salah satu hasil dari demokratisasi pasca reformasi adalah munculnya lembaga-lembaga negara yang bersifat independen atau lembaga non struktural (LNS) yang ikut mengawal proses demokratisasi dalam berbagai bidang secara institutional. Lembaga-lembaga Negara tersebut bukan hanya berada di tingkat pusat, provinsi bahkan daerah, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Dewan Riset Nasional dan lain sebagainya. Institusi kenegaraan tersebut saat ini mengemban peran strategis dalam mengawal proses demokratisasi selain partai politik di bidangnya masing-masing. Peran dan fungsi yang diemban lembaga non-struktural (LNS) tersebut sangat strategis dalam mengawal, mengurai, serta membantu dalam menyelesaikan persoalan hajat hidup orang banyak (publik).

Muhammadiyah juga telah ikut berpartisipasi dan menyumbangkan kader-kadernya berjuang di lembaga-lembaga nonstruktural (LSN). Meskipun demikian hanya pada lembaga-lembaga yang populer saja seperti KPU, Bawaslu, KPAI, dan KPI. Sedangkan untuk lembaga-lembaga non strukturallain, Muhammadiyah secara organisatoris belum memandang penting dan strategis. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya upaya yang bersifat struktural organisatoris dan simultan mempersiapkan kader-kadernya berjuang dan mengemban misi persyarikan di lembaga-lembaga strategis tersebut terkait problematika publik. Padahal bila dimanfaatkan secara optimal, lembaga-lembaga tersebut mampu memberi kemaslahatan pada publik, terkait permasalah yang spesifik.

Kalau ditanya soal sumberdaya manusia, saya kira kita memiliki *stock* yang melimpah. Bukankah selain memiliki orang-orang yang *well-educated* kita juga didukung Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) yang tentu di dalamnya banyak SDM yang mumpuni. Konsolidasi dan kolaborasi dalam pemetaan, promosi dan penempatan kader-kader Muhammadiyah

pada lembaga-lembaga strategis Negara sangat mungkin dilakukan. Namun memang harus diakui kita belum melakukannya secara optimal dalam bingkai program yang strategis dan sistematik. Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang besar secara kuantitas belum dimanfaatkan secara strategis untuk menyuplai SDM dan gagasan terkait isu-isu yang menjadi *concern* publik sebagai bagian dari politik alokatif di lembaga-lembaga tersebut.

Memang wacana Muhammadiyah membangun *center of excellence* dalam berbagai bidang kajian keilmuan dan wacana publik sudah lama digaungkan sejak kepemimpinan sebelumnya. Namun hingga sekarang pun, pusat keunggulan dalam bidang wacana keilmuan, kebijakan publik, dan isu publik (dalam berbagai hal) dalam bentuk pusat kajian di lingkungan PTM yang diperhitungkan di Indonesia belum juga terlihat. Pusat-pusat kajian itulah yang seharusnya mengikuti, memproduksi serta berkontribusi dalam perdebatan kebijakan publik di Indonesia, baik dalam bidang politik pemerintahan, pendidikan, ekonomi, agama, budaya dan lain sebagainya. Pusat-pusat kajian di PTM itu pulayang secara aktif memberi masukan atau rekomendasi kepada Muhammadiyah terkait isu dan wacana strategis kebangsaan dan kenegaraan. Tanpa mengoptimalkan peran serta PTM, saya kira mustahil bagi Muhammadiyah untuk mampu memperkuat peran politik kenegaraan, merespon isu-isu publik, serta termasuk menyiapkan aktor, di era saat ini. Mengapa? Karena di PTM itulah pusat sumber daya persyarikatan ini terkonsentrasi. Ya, PTM adalah kunci bagi gerakan Muhammadiyah saat ini dan mungkin masa depan.

POLITIK YANG MENCERAHKAN JELANG PEMILU 2019

Ridho Al-Hamdi
Direktur *International Program of Government Affairs and Administration* (IGOV) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ketua PCIM Jerman Raya Periode 2015-2017, Anggota LPCR PP Muhammadiyah 2015-2020

Husni Amriyanto Putra
Wakil Dekan Fisipol
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pemilu 2019 merupakan pemilu yang berbeda dengan pemilu-pemilu di Indonesia sebelumnya. Apa yang berbeda? Pemilu 2019 adalah pemilu serentak di mana untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pemilu secara bersamaan waktunya antara pilpres dan pileg pada tanggal 17 April 2019. Meskipun menuai kontroversi terutama terkait dengan ambang batas pemilu, rakyat Indonesia harus menerima hanya ada dua paslon capres-cawapres di 2019. Karena pemilu serentak ini pula, kampanye legislatif tertutup kehebohannya dengan isu pilpres yang terus dinamis dari waktu ke waktu.

Judul tulisan ini mengisyaratkan sebuah pertanyaan mendasar: Apakah politik yang mencerahkan itu? Jika ada politik yang mencerahkan, berarti ada politik yang tidak mencerahkan? Lalu apa perbedaan antara politik yang mencerahkan dengan politik yang tidak mencerahkan? *Well*, istilah "mencerahkan" berarti menunjukkan kondisi jernih, kondisi tidak suram, dan kondisi tidak berada pada situasi keterpurukan. Jika di Perancis ada *renaissance*, di Jerman ada *aufklarung*, maka di Indonesia mengenal istilah "berkemajuan". Mencerahkan harus ditandai dengan kondisi yang berkemajuan. Karena itu, politik yang mencerahkan adalah politik yang mampu mencerdaskan akal pikiran bukan yang membuat orang lain makin

bingung alias linglung. Politik yang mencerahkan adalah politik yang mampu membawa orang pada situasi yang jernih, bukan situasi yang keruh. Politik yang mencerahkan adalah politik di mana akal pikiran satu dengan akal pikiran yang lainnya saling bertukar ide dan gagasan untuk mengkonstruksi ide terbaik, bukan saling menindas apalagi saling mengancam satu sama lain.

Lalu bagaimana situasi politik riil jelang pemilu 2019: apakah ke arah mencerahkan atau sebaliknya? Hal yang wajar jika seseorang mendukung capres tertentu, membela habis-habisan sang capres, bahkan rela bermusuhan dengan mereka yang berbeda pilihan. Namun demikian, bukan berarti kita membela sang capres, tidak berarti tidak ada kekurangan serta menutup-nutupi kekurangan sang capres. Terkadang manusia menjadi tidak rasional ketika emosional yang bermain. Akal sehat menjadi tidak memiliki logika ketika terlalu cinta pada seseorang atau sebaliknya terlalu benci pada seseorang. Meskipun orang yang dicintainya memiliki kesalahan, pasti dia akan menutup-nutupinya. Begitu juga sebaliknya, meskipun orang yang dibencinya mungkin memiliki kebenaran, apapun perkataan yang muncul dari orang yang dibencinya meski benar, tetap terlihat salah.

Islam telah mengajarkan bahwa cintailah seseorang itu sekadarnya, bisa jadi suatu saat, orang yang kita cintai itu adalah orang yang paling kita benci. Sebaliknya, bencilah orang lain itu sekadarnya, karena bisa jadi orang yang hari ini adalah orang yang paling kita benci, besok pagi bisa saja berubah menjadi orang yang paling kita cintai. Ada ungkapan yang sering kita dengar bersama, bahwa ada dua tipe manusia yang sulit diberikan nasehat: pertama adalah orang yang sedang jatuh cinta, kedua adalah tim sukses pasangan calon. Hal ini mengisyaratkan, bahwa akal sehat tidak berlaku bagi orang yang sedang jatuh cinta dan tim sukses paslon dalam pemilu. Yang ada dalam pikiran kedua jenis manusia ini adalah kebahagiaan: kebahagiaan karena sedang berada dalam selimu asmara dengan pasangannya dan kebahagiaan karena seakan-akan paslon yang didukung pasti seratus persen menang.

Begitu tiba-tiba orang yang dicintainya menyatakan putus dan paslon yang didukung tiba-tiba menyakiti tim suksesnya, maka akal pikiran kembali tidak sedang berada pada kondisi yang sehat. Artinya apa? Maka dunia jenis manusia yang dikecewakan dalam dua situasi tersebut akan membenci habis-habisan orang yang dicintainya dan paslon yang didukungnya. Kejelakan dan keburukan mereka akan diumbar habis-habisan di depan publik.

Melihat realitas sekarang di mana paslon capres-cawapres hanya dua saja, menjadikan perseteruan antar mereka semakin jelas. Ketika kelompok oposisi mengatakan bahwa pusat hoaks terbesar adalah penguasa, maka rezim langsung marah. Ketika kelompok oposisi mendeklarasikan tagar #2019gantipresiden, pencekalan terhadap sejumlah aktivis di berbagai daerah dilakukan oleh aparat pemerintah. Ketika sejumlah warga negara sedang menggunakan hak kebebasannya untuk berpendapat, maka rezim sibuk membungkam mereka dengan berbagai cara. Kasus yang menimpa Buni Yani dan Ahmad Dhani adalah beberapa lembar kisah betapa rezim penguasa ingin membungkam mereka yang dianggap membahayakan kedudukan mereka. Kasus Rocky Gerung terkait pernyataannya bahwa "Kitab suci itu fiksi" yang diperkarakan oleh sebagian masyarakat dan dibawa ke jalur hukum juga seakan menunjukkan ketidaksehatan akal pikiran mereka yang memperkarakan ini. Karena itu, melihat persoalan dalam politik, tidak bisa dipisahkan antara satu realitas dengan realitas yang lainnya.

Politik yang mencerahkan dalam konteks pemilu adalah politik yang kompetitif, bertarung dan berproses dengan jalur yang tidak merusak akal pikiran manusia. Kontestasi Pemilu 2019 adalah ibaratkan pertandingan dalam permainan sepak bola. Setiap pertandingan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Siapapun yang menang harus menghormati yang kalah, dan siapapun yang kalah harus mengakui kemenangan pihak lawan. Bagi kita yang sekarang sedang mendukung kubu paslon nomor satu maupun paslon nomor dua harus tetap memiliki akal dan jiwa yang sehat, di mana jika calonnya kalah, maka terimalah kekalahan tersebut. Jika pertandingan dianggap mengandung unsur kecurangan, maka ada Mahkamah Konstitusi sebagai pemutus akhir dari sengketa pemilu. Perkara bahwa mungkin Mahkamah Konstitusi dianggap mendukung pasangan tertentu, itu lain persoalan dan tentu harus dievaluasi bersama ke depannya.

Politik yang mencerahkan adalah politik yang tetap menjaga persatuan di antara sesama warga negara. Politik yang mencerahkan adalah politik yang tidak memecah belah di antara masyarakat dan mencari perbedaan di dalamnya, melainkan mencari persamaan dan kesesuaian. Meskipun bertetangga dengan pilihan berbeda, semangat untuk menjaga persaudaraan sebagai warga negara Indonesia tidak pernah padam. Presiden terpilih tetap bisa dikontrol oleh ratusan juta manusia yang setiap saat bisa bersuara lantang terhadap setiap rezim yang berkuasa. Demokrasi diciptakan tidak untuk membungkam akal pikiran rakyat yang kritis. Demokrasi dibuat tidak untuk membunuh mereka yang sebenarnya

cinta terhadap pemerintah, hanya saja cara mereka mencintai negeri ini berbeda-beda: ada yang dengan cara halus, marah, bahkan kasar. Namanya juga kita hidup dalam keanekaragaman budaya tanah air.

Jadilah penguasa yang dewasa dalam menghadapi keanekaragaman rakyatnya. Jadilah rezim yang melindungin rakyatnya bukan malah menakut-nakuti rakyat dengan memperkarakan mereka ke jalur hukum. Hanya rezim yang memiliki nilai-nilai luhur kenegarawanan sajalah yang tetap berpikiran dan berjiwa tenang jika dikritik atau dicaci maki. Jika rezim yang dicacimaki merasa tidak terima dan lalu marah, mungkin saja cacian itu memang benar adanya. Selamat ber-Tanwir, semoga Pemilu 2019 tetap menjadikan rakyatnya sehat jiwa, sehat akal, dan sehat persatuannya.

MUHAMMADIYAH DAN PILPRES 2019: MEMPERTEGUH POLITIK MODERAT-INKLUSIF MUHAMMADIYAH

Andar Nubowo
Associate Research Fellow padaInstitite of Defence and Strategic Studies, S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University of Singapore, Alumni EHESS Paris Perancis, Kader Muhammadiyah

Tak jadi meminang Mahfud MD, tokoh NU dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Presiden Joko "Jokowi" Widodo secara mendadak memilih KiyaiMa'ruf Amien sebagai calon wakil presiden di jam-jam terakhir pengumuman resmi. Pilihan ini tampaknya dilatari oleh fakta bahwa faktor Islam dianggap menentukan pada Pilres 2019. Hasil Pilkada Serentak pada 2018 di mana calon-calon gubernur-wakil gubernur yang didukung partai Islam dan aliansi kelompok-kelopok Islam mendapatkan suara signifikan dan beberapa di antaranya berhasil memenangkan pemilihan, seperti di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Pilkada Jawa Barat juga membuktikan bahwa Islam menjadi kartu penting bagi calon yang diusungnya Sudrajat Ahmad Syaikhu, meskipun hanya diurutan kedua dan menjungkirbalikkan prediksi hampir semua lembaga survei papan atas. Karena Islam menjadi faktor menentukan dalam Pilpres 2019, Jokowi perlu menggandeng ulama. Figur Kiyai Ma'ruf yang berasal dari NU ---sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, dan dekat dengan kelompok konservatif dinilai dapat menggaet dukungan suara Islam dan sekaligus memecah konsentrasi dukungan konservatif yang dekat dengan Prabowo.

Fakta kedekatan kelompok konservatif dengan Prabowo dapat diindikasikan dengan Ijtimak Ulama 1 dan 2 yang berisi dukungan dan rekomendasi kandidat wakil presiden kepada Prabowo, bukan Jokowi. Meski Prabowo tidak memilih rekomendasi Ijtimak Ulama 1 yang

mencalonkan Salim Jufri Assegaf dan Abdul Shomad, Habib Rizieq dan ulama 212 lainnya tetap mendukung pilihan Prabowo untuk Sandiaga Shalahuddin Uno sebagai calon wakil presidennya. Sandiaga yang bukan dari kalangan santri Muslim, tetapi dianggap dekat dengan kelompok Islam sejak Pilkada Jakarta, mendapat dukungan penuh bahkan dianggap sebagai "santri post-Islamis". Pasangan Prabowo-Sandi, *dus,* dilihat sebagai representasi Islam. Sebaliknya, meski Kiyai Ma'ruf adalah ulama tulen, pasangan Jokowi-Ma'ruf bukanlah representasi Islam, tetapi dianggap gubahan baru dari pola politik "Nasakom" yang diciptakan Soekarno dan ditolak oleh kalangan Islam (Masyumi) pada waktu itu.

Dapat dinyatakan bahwa baik Jokowi dan Prabowo sama-sama menggunakan kartu truf Islam. Keduanya tengah memperebutkan "kue" pemilih Islam. Secara sosiologis, baik Jokowi dan Prabowo berasal dari sub-kultur Islam Jawa, abangan. Keduanya tidak lahir, dibesarkan, dan didik dalam kultur Islam santri, tetapi dalam tradisi priyayi dan filsafat Jawa yang kompromistis. Dalam situasi meningkatnya populisme dan konservatisme Islam, keduanya diwajibkan untuk melakukan komromi-komrpomi politik dengan situasi tersebut. Perubahan sikap Jokowi terhadap Islam terjadi pasca kasus Ahok 2016 lalu di mana ia secara intensif mulai melakukan pendekatan dan komunikasi langsung dengan kelompok-kelompok Islam terutama Muhammadiyah dan NU. Meski mengakui bukan sebagai Muslim santri, Prabowo mengaku memiliki hubungan yang baik dan panjang dengan komunitas Islam sejak akhir Orde Baru. Lahir dan besar dari keluarga campuran Muslim Jawa dan Kristen Manado, Prabowo merasa memiliki Islamic credential karena dekat dengan kelompok santri dan aspirasi umat Islam.

Polarisasi Segregatif

Jokowi-Ma'ruf Amien dan Prabowo-Sandi kembali membuat segregasi di kalangan umat Islam dan bangsa Indonesia. Segregasi yang telah terjadi sejak Pilkada 2012 dan mencapai puncaknya pada Pilkada 2017 lalu kembali menemukan momentumnya. Berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilkada 2017 yang memperhadapkan politik identitas seperti Islam non Islam, komunisme dan imperialisme ekonomi China, kali ini wacana politik identitas Islam lebih berpusat pada wacana Islam (moderat) Nusantara vs modernis dan NKRI Bersyariah-Khilafah, Islam vs Pancasila dan NKRI. Tentu saja, dalam hal ini, Prabowo-Sandi diidentikkan dengan kelompok pengusung konservatisme Islam dan dekat dengan kelompok Islam

modernis. *Vice versa* dengan Jokowi-Ma'ruf. Karena itu, *political cleavege* dengan mudah terbentuk. Kelompok pendukung Ahok dan Muslim liberal-progresif yang kecewa dengan penunjukkan Ma'ruf Amien yang memiliki rekam jejak konservatif kini mulai solid di belakang keputusan itu. Hal yang sama, kelompok konservatif yang awalnya kecewa dengan penunjukkan Sandi, bukan Salim Jufri atau Abdul Shomad kini telah erapatkan barisan di kubu Prabowo-Sandi.

Menariknya, polarisasi dan pengelompokkan dukungan politik pada kedua calon menunjukkan penguatan kembali politik identitas di kalangan umat Islam di Indonesia. Jika NU dapat dipastikan solid—kecuali kubu kiyai NU seperti Sholahuddin Wahid, Khoirul Anam yang berseberangan dengan Kiyai Said Aqil Siraj dan PBNU, warga Muhammadiyah tampak lebih banyak mendukung Prabowo-Sandi, kecuali beberapa tokoh Muhammadiyah yang juga politisi di partai pendukung Jokowi. Dukungan eksponen Muhammadiyah tercerminkan pada susunan Tim Sukses Prabowo-Sandi yang diwakili pengurus teras Muhammadiyah seperti Bendahara PP Muhammadiyah Suyatno, Rektor UMJ Siaful Bakhri dan Ketum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzhar Simanjuntak. Selain itu, berdiri pula relawan-relawan Prabowo-Sandi yang dimotori oleh aktifis Muhammadiyah seperti Aliansi Pencerah Indonesia (API).

Kecenderungan pilihan politik ini tampaknya dilatari oleh fakta bahwa kubu Jokowi telah didominasi oleh NU dan partai-partai politik pendukung. Berbeda dengan Pilpres 2014 lalu di mana relawan Jokowi mendapatkan posisi penting, kali ini posisi kelompok-kelompok relawan dalam Tim Kemenangan Jokowi diambil alih oleh partai koalisi. Keterwakilan Muhammadiyah secara eksponensial nyaris tidak ada, karena tokoh Muhammadiyah seperti Hajriyanto Y Thohari, Ahmad Rofiq, dan Raja Juli Anthoni lebih mewakili Partai Golkar, Partai Perindo, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Karena itu, timbul asumsi bahwa Jokowi lebih memperhatikan NU di banding Muhammadiyah atau ormas Islam lainnya. Dukungan Amien Rais dan PAN serta mundurnya Dien Syamsuddin dari Utusan Khusus Presiden beberapa minggu setelah penunjukkan Ma'ruf Amien memperkuat asumsi di atas. Beberapa saat kemudian, Dien Syamsuddin satu panggung dengan Prabowo Subianto di sebuah acara yang dihelatnya. Sandiaga Uno juga terlihat "blusukan" melakukan kuliah umum di kampus-kampus besar Muhammadiyah di Jakarta, Solo, dan Surabaya.

Meski demikian, Muhammadiyah tetap bersifat netral dan menjamin *civil and political liberties* bagi warga dan simpatisannya. Karena itu,

meski kecenderungan umum ke Prabowo-Sandi, sebagian eksponen dan tokoh Muhammadiyah juga mendukung Jokowi-Maruf. Dukungan tersebut didasarkan pada argumen bahwa Jokowi adalah presiden yang perlu didampingi atau dikawal oleh umat Islam sebaik mungkin. Argumen lain adalah peran menonjol Jokowi dalam menjaga harmoni, keutuhan, keragaman, dan persatuan bangsa Indonesia. Karena itulah, lahir sekelompok eksponen Muhammadiyah yang membentuk pusat-pusat kerelawanan untuk pemenangan Jokowi-Ma'ruf seperti Rumah Indonesia Berkemajuan, Balad Jokowi dan Aliansi Indonesia Baru (ABI).

Meneguhkan Politik Moderat-Inklusif

Perebutan *Islamic credential* di kalangan elit kekuasaan Indonesia mengindikasikan bahwa politik masih bergantung pada politik identitas; Islam, nasionalis, sekular. Dewasa ini, bobot Islam menemukan momentumnya. Kompromi terhadap Islam dalam panggung politik dewasa ini mungkin tidak dapat dihindarkan, tetapi sekaligus menimbulkan polarisasi dan segregasi politik, sosial dan keagamaan di kalangan umat Islam sendiri, dan juga antar umat Islam dengan elemen nasionalis dan sekular lainnya. Di lain pihak, bobot Islam dalam panggung politik nasional juga mencerminkan dinamika Islamisasi mendalam yang terus berlangsung di Indonesia sejak kedatangannya dan sekaligus ketegangan, kontestasi, dan perebutan dominasi antar madzhab dan kepentingan di kalangan Islam Indonesia yang berwajah banyak tersebut.

Sebagai dua kekuatan besar moderatisme Islam di Indonesia, Muhammadiyah dan NU tidak bisa tidak perlu menjaga netralitasnya pada Pilpres 2019. Keduanya mesti kembali kepada khittah organisasi sebagai organisasi Islam sosial kemasyarakatan, bukan partai politik. Meski demikian, keduanya juga tidak perlu antipati dan menjauh dari dunia politik, dengan menerapkan politik alokatif, menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik. Hal ini diperlukan karena kedua ormas tersebut juga perlu mengawal dan mengantisipasi upaya-upaya kelompok konservatif Islam di Indonesia yang ingin memanfaatkan even Pilpres 2019 untuk kepentingan agama dan politiknya.

Kenyataan bahwa Jokowi dan Prabowo tidak memahami dengan baik konfigurasi politik Islam dan wacana yang diusungnya memungkinkan mereka terjebak pada "perangkap dan strategi politik" kelompok konservatif. Setidaknya, elemen konservatisme politik ada di kedua belah kubu, yang bobot dan derajat politiknya sama-sama kuat: Kiyai Maruf Amien dengan

rekam jejak fatwa kontroversialnya yang anti minoritas adalah pasangan Jokowi, sedangkan partai Islam dan kelompok konservatif Islam berkumpul di kubu Prabowo. Dengan kata lain, apakah konservatisme agama telah berada di jalan terbaiknya untuk mencapai agenda-agenda agama dan politiknya, siapapun kubu yang menang pada Pilpres 2019.

Dalam hal ini, tentu kekuatan moderat Islam tampaknya tidak boleh terpecah, karena hanya akan memperlemah kekuatan moderat Islam dalam panggung sosial dan politik di Indonesia. Semakin lemah kekuatan moderat Islam, semakin memberi kesempatan kepada kelompok konservatif untuk tampil dalam panggung nasional. Mereka memiliki momentum besar untuk menerapkan cita-cita konservatisme Islam di Indonesia. Karena itu, kelompok Islam moderat perlu kembali membangun otoritas keagamaan dan sosialnya di kalangan Islam; merebut kembali wacana Islam Indonesia, dan memberikan pencerahan kepada kaum muda. Sebaliknya, jika kekuatan moderat Islam terbelah, maka anak-anak muda khususnya dan masyarakat muslim Indonesia umumnya akan cenderung pada kelompok konservatif, yang dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak kasus Ahok 2016 lalu berhasil menarik dukungan keagamaan dan politik.

Kekuatan moderat Islam, Muhammadiyah dan NU, selain memperteguh solidaritas Islam, juga perlu mengaitkannya dalam konteks kebangsaan atau keindonesiaan dan kemanusiaan. Kekuatan moderat Islam perlu juga membangun aliansi global moderat Islam di tingkat global, untuk mempromosikan ajaran Islam yang toleran, open inded dan sekaligus melawan kecenderungan global pada ektrimisme, radikalisme, dan terorisme. Untuk itu, jaringan *global people to people contact* perlu dibangun dan diperkuat seiring dengan perlunya membangun upaya perdamaian global yang berkelanjutan, yang selama ini dan terus dilakukan oleh *government to government contact* di tingkat regional seperti ASEAN dan juga tingkat global.

NETRAL-AKTIF: SIKAP ELEGAN DALAM POLITIK KEBANGSAAN MUHAMMADIYAH

M. Taufiq AR
Anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY

Muhammadiyah merupakan gerakan sosial Islam yang bersifat multi-wajah, aktivitasnya tidak hanya berkaitan dengan bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial serta pemberdayaan saja, tetapi juga turut serta terlibat dalam aktivitas di ranah politik kenegaraan. Identitas utama Muhammadiyah tetap pada gerakan keagaman dan sosio-kultural.Peran dan kiprahnya pada ranah politik terbatas sesuai dengan identitasnya sebagai gerakan sosial Islam. Dalam relasinya dengan politik, Muhammadiyah selalu mengalami pasang surut, yang dapat ditilik dari sejarah perjalanan panjang Muhammadiyah sejak lahir pada tahun 1912 hingga saat ini. Adakalanya mencoba untuk menjauh dari kekuasaan dengan berusaha menjaga jarak yang sama, namun adakalanya berusaha mendekat dengan berusaha menjaga kedekatan yang sama dengan semua kekuatan politik yang ada.

Adagium "menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik" dipopulerkan pada periode kepemimpinan Buya Syafii Maarif (2000-2005), sementara jargon "menjaga kedekatan yang sama dengan kekuatan politik" populer para periode kepemimpinan Din Syamsuddin (2005-2010, 2010-2015). Kedua jargon itu sesungguhnya mencerminkan ambiguitas Muhammadiyah dalam memandang dan menyikapi ranah dan kontestasi politik. Hal itu juga mengindikasikan masih kuatnya tarik-ulur internal, kontestasi di kalangan internal Muhammadiyah, antara faksi politik vs faksi apolitik, faksi kultural vs faksi struktural, hingga faksi progresif vs faksi konservatif.

Dalam perjalanannya, formulasi dan ekspresi tentang netralitas politik Muhammadiyah pada setiap moment politik elektoral selalu dinamis. Dinamika sikap Muhammadiyah itu bagian dari adaptasi eksternal yang sejatinya merupakan salah satu resep dari usia panjang Persyarikatan ini. Kim Hyung-Jun, Profesor Antropologi Budaya dari Kangwon National University Korea Selatan mencatatnya sebagai *"..tidak ada rahasia yang susah dipahami dalam usia panjang Muhammadiyah. Apa yang ada dibaliknya adalah hal yang mendasar, yaitu tradisi demokrasi, egaliterianisme, serta otonomi yang dijaga dan dilaksanakan oleh warga Muhammadiyah.."* (Hyung-Jun, 2010).

Watak dan kharakter Muhammadiyah dalam ranah politik sejatinya moderat-akomodatif, relasinya dengan pemerintah sesungguhnya mutualistik (Efendi, 1998). Politik, dalam doktrin perjuangan Muhammadiyah adalah bagian dari arena dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar.*Aktivitas politik (baik melalu partai politik maupun kekuatan politik lain) oleh Muhammadiyah dimaknai sebagai strategi dakwah. Kiprah politik Muhammadiyah dapat dilihat setidaknya dalam 3 perspektif; *pertama,* kokohnya doktrin dan pemahaman agama yang menyatu dalam setiap sendi kehidupan, sehingga interaksi dan percampuran antara politik dan agama tak bisa dihindari. *Kedua,* kondisi objektif di lingkungan sekitar, situasi carut-marut kehidupan berbangsa dan bernegara serta perilaku politisi dan penyelenggara negara yang jauh dari ideal menjadi panggilan bagi Muhammadiyah untuk masuk terlibat membenahinya. *Ketiga,* politik dianggap dapat memberikan keuntungan jangka pendek untuk tujuan jangka panjang (Noor, 2000).

Muhammadiyah sebagai kekuatan *civil society* dan *political interest* menjadi sulit dibedakan, karena proses penghimpitan dan irisan dengan kekuatan politik formal pada wilayah praktis begitu kuat, bahkan menjadi bagian dari politik praktis itu sendiri. Kondisi itu juga terkonfirmasi dari kharakteristik anggota Muhammadiyah. Anggota Muhammadiyah dapat dikelompokkan ke dalam varian keanggotaan dicirikan oleh kecenderungan orientasi sikap politiknya; *pertama,* anggota organsiasi yang totalistik sebagai warga Muhammadiyah, selain memiliki NBM (Nomor Baku Muhammadiyah), juga secara sungguh-sungguh membela kepentingan Muhammadiyah dari berbagai intrik politik pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan dalam Muhammadiyah.

Kedua, anggota yang secara legal-formal terdaftar sebagai anggota resmi Muhammadiyah (memiliki NBM) – mereka umumnya kader-kader

Muhammadiyah yang memiliki kecenderungan ketertarikan berpolitik yang menonjol, mereka bergabung atau turut mendirikan partai politik – mereka ini, entah sadar atau tidak sadar niscaya menggunakan Muhammadiyah sebagai alat atau batu loncatan dalam mencapai kepentingan politiknya. *Ketiga,* mereka yang bekerja atau mencari keuntungan dari hubungannya dengan Muhammadiyah – secara ideologis dan/atau organsiastoris mereka bukanlah kader-kader Muhammadiyah, mereka mengaku Muhammadiyah secara nominal karena ingin mendapatkan keuntungan yang bersifat pragmatis dari Muhammadiyah (Jurdi, 2008).

Ketiga varian anggota tersebut memiliki cara pandang yang tidak sama dalam menafsirkan dan mengimplementasikan konsep *amar ma'ruf nahi munkar;* karena dimensi dan kepentiangan politik-kekuasaan dan kepentingan ekonomi mempengaruhinya. Dalam konteks ini, anggota Muhammadiyah tidak sepenuhnya terikat dengan prinsip-prinsip dan doktrin organisasi (MKCH = Matan Keyakinan dan CIta-cita Hidup Muhammadiyah, maupun PHI= Pedoman Hidup Islami warga Muhammadiyah), nilai-nilai dasar organsiasi sudah semakin cair di hadapan kepentingan ekonomi dan politik. Bahkan terkadang, bagi warga Muhammadiyah yang berkiprah di partai politik, pembelaan terhadap kepentingan partainya lebih menonjol daripada pembelaan terhadap kepentingan Muhammadiyah.

Situasi dan kondisi itu hendak dijawab oleh Muhammadiyah pada periode kepemimpinan Haedar Nashir (2015-2020) dengan statemennya bahwa Muhammadiyah tegak di atas Khittah Organisasi dalam menyikapi dinamika politik yang terjadi. Saatnya kini, Muhammadiyah menegaskan khittahnya untuk netral-aktif dalam peran politik kebangsaannya, terlebih lagi menjelang moment politik elektoral yang kontestasinya terasa semakin sengit, berpotensi terjadinya keterbelahan di kalangan warga bangsa Indonesia.

Netral-aktif merupakan perpaduan orientasi sosio-kultural dengan orientasi politik-struktural. Sikap netral artinya Muhammadiyah tegas untuk menjaga jarak *dus* kedekatan yang sama dengan semua kekuatan politik. Muhammadiyah mengambil jarak dengan penguasa atau pemerintah dalam arti yang proporsional. Sikap kritis dan korektif terhadap pemerintah didasarkan pada panggilan moral dan tanggungjawab moral untuk mengingatkan pemerintah agar berjalan sesuai dengan konstitusi.

Sikap aktif mengandung pengertian akan ikhtiar Muhammadiyah untuk merekonstruksi kondisi politik yang lebih berkeadaban. Proaktif juga mengandung makna Muhammadiyah berupaya mempelopori,

menginisiasi formulasi kebijakan-kebijakan publik yang lebih berorientasi pada kebajikan, regulasi-regulasi yang lebih pro-rakyat, berdimensi jangka panjang dengan mengedepankan perspektif keberlanjutan dan kelestarian alam.

Dalam menyongsong moment politik elektoral 2019, Muhammadiyah seyogianya menjadi pencetus dan penggerak politik yang berkeadaban. Tema Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu "Beragama yang Mencerahkan" perlu dialoborasi dan diformulasikan dalam konteks kehidupan berpolitik. Kontestasi politik yang berlangsung sengit akhir-akhir ini, ditengarai telah menumbuhsuburkan dua patologi utama dalam demokrasi elektoral: merebaknya *hoax* dan ujaran kebencian yang memecah belah warga, potensi *money politic* dalam proses elektoral.

"Beragama yang Mencerahkan" harus ditafsirkan dalam ranah politik untuk "memerangi" *hoax*, ujaran kebencian, serta *money politic* yang merupakan manifestasi kemunkaran pada kehidupan politik-demokrasi. Dalam konteks *amar ma'ruf,* Muhammadiyah perlu menginisiasi pendidikan politik dan pendidikan pemilih bagi kader, warga, maupun anak-anak didik di amal usaha pendidikan yang dikelolanya. Melalui ini diharapkan kader, warga, dan para anak didik di sekolah/madrasah Muhammadiyah memiliki kesadaran dan perspektif yang luas dalam hal politik maupun hak-hak sebagai warga negara dalam mengekspresikan maupun menyalurkan hak politiknya dalam Pemilu.

Literasi media, utamanya media massa dan media sosial; perlu dipelopori dan digiatkan untuk kalangan punggawa, kader, dan warga Persyarikatan. Merebaknya hoax dan ujaran kebencian di media sosial khususnya, tak terlepas dari minimnya literasi media. Pemahaman akan perlunya *saring sebelum sharing*, kroscek kebenaran dan validitas berita, belum sepenuhnya dimiliki oleh warga Persyarikatan. Terlebih lagi, dalam konteks *nahi munkar*, jangan sampai ada punggawa, kader, atau warga Muhammadiyah yang menjadi produsen atau penyebar berita *hoax* serta ujaran kebencian.

Money politic atau praktek suap serta jual-beli suara dalam pemilu juga harus menjadi perhatian dan bagian dari gerakan *nahi munkar* Muhammadiyah. Kantong-kantong jamaah Muhammadiyah di tingkat Ranting, harus menjadi pelopor dari gerakan komunitas anti-politik uang. Gerakan *Dakwah Jamaah, Qaryah Thayyibah* harus menjangkau dimensi kehidupan politik kewargaan pada tingkat komunitas itu. Pendidikan dan kampanye anti-politik uang harus dilakukan secara lebih masif dan

terstruktur, berjejaring dan berkolaborasi dengan para aktor dan pegiat anti-politik uang lain yang sudah terlebih dahulu menginisiasi, salah satu misalnya dalam gerakan '*Desa anti-politik uang'.*

Kesemuanya itu adalah ekspresi dan manifestasi dari sikap netral-aktif Muhammadiyah yang elegan dalam politik kebangsaan, khususnya dalam menghadapi moment politik elektoral. Langkah-langkah tersebut perlu dirumuskan secara lebih sistematis, menjadi bagian dari gerakan sosio-kutural *amar ma'ruf nahi munkar* yang sudah menjadi identitas Persyarikatan ini, dan seyogianya menjadi bagian dari rumusan dari Sidang Tanwir Muhammadiyah yang dihelat di Bengkulu pada pertengahan Februari 2019.

DILEMA NETRALITAS SIKAP POLITIK MUHAMMADIYAH

Wahyudi Akmaliah
Peneliti di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK) LIPI

Di tengah polarisasi politik yang sangat menguat, menjaga berada di titik tengah bagi Muhammadiyah tidak hanya penting, melainkan juga keharusan untuk menjaga keseimbangan untuk menjembati jurang pemisah tersebut. Perihal menjadi jembatan dan penghubung ini yang sedang dilakukan oleh Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Haedar Nashir (Burhani, 2019). Namun, pertanyaannya, seberapa relevan sikap politik Muhammadiyah tersebut di tengah memudarnya politik representasi dalam level nasional dan kuatnya dukungan warga Muhammadiyah kepada salah satu kubu? Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Setidaknya, pertanyaan ini menjadi refleksi ke depan sikap politik semacam apa yang mesti diambil oleh Muhammadiyah. Ini karena, berupaya menjaga titik moderasi di tengah gelombang perubahan tatanan politik dan arus populisme Islam, sekali lagi, harus ada reformulasi sendiri dalam menempatkan diri bagaimana semestinya sikap upaya menjembati tersebut yang harus diambil oleh Muhammadiyah.

Sebagaimana diketahui, jauh sebelum dua periode pemerintahan (SBY-Boediono dan Jokowi-JK), kader-kader terbaik Muhammadiyah selalu mendapatkan tempat menjadi salah satu menteri dalam pemerintahan di Indonesia. Muhammadiyah biasanya mengisi tiga kementerian, yaitu Menteri Agama, Kesehatan, dan Pendidikan-Kebudayaan. Tiga kementerian itu yang menjadi ladang garapan dan kerja-kerja praktis yang selama ini dikerjakan oleh Muhammadiyah, mulai dari mendirikan, membangun, dan mengembangkan Sekolah dan Madrasah (dari Taman Kanak-Kanak-Perguruan Tinggi), pembangunan-pengelolaan rumah sakit dan panti asuhan serta pendirian Mushola dan Mesjid di pelosok-pelosok Desa.

Namun, era politik representasi telah berakhir seiring dengan adanya perubahan tatanan politik pasca rejim Orde Baru. Dengan hadirnya sistem multi partai dan adanya partai-partai yang merepresentasikan Islam, seperti PKB, PPP, PAN, PKS, dan PBB, sejumlah partai inilah yang mengajukan kader-kadernya untuk diajukan sebagai menteri dalam kabinet apabila terpilih. Di sisi lain, sistem pemilihan langsung untuk pemilihan legislatif dan presiden juga memperkuat hal tersebut.

Dengan kata lain, ini sistem politik di mana yang mendukung dan memenangkan koalisi partai politik yang akan diusung. Jika gabungan partai koalisi yang mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden kalah, maka selesailah proyeksi karir politiknya dalam pemerintahan yang akan datang. Dalam konteks ini, akibatnya, alih-alih suara Muhammadiyah sebagai perwakilan suara Islam bisa terakomodasi seperti yang terjadi dalam pemerintahan rejim Orde Baru, yang terjadi, justru partai politik yang menjadi mitra koalisi dari calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung, apabila menang, baru akan mendapatkan posisi dalam pemerintahan sebagai bagian dari kontrak politik mereka. Di sini, banyaknya kader-kader dan perwakilan NU yang mendukung koalisi Jokowi-JK bisa mendapatkan posisi di 5 kementerian melalui representasi suara PKB dan PPP. Karena, banyak kader Muhammadiyah yang berada di PAN dan mendukung Prabowo-Hatta, dengan sendirinya akan tersingkir dari pusaran kekuasaan tersebut. Struktur politik semacam ini yang seringkali diabaikan oleh sebagian besar warga Muhammadiyah, menganggap bahwasanya pemerintahan saat ini tidak merepresentasikan suara Islam, khususnya dari Muhammadiyah.

Meskipun harus diakui, sikap politik akomodasi tersebut masih belum benar-benar pudar. Hal ini terlihat dengan terpilihnya Muhajir Effendy sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggantikan Anies Baswedan dalam pergantian kabinet pada 27 Juli 2016. Selain itu, menguatnya rangkaian demonstrasi besar (212 dan 411) untuk memenjarakan Ahok atas tuduhan penodaan agama, suara Muhammadiyah kembali mulai didengarkan. Hal ini tercermin dengan masuknya beberapa orang kader Muhammadiyah dalam lingkaran kedua dan ketiga pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan, untuk mendapatkan suara Muhammadiyah dalam politik elektoral, Jokowi beberapa kali kerap mengunjungi basis-basis Muhammadiyah, baik di Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Meskipun sikap politik yang ditunjukkan oleh Jokowi tersebut bukan berarti membuat warga Muhammadiyah mau mendukungnya di tengah gelombang suara Muhammadiyah yang sebagian besar memilih pasangan Prabowo-Sandi. Di sisi lain, sikap politik Jokowi

juga bukan mengandaikan bahwasanya representasi suara Muhammadiyah akan diakomodasi dalam pemerintahan di tengah perubahan tatanan politik tersebut.

Di sini, posisi Muhammadiyah menjadi dilematis. Dalam level pusat, mereka harus bersikap netral, dalam akar rumput, banyak dari warga Muhammadiyah sudah menentukan sikap politiknya. Upaya untuk menjewer Haedar Nashir apabila tidak memilih Prabowo-Sandi, sebagaimana diungkapkan berkali-kali oleh Amien Rais, misalnya, merupakan bentuk sikap dari representasi suara Muhammadiyah tersebut. Meskipun, ucapan tersebut juga ditentang oleh kader Muhammadiyah yang lain dengan berusaha menjaga Muhammadiyah bersikap netral untuk tidak terjebak dalam politik praktis sesuai dengan khittahnya. Sikap dilematis ini justru membuat Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Haedar Nashir menjadi tidak terlihat artikulatif di publik luas. Walaupun sikap ini sebenarnya menunjukkan kehati-hatian yang coba dipegang oleh Haedar Nashir.

Di tengah besarnya aset amal usaha Muhammadiyah dan kekhawatiran terjebak dalam politik praktis yang bisa menggulung Muhammadiyah ke dalam titik curam kehancuran, ada dua sikap yang bisa diusung dalam politik Muhammadiyah, yang terus-menerus didengungkan di lingkaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sikap politik itu adalah mengenai kebangsaan dan kewarganegaraan. Sebenarnya, dua sikap politik ini sudah memiliki landasan, yaitu dengan menjadikan Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Shayadah* dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 pada 3-7 Agustus 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan. Semangat itu menunjukkan bahwasanya negara Indonesia merupakan bagian dari konsensus nasional yang berdiri di atas kemajukan bangsa, golongan, daerah, dan politik di mana Pancasila sebagai landasan utama berbangsa dan bernegara.

Namun, diseretnya Islam dalam narasi pragmatisme politik membuat sikap Muhammadiyah terhadap Pancasila menjadi gamang dan cenderung permisif. Ini bisa dilihat dari kasus Ahok. Meskipun Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimbau agar warganya tidak ikut dalam aksi 212, tidak ada sikap politik kebangsaan dalam melihat kasus tersebut. Alih-alih membela Ahok dalam kepungan intervensi politik atas nama Islam dan mobilisasi, Muhammadiyah justru melakukan semacam proses pembiaraan. Padahal, kasus Ahok ini terjadi dalam momentum Pilkada. Dalam momentum ini, narasi perasaan terancam atas identitas Ahok sebagai Tionghoa demikian direproduksi untuk memperkuat dukungan,

dimainkan oleh kelompok konservatif Islam dan predator politik. Dalam momentum ini, suara Muhammadiyah benar-benar ditunggu oleh publik Indonesia. Meskipun demikian, dalam konteks pembubaran HTI, harus diakui, Muhammadiyah memiliki sikap yang jelas, yaitu mendukung pemerintah Indonesia untuk melakukan proses pembubaran terhadap ormas yang bertentangan terhadap Pancasila. Tentu saja, dukungan ini dilakukan selama pemerintah Indonesia sesuai dengan jalur konstitusi, bukan semata-mata sekedar politik praktis.

Dengan demikian, pembelaan politik kepada nilai-nilai kebangsaan dan kewarganegaraan dengan mengartikulasikan secara jelas di publik, khususnya kasus-kasus intoleransi dan kekerasan atas nama agama di Indonesia, tidak hanya menempatkan Muhammadiyah berada dalam sikap moderat, melainkan juga menempatkan organisasi besar ini sebagai rumah bagi siapa saja dengan latarbelakang kelas, politik, etnik, dan sosial yang berbeda dengan tidak terjebak dalam politik praktis. Jika sikap ini terus direproduksi dalam setiap kesempatan, kader-kader terbaik Muhammadiyah akan terus diminta untuk mengabdi kepada negara dan bangsa untuk membangun kemaslahatan umat yang lebih besar, meskipun adanya pergantian rejim pemerintahan dan perubahan struktur politik di Indonesia.

MENINJAU ULANG PEMILU LANGSUNG UNTUK DEMOKRASI YANG BERADAB

Irvan Mawardi
Mantan Aktivis Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung sejak tahun 2004 menjadi salah satu agenda penguatan demokrasi di Indonesia pasca reformasi tahun 1998. Pada pemilu 2019 ini Pemilihan Presiden secara langsung telah berlangsung empat kali yakni 2004, 2009, 2014 dan 2019. Sementara pilkada langsung yang juga dimulai pada tahun 2004 telah berlangsung ratusan kali di berbagai kabupaten/kota dan atau provinisi. Makna "pemilihan umum langsung" yang berbasis *one man one vote* juga terasa pada pemilihan legislative sejak tahun 2004 yakni dengan diterapkannya mekanisme pemilihan dengan system proporsional terbuka, yakni sistem perwakilan proporsional yang memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses penentuan urutan calon partai yang akan dipilih. Selain itu, sistem terbuka mengizinkan pemilih untuk memilih individu daripada partai.

Secara konseptual Pemilihan langsung, baik dalam konteks Pilpres, Pilkada maupun dengan system proporsional terbuka memiliki semangat untuk memperbaiki kualitas kontestasi yang selama ini tertutup. Menurut hemat saya, peningkatan kualitas demokratisasi dengan agenda Pemilihan Umum secara Langsung setidaknya mengandung beberapa indikator. Pertama, rakyat memiliki kemandirian dan kapasitas yang rasional dalam menentukan pilihannya. Kedua, proses pilkada berlangsung dengan baik, lancar dan damai sesuai dengan prosedur yang demokratis. Ketiga, pilkada mampu melahirkan pemimpin yang memiliki kapasitas dan akseptabilitas yang mamadai. Keempat, kepemimpinan yang dilahirkan oleh proses pilkada harus mampu membentuk pemerintahan yang bersih dan kuat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sepanjang lima belas tahun jagad situasi perpolitikan dan suasana

kontestasi rekruitmen elit di seantero nusantara justru yang menampakkan turunnya kualitas keadaban demokrasi. Dalam konteks kemandirian pemilih misalnya, sepertinya tidak mudah mendapatkan ribuan massa yang hadir secara ikhlas dan sukarela dalam sebuah kontetasi pemilihan. Praktek money politik yang massif dan terbuka dengan penuh transaksional menunjukkan betapa lemahnya kemandirian pra pemilih. Di era media sosial, lemahnya kemandirian dan rasionalitas terlihat dari begitu mudahnya menyebar berita yang tidak akurat, penuh kebencian dan caci maki dalam sebuah kontestasi.

Tidak dapat dipungkri bahwa situasi sosial politik dalam Pemilihan Langsung pada umumnya berlangsung panas dan cenderung keras karena penuh dengan nalar kontestasi. Dalam penyelenggaraan pilkada misalnya, data dari Lembaga pengkaji masalah sosial politik, Internasional Crisis Group (ICG), mencatat sekitar 10% dari 200 pemilukada yang diselenggarakan pada 2010 telah diwarnai aksi kekerasan (Pradhanawati, 2011). Data dari Crisis Group Asia Report N°197 menjelaskan bahwa jumlah kekerasan yang terjadi dalam 224 pemilukada yang terjadwal pada 2010 tidak sampai 10% (20 kasus kekerasan), sedangkan sepanjang pemilukada 2005-2008 mencatat ada13 kasus kekerasan. Sementara itu, hasil penelitian LIPI terhadap pemilukada di 491 kabupaten/kota antara Juni 2005 hingga 2008, menemukan sekitar 10-15% pemilukada telah diwarnai aksi kekerasan (Pradhanawati, 2011). Secara kuantitatif angka-angka ini bisa saja diperdebatkan, namun secara kualitatif, relasi social dan kehangatan sebagai warga dan hubungan kewargaan semakin mengalami penurunan seiring dengan tingginya rivalitas dalam suasana pemilihan langsung.

Dalam hal kualitas output pemilihan langsung juga banyak menyisakan persoalan. Mimpi terindahnya adalah melalui pemilihan langsung maka pemimpin dan kepemimpinan yang dihasilkan pemilihan langsung akan lebih baik dan berkualitas dibanding pemilihan tidak langsung. Bagaimana potret sesungguhnya? Sepanjang tahun 2004 sampai dengan 2018 ada 100 Kepala Daerah yang diproses oleh Komisi Anti Korupsi. Jumlah yang agak memilukan hati dapat dilihat pada periode 2016-2018, jumlah Kepala Daerah yang menjadi Tersangka sebanyak 43 orang. Angka itu terdiri dari 9 orang di tahun 2016, 8 orang di tahun 2017, dan yang paling banyak adalah di tahun 2018 yakni sejumlah 26 orang (www.idntimes.com/news). Produk pemilihan yang berbasis system proporsional terbuka setali tiga uang dengan pilkadasung yang juga melahirkan wakil rakyat yang minus

integritas dan kapasitas. Menurut rilis Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak tahun 2007-2018 sebanyak 205 anggota DPR dan DPRD yang telah dijatuhi tindak pidana korupsi (www.kpk.go.id/id). Keterbatasan kapasitas dan integritas calon yang terpilih dalam pemilihan langsung cukup berpengaruh pada kualitas pemerintahan dan legsilatif yang dibentuk. Harapan adanya pemerintahan dan legislatif yang bersih menjadi sulit terwujud akibat keterbatasan kapasitas calon dan system pemilihan yang terdesain hanya mampu melahirkan figure-figur yang punya uang dan popularitas. Proses pemilu yang tidak berlangsung secara demokratis dan transparan akan memicu lahirnya pemerintahan yang korup dan serba pragmatis. Banyak keluhan yang dilontarkan rakyat di level grass root yang tidak mengalami perubahan hidup pasca pergantian pemimpin pemerintahan. Rotasi kekuasaan hanya berputar dan lingkaran kekuatan oligarki. Ironisnya Pemilihan langsung akhirnya melahirkan bermacam bentuk oligarki, yakni sekelompok kecil masyarakat yang menikmati euphoria pentas pemilihan langsung namun rakyat banyak masih tetap terpinggirkan dari daulatnya.

Tiga Macam Oligarki

Oligarki menunjukkan adanya dominasi kekuasaan oleh segolongan elit dan golongan tertentu, berbading terbalik dengan praktik Demokrasi yang merupakan wajah kekuasaan yang dijalankan secara egaliter dan akuntabel oleh semua elemen masyarakat. Setidaknya ada tiga jenis oligarki yang subur berkembang pada rezim pemilihan langsung ini. Pertama Oligarki Partai Politik. Praktik oligarki partai politik pertama kali terlihat dari penyusunan dan perancangan aturan main pemilu alias UU Pemilu. Oligarki yang paling nyata dan merusak akal sehat adalah disahkannya UU Pemilu Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang salah satunya mengatur tentang ambang batas suara partai politik dalam mengajukan calon presiden wan wakil presiden pada pemilu tahun 2019. Pasal 222 dalam UU ini mengatur bahwa Parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019. Karena pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 digelar serentak, ambang batas yang digunakan adalah hasil pemilu legislatif 2014 lalu. Dengan ketentuan demikian, masyarakat dipertontonkan akrobat yang tidak lucu dari segelintir elit parpol yang berusaha membatasi akses kekuasaan didapat atau dinikmati calon atau figure lain dari partai politik. Kontestasi pilkada pun juga menunjukkan oligarki partai politik dengan dipersulitnya calon perseorangan untuk maju

sebagai calon alternative dari partai politik. Dalam UU Pilkada, minimal dukungan calon perseorangan yang maju dalam Pilgub berkisar antara 6,5 persen hingga 10 persen dari jumlah pemilih yang tercantum pada DPT. Rinciannya, 10 persen untuk jumlah DPT 2 juta; 8,5 persen untuk jumlah DPT antara 2 juta-6 juta; 7,5 persen untuk jumlah DPT 6 juta-12 juta, dan 6,5 persen untuk jumlah DPT lebih dari 12 juta. Angka ini sungguh mempersulit muncul calon alternative dalam pilkadasung.

Kedua, praktik oligarki juga melibatkan elit atau pemimpin yang dihasilkan dari pemilihan langsung. Seolah hendak "balas dendam" dengan praktik oligarki partai politik ketika hendak mencalonkan diri, alih-alih memperbaiki kualitas partai politik yang mengusungnya, kepala daerah terpilih justru menyuburkan praktik oligarki itu. Kekuasaan yang diraih dan dipelihara tidak hanya melibatkan elit partai tertentu saja, namun estafet kekuasaan justru diberikan kepada keluarga dengan label politik dinasti. Rakyat kembali dipertontonkan dengan pemilihan langsung sebagai prasyarat demokrasi procedural namun miskin substansi karena yang ditawarkan kepada mereka adalah kerabat bupati/walikota/gubernur yang sedang berkuasa namun minus kapasitas untuk memimpin. Termasuk kategori oligarki di sini adalah kepala daerah atau anggota legislative yang berkuasa yang hanya mengandalkan uang dan sponsor dari perusahaan tertentu (pemodal) sehingga distribusi kekuasaan hanya mampu diakses oleh para donatur atau sponsor tersebut.

Ketiga, praktik oligarki yang muncul dalam system rekruitmen penyelenggara pemilu. Pemilihan Umum langsung membawa konsekuensi perlunya sumber daya manusia sebagai penyelenggara. Secara normative, penyelenggara pemilu saat ini terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selain DKPP, KPU dan Bawaslu memiliki struktur dari Pusat sampai Desa dan Kelurahan, bahkan sampai TPS. Keseluruhan SDM di KPU dan Bawaslu direkrut dengan system pendaftaran terbuka dengan seleksi oleh Tim Seleksi yang dibentuk Oleh KPU atau Bawaslu. Sudah jamak diketahui bahwa model rektruitmen komisioner lembaga negara dengan menggunakan tim seleksi selain mematok kriteria kualitas, kapasitas dan profesionalitas personal hal penting lainnya yang menjadi pertimbangan adalah representasi kelompok dan primodial golongan. Faktor atau kriteria yang terakhir inilah yang menunjukkan adanya fenomena oligarki baru, yakni akses sebagai penyelenggara pemilu hanya dapat diperoleh bagi orang-orang yang berafiliasi kelompok atau warna tertentu. Pada proses

seleksi dan penjaringan itulah kemudian muncul semacam agen-agen atau "tim khusus" untuk mensukseskan seseorang jadi penyelenggara pemilu dengan klaim dan garansi label golongan tertentu. Ironisnya, praktik rekruitmen model agen ini kemudian dikapitalisasi menjadi lingkaran/ gen tertentu yang seolah memiliki otoritas dan legitimasi politik dalam internal keompok primordialnya. Kapitalisasi itu akhirnya bermuara pada politicking atau agenda politik lainnya dan praktik politik uang dan perbuatan menyimpang lainnya. Point saya dalam konteks ini adalah system rekruitmen penyelenggara pemilu harus dibuka seluas mungkin untuk semua warga Indonesia dengan menjadikan syarat kapasitas, integritas dan profesionalitas sebagai criteria utama melampui kedekatan personal dan kelompok antara tim seleksi dan yang diseleksi.

Pemilu dan Masyarakat Sipil

Dengan rentetan persoalan yang ditimbulkan oleh system pemilihana langsung maka banyak pihak yang kemudian mendorong agar system pemilu kembali pada semangat sila keempat pancasila yakni pemilihan yang berbasis perwakilan. Pakar Hukum Negara Mahfud MD termasuk salah satu tokoh yang mendorong perlunya meninjau ulang pemilu langsung. Menurutnya fenoma pilkada misalnya menunjukkan adanya Penjegalan di tengah jalan, penyuapan pada KPUD, kemudian korupsi anggaran daerah, pemalsuan dokumen, ,mobilisasi massa pemecatan pegawai yang tidak mendukung birokrasi incumbent. Filosofi Pancasila Sila keempat dengan mengedepankan semangat perwakilan (represntasi) perlu ditimbangkan secara serius. Ada beberapa yang perlu dipertimbangkan sebagai bahan kajian untuk menimbang ulang pemilihan langsung;

Pertama, mempertegas dan memperkuat filosofi representasi/ perwakilan yang ada di dalam sila keempat pancasila. Secara sosilogis, Para pendiri bangsa kita dahulu tentunya sudah mempertimbangkan konstruksi social politik bangsa Indonesia yang beragam dan memiliki kapasitas dan keunikan masing-masing. Secara yuridis, sesungguhnya ketika menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum utama perundang-undangan, maka jiwa dan pesan dari sila Pancasila itu harus tergambar dalam materi perundang-undangan. Dalam hal ini UU Pemilu juga harus merepsentasikan jiwa sila keempat pancasila itu.

Kedua, Perlu mendorong dan mempromosikan model-model pemilihan pemimpin yang secara historis ideologis telah melekat pada tradisi local tertentu di nusantara ini. Gejolak-gejolak local di tengah

berlangsungnya pilkadasung misalnya semestinya menjadi pertimbangan untuk memperhatikan dan memberlakukan kembali praktik pemilihan pemimpin local yang berbasis kearifan budaya di masing-masing daerah.

Ketiga, nilai utama dalam pemilihan umum adalah adanya akuntabilitas, tranparansi dan partisipasi aktif oleh masyarakat. Dalam kerangka pemilihan tidak langsung, KPU lebih berfungsi sebagai fasilitator untuk memastikan nilai-nilai tersebut terwujud. KPU hendaknya menghadirkan forum yang terbuka dan egaliter untuk mempertemukan para pemilih termasuk masyarakat sipil dengan calon pemimpinnya di level manapun. Dengan difasilitasi KPU, melalui Uji Publik dan format kegiatan lainnya, Pemilih dan masyarakat sipil harus mampu menguji kemampuan dan pikiran kandidat atau calon pemimpinnya secara terbuka dan rasional.

Keempat, tugas masyarakat sipil seperti Muhammadiyah selain menguji calon pemimpin dalam setiap kontestasi namun lebih utama dari itu adalah menyiapkan kader terbaiknya untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Konteks menyiapkan kader ini tentunya mendorong kader Muhammadiyah untuk masuk partai politik karena demokrasi saat ini secara formal hanya mengakui partai politik sebagai media untuk menseleksi dan menyiapkan calom pemimpin bangsa. Sehingga dalam mendesaian keadaban demokrasi melalui Pemilu, Muhammadiyah harus berperan ganda; yakni mendampingi masyarakat untuk memiliki rasionalitas dan kemandirian dalam menentukan pemimpinnya. Pada sisi lain Muhammadiyah juga harus mampu mendorong penguatan dan pendewasaan partai politik dengan cara menyiapkan kader terbaiknya untuk ditransformasikan dari kader Persyarikatan menjadi kader kebangsaan. Mungkin itu.

BAB 5

MUHAMMADIYAH DAN POLITIK PERDAMAIAN

NARASI DAN TEOLOGI PERDAMAIAN MUHAMMADIYAH

Surwandono
Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Muhammadiyah merupakan organisasi dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang telah berusia lebih dari satu abad, usia yang matang dan tangguh dalam mengarungi dinamika social, politik, dan kebudayaan. Dalam studi terakhir dari Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM (2019), Muhammadiyah telah memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap bangsa Indonesia, umat Islam, dan masyarakat internasional sehingga Muhammadiyah menjadi sangat layak mendapatkan nominasi nobel perdamaian bersama dengan Nahdhatul Ulama.

Tulisan ini hendak melakukan pelacakan narasi dan teologi perdamaian al-Hujurat, sebagai alternative membangun perdamaian di era ledakan informasi melalui penyebaran informasi secara digital. Ketersediaan informasi yang sangat berlebih, dan proses enyebaran yang sangat cepat telah menimbulkan kegaduhan atau meminjam istilah Johan Galtung melahirkan kontradiksi.

Narasi Konflik dan Perdamaian

Para pembelajar konflik membagi tiga variabel besar yang menyebabkan konflik. Pertama, variable artikulasi identitas. Pandangan ini berasumsi bahwa konflik terjadi karena tidak kompatibelnya identitas kelompok satu atas kelompok yang lain. Kelompok yang satu mengklaim lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang lain. Kelompok yang satu berkeinginan untuk mendominasi agar memberikan konstribusi yang besar kepada masyarakat.

Untuk menyelesaikan ini maka perlu dibangun narasi hidup berdampingan secara damai. Kesediaan untuk menerima keberadaan

kelompok lain, apapun kondisi dan afiliasinya. Perlu dibangun kesepakatan bersama bahwa kehidupan di dunia memang beragam. Dalam praktiknya membangun perdamaian dengan narasi ini indah di wacana namun sulit sekali dilaksanakan. Terlampau banyak timbul kontradiksi intermenis, sehingga narasi ini indah diskusi, elitis, dan sulit dibumikan.

Kedua, variable artikulasi pencapaian kepentingan. Pandangan ini berasumsi bahwa konflik timbul karena konflik memberikan insentif atau beneifit bagi siapa saja yang berkonflik. Konflik memberikan jalan yang terbuka, dan terdapat peluang yang besar bagi fihak yang berkonflik untuk melakukan mobilitas vertikal maupun horizontal. Tanpa konflik seakan sulit bagi aktor sosial untuk mendapatkan sejumlah kepentingan ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Untuk menyelesaikan kondisi ini maka perlu dibangun logika bahwa perdamaian didesaian untuk menjadi variabel yang penting bagi pencapaian kepentingan politik, ekonomi, social dan budaya. Logika sederhananya adalah bagaimana membuat prakondisi bahwa dengan kehidupan yang damai akan memberikan keuntungan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan kondisi konfliktual. Dalam praktiknya, membangun perdamaian dengan logika instrumentasi perdamaian juga menemukan batu sandungan yang besar. Banyak gagasan untuk membangun peace incentive lebih kompetitif dengan conflict incentive, sulit berlangsung berkesinambungan. Akselerasi kelompok dan daya tahan kelompok pro peace seperti kelompok merpati dibandingkan dengan kelompok pro konflik (perang) seperti kelompok elang seperti gap merpati dan elang. Elang terasa lebih perkasa dibandingkan dengan merpati. Gagasan intrumentasi perdamaian juga membutuhkan daya dukung energy perdamaian yang besar sehingga isolasi kelompok elang oleh kelompok merpati akan efisien.

Ketiga, variable konstruksi sosial. Konflik ditimbulkan karena perubahan konstruksi social. Pergeseran social terkait dengan proses mobilitas social dan politik yang berjalan dengan cepat, tidak diikuti dengan kontruksi tatanan social yang mampu merespon tatanan social. Tatanan social yang tidak responsive dituding sebagai sumber masalah konflik.

Untuk menyelesaikan konflik konstruksi sosial maka dibangun argumen dengan pembentukan konstruksi social yang baru. Gagasan pembangun supra-struktur dan tata kelola dalam masyarakat juga sangat indah dalam diskusi. Dalam prakteknya, supra-struktur banyak dikreasi oleh fihak yang memiliki kuasa yang lebih dibandingkan dengan kelompok yang lain. Orang yang berkuasa maka cenderung akan membuat regulasi yang mampu mempertahankan kuasa tersebut.

Disrupsi Informasi dan Energi Perdamaian Teologi Al-Hujurat

Al-Hujurat merupakan surat no. 49 dalam Al-Quran, yang memiliki 18 ayat yang kompleks. Ada sekitar lima ayat mempergunakan seruan perintah kepada orang yang beriman. Dan ada satu ayat yang mempergunakan seruan perintaj kepada manusia secara umum. Dari 18 ayat tersebut, surat al-hujurat mendiskursuskan tentang konflik dan perdamaian secara berkesinambungan.

Terdapat gagasan utama dari al-hujurat bahwa konflik yang timbul dalam masyarakat terkait dengan ketersediaan informasi, memperoleh informasi, mengelola informasi, dan bagaimana cara mengartikulasikan informasi yang sudah mengendap dan mendarah daging. Artinya, terdapat gagasan baru yang penting, bahwa konflik bersumber dari proses transmisi pesan, dan kemudian menimbulkan sejumlah distorsi pesan. Distorsi pesan itulah yang harus dikelola dengan baik agar berkelimpahan informasi tidak menimbulkan konflik, dari perdebatan yang tidak produktif, berlimpahnya hoaks, caci maki, mengembangkan prasangka buruk melalui *negative and black campaign*, mencari-cari kesalahan fihak lain, menerbarkan fitnah, memberikan gelaran atau sapaaan yang menyakitkan, dan bermain *playing victims.*

Bagaimana epistimologi teologi al-Hujurat dalam mengelola disrupsi informasi agar tidak menjadi energy konflik namun menjadi energy perdamaian. *Pertama,* melacak sumber informasi secara seksama, dari narasi ayat 1 sampai 6. Disrupsi informasi telah melahirkan berkelimpahan informasi. Informasi harus dapat dipilah mana yang hoaks mana yang faktual. Mana yang produktif mana yang provokatif. Mekanisme cek dan ricek perlu dikembangkan. Di sinilah peran media massa sebagai penghasil informasi social harus mengembangkan profesionalisme pemberitaan, di sini juga menantang peran lembaga pendidikan untuk menghasilkan informasi ilmiah yang visioner dan akuntabel. Di sinilah dituntut peran para produsen informasi untuk memproduksi informasi yang akurat dan bertanggungjawab.

Kedua, membangun otoritas manager informasi yang memiliki kuasa dalam membangun tertib informasi yang dilakukan secara professional, dan imparsial, dari narasi ayat 7 sampai 10. Otoritas menjadi alat eksekusi mana yang salah dan mana yang benar. Professionalme dan imparsialisme menjadi kunci penting untuk membangun otoritas tersebut legal atau sah. Tugas utama adalah mendisiplinkan agar kelompok yang melampau batas dalam penyebaran informasi dusta, kembali kepada track sesungguhnya.

Jika tidak mau maka harus ditertibkan secara adil. Di sinilah peran dewan tata kelola informasi, dari eksekutif , legistative dan judikatif dituntut menjalankan perannya sebagai agen perdamaian bukan sebagai agen konflik.

Ketiga, membangun pendidikan karakter kepada para pengguna informasi untuk berkomunikasi secara baik, dari narasi ayat 11 sampai dengan 13. Tehnik berkomunikasi secara demokratis, persuasive dan dialogis menjadi kunci utama untuk membangun proses komunikasi efektif. Komunikasi efektif akan menghasilkan mutualisme, kesalingfahaman antar fihak. Organisasi sipil, dan politik memegang peran penting untuk melakukan pendidikan literasi secara simultan dan konsisten. Tingginya angka literasi akan menghasilkan akumulasi pengetahuan yang komperehensif, dan sistematis, sehingga akan melahirkan ujaran, opini, pandangan, diskursus yang proporsional dan professional.

Keempat, membangun kepatuhan *(compliance)* dalam tata kelola (*governance*) informasi. Kepatuhan merupakan mekanisme untuk membangun 3 pilar informasi, yakni produser informasi, manager informasi, dan user informasi secara simultan, diambil dari narasi ayat 14-18. Kepatuhan tidak hanya sebatas perilaku untuk mentaati dari apa-apa yang tersurat, namun juga termasuk di dalamnya apa-apa yang tidak tersurat. Untuk membangun kepatuhan perdamaian diperlukan proses internalisasi kepatuhan secara berkesinambungan, sungguh-sungguh, professional.

Tata kelola konflik di era disrupsi informasi merupakan suatu keniscayaan dan kehadiran teologi perdamaian dengan teologi al-Hujurat diharapkan menjadi pendekatan aktual.

MUHAMMADIYAH SEBAGAI NOBEL PEACE LAUREATE, MENGAPA TIDAK?

Moh Zaki Arrobi
Dosen Muda di Departemen Sosiologi, Peneliti di Pusat Studi Keamanan & Perdamaian UGM, bergiat di Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah

Menjelang Tanwir Muhammadiyah yang akan digelar pada 15-17 Februari 2019 di Bengkulu, Muhammadiyah bersama Nadhlatul Ulama diusulkan secara resmi oleh beberapa kalangan untuk menerima anugerah penghargaan Nobel Perdamaian (*Nobel Peace Laurette*) dari komite nobel di Norwegia. Pihak-pihak yang menominasikan Muhammadiyah dan NU untuk nobel perdamaian datang dari kalangan sarjana dalam dan luar negeri, pejabat publik, universitas, hingga mantan penerima nobel perdamaian. Saya sendiri turut serta dalam ikhtiar kecil di UGM untuk mendorong proses nominasi ini antara lain dengan menyusun buku berjudul '*Dua Menyemai Damai: Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dalam Perdamaian dan Demokrasi'* dan mendiseminasikannya secara luas ke khalayak publik.

Dalam tulisan ini saya hendak mendiskusikan dan merefleksikan pertimbangan dan prospek Muhammadiyah sebagai calon penerima penghargaan Nobel Perdamaian. Selain itu, terlepas dari wacana penghargaan nobel perdamaian, yang lebih penting lagi menurut penulis adalah bagaimana kita harus mendorong Muhammadiyah sebagai 'sayap perdamaian' bangsa dan dunia agar terus berkiprah pada pembangunan perdamaian, demokrasi, dan kemanusiaan. Ketika Muhammadiyah terus konsisten dengan kerja-kerja perdamaiannya tentu hadiah nobel perdamaian tinggal menunggu waktu dan bisa jadi hanya 'bonus rekognisi' atas kiprah kemanusiaan Muhammadiyah.

Nobel Perdamaian dan Agenda Internasionalisasi Muhammadiyah

Upaya mengangkat Muhammadiyah bersama NU sebagai penerima nobel perdamaian merupakan ide yang brilian sekaligus menantang. Brilian karena selama ini kita nyaris luput dan cenderung melupakan 'mutiara yang terpendam' dari bangsa Indonesia. Barang kali bagi warga Indonesia pada umumnya dan umat Islam di Indonesia pada khususnya keberadaan Muhammadiyah dan NU merupakan hal yang biasa saja. Sering kali bagi kita kedua ormas terbesar di dunia ini diterima secara '*taken for granted*'. Namun, barang kali bagi bangsa-bangsa lain dan komunitas internasional, eksistensi dan kiprah kedua organisasi masa Islam terbesar di dunia sesuatu yang luar biasa. Tidak hanya dari sisi kuantitas anggotanya, kedua ormas ini banyak disanjung oleh sarjana internasional sebagai pilar utama masyarakat sipil dalam mengawal dan mengkonsolidasikan demokrasi dan menyemai kultur toleransi di Indonesia (Hefner, 2000, Barton, 2014, Kunkler & Stepan, 2013, Menchik, 2015).

Pada saat yang bersamaan, nominasi Muhammadiyah-NU untuk nobel perdamaian juga sesuatu yang menantang karena harus 'berkompetisi' dengan usulan serupa dari berbagai pojok dunia. Penghargaan prestisius di tingkat global itu juga terhitung jarang 'mampir' ke negara-negara Asia Tenggara. Tercatat baru dua kali penghargaan nobel perdamaian jatuh ke tangan negara Asia Tenggara yakni pada 1991 oleh yakni Aung San Suu Kyi atas perjuangannya melawan junta militer Myanmar dan Ramos Horta bersama Uskup Belo pada 1996 atas perjuangan mengangkat pelanggaran HAM di Timor Lester di PBB dan komunitas internasional.

Usulan nobel perdamaian untuk Muhammadiyah dengan sendirinya merupakan upaya mempromosikan 'Islam Indonesia' secara umum. Muhammadiyah, bersama NU, adalah organisasi massa Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Bahkan Muhammadiyah disebut-sebut NGO dengan aset terbesar di dunia. Upaya promosi 'Islam Indonesia' ke panggung pergaulan dunia melalui usulan nobel perdamaian merupakan langkah strategis mengingat diskursus keislaman di panggung global sangat erat kaitannya dengan kekerasan, sektarianisme, dan terorisme. Baik di Eropa maupun di Timur Tengah dan Asia Selatan, Islam senantiasa diasosiasikan melekat pada konflik kekerasan, ekstremisme, dan terorisme. Pandangan ini sebagian lahir dari warisan cara berpikir Orientalisme yang melihat selalu melihat 'Timur' sebagai 'the Other' (1978), namun naasnya pandangan menyesatkan ini beresonansi ketika kita melihat sebagian

umat Islam yang terus menerus terlibat pertikaian yang berbalut teologis di Timur Tengah maupun aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh 'generasi kedua' kaum Muslim migran di negara-negara Eropa dan Amerika Utara.

Di tengah kegersangan wacana Islam yang damai dan demokratis di panggung global, tak salah jika Azyumardi Azra (2019) menyebut bahwa kehadiran diskursus Islam Indonesia sangat dibutuhkan dan dinantikan tidak hanya oleh kaum Muslim di Timur Tengah dan Asia Selatan, namun juga oleh umat Islam di Eropa dan Amerika. Islam Indonesia yang salah satunya diwakili oleh 'Islam Berkemajuan' memiliki potensi yang besar untuk dipromosikan di aras global. Islam berkemajuan yang gencar diusung Muhamadiyah di abad kedua merupakan manifestasi dari visi kosmopolitanisme Islam yang *rahmatan lil alamiin* sebagaimana amanat Muktamar ke-47 di Makassar, 2015. Islam Berkemajuan harus dimanifestasikan dalam bentuk gerakan pencerahan yang memiliki sikap *outward looking*, kepercayaan diri yang tinggi, dan berorientasi untuk mempromosikan gagasan dan praktik Islam Indonesia ke dunia luar (Mu'ti dkk, 2015).

Lebih jauh lagi, wacana pengusulan Muhammadiyah sebagai penerima nobel perdamaian akan semakin memperkuat upaya 'Internasionalisasi Muhammadiyah' di abad kedua. Agenda internasionalisasi ini dalam beberapa tahun terakhir cukup nyaring digaungkan oleh intelektual-intelektual Muhammadiyah. Menurut Amin Abdullah (2015), dibanding gerakan-gerakan Islam lainnya di dunia seperti *Gulen Movement* dan Ikhwanul Muslimin, Muhammadiyah tertinggal jauh dalam menginternasionalisasikan gerakannya. Muhammadiyah kurang agresif dan inovatif dalam mempromosikan gerakannya di luar Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya agenda internasionalisasi Muhammadiyah perlu didorong melalui promosi dan produksi pengetahuan Islam Indonesia ke tingkat global seperti penerjemahan karya-karya sarjana Muhammadiyah ke bahasa internasional. Tidak hanya bahasa Inggris, karya-karya sarjana Muhammadiyah perlu diterjemahkan ke dalam bahasa resmi PBB lainnya seperti Bahasa Arab, Perancis, China, Spanyol, dan Rusia. Penulis ingin menambahkan bahwa agenda internasionalisasi juga dapat diakselerasi melalui rekognisi dan apresiasi komunitas internasional atas Islam Indonesia. Di titik inilah, ikhtiar menominasikan Muhammadiyah sebagai penerima nobel perdamaian menemukan relevansinya dengan agenda internasionalisasi gerakan Muhammadiyah di abad kedua.

Muhammadiyah sebagai Agen Perdamaian

Jika corak keislaman di Indonesia, terlepas dari segenap persoalan dan kelemahannya, dipandang mampu menjadi harapan baru Islam di panggung global. Lantas, apa sesungguhnya peranan riil Muhammadiyah dalam pembangunan perdamaian dan demokrasi baik di tingkat lokal, nasional, regional hingga internasional?

Muhammadiyah pada mulanya harus diakui tidak memiliki perhatian yang spesifik kepada isu perdamaian. Trilogi Muhammadiyah di abad pertamanya adalah: pendidikan (*schooling*), kesehatan (*healing*), dan pelayanan sosial (*feeding*). Meski demikian Muhammadiyah sejak lama memiliki *concern* yang tinggi terhadap isu-isu konflik dan perdamaian di dunia Islam seperti konflik di Kosovo, Chechnya, hingga Palestina-Israel. Di era pasca-reformasi, seiring Muhammadiyah menapaki usia abad keduanya, organisasi modernis terbesar ini mulai mengepakkan sayap-sayap perdamaiannya. Pada saat republik tengah dilanda kecamuk konflik komunal di Aceh, Poso, Ambon, dan Papua, Muhammadiyah mengirimkan tim-tim kecil dari Pimpinan Pusat untuk turun langsung ke lapangan dan merumuskan rekomendasi strategis untuk resolusi konflik.

Di aras regional dan internasional, Muhammadiyah juga terbang tinggi mengepakkan sayap-sayap perdamaiannya. Dari Mindanao, Filipina, Rohingnya, Myanmar, hinggga Pattani, Thailand menuju Palestina, Muhamadiyah terlibat dalam aksi-aksi kemanusiaan, filantropis, dan 'bina damai' dan resolusi konflik. Kiprah 'bina damai' Muhammadiyah yang paling menonjol barang kali dapat dilihat di Mindanao, Filipina Selatan. Muhammadiyah sejak awal bergabung dalam International Crisis Group (ICG), terlibat dalam perundingan-perundingan dengan pihak-pihak yang bertikai, merumuskan peta jalan damai, hingga memberikan beasiswa pendidikan dan merancang ekonomi mikro untuk komunitas Bangsamoro di Filipina.

Jika kita mengacu pada konsep 'perdamaian positif' (positive peace) dari Johan Galtung (1996) yang mendefinisikannya sebagai upaya menghapuskan 'kekerasan struktural' seperti kemiskinan, penindasan, dan ketidakadilan, Muhammadiyah nampaknya sangat menonjol dalam bidang ini. Kiprah dalam pembangunan 'perdamaian positif' (*positive peace*) j belakangan banyak dilakukan oleh 'Trisula Baru' Muhammadiyah yakni MDMC, LAZISMU, dan MPM. Ketiga lembaga baru ini mampu mewarnai dan menjadi motor gerakan Muhammadiyah di abad kedua. MDCM berkolaborasi dengan LAZISMU telah terlibat dalam berbagai aksi-aksi

penanggulangan bencana, baik ‘bencana alam’ maupun ‘bencana sosial’ di level nasional, regional, hingga internasional. Kepeloporan MDMC dalam aksi-aksi kemanusiaan terlihat dalam berbagai forum seperti Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Indonesia Humanitarian Alliance (IHA), dan forum-forum global lainnya. Tak heran jika MDMC ‘banjir’ penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri.

Tentu masih sangat banyak kerja-kerja perdamaian dan kemanusiaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah baik melalui ‘struktur formal’-nya maupun melalui ‘sayap-sayap kulturalnya’ yang tidak dapat penulis rangkum seluruhnya dalam tulisan ini. Kerja-kerja pendokumentasian dan studi atas kontribusi ini juga merupakan ‘pekerjaan rumah’ bagi Muhammadiyah ke depan.

Beberapa Tantangan Muhammadiyah

Meski kerja-kerja ‘bina damai’ dan kemanusiaan telah dan terus dilakukan oleh berbagai lembaga dan komunitas kultural Muhammadiyah, salah satu kelemahan yang dapat menghambat kiprah Muhammadiyah dalam perdamaian adalah ketiadaan lembaga khusus atau majelis yang secara spesifik dan fokus pada isu-isu perdamaian dan resolusi konflik. Selama ini, isu-isu perdamaian dan resolusi konflik yang terjadi baik di level nasional maupun regional dan internasional direspons oleh Muhammadiyah melalui pembentukan tim *Ad Hoc*. Hal ini tercermin dari respons Muhammadiyah yang membentuk tim kecil ‘*scoping mission’* untuk menangani konflik komunal di beberapa daerah di Indonesia di era reformasi dan konflik berkepanjangan di Mindanao, Filipina. Karena sifatnya yang *Ad Hoc*, kerja tim ini sangat terbatas karena tidak didukung secara penuh oleh *resources* organisasi dan komitmen yang kuat dari para pimpinan. Sebut saja penanganan konflik di Mindanao sekarang konon terhenti karena tidak mendapatkan dukungan dari pimpinan Muhammadiyah.

Oleh karena itu, menjadi krusial dan urgen untuk membentuk suatu lembaga khusus/majelis yang fokus menangani dan merespons isu-isu perdamaian dan resolusi konflik di dalam struktur Muhammadiyah. Dalam bahasa Yayah Khisbiyah, pegiat dan aktivis perdamaian Muhammadiyah, bagaimana ‘membawa kultur perdamaian ke dalam struktur Muhammadiyah’. Kehadiran lembaga ini juga krusial untuk mengarusutamakan isu-isu perdamaian, nir-kekerasan, dan resolusi konflik dalam gerakan Muhammadiyah. Lembaga yang khusus dan permanen tentu sangat berguna dalam menggerakkan kerja-kerja perdamaian dan

resolusi konflik di level *grassroots*. Kerja akar rumput ini diperlukan untuk melengkapi kerja-kerja elit melalui berbagai forum internasional yang jamak dilakukan oleh elit-elit Muhammadiyah.

Di samping problem kelembagaan, komitmen terhadap isu perdamaian Muhammadiyah juga menghadapi kendala menguatnya fenomena 'milisi sipil' yang menimpa hampir semua organisasi sosial dan politik di Indonesia. Fenomena kebangkitan 'milisi sipil' dalam jubah agama juga dialami oleh Muhammadiyah seperti direpresentasikan dengan menguatkan Komando Aksi Kesiapsiagaan Muhammadiyah (KOKAM). Terakhir, KOKAM dari beberapa daerah mengintimidasi dan meneror sebuah diskusi intelektual yang diselenggarakan oleh Majelis Pustaka Muhammadiyah. Cara-cara anti-intelektualisme ini tentu tidak mencerminkan tradisi dan komitmen Muhammadiyah yang senantiasa mengedepankan tradisi dialog dan nir-kekerasan. Sebagaimana diungkapkan Najib Burhani (2018), tradisi 'militerisme' berbaju sipil dalam berbagai bentuk harus mulai dikikis dari Muhammadiyah. Salah satu langkah yang paling krusial dan urgen untuk dilakukan sekarang adalah mengikis tradisi paramiliter dalam tubuh KOKAM.

Tantangan lain yang tidak kurang strategis adalah bagaimana Muhammadiyah merumuskan gagasan keislaman yang berorientasi pada isu-isu perdamaian dan resolusi konflik secara permanen dan dapat dipromosikan di level internasional. Tantangan ini telah diulas dengan cukup apik oleh Ahmad Rizky Mardhatillah, dalam tulisannya berjudul '*Menggagas Fikih Perdamaian'* (2019) yang menekankan formulasi FIkih baru yang membahas sikap teologis-intelektual Muhammadiyah di tiga area: diplomasi, hukum dan kerja sama internasional, serta etika masyarakat internasional.

Penutup

Menutup tulisan ini penulis ingin memberikan secercah harapan bahwa kiprah Muhammadiyah dalam bidang perdamaian dan resolusi konflik sesungguhnya luar biasa. Baik dalam upaya 'perdamaian positif' seperti pelayanan sosial, kesehatan, dan pendidikan maupun dalam 'perdamaian negatif' seperti negosiasi dan resolusi konflik, Muhammadiyah telah dan terus berkiprah pada perdamaian abadi di aras nasional, regional, dan internasional. Terlepas dari kekurangan dan kelemahannya, upaya-upaya ini menurut hemat penulis sangat penting untuk diapresiasi secara lebih luas khususnya di kancah komunitas internasional. Ikhtiar

mendorong penghargaan nobel perdamaian bagi Muhammadiyah (dan juga NU) adalah sedikit dari upaya mendorong dan mengakselerasi agenda internasionalisasi gerakan yang telah dicanangkan Muhammadiyah di abad keduanya. Untuk menuju ke arah sana, beberapa tantangan baik yang bersifat kelembagaan maupun kultural harus segera direspons dan diselesaikan dengan baik. *Akhirul kalam*, penulis berharap sidang-sidang Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu dapat membawa kemaslahatan dan kesejukan pada bangsa Indonesia yang tengah dikoyak oleh kontestasi politik yang sengit dan acap kali dibumbui dengan nuansa kebencian dan sektarianisme. Secara khusus, penulis juga berharap para pemimpin dan intelektual Muhammadiyah dari berbagai penjuru negeri memikirkan kembali dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat agenda dan komitmen Muhammadiyah dalam isu-isu perdamaian, resolusi konflik, dan nir-kekerasan.

GERAKAN PERDAMAIAN GLOBAL MELALUI CABANG ISTIMEWA MUHAMMADIYAH

Ridho Al-Hamdi
Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Jerman Raya Periode 2015-2017, Admin WA Group PCIM Luar Negeri sejak 07 Maret 2015.

Cabang Istimewa Muhammadiyah dalam Data

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang awalnya berpusat secara teritorial hanya di Indonesia, mulai awal tahun 2000-an menjajakkan dirinya ke berbagai negara lain. Hal ini ditandai dengan berdirinya Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) pada tahun 2002 sebagai tonggak awal Muhammadiyah memulai dakwahnya di negara lain. Setelah itu, PCIM berdiri di berbagai negara dan hingga tulisan ini terbit, ada 22 PCIM yang telah berdiri. Di Timur Tengah, PCIM ada di Mesir, Maroko, Tunisia, Sudan, Libya, dan Saudi Arabia. Di Asia, PCIM dapat dijumpai di Malaysia, Taiwan, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Pakistan, Iran, dan Turki. Di daratan Eropa, PCIM ada di Jerman, Inggris, Belanda, dan Perancis. Selain itu, PCIM berkembang juga di Rusia, Amerika, dan Australia. Disebut sebagai "cabang istimewa", karena kedudukannya di luar negeri di bawah binaan langsung Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan luas area dakwah tidak ditentukan, bisa berbasis negara, kota, atau kawasan tertentu di sebuah negara.

Munculnya cabang istimewa di 22 negara tersebut setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, ekspansi kader dan anggota Muhammadiyah ke luar negeri untuk kepentingan yang beragam, yaitu studi, pekerjaan maupun faktor pernikahan sehingga menyebabkan banyak dari warga Muhammadiyah yang pada akhirnya menjadi penghuni tetap di berbagai negara di luar Indonesia. Kedua, faktor pertama diperkuat lagi

dengan faktor kedua bahwa mulai menjamurnya beasiswa yang menjadikan para pelajar Indonesia termasuk warga Muhammadiyah memiliki semangat dan cita-cita kuliah di luar negeri. Ketiga, dorongan internal organisasi bahwa Muhammadiyah dianggap berhasil dalam membangun peradaban Islam moderat di Asia Tenggara dan saatnya harus memperkenalkan diri ke warga dunia sehingga platgorm “Islam berkemajuan” dapat menjadi jalur diplomasi Islam moderat dimana Islam di Timur Tengah sedang berada dalam ketidakstabilan, maka saatnya Islam berkemajuan harus tampil di depan.

Dalam perkembangannya, dari 22 cabang istimewa tersebut, di antara mereka memiliki perkembangan yang sangat pesat, antara lain PCIM Mesir, PCIM Malaysia, PCIM Taiwan, PCIM Australia, PCIM Jerman, dan lain sebagainya. PCIM Mesir selain memiliki struktur Muhammadiyah, juga memiliki PCIA Mesir, Tapak Suci Mesir, dan Lazismu Kantor Layanan Mesir. Amal usaha yang ada di Mesir adalah MCIS (Muhammadiyah Center for Islamic Studies), TK ABA Cairo, Majalah Sinar Muhammadiyah dan Shaffatul Aisyiyah, (LPMD) Lembaga Pengelola Markaz Dakwah Muhammadiyah Mesir, dan Mediator FUSTAT.

Kemudian, PCIM Malaysia saat ini memiliki tujuh PRIM (Pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah) dan lima PRIA (Pimpinan Ranting Istimewa Aisyiyah). Ketujuh PRIM tersebut adalah PRIM Kampung Baru, PRIM Sungai Way, PRIM KL Sentral, PRIM Klang Lama, PRIM Kepong, RIM Ampang, dan PRIM Pandan. Sedangkan kelima PRIA itu adalah PRIA Kampung Baru, PRIA Klang Lama, PRIA Kepong, PRIA Ampang, dan PRIA Pandan. Selain itu, PCIM Malaysia memiliki sejumlah amal usaha, yaitu TPA Prima Kampung Baru (di bawah asuhan PRIM/PRIA Kampung Baru), TPA IMM Malaysia, PAUD Aisyiyah di bawah binaan PCIA Malaysia, dan Surau Ar-Rihlah (Kampung Baru). Tentu, selain memiliki PRIM, PRIA dan amal usaha, PCIM Malaysia memiliki MDMC Malaysia, Lazismu Malaysia, dan Pimpinan Cabang Istimewa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PCI IMM) Malayisa.

PCIM Taiwan hingga saat ini memiliki empat (Pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah/PRIM: PRIM Taiwan Utara, PRIM Taiwan Tengah, PRIM Taiwan Selatan, dan PRIM Taiwan Timur). Di Taiwan juga sudah ada PCIA Taiwan, PCI Tapak Suci Taiwan, Lazismu KL Taiwan. Sementara itu, amal usaha yang ada di Taiwan adalah Radio Surya Formosa, TV Surya Formosa, Surya Formosa Express (Remittance), Majalah Surya Formosa, Pesantren Virtual Surya Formosa, Aksara Surya Formosa (SF Publishing), PKBM Muhammadiyah Taiwan, dan Klinik All in One.

Kemudian, di Australia, selain PCIM berkembang pesat, juga ada PCIA Australia, PRIM Queenslands, PRIM Adelaide, dan PRIM New South Wales. Saat ini, PCIM Australia sedang merintis berdirinya *Muhammadiyah Australia College* dan juga menjalankan aktivitas dakwah berupa kajian bulanan, pengumpulan dana untuk Lazizmu dan lain sebagainya di Pusat Dakwah Muhammadiyah Australia. Muhammadiyah di Eropa juga berkembang pesat di Jerman. Saat ini, PCIM Jerman mengembangkan dakwahnya hingga di negara-negara sekitar Jerman seperti Austria, Belgia, dan Polandia sehingga PCIM Jerman menambahkan identitas "Raya" pada dirinya sehingga menjadi PCIM Jerman Raya. Di Jerman, selain PCIM aktif dalam mengembangkan dakwah seperti Pengajian Online Uni-Eropa (PENNA), juga ada Tapak Suci Jerman di bawah Binaan Pendekar Joko Suseno dan Lazismu Jerman yang rutin mengelola Gerakan Infaq Satu Euro (GIRO).

Di Asia, ada PCIM Pakistan yang memiliki PCIA Pakistan, Tapak Suci Paksitan, dan Buletin Sang Surya. Sementara itu, PCIM Sudan juga memiliki PCIA Sudan dan Tapak Suci Sudan. Sementara amal usaha yang ada di Sudan adalah Komunitas Muroja'ah Qur'an-Mu dan usaha makanan ringan. Di Saudi Arabia, selain ada PCIM, juga ada Tapak Suci Saudi Arabia, PRIM Riyadh, PRIM Makkah, dan PRIM Madinah. Adapun amal usahanya adalah Pusat Khidmah Haji dan Umroh, Kajian Islam Berkemajuan, dan EL-WAHAT (Lembaga Kerjasama Beasiswa Studi).

Selain itu, Muhammadiyah juga memiliki "sister organization" di berbagai negara seperti di Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Timor Leste, Vietnam, dan Mauritius. Disebut "sister organization", karena gerakan di luar Indonesia tersebut juga menggunakan nama "Muhammadiyah" sebagai identitas mereka, tetapi mereka tidak memiliki hubungan struktural dengan Muhammadiyah di Indonesia. Komunikasi dan interaksi antara Muhammadiyah di Indonesia dengan "sister organization" tersebut terus dilakukan dalam berbagai acara.

Perkembangan Muhammadiyah di 22 negara tersebut setidaknya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, faktor spirit internasionalisasi Muhammadiyah ke berbagai negara menjadikan para aktivis dan warga Muhammadiyah memiliki ghiroh untuk berdakwah dan mengembangkan gerakan Muhammadiyah dimanapun mereka tinggal. Kedua, semangat bersosialisasi dan saling membantu sesama umat Muslim tetap ada pada jiwa warga Muhammadiyah meskipun mereka sedang berada di luar negeri. Justru karena mereka berada di luar negeri, mereka merasakan sebagai

komunitas minor yang wajib saling membantu sesama mereka. Ketiga, adalah berkembangnya berbagai komunitas Indonesia di luar negeri yang hal terserbut semakin menjadikan warga Muhammadiyah semangat untuk juga bersama-sama menggerakan Islam di luar negeri. Tentunya, dukungan dari Pimpinan Pusat dan kerjasama dari KBRI dan KJRI di negara setempat sangat mempengaruhi perkembangan Muhammadiyah di luar negeri.

Cabang Istimewa Muhammadiyah sebagai Duta Peradaban Islam untuk Perdamaian Dunia

Dalam forum terbatas pertemuan PCIM Se-Dunia pada arena Muktamar Muhammadiyah di Makassar 2015, Din Syamsuddin yang saat itu masih menjadi ketua umum PP Muhammadiyah mengatakan bahwa salah satu fungsi PCIM adalah menjadi duta Muhammadiyah di luar negeri. Apa ini artinya? Merujuk pada tujuan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam yang bersumber pada ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka PCIM harus terus menerus bekerjasama dengan berbagai gerakan Muslim maupun non Muslim untuk misi perdamaian dunia dengan membangun generasi mudanya melalui jalur terutama pendidikan dan kesehatan.

Keberadaan PCIM harus mampu mensyiarkan wajah Islam yang moderat, wajah Islam yang cinta perdamaian, bukan Islam yang dikesankan media sebagai Islam yang teroris dan anti-HAM. Jalur yang dilakukan oleh PCIM adalah diplomasi kebudayaan dan seni dalam berbagai caranya. Dari budaya dan seni inilah, nilai-nilai Islam dikenalkan kepada warga negara non Indonesia dan non Muslim. Ketika kaum Muslim di Timur Tengah sedang berada dalam konflik yang tak berkesudahan, maka ini saatnya yang tepat bagi Muslim Indonesia terutama Muhammadiyah untuk ambil bagian dalam upaya harmonisasi antar Islam dan Barat. Alangkah indahnya jika umat manusia di dunia ini bisa saling hidup berdampingan meskipun memiliki perbedaan agama, etnis, maupun pandangan hidup lainnya.

Karena itu, beberapa cara bisa dilakukan oleh PCIM. Pertama, PCIM secara kelembagan senantiasa fokus untuk terus menyebarkan dan mendesiminasikan konsep Islam berkemajuan dalam berbagai program dan kegiatan. Sebagai contoh, jika PCIM memiliki Tapak Suci, para kader Muhammadiyah bisa mulai mengenalkan kepada publik tentang salah satu seni bela diri ini ke warga lokal setempat. Jika PCIM memiliki Lazismu, para kader Muhammadiyah bisa mensosialisasikannya kepada warga lokal terutama di negara maju untuk mengajak mereka menyisihkan uangnya. Tentu, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, Lazismu

harus memberikan laporan bulanan kepada para penyumbang dana. Melalui pendidikan, PCIM terutama yang ada di Malaysia, Australia, Mesir, dan Taiwan, telah melangkahkan dakwahnya dengan mendekati warga Indonesia yang tinggal di negara tersebut termasuk warga lokal yang ada di dalamnya.

Kedua, secara individual, para kader Muhammadiyah harus memiliki komitmen kuat untuk bersikap baik dan professional dalam menghadapi kehidupan masyarakat di negara lain. Sikap-sikap individu yang baik dapat ditunjukkan dalam bentuk seperti antri dalam setiap aktivitas sehari-hari bermasyarakat, menyeberang jalan saat *trafficlight* sudah hijau buat penyeberang jalan, dan mengutamakan penyeberang jalan saat mengendarai mobil. Memberikan senyum kepada siapapun ketika berjumpa di jalan juga menjadi bagian dari langkah para kader Muhammadiyah menjadi bagian dari *agent of change* perdamaian dunia. Sebuah senyuman yang ikhlas akan selalu menghantarkan kita dalam ketengangan, apalagi jika kita tinggal di negara lain.

Gerakan perdamaian global dapat tercapai jika perbedaan itu diminimalisir oleh para pelakunya. Gerakan perdamaian dapat tercapai jika secara individu, manusia dapat memahami bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Secara kelembagaan, pendekatan persuasif harus lebih diutamakan daripada hal yang bersifat konflik dan berujung pada kerugian yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Karena itu, kader-kader Muhammadiyah yang ada di luar negeri dan saat ini tetap istiqomah berdakwah, semoga gerak langkah menjadi duta perdamaian dunia dapat menuai hasil. Selamat berjuang *ikhwan fillah*.

TENTANG EDITORS

Ridho Al-Hamdi adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini menjabat sebagai direktur *Internatinonal Program of Government Affairs and Administration* (IGOV) UMY. Dia merupakan lulusan doktor ilmu politik Universitas TU Dortmund, Jerman (beasiswa Kemenristekdikti 2014-2017). Minat kajiannya adalah partai politik, pemilu, demokrasi, Islam dan politik. Email: ridhoalhamdi@umy.ac.id

David Efendi adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Alumni master di bidang ilmu politik Hawaii University at Manoa Amerika ini sekarang sedang menempuh studi doktor Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Minat kajian adalah civil society, politik lokal, gerakan sosial, politik lingkungan. Aktif di gerakan literasi sebagai Ketua Serikat Taman Pustaka Muhammadiyah. Email: defendi@umy.ac.id.

Bachtiar Dwi Kurniawan adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu, dia adalah sekretaris Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah Periode 2015-2020. Dia adalah alumni Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada. Minat kajiannya adalah politik, kebijakan publik, dan kesejahteraan sosial. Email: bachtiar_dk@umy.ac.id atau bachtiar.dk@gmail.com.

Hilman Latief adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini juga menjabat sebagai Ketua Lazismu PP Muhammadiyah Periode 2015-2020. Dia adalah alumni doktor dari Utrecht University, Belanda. Minat kajiannya adalah filantropi, agama dan pembangunan, dan sejarah intelektual Islam di Asia Tenggara. Email: hilman.latief@gmail.com.

POLITIK INKLUSIF MUHAMMADIYAH

Narasi Pencerahan Islam untuk Indonesia Berkemajuan

Politik inklusif menjadi topik utama dalam buku ini. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang telah berkembang pesat sejak 1912 berada pada landasan inklusivitas. Di satu sisi, Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian (purifikasi), di sini yang lain terjadi dinamisasi di tubuh organisasi ini tanpa meninggalkan jejak asal. Perpaduan antara pemurnian dan dinamisasi menunjukkan bahwa gerakan inklusivitas menjadi fondasi Muhammadiyah untuk dapat *survive* sepanjang zaman, *saleh li kulli zaman wa al-makaan*. Politik inklusif Muhammadiyah tidak hanya dipahami dalam arti sempit politik kekuasaan atau politik kepemiluan, tetapi jauh lebih luas lagi, bahwa politik inklusif yang dilakukan oleh Muhammadiyah juga menyentuh wilayah pemberdayaan ekonomi rakyat, filantropi, kebencanaan, lingkungan hidup, konstitusi, dan pedamaian global.

Empatpuluhtiga artikel yang dikelompokkan dalam lima bab sebagaimana tertuang dalam buku ini ditulis oleh para intelektual Muhammadiyah dari berbagai kalangan yang memiliki perspektif berbeda-beda, tetapi mereka pada dasarnya memiliki kesamaan pandangan: Muhammadiyah telah memberi bukti nyata dalam mengaktualisasikan Islam berkemajuan di berbagai dimensi kehidupan. Inilah narasi pencerahan Islam untuk sebuah cita-cita bernama: INDONESIA BERKEMAJUAN.

PUSAT STUDI MUHAMMADIYAH DAN PERUBAHAN SOSIAL POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA